



**PERATURAN BUPATI KLATEN  
NOMOR 27 TAHUN 2017  
TENTANG  
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN KLATEN TAHUN 2018**

**PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN  
TAHUN 2017**



BUPATI KLATEN  
PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN BUPATI KLATEN  
NOMOR 27 TAHUN 2017  
TENTANG  
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KLATEN  
TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KLATEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta Pasal 263 ayat (4) dan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, perlu ditetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2018;
- b. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2018 sebagaimana dimaksud pada huruf a merupakan jabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021 maka untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan,

penganggaran, pelaksanaan dan pengendalian rencana pembangunan daerah Kabupaten Klaten Tahun 2018, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2018;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
  8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
16. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
17. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2018;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2017 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018;
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah

Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 88);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 46);

24. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Klaten Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 66);

25. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 136);

26. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 138);

27. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018;

28. Peraturan Bupati Klaten Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 32);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2018.

Pasal 1

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2018, selanjutnya disebut RKPD Tahun 2018, adalah dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Klaten untuk periode 1 (satu) tahun anggaran yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2018 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

Pasal 2

RKPD Tahun 2018 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 digunakan sebagai pedoman dalam:

- a. Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2018.
- b. Penyusunan Kebijakan Umum APBD, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2018.

Pasal 3

Dalam rangka menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2018, Pemerintah Kabupaten Klaten menggunakan RKPD Tahun 2018 sebagai bahan pembahasan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2018 dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klaten.

Pasal 4

RKPD Tahun 2018 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas:

- a. Narasi RKPD Tahun 2018, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini;

- b. Rencana Program Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2018, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Klaten.

Ditetapkan di Klaten  
pada tanggal 18 Agustus 2017

Plt. BUPATI KLATEN,

Ttd.

SRI MULYANI

Diundangkan di Klaten  
pada tanggal 18 Agustus 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLATEN,

Ttd.

JAKA SAWALDI

BERITA DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2017 NOMOR 28



## DAFTAR ISI

	Halaman
Daftar Isi .....	i
Daftar Tabel.....	iii
Daftar Gambar.....	vi
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>I</b>
1.1. Latar Belakang .....	I – 1
1.2. Landasan Hukum.....	I – 2
1.3. Hubungan Antar Dokumen .....	I – 4
1.3.1. Hubungan Antar Dokumen Perencanaan.....	I – 4
1.3.2. Kerangka Penyusunan RKPD Tahun 2018.....	I – 5
1.4. Kaidah Pelaksanaan .....	I – 5
1.5. Sistematika Dokumen RKPD .....	I – 6
1.6. Maksud dan Tujuan .....	I – 7
<b>BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2016 DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH .....</b>	 <b>II</b>
2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah.....	II – 1
2.1.1. Aspek Geografis & Demografi .....	II – 1
2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat.....	II – 11
2.1.3. Aspek Pelayanan Umum.....	II – 26
2.1.4. Aspek Potensi Daerah.....	II – 58
2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Tahun Lalu dan Realisasi RPJMD.....	II – 65
2.2.1. Capaian Kinerja Organisasi Perangkat Daerah.....	II – 66
2.2.2. Evaluasi dan Analisis Pencapaian Kinerja Sasaran RPJMD	II – 70
2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah.....	II – 93
2.4. Isu Strategis Pembangunan Daerah .....	II – 94
<b>BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH .....</b>	 <b>III</b>
3.1. Arah Kebijakan Ekonomi .....	III – 1
3.1.1. Kondisi Ekonomi .....	III – 1
3.1.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah.....	III – 7
3.1.3. Sasaran Kebijakan Ekonomi Daerah.....	III – 11
3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah.....	III – 14
3.2.1. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan .....	III – 14
3.2.2. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah.....	III – 16
3.2.3. Arah Kebijakan Belanja Daerah .....	III – 18
3.2.4. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah .....	III – 19
3.2.5. Rekapitulasi Realisasi dan Proyeksi Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah.....	III – 21

<b>BAB IV</b>	<b>PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2018...</b>	<b>IV</b>
4.1.	Visi, Misi, Sasaran dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah ...	IV – 1
4.2.	Prioritas Pembangunan Daerah.....	IV – 14
4.3.	Kebijakan dan Strategi Pengembangan Kewilayahan.....	IV – 19
<b>BAB V</b>	<b>RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH .....</b>	<b>V</b>
5.1.	Urusan Wajib Pelayanan Dasar .....	V – 1
5.2.	Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar.....	V – 3
5.3.	Urusan Pilihan.....	V – 6
5.4.	Administrasi Pemerintahan Umum.....	V – 8
<b>BAB VI</b>	<b>PENUTUP.....</b>	<b>VI</b>
6.1.	Kaidah Pelaksanaan .....	VI – 1
6.2.	Kesimpulan.....	VI – 2

**LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1	Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan Tahun 2011-2015 dan Laju Pertumbuhan di Kabupaten Klaten .....	II – 10
Tabel 2. 2	Rasio Beban Tanggungan Tahun 2012-2016 .....	II – 11
Tabel 2. 3	Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 di Kabupaten Klaten Tahun 2012-2016 (dlm Rp. Juta) .....	II – 13
Tabel 2. 4	Nilai PDRB Atas Harga Berlaku Tahun 2010 di Kabupaten Klaten Tahun 2012-2016 (dlm Juta Rupiah) .....	II – 14
Tabel 2. 5	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Klaten Tahun 2012-2015 .....	II – 20
Tabel 2. 6	Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) di Kabupaten Klaten Menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2012-2016 .....	II – 22
Tabel 2. 7	Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2012- 2016 .....	II – 23
Tabel 2. 8	Perkembangan Seni, Budaya dan Olahraga di Kabupaten Klaten Tahun 2012-2016 .....	II – 26
Tabel 2. 9	Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) di Kabupaten Klaten Menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2012-2016 .....	II – 26
Tabel 2. 10	Perkembangan Persentase Ruang Kelas Dalam Kondisi Baik di Kabupaten Klaten Tahun 2012-2016 .....	II – 27
Tabel 2. 11	Perkembangan Persentase Angka Putus Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Klaten Tahun 2012-2016 .....	II – 28
Tabel 2. 12	Guru yang Memenuhi Kualifikasi D4/S1 Menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Klaten Tahun 2012-2016 .....	II – 28
Tabel 2. 13	Perkembangan Persentase Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Klaten Tahun 2012 – 2016 .	II – 29
Tabel 2. 14	Rasio Puskesmas, Puskesmas Keliling, Pustu per Satuan Penduduk .....	II – 29
Tabel 2. 15	Rasio Dokter Per Satuan Penduduk .....	II – 29
Tabel 2. 16	Cakupan Desa/Kelurahan UCI .....	II – 30
Tabel 2. 17	Cakupan Pelayanan Air Bersih dan Sanitasi di Kabupaten Klaten Tahun 2011-2015 .....	II – 32
Tabel 2. 18	Penanganan Penyandang Penderita Cacat Menurut Kecamatan dan Jenis di Kabupaten Klaten Tahun 2015 .....	II – 35
Tabel 2. 19	Perkembangan Ketenagakerjaan di Kabupaten Klaten Tahun 2012-2016 .....	II – 36
Tabel 2. 20	Indikator Kependudukan dan Ketenagakerjaan di Kabupaten Klaten Tahun 2011-2015 .....	II – 37
Tabel 2. 21	Persentase UMK terhadap KHL di Kabupaten Klaten Tahun 2012-2016 .....	II – 37
Tabel 2. 22	Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama di Kabupaten Klaten Tahun 2011-2015 .....	II – 38
Tabel 2. 23	Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Berhadapan Dengan Hukum di Kabupaten Klaten Tahun 2011-2015 .....	II – 39
Tabel 2. 24	Jumlah Ketersediaan dan Kebutuhan Pangan Tahun 2015 .....	II – 39
Tabel 2. 25	Penerbitan Sertifikat Hak Atas Tanah yang Diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten Tahun 2011-2015 .....	II – 40
Tabel 2. 26	Jumlah Pelayanan Akte di Kabupaten Klaten Tahun 2012-2016 ..	II – 41
Tabel 2. 27	Peserta KB dan KB Aktif di Kabupaten Klaten Tahun 2012-2016 .	II – 42
Tabel 2. 28	Jumlah Sarana Angkutan (Umum dan Pribadi) di Kabupaten Klaten Tahun 2015 .....	II – 43
Tabel 2. 29	Pengembangan Usaha Nasional di Kabupaten Klaten Tahun 2012-2016 .....	II – 44
Tabel 2. 30	Perkembangan Realisasi PMDN di Kabupaten Klaten Tahun 2013-2016 .....	II – 45
Tabel 2. 31	Perkembangan Realisasi PMA di Kabupaten Klaten Tahun 2012-2016 .....	II – 46
Tabel 2. 32	Perkembangan Kepemudaaan dan Olahraga di Kabupaten Klaten Tahun 2012-2016 .....	II – 46
Tabel 2. 33	Jumlah Penyelenggaraan Seni dan Budaya di Kabupaten Klaten Tahun 2012-2016 .....	II – 47
Tabel 2. 34	Jumlah Cagar Budaya yang dilestarikan di Kabupaten Klaten Tahun 2012-2016 .....	II – 47

Tabel 2. 35	Perkembangan Perpustakaan di Kabupaten Klaten Tahun 2012-2016 .....	II – 48
Tabel 2. 36	Pengelolaan Kearsipan di Kabupaten Klaten Tahun 2012-2016 .....	II – 48
Tabel 2. 37	Produksi Ikan dan Jenisnya Menurut Kecamatan di Kabupaten Klaten Tahun 2015 (ton).....	II – 49
Tabel 2. 38	Tingkat Konsumsi Ikan di Kabupaten Klaten .....	II – 50
Tabel 2. 39	Nama dan Jenis Obyek Wisata serta Lokasinya di Kabupaten Klaten Tahun 2016.....	II – 50
Tabel 2. 40	Jumlah Obyek Wisata dan Pengunjung di Kabupaten Klaten Tahun 2012-2016.....	II – 51
Tabel 2. 41	Luas Lahan Pertanian dan Bukan Lahan Pertanian di Kabupaten Klaten Tahun 2015 (dlm satuan Ha).....	II – 52
Tabel 2. 42	Luas Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian ke Non Pertanian Menurut Kecamatan dan Penggunaannya di Kabupaten Klaten Tahun 2016 (Ha).....	II – 53
Tabel 2. 43	Potensi Pertambangan di Kabupaten Klaten.....	II – 54
Tabel 2. 44	Pasar Menurut Jenisnya di Kabupaten Klaten Tahun 2012-2016 .....	II – 55
Tabel 2. 45	Jenis dan Jumlah Keputusan DPRD 2012-2016 .....	II – 57
Tabel 2. 46	Persentase Penduduk Kabupaten Klaten Menurut Golongan Pengeluaran Tahun 2012-2016 (dlm %) .....	II – 58
Tabel 2. 47	Rata-rata Pengeluaran Penduduk Menurut Pengeluaran Makanan dan Non Makanan Tahun 2012-2016.....	II – 59
Tabel 2. 48	Luas Lahan Pertanian dan Bukan Lahan Pertanian di Kabupaten Klaten Tahun 2016 (dlm satuan Ha).....	II – 59
Tabel 2. 49	Jumlah Pasar Kios, Los dan Pedagang Menurut Kecamatan di Kabupaten Klaten Tahun 2016.....	II – 60
Tabel 2. 50	KWH Terjual PLN Menurut Bulan Tahun 2016 .....	II – 61
Tabel 2. 51	Kapasitas dan Produksi Air Minum Yang Terjual dari PDAM di Kabupaten Klaten Tahun 2016.....	II – 61
Tabel 2. 52	Panjang Jalan Menurut Jenis Permukaan Kondisi dan Kelas Jalan di Kabupaten Klaten Tahun 2016 (Km) .....	II – 62
Tabel 2. 53	Panjang Jalan Berdasarkan Jenis Jalan Menurut Kecamatan di Kabupaten Klaten Tahun 2016 (dlm Km) .....	II – 62
Tabel 2. 54	Biro Perjalanan di Kabupaten Klaten.....	II – 63
Tabel 2. 55	Perusahaan Industri dan Tenaga Kerja Menurut Kelompok Usaha di Kabupaten Klaten Tahun 2016.....	II – 64
Tabel 2. 56	Banyaknya Pencari Kerja Menurut Pendidikan dan Jenis Kelamin Tahun 2012-2016.....	II – 64
Tabel 2. 57	Skala Nilai Peringkat Kinerja Progresif .....	II – 65
Tabel 2. 58	Skala Nilai Peringkat Kinerja Represif .....	II – 65
Tabel 2. 59	Capaian Kinerja Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun 2016.....	II – 66
Tabel 2. 60	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Terwujudnya Pemenuhan Kebutuhan Pendidikan Bagi Masyarakat.....	II – 70
Tabel 2. 61	Perkembangan Persentase Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Klaten Tahun 2012-2016 ...	II – 71
Tabel 2. 62	Perkembangan Persentase Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Dasar di Kabupaten Klaten 2012-2016 .....	II – 71
Tabel 2. 63	Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2016 .....	II – 72
Tabel 2. 64	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA Tahun 2012-2016. ....	II – 72
Tabel 2. 64	Perkembangan Persentase Angka Putus Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Klaten Tahun 2012-2016.....	II – 73
Tabel 2. 65	Perkembangan Angka Kelulusan (AL) Menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2012-2016.....	II – 73
Tabel 2. 66	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Meningkatnya Kualitas Derajat Kesehatan Masyarakat.....	II – 74
Tabel 2. 67	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Efektif dan Efisien .....	II – 77
Tabel 2. 68	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Akuntabel.....	II – 81
Tabel 2. 69	Opini BPK Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun 2013-2016.....	II – 81
Tabel 2. 70	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Meningkatnya Produktifitas, Nilai Tambah dan Daya Saing Sektor Pertanian dan Ketahanan Pangan .....	II – 83

Tabel 2. 71	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Meningkatnya dan Pengembangan Produktifitas, Nilai Tambah dan Daya Saing Sektor Perindustrian, Perdagangan, Koperasi UMKM dan Penanaman Modal .....	II – 84
Tabel 2. 72	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Meningkatnya dan Pengembangan Produktifitas, Nilai Tambah dan Daya Saing Sektor Ketenagakerjaan.....	II – 85
Tabel 2. 73	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Meningkatnya Penerapan Inovasi Dalam Pengembangan Ekonomi .....	II – 86
Tabel 2. 74	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Meningkatnya Pemenuhan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum .....	II – 87
Tabel 2. 75	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Meningkatnya Pemenuhan Prasarana, Sarana dan Utilitas Kawasan Perumahan dan Pemukiman .....	II – 88
Tabel 2. 76	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Terwujudnya Pengurangan Kerentanan Resiko Bencana .....	II – 90
Tabel 2. 77	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Terwujudnya Tertib Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang .....	II – 91
Tabel 2. 78	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban Bagi Masyarakat.....	II – 91
Tabel 2. 79	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Peningkatan Pemenuhan Hak Anak.....	II – 92
Tabel 2. 80	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Tepat Waktu, Tepat Mutu, Tepat Sasaran dan Tepat Manfaat.....	II - 93
Tabel 3.1	Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 di Kabupaten Klaten Tahun 2012-2016 (dIm Juta Rupiah) .....	III – 5
Tabel 3.2	Perkembangan Indikator Makro Ekonomi Kabupaten Klaten Tahun 2012-2015.....	III – 6
Tabel 3.3	Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 – 2018 .....	III – 15
Tabel 3.4	Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016-2018 .....	III – 19
Tabel 3.5	Realisasi dan Proyeksi Penerimaan Pembiayaan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 – 2018 .....	III – 20
Tabel 3.6	Realisasi dan Proyeksi Pengeluaran Pembiayaan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 – 2018 .....	III – 21
Tabel 3.7	Rekapitulasi Realisasi dan Proyeksi (Pagu Indikatif) Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 – 2018.....	III – 21
Tabel 4.1	Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021.....	IV – 6
Tabel 5.1	Pagu Indikatif Tahun 2018 Berdasarkan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan .....	V - 10

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1	Alur Penyusunan RKPD Kabupaten Klaten Tahun 2018 .....	I – 2
Gambar 2. 1	Perkembangan Perubahan Luasan Penggunaan Tanah Pertanian ke Non Pertanian di Kabupaten Klaten Tahun 2012-2016 Menurut Penggunaannya.....	II – 3
Gambar 2. 2	Perkembangan Jumlah KK Tahun 2012-2016.....	II – 11
Gambar 2. 3	Perbandingan Pertumbuhan Perekonomian Antara Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional selama Tahun 2012-2016 .....	II – 12
Gambar 2. 4	Perkembangan PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 di Kabupaten Klaten dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2016 .....	II – 15
Gambar 2. 5	Laju Inflasi di Kabupaten Klaten Tahun 2012-2016 .....	II – 16
Gambar 2. 6	Posisi Relatif Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Klaten Tahun 2012-2016 .....	II – 17
Gambar 2. 7	Perkembangan Efektifitas Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Klaten Tahun 2012-2016.....	II – 17
Gambar 2. 8	Perkembangan Kemiskinan di Kabupaten Klaten Terhadap Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2012-2016 .....	II – 18
Gambar 2. 9	Perkembangan Posisi Relatif Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Klaten dibandingkan Kab/Kota se-Jawa Tengah....	II – 18
Gambar 2. 10	Perkembangan Antar Waktu Jumlah Penduduk Miskin Tahun 2012-2016 .....	II – 19
Gambar 2. 11	Jumlah Perkara dan Terdakwa di Kabupaten Klaten Tahun 2011-2015 .....	II – 19
Gambar 2. 12	Perkembangan Usia Harapan Hidup Masyarakat di Kabupaten Klaten Tahun 2012-2015.....	II – 20
Gambar 2. 13	Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah di Kabupaten Klaten Tahun 2012-2015 .....	II – 21
Gambar 2. 14	Perkembangan Angka Harapan Lama Sekolah di Kabupaten klaten Tahun 2012-2015 .....	II – 21
Gambar 2. 15	Perkembangan Pengeluaran Riil Per Kapita di Kabupaten Klaten Tahun 2012-2015.....	II – 22
Gambar 2. 16	Perkembangan Kasus Kematian Ibu di Kabupaten Klaten Tahun 2012-2016 .....	II – 24
Gambar 2. 17	Perkembangan Persentase Angka Kematian Bayi di Kabupaten Klaten Tahun 2012-2016.....	II – 24
Gambar 2. 18	Perkembangan Persentase Gizi Buruk di Kabupaten Klaten Tahun 2012-2016 .....	II – 25
Gambar 2. 19	Perkembangan TPAK dan TPT di Kabupaten Klaten Tahun 2012-2016 .....	II – 25
Gambar 2. 20	Rasio Ketersediaan Sekolah di Kabupaten Klaten Tahun 2012-2016.....	II – 27
Gambar 2. 21	Rasio Guru dan Murid di Kabupaten Klaten Tahun 2012-2016 .....	II – 27
Gambar 2. 22	Indikator BOR.....	II – 30
Gambar 2. 23	Angka Kriminalitas di Kabupaten Klaten Tahun 2011-2015.....	II – 34
Gambar 2. 24	PMKS yang memperoleh Bantuan.....	II – 34
Gambar 2. 25	Pembagian Penduduk Berdasarkan Usia Kerja, Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan Kerja.....	II – 36
Gambar 2. 26	Indeks Pembangunan Gender (IPG) .....	II – 38
Gambar 2. 27	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) .....	II – 39
Gambar 2. 28	Perkembangan Jumlah Tahapan Keluarga Sejahtera di Kabupaten Klaten Tahun 2012-2016.....	II – 43
Gambar 2. 29	Trend Jumlah Tenaga Kerja di Perusahaan Kecil dan Menengah/Besar Tahun 2012-2016 .....	II – 44
Gambar 2. 30	Perkembangan Lahan Kritis di Kabupaten Klaten Tahun 2011-2015.....	II – 54
Gambar 2. 31	Perkembangan Sektor Perindustrian terhadap PDRB ADHK pada Tahun 2012-2016 .....	II – 56
Gambar 2. 31	Profile Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan Tahun 2012-2016 .....	II – 58
Gambar 2. 32	Peringkat Kinerja Progresif.....	II – 69
Gambar 2. 33	Peringkat Kinerja Represif.....	II – 69
Gambar 2. 34	Perkembangan Persentase Gizi Buruk di Kabupaten Klaten Tahun 2012-2016 .....	II – 75

Gambar 2. 36	Perkembangan Kasus Kematian Ibu di Kabupaten Klaten Tahun 2012-2016 .....	II – 75
Gambar 2. 37	Perkembangan Persentase Angka Kematian Bayi di Kabupaten Klaten Tahun 2012-2016 .....	II – 76
Gambar 2. 37	Kesesuaian Program RKPD dengan APBD.....	II – 78
Gambar 3.1	Perbandingan Pertumbuhan Perekonomian Antara Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2012-2016	III – 4
Gambar 3.2	Inflasi Kabupaten Klaten Tahun 201-2016 .....	III – 6

LAMPIRAN – I  
PERATURAN BUPATI KLATEN  
NOMOR 27 TAHUN 2017  
TENTANG  
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN KLATEN TAHUN 2018

**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

**1.1. LATAR BELAKANG**

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Klaten Tahun 2018 merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Klaten 2016-2021 dengan berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2005-2025, dan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Klaten Tahun 2011-2031 serta mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019, dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018.

Dasar penyusunan RKPD Tahun 2018 dengan memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2017 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018.

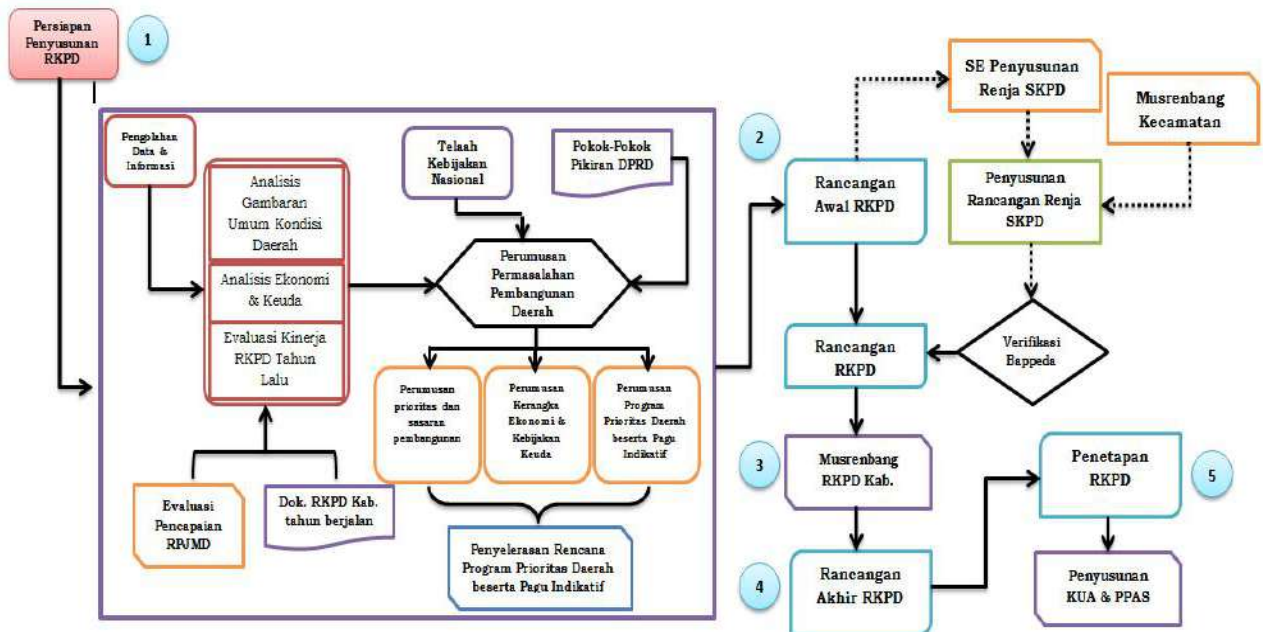
RKPD Tahun 2018 disusun sebagai pedoman dan arah penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang memuat kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah dan kewajiban daerah, rencana kerja beserta indikasi pendanaannya, baik yang dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Proses penyusunan RKPD Tahun 2018 ditempuh dengan memperhatikan 5 (lima) aspek pendekatan perencanaan, yaitu : teknokratik, *top-down*, *bottom-up*, partisipatif dan politis. Aspek pendekatan perencanaan dalam penyusunan RKPD Tahun 2018 bersifat strategis, karena dalam proses penyusunan perencanaan didasarkan pada penjangkauan aspirasi dari seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) yang secara formal diformulasikan melalui Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) mulai dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten, provinsi dan pusat,



sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Adapun Diagram Alur penyusunan RKPD Kabupaten Klaten Tahun 2018 dapat dilihat pada Diagram 1.1 berikut :



Sumber : Permendagri Nomor 54 Tahun 2010

**Gambar 1.1.**  
Alur Penyusunan RKPD Kabupaten Klaten Tahun 2018

Sesuai dengan Pasal 17 ayat (4), Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, telah dijelaskan bahwa RKPD memuat kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, serta prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, baik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun dari sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Memperhatikan Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dan Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, RKPD sebagai pedoman bagi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), maka konsekuensi dari pelaksanaan atas pasal-pasal tersebut, rencana kerja, program dan kegiatan yang disusun dalam RKPD harus terukur dan dapat dilaksanakan dengan memperhitungkan kemampuan APBD. RKPD Tahun 2018 merupakan integrasi antara program-program pemerintah (Pusat, Provinsi dan Kabupaten) maupun swasta/masyarakat sebagai hasil penjaringan aspirasi yang telah diformulasikan melalui Musrenbang.

## 1.2. LANDASAN HUKUM

Dasar hukum penyusunan RKPD Kabupaten Klaten Tahun 2018 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan ;

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan ;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
15. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
16. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2018.
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2005-2025;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Klaten Tahun 2011-2031;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten;

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2017 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018;
27. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018.
28. Peraturan Bupati Klaten Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Klaten.

### **1.3. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN**

#### **1.3.1. Hubungan Antar Dokumen Perencanaan**

Mendasari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun RKPD sebagai dokumen perencanaan pembangunan tahunan daerah. Peraturan tersebut mengarahkan pada penyempurnaan sistem perencanaan dan penganggaran, baik dari aspek proses, mekanisme, tahapan, dan tata cara pelaksanaan musyawarah perencanaan di tingkat pusat maupun daerah.

Dalam rangka implementasi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya diatur lebih teknis dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 bahwa telah jelas diatur ruang lingkup perencanaan pembangunan daerah yang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis (Renstra) SKPD, Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja (Renja) SKPD. Semua dokumen perencanaan tersebut harus disinkronkan dan diselaraskan sehingga dapat terwujud sinergitas, keterkaitan, konsistensi dan keterpaduan antar dokumen perencanaan pembangunan daerah dan juga harus dapat terintegrasi dengan rencana tata ruang.

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam rangka memenuhi ketentuan tentang perencanaan pembangunan daerah, perlu diupayakan terwujudnya

hubungan dokumen RKPD dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya sebagai berikut :

1. Hubungan RKPD dengan RPJMD

Dokumen RPJMD dijabarkan ke dalam RKPD sebagai dokumen perencanaan tahunan yang memuat rancangan kerangka ekonomi makro daerah beserta kerangka pendanaan, prioritas, sasaran pembangunan, dan rencana program kegiatan prioritas pembangunan daerah. RKPD Kabupaten Tahun 2018 disusun berdasarkan RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021 serta mempedomani arah kebijakan pembangunan tahun ketiga 2015-2020 dalam RPJPD Kabupaten Klaten Tahun 2005-2025 dan selaras dengan visi misi Kepala Daerah periode 2016-2021.

2. Hubungan RKPD dengan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah;

Dokumen RKPD Kabupaten Klaten sebagai pedoman penyusunan dan penetapan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang selanjutnya digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah.

3. Hubungan RKPD dengan RPJMD Provinsi Jawa Tengah dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP)

Dokumen RKPD Kabupaten Klaten mempedomani dan telah disinkronkan serta diselaraskan dengan dokumen RPJMD Provinsi Jawa Tengah dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nasional. Sinkronisasi dilakukan terkait dengan kesinambungan tema, prioritas, sasaran, target kinerja pembangunan dan juga indikasi program-program pembangunan prioritas.

### 1.3.2. Kerangka Penyusunan RKPD Tahun 2018

Tahun 2018 merupakan tahun ketiga RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021 dan tahap ketiga pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tahun 2005-2025.

Arah kebijakan pembangunan daerah Tahun Ketiga RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021 dijabarkan dalam sasaran pembangunan yang lebih spesifik dengan indikator dan target kinerja yang terukur baik di tingkat Kabupaten maupun di tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah yang telah disesuaikan dengan struktur organisasi perangkat daerah baru sebagaimana diatur didalam Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten. Dengan demikian diharapkan rumusan program dan kegiatan pembangunan daerah dapat lebih terarah dalam mewujudkan sasaran pembangunan yang ditetapkan dan juga dalam rangka mewujudkan Visi Misi Kepala Daerah periode 2016-2021.

### 1.4. KAIDAH PELAKSANAAN

1. RKPD Kabupaten Klaten Tahun 2018 merupakan rencana kerja pemerintah selama satu tahun dengan mendasarkan permasalahan, tantangan dan peluang, potensi yang tersedia, prioritas, target dan capaian yang telah ditetapkan.

2. Mendasarkan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 Pasal 285, Perubahan RKPD dapat dilakukan apabila hasil evaluasi pelaksanaan dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan meliputi:
  - a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah;
  - b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan;
  - c. Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang - undangan;
  - d. Pergeseran pagu kegiatan antar SKPD, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.

#### **1.5. SISTEMATIKA DOKUMEN RKPD**

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2018 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

##### **BAB I PENDAHULUAN**

Bagian ini memuat tentang latar belakang, landasan hukum, hubungan antar dokumen, sistematika dokumen RKPD, serta maksud dan tujuan.

##### **BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU**

Bagian ini memuat gambaran umum kondisi daerah meliputi aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, aspek potensi daerah, hasil evaluasi RKPD tahun lalu, evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD tahun lalu dan realisasi RPJMD, serta isu strategis dan masalah mendesak.

##### **BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH BESERTA KERANGKA PENDANAAN**

Bagian ini memuat penjelasan tentang rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan, mencakup Kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan; tantangan dan prospek perekonomian daerah, arah kebijakan ekonomi daerah, analisis dan perkiraan sumber-sumber pendapatan daerah dan arah kebijakan keuangan daerah.

##### **BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2018**

Bagian ini memuat perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD, identifikasi issue dan masalah mendesak pembangunan daerah dan nasional, rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan dan hasil Musrenbang RKPD Tahun 2017, dalam rangka menetapkan arah kebijakan pembangunan daerah Tahun 2018.

##### **BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH**

Bagian ini menjelaskan rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan.



## **BAB VI PENUTUP**

Pada bagian ini berisi kaidah pelaksanaan dan penutup.

### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

#### **1.6. MAKSUD DAN TUJUAN**

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Klaten Tahun 2018 dimaksudkan untuk :

1. Mewujudkan dan menentukan arah kebijakan pembangunan daerah Tahun 2018;
2. Menyediakan kerangka formal dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018 yang didahului dengan Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA), serta Prioritas dan Pagu Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2018.
3. Menyediakan kerangka logis bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) SKPD Tahun 2018.

Adapun tujuan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Klaten Tahun 2018 sebagai berikut :

- a. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;
- b. Menciptakan keterpaduan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan daerah, baik antar wilayah, antar fungsi maupun antar tingkat penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Klaten ;
- c. Menciptakan efisiensi dan efektifitas pengalokasian anggaran belanja daerah.

**BAB II**  
**EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2016**  
**DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH**

**2.1. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH**

**2.1.1. Aspek Geografis dan Demografi**

Kabupaten Klaten dalam lingkup Pemerintah Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu dari 35 kabupaten/kota yang mempunyai nilai strategis dan memiliki peranan yang sangat penting dalam proses pertumbuhan wilayah di Jawa Tengah. Wilayah Kabupaten Klaten terletak di jalur yang sangat strategis, karena berbatasan langsung dengan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Dari sisi bentangan garis khatulistiwa, Kabupaten Klaten terletak antara 7°32'19" Lintang Selatan sampai 7°48'33" Lintang Selatan dan antara 110°26'14" Bujur Timur sampai 110°47'51" Bujur Timur.

**2.1.1.1. Letak Administrasi**

Kabupaten Klaten mempunyai luas wilayah 65.556 ha (655,56 km<sup>2</sup>) atau seluas 2,014% dari luas Provinsi Jawa Tengah (3.254.412 ha). Luas wilayah tersebut mencakup seluruh wilayah administrasi di Kabupaten Klaten yang terdiri dari 26 Kecamatan, 391 Desa serta 10 Kelurahan, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

1. Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Boyolali;
2. Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Sukoharjo;
3. Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Gunungkidul (DIY); dan
4. Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Sleman (DIY).

**2.1.1.2. Kondisi Topografi**

Kondisi topografi wilayah Kabupaten Klaten diapit oleh Gunung Merapi dan Pegunungan Seribu, dan dengan ketinggian antara 76–1.60 m dpl (di atas permukaan laut). Secara geografis terbagi ke dalam 3 (tiga) wilayah, yaitu:

1. Wilayah lereng Gunung Merapi (wilayah bagian utara) yang meliputi Kecamatan Karangnongko, Kemalang, Jatinom dan Tulung.
2. Wilayah datar (wilayah bagian tengah) yang meliputi wilayah kecamatan-kecamatan Manisrenggo, Klaten Tengah, Kalikotes, Klaten Utara, Klaten Selatan, Ngawen, Kebonarum, Wedi, Jogonalan, Prambanan, Gantiwarno, Delanggu, Wonosari, Juwiring, Ceper, Pedan, Karangdowo, Trucuk, Cawas, Karanganom, Polanharjo.
3. Wilayah berbukit / gunung kapur (wilayah bagian selatan) yang hanya meliputi sebagian Kecamatan Bayat, Cawas dan Gantiwarno.

Dari sisi topografi wilayah Kabupaten Klaten, dirinci sebagai berikut:

1. Wilayah dengan ketinggian kurang dari 100 m di atas permukaan laut (dpl) meliputi sebagian dari kecamatan: Juwiring, Karangdowo dan Cawas.
2. Wilayah dengan ketinggian antara 100 – 200 m dpl meliputi Kecamatan: Prambanan, Jogonalan, Gantiwarno, Wedi, Bayat, Cawas (di bagian barat), Trucuk, Kalikotes, Klaten Selatan, Klaten Tengah, Klaten Utara, Kebonarum (di bagian selatan), Ngawen (di bagian selatan dan timur), Ceper, Pedan,

Karanganom (di bagian timur), Polanharjo (di bagian timur), Delanggu, Juwiring (di bagian barat) dan Wonosari (di bagian barat).

3. Wilayah dengan ketinggian antara 200 – 400 m dpl meliputi Kecamatan: Manisrenggo, Jogonalan (di bagian utara), Karangnongko, Kebonarum (di bagian utara), Ngawen (di bagian utara), Jatinom, Karanganom (di bagian barat), Tulung (sebagian besar) dan Polanharjo (bagian barat).
4. Wilayah dengan ketinggian antara 400 – 1000 m dpl meliputi Kecamatan: Kemalang (sebagian besar), Manisrenggo (sebagian besar), Jatinom (sebagian kecil) dan Tulung (sebagian kecil).
5. Wilayah dengan ketinggian 1.000 – 2000 m dpl berada di Kecamatan Kemalang.

#### **2.1.1.3. Kondisi Klimatologi**

Kabupaten Klaten memiliki iklim tropis dengan musim hujan dan musim kemarau silih berganti sepanjang tahun, temperatur antara 28–30 derajat Celcius, dan kecepatan angin rata-rata berkisar 20–25 km/jam. Pada tahun 2015 curah hujan tertinggi tercatat di Stasiun Kecamatan Ngawen yaitu 374 mm, sedangkan jumlah intensitas hujannya 13.308 mm/tahun. Sedangkan curah hujan terendah tercatat di Stasiun Bayat.

#### **2.1.1.4. Kondisi Geologi**

Kondisi geologi di Kabupaten Klaten dapat diklasifikasikan berdasar jenis tanah, yaitu :

##### 1. Litosol :

Bahan induk dari skis kristalin dan batu tulis terdapat di daerah Kecamatan Bayat.

##### 2. Regosol Kelabu :

Bahan induk abu dan pasir vulkanik termedier terdapat di Kecamatan Cawas, Trucuk, Klaten Tengah, Kalikotes, Kebonarum, Klaten Selatan, Karangnongko, Ngawen, Klaten Utara, Ceper, Pedan, Karangdowo, Juwiring, Wonosari, Delanggu, Polanharjo, Karanganom, Tulung dan Jatinom.

##### 3. Grumusol Kelabu Tua :

Bahan induk berupa abu dan pasir vulkanik intermedier terdapat di daerah Kecamatan Bayat, Cawas sebelah selatan.

##### 4. Kompleks Regosol Kelabu dan Kelabu Tua :

Bahan induk berupa batu apurnapal terdapat di daerah Kecamatan Klaten Tengah dan Kalikotes sebelah selatan.

##### 5. Regosol Coklat Kekelabuan :

Bahan induk berupa abu dan pasir vulkanik intermedier terdapat di daerah Kecamatan Kemalang, Manisrenggo, Prambanan, Jogonalan, Gantiwarno dan Wedi.

#### **2.1.1.5. Kondisi Hidrologi**

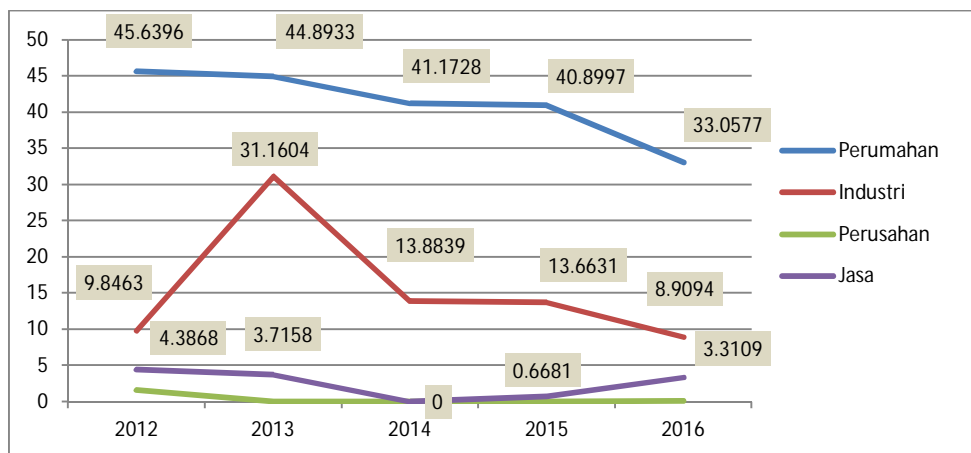
Kabupaten Klaten dilalui 80 sungai dengan berbagai klasifikasi (ordo), yaitu: (i) 1 sungai berklasifikasi induk yaitu Bengawan Solo, (ii) 1 sungai berklasifikasi Ordo I yaitu sungai Dengkeng, (iii) 24 sungai dengan klasifikasi ordo II, dan (iv) 54 sungai dengan Ordo III. Potensi air lainnya adalah sumber mata air. Terdapat 174 titik sumber mata air yang tersebar di 20 (dua puluh) Kecamatan. Dimana sumber air terbanyak terdapat di Kecamatan Tulung (24 lokasi) dan Manisrenggo (24 lokasi).



### 2.1.1.6. Penggunaan Lahan

Dari sisi penggunaan lahan pertanian selama 5 (lima) tahun terakhir mulai tahun 2012-2016 terjadi perubahan pola penggunaan lahan sawah irigasi. Penggunaan lahan sawah dari 33.376 Ha pada tahun 2011, menjadi 33.314 Ha pada tahun 2012, menjadi 33.220 Ha pada tahun 2013, menjadi 33.116 Ha pada tahun 2014, pada tahun 2015 menjadi 33.111 Ha.

Adapun perubahan luasan penggunaan tanah pertanian ke non pertanian pada tahun 2015 perubahan luasan penggunaan tanah pertanian ke non pertanian seluas 55,2309 Ha, dengan perincian peruntukan: perumahan 40,8997 Ha, industri 13,6631 Ha, dan jasa 0,6681 Ha. Sedangkan pada tahun 2016 seluas 45,3910 Ha, dengan perincian peruntukan: perumahan 33,057 Ha, industri 8,9094 Ha, perusahaan 0,113 Ha dan jasa 3,3109 Ha. Adapun Perkembangan Perubahan Luasan Penggunaan Tanah Pertanian Ke Non Pertanian di Kabupaten Klaten Tahun 2012-2016 Menurut Penggunaannya sebagaimana Gambar 2.1



Sumber : Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten, 2017 (diolah)

**Gambar 2.1.**  
**Perkembangan Perubahan Luasan Penggunaan Tanah Pertanian Ke Non Pertanian di Kabupaten Klaten Tahun 2012-2016 Menurut Penggunaannya**

Besaran luas lahan dan persentase lahan sawah yang beririgasi di Kabupaten Klaten menunjukkan bahwa tanah pertanian di Kabupaten Klaten masih sangat potensial untuk dikembangkan menjadi kawasan agropolitan. Hal ini juga didukung oleh kenyataan bahwa selama ini Kabupaten Klaten mendapat sebutan sebagai penyangga pangan di Provinsi Jawa Tengah. Pengembangan Kabupaten Klaten sebagai kawasan agropolitan, perlu ada pengendalian dan optimalisasi pemanfaatan lahan sesuai produk unggulan yang disesuaikan dengan tata ruang wilayah.

### 2.1.1.7. Pengembangan Potensi Wilayah

Potensi pengembangan wilayah disusun dengan mengacu pada Pasal 21 Perda Nomor 11 Tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Klaten Tahun 2011-2031, serta memperhatikan kondisi eksisting wilayah di Kabupaten Klaten diarahkan dengan memperhatikan pola ruang yang meliputi kawasan lindung dan kawasan budidaya, dengan penjelasan sebagai berikut:

- A. Kawasan lindung, terdiri atas:
- a. Kawasan Hutan Lindung;  
Kawasan hutan lindung dapat dilihat pada dimaksud mencakup luas kurang lebih 29 (dua puluh sembilan) hektar berada di Kecamatan Bayat.
  - b. Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya;  
Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya dapat dilihat pada dimaksud adalah berupa kawasan resapan air, meliputi Kecamatan : Kemalang, Manisrenggo, Karangnongko, Jatinom, dan Tulung.
  - c. Kawasan Perlindungan Setempat;  
Kawasan perlindungan setempat dapat dilihat pada dimaksud terdiri atas:
    - (1). Sempadan sungai, kawasan sempadan sungai dapat dilihat pada dimaksud adalah mencakup luasan kurang lebih 3.963 (tiga ribu sembilan ratus enam puluh tiga) hektar yang tersebar di wilayah Kabupaten, dengan rincian sebagai berikut :
      - (a). dataran sepanjang tepian sungai bertanggul dengan lebar paling sedikit 5 (lima) meter dari kaki tanggul sebelah luar;
      - (b). dataran sepanjang tepian sungai besar tidak bertanggul di luar kawasan permukiman dengan lebar paling sedikit 100 (seratus) meter dari tepi sungai; dan
      - (c). dataran sepanjang tepian anak sungai tidak bertanggul di luar kawasan permukiman dengan lebar paling sedikit 50 (lima puluh) meter dari tepi sungai.
  - d. Kawasan Sekitar Danau Atau Waduk; dan Kawasan sekitar dan atau waduk berupa daratan dengan jarak 50 (lima puluh) meter sampai dengan 100 (seratus) meter dari titik pasang air dan atau waduk tertinggi, dengan luas kurang lebih 34 (tiga puluh empat) hektar berada di sekitar Rawa Jombor Kecamatan Bayat.
  - e. Kawasan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan.  
Kawasan ruang terbuka hijau kawasan perkotaan luas kurang lebih 8.557 (delapan ribu lima ratus lima puluh tujuh) hektar atau 42 (empat puluh dua) persen dari luas kawasan perkotaan kurang lebih 20.018 (dua puluh ribu delapan belas) hektar.
  - f. Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam, dan Cagar Budaya.  
Kawasan suaka alam, pelestarian, dan kawasan cagar budaya dapat dilihat pada dimaksud terdiri atas:
    - (1). Taman Nasional Gunung Merapi dengan luas kurang lebih 893 (delapan ratus Sembilan puluh tiga) hektar yang meliputi sebagian wilayah Kecamatan Kemalang; dan
    - (2). Kawasan cagar budaya meliputi:
      - (a). Candi Prambanan, Candi Sojiwan, Candi Buraah, Candi Lumbang, Candi Sewu, Candi Asu/Gana, Candi Lor/Candirejo, Candi Plaosan Lor, dan Candi Plaosan Kidul berada di Kecamatan Prambanan dengan luas kurang lebih 67 (enam puluh tujuh) hektar;
      - (b). Candi Merak dan Candi Karangnongko berada di Kecamatan

- Karangnongko dengan luas kurang lebih 1 (satu) hektar; dan
- (c). Kawasan Pandanaran berada di Kecamatan Bayat dengan luas kurang lebih 9 (sembilan) hektar.

B. Kawasan Budidaya, terdiri atas:

a. Kawasan peruntukan hutan produksi;

Kawasan peruntukan hutan produksi, terdiri atas:

- (1). Hutan produksi terbatas mencakup luasan kurang lebih 185 (seratus delapan puluh lima) hektar berada di Kecamatan Bayat.
- (2). Hutan produksi tetap mencakup luasan kurang lebih 429 (empat ratus dua puluh sembilan) hektar meliputi kecamatan Bayat dan Kalikotes.

b. Kawasan peruntukan hutan rakyat;

Kawasan peruntukan hutan rakyat mencakup luasan kurang lebih 1.514 (seribu lima ratus empat belas) hektar meliputi kecamatan : Bayat, Jatinom, Karangnongko, Kemalang, Manisrenggo, Prambanan, Tulung dan Wedi.

c. Kawasan peruntukan pertanian;

Kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan mencakup luasan kurang lebih 28.949 (dua puluh delapan ribu sembilan ratus empat puluh sembilan) hektar berada di seluruh kecamatan, dengan perincian sebagai berikut:

- (1). Kawasan peruntukan hortikultura mencakup luasan kurang lebih 2.422 (dua ribu empat ratus dua puluh dua) hektar meliputi kecamatan: Bayat, Cawas, Ceper, Delanggu, Gantiwarno, Jatinom, Jogonalan, Juwiring, Kalikotes, Karangnongko, Karangdowo, Karangnongko, Kemalang, Manisrenggo, Ngawen, Pedan, Prambanan, Trucuk, Tulung, Wedi, dan Wonosari.
- (2). Kawasan peruntukan perkebunan mencakup luasan kurang lebih 1.080 (seribu delapan puluh) hektar terdiri atas komoditas:
  - (a). Kelapa deres meliputi kecamatan: Bayat, Gantiwarno, Jogonalan, Kalikotes, Kemalang, Manisrenggo dan Wedi.
  - (b). Kapuk meliputi kecamatan : Gantiwarno, Jatinom, Jogonalan, Kalikotes, Ngawen, Prambanan, dan Tulung.
  - (c). Kopi meliputi kecamatan: Jatinom, Karangnongko, Kemalang, Tulung, dan Manisrenggo.
  - (d). Tembakau rajangan dan asepan meliputi kecamatan: Bayat, Ceper, Kalikotes, Gantiwarno, Jatinom, Jogonalan, Prambanan, Karangnongko, Tulung, Manisrenggo dan Kemalang,
  - (e). Tembakau Virginia meliputi Kecamatan Pedan dan Trucuk.
  - (f). Tembakau Vorsternland meliputi Kecamatan Gantiwarno, Jogonalan, Kebonarum, Klaten Selatan, Klaten Utara, dan Wedi.
  - (g). Cengkeh meliputi kecamatan: Jatinom, Karangnongko, Kemalang, Manisrenggo dan Tulung.
  - (h). Tebu meliputi kecamatan: Bayat, Ceper, Pedan, Jatinom, Gantiwarno, Jogonalan, Kalikotes, Klaten Utara dan Prambanan.
- (3). Pengembangan kawasan peruntukan peternakan diantaranya: penangkaran burung, sapi, kelinci, ayam, kambing dengan luasan



- kurang lebih 434 (empat ratus tiga puluh empat) hektar yang tersebar disemua kecamatan.
- (4). Kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan mencakup luasan kurang lebih 32.451 (tiga puluh dua ribu empat ratus lima puluh satu) hektar ditetapkan menjadi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LPPB).
- d. Kawasan Peruntukan Perikanan;
- Kawasan peruntukan perikanan terdiri atas:
- (1). Kawasan Peruntukan Perikanan Tangkap.
- Kawasan peruntukan perikanan tangkap mencakup seluruh perairan badan sungai di wilayah Kabupaten.
- (2). Kawasan Peruntukan Perikanan Budidaya.
- Kawasan peruntukan perikanan budidaya meliputi:
- (a). Waduk atau rawa dengan luas kurang lebih 180 (seratus delapan puluh) hektar berada di Kecamatan Bayat.
- (b). Budidaya pembibitan dan budidaya pembesaran dengan luas kurang lebih 113 (seratus tiga belas) hektar meliputi kecamatan: Bayat, Cawas, Jogonalan, Juwiring, Kalikotes, Karanganom, Karangdowo, Karangnongko, Kebonarum, Manisrenggo, Ngawen, Polanharjo, Prambanan, Wonosari dan Tulung.
- (c). Pengembangan budidaya perikanan berbasis sistem kewilayahan dilaksanakan melalui pengembangan kawasan minapolitan dengan komoditas ikan nila meliputi kecamatan: Karanganom, Polanharjo, Tulung, Ngawen, Klaten Selatan dan Kebonarum.
- e. Kawasan Peruntukan Pertambangan;
- Kawasan peruntukan pertambangan terdiri atas mineral serta minyak dan gas bumi, dengan penjelasan sebagai berikut:
- (1). Kawasan peruntukan pertambangan mineral meliputi:
- (a). Pertambangan andesit berada di Kecamatan Karangdowo;
- (b). Pertambangan batu gamping berada di Kecamatan Kalikotes;
- (c). Pertambangan lempung alluvial meliputi kecamatan: Ceper, Gantiwarno, Jogonalan, Karanganom, Karangnongko, dan Ngawen.
- (d). Pertambangan batuan dengan luas kurang lebih 69 (enam puluh sembilan) hektar berada di Kecamatan Kemalang.
- (2). Kawasan peruntukan pertambangan mineral merupakan wilayah pertambangan rakyat.
- (3). Pertambangan batuan ditetapkan sebagai wilayah usaha pertambangan.
- (4). Kawasan peruntukan pertambangan minyak dan gas bumi dapat dilihat pada dimaksud pada ayat (1) meliputi seluruh wilayah di Kabupaten.
- f. Kawasan Peruntukan Industri;
- Kawasan peruntukan industri meliputi
- (1). Kawasan peruntukan industri besar meliputi:
- (a). Kecamatan Ceper dengan luas kurang lebih 342 (tiga ratus empat

- puluh dua) hektar;
- (b). Kecamatan Pedan dengan luas kurang lebih 147 (seratus empat puluh tujuh) hektar; dan
  - (c). Kecamatan Prambanan dengan luas kurang lebih 127 (seratus dua puluh tujuh) hektar.
- (2). Kawasan peruntukan industri menengah meliputi:
- (a). Kecamatan Klaten Tengah dan Kecamatan Klaten Utara dengan luas kurang lebih 71 (tujuh puluh satu) hektar;
  - (b). Kecamatan Karanganyam dengan luas kurang lebih 22 (dua puluh dua) hektar;
  - (c). Kecamatan Delanggu dengan luas kurang lebih 51 (lima puluh satu) hektar; dan
  - (d). Kecamatan Jogonalan dengan luas kurang lebih 56 (lima puluh enam) hektar.
- (3). Kawasan peruntukan industri kecil dan mikro meliputi:
- (a). industri pengecoran logam berada di Kecamatan Ceper
  - (b). industri pandai besi meliputi kecamatan: Delanggu, Jatinom, Karanganyam, Manisrenggo, dan Polanharjo.
  - (c). industri tenun Alat Tenun Bukan Mesin (ATBM) meliputi kecamatan: Bayat, Cawas, Juwiring, Karangdowo, dan Pedan.
  - (d). industri konveksi meliputi kecamatan: Ceper, Kalikotes, Klaten Selatan, Ngawen, Pedan, dan Wedi.
  - (e). industri genteng meliputi kecamatan: Ceper, Kalikotes, Karanganyam, Selatan, Ngawen, dan Wonosari.
  - (f). industri meubel/furniture meliputi kecamatan: Cawas, Juwiring, Karangdowo, Klaten Utara, Ngawen, Trucuk, dan Wonosari.
  - (g). industri gerabah/keramik meliputi kecamatan : Bayat, Wedi, dan Wonosari.
  - (h). industri pengolahan tembakau meliputi kecamatan: Gantiwarno, Wedi, Kebonarum, Manisrenggo, Trucuk dan Wedi.
  - (i). industri soon meliputi kecamatan: Ngawen dan Tulung.
  - (j). industri makanan kecil meliputi kecamatan: Jogonalan dan Polanharjo.
  - (k). industri tatah sungging, dan bordir meliputi kecamatan Wonosari
- g. Kawasan Peruntukan Pariwisata;
- Kawasan peruntukan pariwisata meliputi:
- (1). Kawasan peruntukan pariwisata budaya, mencakup;
- (a). Candi Prambanan, Candi Sojiwan, Candi Buhrah, Candi Lumbung, Candi Sewu, Candi Asu/Gana, Candi Lor/Candirejo, Candi Plaosan Lor, dan Candi Plaosan Kidul berada di Kecamatan Prambanan;
  - (b). Candi Merak dan Candi Karangnongko berada di Kecamatan Karangnongko;
  - (c). Museum Gula Jawa Tengah berada di Kecamatan Jogonalan;

- (d). Makam Ki Ageng Gribig dan Tradisi Yaqowiyu berada di Kecamatan Jatinom;
  - (e). Makam Ki Ageng Pandanaran berada di Kecamatan Bayat;
  - (f). Makam Ki Ageng Ronggowarsito berada di Kecamatan Trucuk;
  - (g). Makam Ki Ageng Perwito berada di Kecamatan Wonosari; dan
  - (h). Keunikan lokal desa wisata meliputi desa :
    1. Desa Wisata Kebondalem Kidul Kecamatan Prambanan;
    2. Desa Wisata Melikan Kecamatan Wedi;
    3. Desa Wisata Duwet (Sorani) Kecamatan Ngawen;
    4. Desa Wisata Ponggok Kecamatan Polanharjo;
    5. Desa Wisata Nganjat Kecamatan Polanharjo;
    6. Desa Wisata Janti Kecamatan Polanharjo;
    7. Desa Wisata Plawikan Kecamatan Jogonalan;
    8. Desa Wisata Jimbung Kecamatan Kalikotes;
    9. Desa Wisata Krakitan Kecamatan Bayat;
    10. Desa Wisata Jarum Kecamatan Bayat;
    11. Desa Wisata Demak Ijo Kecamatan Karangnongko;
    12. Desa Wisata Mlese Kecamatan Cawas;
    13. Desa Wisata Tlingsing Kecamatan Cawas;
    14. Desa Wisata Pokak Kecamatan Ceper; dan
    15. Desa Wisata lainnya sesuai dengan karakteristik dan potensi wilayah.
- (2). Kawasan peruntukan pariwisata alam meliputi:
- (a). Deles Indah berada di Kecamatan Kemalang;
  - (b). Gunung Watu Prau dan Pegunungan Kidul berada di Kecamatan Bayat;
  - (c). Kawasan keunikan batuan dan fosil berada di Kecamatan Bayat; dan
  - (d). Umbul Pelem dan Nganten di Kecamatan Tulung dan Polanharjo.
  - (e). Pemandian Umbul Ponggok berada di Kecamatan Polanharjo
- (3). Kawasan peruntukan pariwisata buatan meliputi:
- (a). Rawa Jombor Permai berada di Kecamatan Bayat;
  - (b). Obyek Wisata Mata Air Cokro (OMAC), Pemandian Lumban Tirto, Kecamatan Tulung dan Pemancingan Janti berada di Kecamatan Polanharjo;
  - (c). Pemandian Jolotundo berada di Kecamatan Karangnongko; dan
  - (d). Pemandian Tirtomulyono dan Pemandian Tirtomulyani berada di Kecamatan Kebonarum.
- h. Kawasan Peruntukan Permukiman meliputi;
- (1). Kawasan peruntukan permukiman perkotaan mencakup luasan kurang lebih 10.480 (sepuluh ribu empat ratus delapan puluh) hektar meliputi desa dan kelurahan pada kawasan perkotaan di wilayah Kabupaten.
  - (2). Kawasan peruntukan permukiman perdesaan mencakup luasan kurang lebih 19.935 (sembilan belas ribu sembilan ratus tiga puluh lima) hektar

meliputi desa yang termasuk dalam kawasan perdesaan di wilayah Kabupaten.

(3). Pengembangan Kawasan Siap Bangun (Kasiba) dan Lingkungan Siap Bangun (Lisiba) mandiri di kawasan perkotaan.

i. Kawasan Peruntukan Lainnya.

Kawasan peruntukan lainnya diantara kawasan pertahanan dan keamanan yang meliputi:

(1). Depo Pendidikan dan Latihan Tempur (Dodiklatpur) berada di Kecamatan Klaten Selatan dengan luas kurang lebih 29 (dua puluh sembilan) hektar;

(2). Komando Distrik Militer (Kodim) Klaten berada di Kecamatan Klaten Tengah dengan luas kurang lebih 1 (satu) hektar;

(3). Kepolisian Resor (Polres) Klaten berada di Kecamatan Klaten Utara dengan luas kurang lebih 3 (tiga) hektar;

(4). Lapangan tembak berada di Kecamatan Trucuk dengan luas kurang lebih 5 (lima) hektar;

(5). Komando Rayon Militer (Koramil) yang tersebar di wilayah Kabupaten; dan

(6). Kepolisian Sektor (Polsek) yang tersebar di wilayah Kabupaten.

j. Kawasan Rawan Bencana

Berdasarkan kondisi geografis, klimatologis, geologis dan hidrologi seluruh kawasan Kabupaten Klaten berpotensi terjadinya bencana alam, dan beberapa kawasan rawan bencana alam adalah sebagai berikut :

(1). Kawasan rawan bencana alam tanah longsor meliputi:

- a) Kecamatan Bayat;
- b) Kecamatan Cawas;
- c) Kecamatan Gantiwarno;
- d) Kecamatan Kemalang;
- e) Kecamatan Manisrenggo;
- f) Kecamatan Prambanan; dan
- g) Kecamatan Wedi.

(2). Kawasan rawan bencana alam banjir meliputi:

- a) Kecamatan Bayat;
- b) Kecamatan Cawas;
- c) Kecamatan Ceper;
- d) Kecamatan Gantiwarno;
- e) Kecamatan Juwiring;
- f) Kecamatan Karangdowo;
- g) Kecamatan Pedan;
- h) Kecamatan Prambanan;
- i) Kecamatan Trucuk;
- j) Kecamatan Wedi; dan
- k) Kecamatan Wonosari.

(3). Kawasan rawan bencana angin topan dapat dilihat pada mencakup seluruh wilayah di Kabupaten.

### 2.1.1.8. Aspek Demografi

Jumlah penduduk pada tahun 2012 sebanyak 1.461.706 jiwa, meningkat menjadi sebanyak 1.485.610 jiwa pada tahun 2016, dengan rata-rata laju pertumbuhan 0,36 % dan Kepadatan penduduk 2.266 jiwa/km<sup>2</sup>. Gambaran jumlah penduduk, laju pertumbuhan dan kepadatan penduduk di Kabupaten Klaten dapat disajikan pada Tabel 2.1

**Tabel 2.1**  
**Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan Tahun 2011-2015**  
**dan Laju Pertumbuhan di Kabupaten Klaten**

Kecamatan	Tahun					Penambahan Penduduk (Jiwa)	Laju Pertumbuhan (%)	Kepadatan Penduduk (jiwa/km <sup>2</sup> )
	2012	2013	2014	2015	2016			
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)
01 Prambanan	58.117	58.448	58.712	59.460	59.790	330	0,55	2.447
02. Gantiwarno	49.840	49.498	49.631	50.161	50.004	(157)	-0,31	1.950
03 Wedi	64.929	64.400	64.290	64.525	64.397	(128)	-0,20	2.641
04 Bayat	74.056	74.425	74.836	75.623	75.891	268	0,35	1.925
05 Cawas	69.827	69.967	70.071	70.118	70.067	(51)	-0,07	2.033
06 Trucuk	86.989	87.397	87.526	87.121	87.721	600	0,69	2.595
07 Kalikotes	23.978	23.890	23.861	23.913	23.916	3	0,01	1.843
08 Kebonarum	68.507	68.250	68.260	69.157	69.670	513	0,74	7.205
09 Jogonalan	47.354	47.902	48.084	48.689	48.834	145	0,30	1.829
10 Manisrenggo	41.624	41.888	42.082	42.466	42.585	119	0,28	1.580
11 Karangnongko	73.004	73.337	73.735	74.681	75.496	815	1,09	2.823
12 Ngawen	54.492	54.408	54.507	55.013	55.184	171	0,31	3.252
13 Ceper	54.269	53.061	53.060	53.201	53.316	115	0,22	2.181
14 Pedan	67.880	68.172	68.271	68.651	68.677	26	0,04	3.583
15 Karangdowo	67.880	70.221	70.626	71.171	71.480	309	0,43	2.445
16 Juwiring	49.953	49.736	49.739	49.868	49.966	98	0,20	1.677
17 Wonosari	48.774	48.438	48.610	48.641	48.585	(56)	-0,12	1.560
18 Delanggu	51.731	51.879	52.034	52.404	52.551	147	0,28	2.798
19 Polanharjo	60.921	61.865	62.049	62.614	62.920	306	0,49	2.639
20 Karanganom	65.814	66.301	66.804	67.867	68.594	727	1,07	2.851
21 Tulung	41.312	41.625	41.905	42.428	42.990	562	1,32	1.343
22 Jatinom	51.811	51.168	51.388	51.517	51.630	113	0,22	1.453
23 Kemalang	40.655	40.724	41.052	41.502	41.461	(41)	-0,10	803
24 Klaten Selatan	50.519	50.480	50.804	51.372	51.773	401	0,78	3.588
25 Klaten Tengah	47.065	47.033	47.245	47.700	47.712	12	0,03	5.349
26 Klaten Utara	50.405	50.010	50.070	50.408	50.400	(8)	-0,02	4.855
<b>Jumlah</b>	<b>1.461.706</b>	<b>1.464.523</b>	<b>1.469.253</b>	<b>1.480.271</b>	<b>1.485.610</b>	<b>5.339</b>	<b>0,36</b>	<b>2.266</b>

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, 2017

Pertumbuhan penduduk di Kecamatan Gantiwarno, Wedi, Cawas, Wonosari dan Kemalang minus, hal ini disebabkan diantaranya: angka mutasi, angka kematian, dan validasi administrasi kependudukan. Di samping itu, adanya penambahan jumlah penduduk juga mengakibatkan pergeseran rasio beban tanggungan. Gambaran Angka Beban Tanggungan pada tahun 2012-2016 dapat dilihat pada Tabel 2.2

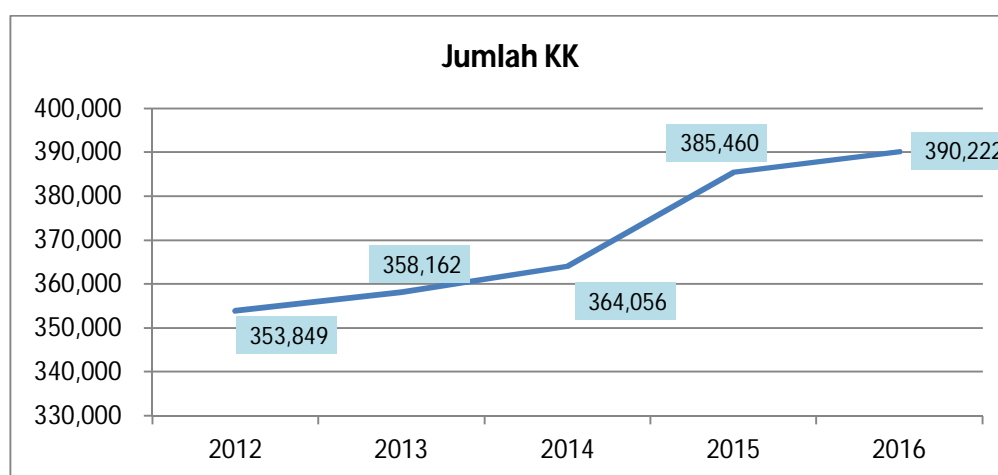


**Tabel 2.2.**  
**Rasio Beban Tanggungan Tahun 2012-2016**

No	Tahun	Penduduk Kelompok Umur			Jumlah Penduduk	Rasio Beban Tanggungan (RBT)
		0-14 th	15-64 th	65 th+		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	2012	312.217	704.715	130.701	1.147.633	62,85
2	2013	313.518	704.091	131.385	1.148.994	63,19
3	2014	284.632	1.030.011	154.610	1.469.253	42,64
4	2015	288.064	1.028.587	163.620	1.480.271	43,91
5	2016	287.101	1.032.300	162.209	1.481.610	43,53

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klaten 2017, (diolah)

Di samping itu, adanya pertambahan jumlah penduduk juga mengakibatkan terjadinya pertambahan jumlah Kepala Keluarga (KK). Gambaran perkembangan jumlah KK (Kepala Keluarga) pada tahun 2012-2016 dapat dilihat pada Gambar 2.2.



Sumber : Kabupaten Klaten Dalam Angka Tahun 2016.

**Gambar 2.2.**  
**Perkembangan Jumlah KK pada Tahun 2012-2016**

Jumlah keluarga sebanyak 390.222 KK sebagaimana tersebut pada Tabel 2.1, terdiri dari keluarga yang dikategorikan Pra Sejahtera sebanyak 67.400 KK, Sejahtera I sebanyak 83.239 KK, dan Keluarga Sejahtera sebanyak 239.583 KK.

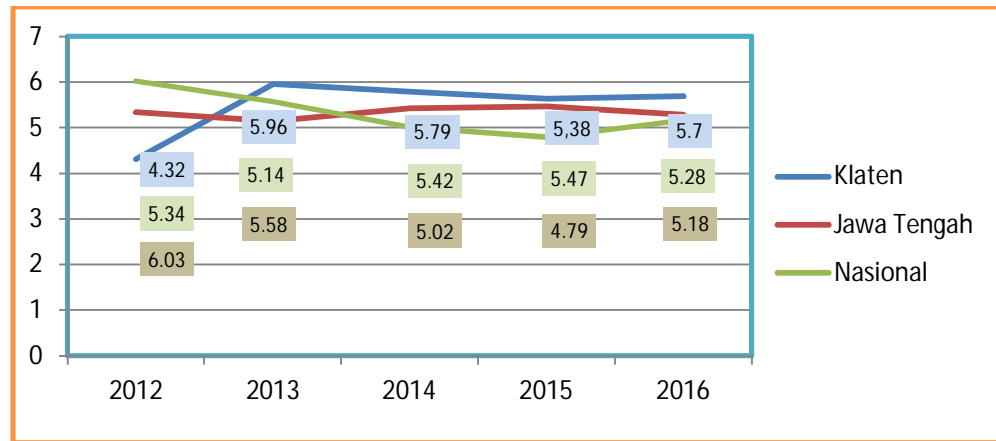
### 2.1.2. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Kondisi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Klaten dapat dilihat pada aspek pemerataan ekonomi, kesejahteraan sosial, seni budaya dan olahraga serta agama dapat dilihat pada tersebut di bawah ini:

#### 2.1.2.1. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan perekonomian Kabupaten Klaten selama tahun 2012-2016 menunjukkan kinerja positif, hal ini ditunjang adanya pertumbuhan sektor UMKM dan lapangan usaha yang mendukung peningkatan sektor jasa. Tahun 2012 tumbuh 4,32%, dan tahun 2013 tumbuh menjadi sebesar 5,96%, namun pada tahun 2014 mengalami penurunan (atau hanya tumbuh 5,79%) sebagai akibat pengaruh perekonomian nasional, sedangkan tahun 2015 tumbuh sebesar 5,64 %, dan tahun 2016 diperkirakan tumbuh berkisar sebesar 5,7%. Perbandingan

pertumbuhan perekonomian antara Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional selama Tahun 2012-2016, dapat dilihat pada Gambar 2.3.



Sumber : BAPPEDA Kabupaten Klaten, 2017

**Gambar 2.3.**  
**Perbandingan Pertumbuhan Perekonomian Antara Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional selama Tahun 2012-2016**

Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Klaten Atas Dasar Harga Konstan 2010 selama Tahun 2012-2016 tumbuh secara positif. Gambaran selengkapnya Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010, di Kabupaten Klaten selama Tahun 2012-2016 dapat dilihat dapat dilihat pada Tabel 2.3. Sementara itu, Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Klaten Atas Dasar Harga Berlaku, pada tahun 2012-2016 dapat dilihat pada Tabel 2.4.

**Tabel 2.3.**  
**Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010**  
**di Kabupaten Klaten Tahun 2012-2016 (dalam Rp.Juta)**

No	Lapangan Usaha	2012		2013		2014		2015		2016	
		Nilai (juta Rp.)	(%)	Nilai (juta Rp.)	(%)	Nilai (juta Rp.)	%	Nilai (juta Rp.)	%	Nilai (juta Rp.)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	2,471,010.67	11.10	2,583,620.33	4.56	2,606,035.81	0.87	2,732,275.47	4.84	2,814,072.17	2.99
2	Pertambangan dan Penggalian	523,680.55	3.87	557,451.35	6.45	597,551.15	7.19	617,439.64	3.33	635,253.28	2.89
3	Industri Pengolahan	5,991,221.12	6.51	6,506,551.46	8.60	7,093,268.56	9.02	7,540,801.78	6.31	8,001,139.74	6.10
4	Pengadaan Listrik dan gas	34,545.06	8.70	37,301.57	7.98	38,526.20	3.28	39,160.62	1.65	41,588.12	6.20
5	Pengadaan Air, Pengolahan sampah, Limbah, dan Daur Ulang	10,692.21	1.14	11,062.16	3.46	11,527.87	4.21	11,793.17	2.30	12,047.34	2.16
6	Konstruksi	1,199,173.63	2.55	1,254,970.42	4.65	1,294,690.29	3.17	1,356,317.55	4.76	1,435,985.49	5.87
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3,912,955.36	1.15	4,000,471.06	2.24	4,094,285.55	2.35	4,209,074.39	2.80	4,358,461.18	3.55
8	Transportasi dan Pergudangan	424,248.41	4.17	469,346.14	10.63	515,457.41	9.82	544,592.24	5.65	566,772.32	4.07
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	733,824.99	2.26	755,159.55	2.91	792,087.87	4.89	832,820.90	5.14	883,280.17	6.06
10	Informasi dan Komunikasi	722,286.22	2.11	749,129.31	3.72	794,978.71	6.12	844,708.79	6.26	908,151.37	7.51
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	637,716.58	6.26	675,611.17	5.94	718,614.58	6.37	767,642.41	6.82	823,297.85	7.25
12	Real Estate	272,023.36	3.62	290,530.05	6.80	316,062.61	8.79	339,893.73	7.54	360,869.45	6.17
13	Jasa Perusahaan	50,940.86	9.49	60,535.96	18.84	65,626.24	8.41	70,961.66	8.13	77,484.45	9.19
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	530,808.20	-0.10	543,501.77	2.39	546,822.57	0.61	574,874.57	5.13	591,863.52	2.96
15	Jasa Pendidikan	1,085,188.87	23.09	1,193,988.37	10.03	1,333,544.38	11.69	1,438,627.68	7.88	1,519,264.74	5.61
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan sosial	182,774.69	13.87	200,873.15	9.90	224,011.39	11.52	241,260.27	7.70	260,076.42	7.80
17	Jasa Lainnya	319,311.93	-1.18	351,325.20	10.03	381,431.17	8.57	396,731.26	4.01	428,323.40	7.96
<b>Produk Domestik Regional Bruto</b>		<b>19,102,402.71</b>	<b>5.71</b>	<b>20,241,429.02</b>	<b>5.96</b>	<b>21,424,522.36</b>	<b>5.84</b>	<b>22,558,976.13</b>	<b>5.30</b>	<b>23,717,931.01</b>	<b>5.14</b>

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Klaten 2017

**Tabel 2.4.**  
**Nilai PDRB Atas Harga Berlaku Tahun 2010**  
**di Kabupaten Klaten Tahun 2012-2016 (dlm Juta Rupiah)**

No	Lapangan Usaha	2012		2013		2014		2015		2016)	
		Nilai (juta Rp.)	(%)	Nilai (juta Rp.)	(%)	Nilai (juta Rp.)	(%)	Nilai (juta Rp.)	(%)	Nilai (juta Rp.)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	2,820,039.55	18.52	3,095,353.37	9.76	3,284,129.30	6.10	3,622,347.95	10.30	3,807,648.99	5.12
2	Pertambangan dan Penggalian	601,493.80	9.80	662,226.32	10.10	809,207.55	22.20	955,364.63	18.06	1,013,913.84	6.13
3	Industri Pengolahan	6,963,659.60	9.69	7,693,350.45	10.48	9,116,653.82	18.50	10,178,503.39	11.65	11,342,482.65	11.44
4	Pengadaan Listrik dan gas	33,763.34	4.76	34,673.28	2.70	36,912.08	6.46	39,661.13	7.45	45,832.98	15.56
5	Pengadaan Air, Pengolahan sampah, Limbah, dan Daur Ulang	10,828.33	1.19	11,394.65	5.23	12,097.70	6.17	12,698.33	4.96	13,246.78	4.32
6	Konstruksi	1,307,396.81	7.65	1,417,692.47	8.44	1,604,879.56	13.20	1,780,130.61	10.92	1,914,709.83	7.56
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4,138,649.13	3.66	4,362,830.00	5.42	4,609,167.50	5.65	4,947,444.05	7.34	5,290,031.30	6.92
8	Transportasi dan Pergudangan	431,466.84	5.56	483,145.12	11.98	557,513.39	15.69	614,745.60	10.27	645,983.06	5.08
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	776,996.48	4.18	803,221.78	3.38	878,161.00	9.33	974,845.99	11.01	1,091,004.92	11.92
10	Informasi dan Komunikasi	752,212.33	4.26	795,566.85	5.76	836,098.10	5.09	880,528.28	5.31	948,513.65	7.72
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	723,974.35	16.29	801,037.09	10.64	888,874.29	10.97	985,803.41	10.90	1,084,247.12	9.99
12	Real Estate	275,615.93	4.59	298,881.50	8.44	343,172.57	14.82	381,078.74	11.05	409,138.03	7.36
13	Jasa Perusahaan	56,290.58	14.40	71,050.05	26.22	79,657.41	12.11	90,459.78	13.56	102,385.38	13.18
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	592,451.52	10.17	626,029.07	5.67	668,437.00	6.77	730,951.96	9.35	790,819.46	8.19
15	Jasa Pendidikan	1,311,706.32	33.67	1,548,658.63	18.06	1,805,978.48	16.62	1,984,205.50	9.87	2,159,132.68	8.82
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan sosial	220,042.92	20.56	262,302.13	19.20	303,146.41	15.57	339,329.96	11.94	371,819.69	9.57
17	Jasa Lainnya	331,734.12	-0.56	377,737.09	13.87	436,804.15	15.64	470,679.24	7.76	527,780.71	12.13
<b>Produk Domestik Regional Bruto</b>		<b>21,348,321.95</b>	<b>10.20</b>	<b>23,345,149.85</b>	<b>9.35</b>	<b>26,270,890.31</b>	<b>12.53</b>	<b>28,988,778.55</b>	<b>10.35</b>	<b>31,558,691.07</b>	<b>8.87</b>

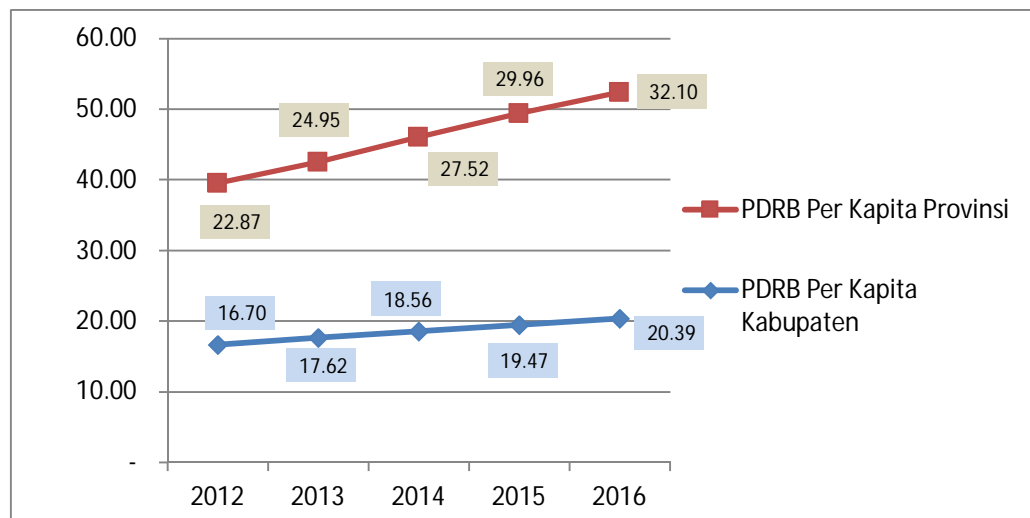
Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Klaten 2017

Dari Tabel 2.3. dapat diketahui bahwa PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 di Kabupaten Klaten selama tahun 2012-2016 mengalami kenaikan dari sebesar Rp.19.102.405,71 juta pada tahun 2012, meningkat menjadi sebesar Rp.23.717.931,01 pada tahun 2016.

Sedangkan dari Tabel 2.4 dapat dilihat bahwa PDRB atas dasar Harga Berlaku di Kabupaten Klaten selama Tahun 2012-2016 mengalami kenaikan dari sebesar Rp.21.348.321,95 juta pada tahun 2012, meningkat menjadi sebesar Rp.31.558.691,07 pada tahun 2016.

### 2.1.2.2. PDRB Perkapita

PDRB per kapita dapat dijadikan salah satu indikator guna melihat keberhasilan pembangunan perekonomian di suatu wilayah. Adapun perkembangan PDRB Per Kapita di Kabupaten Klaten menunjukkan kinerja yang cenderung meningkat. PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Konstan pada tahun 2012 sebesar 16,70; pada tahun 2013 naik menjadi sebesar 17,62; dan pada tahun 2014 naik menjadi sebesar 18,56; sedangkan pada tahun 2015 naik menjadi sebesar 19,47; serta pada tahun 2016 naik menjadi sebesar 20,39. Gambaran selengkapnya Perkembangan PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Konstan di Kabupaten Klaten dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2016 dapat dilihat pada Gambar 2.4.



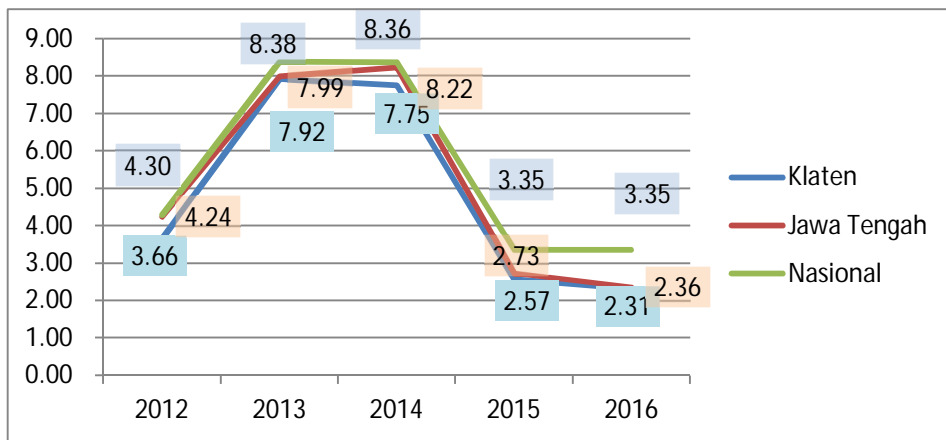
Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah 2017  
Badan Pusat Statistik Kabupaten Klaten 2017

**Gambar 2.4.**  
**Perkembangan PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 di Kabupaten Klaten dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2016**

### 2.1.2.3. Inflasi

Perkembangan inflasi di Kabupaten Klaten selama 5 (lima) tahun dari tahun 2012-2016 sangat fluktuatif. Inflasi di Kabupaten Klaten pada tahun 2012 sebesar 1,66%, atau lebih rendah dibanding tahun 2016 sebesar 0,27%. Fluktuasi Inflasi ini disebabkan oleh adanya beberapa faktor seperti adanya fluktuasi harga komoditas pangan maupun harga BBM dan menurunnya daya beli masyarakat juga

sangat berpengaruh terhadap laju inflasi. Perbandingan laju inflasi di Kabupaten Klaten selama tahun 2012-2016 dapat dilihat pada Gambar 2.5.



Sumber : Kabupaten Klaten Dalam Angka Tahun 2016.

**Gambar 2.5.**  
**Laju Inflasi di Kabupaten Klaten Tahun 2012-2016**

Berdasarkan Gambar 2.5. di atas, laju inflasi selama tahun 2012-2016 mengalami perkembangan yang bersifat fluktuatif, namun berdasarkan penggolongannya, inflasi di Kabupaten Klaten apabila dilihat termasuk ringan, karena masih di bawah 10% per tahunnya, dan juga di bawah inflasi nasional maupun provinsi. Inflasi pada tahun 2012 sebesar 3,66% dapat disampaikan cukup stabil. Untuk inflasi pada tahun 2013 mengalami peningkatan menjadi 7,92% ini dapat dikatakan sangat ekstrem dan kenaikan inflasi selama dua tahun dimaksud utamanya dipicu oleh kebijakan kenaikan harga BBM dan Tarif Dasar Listrik (TDL). Pada tahun 2012 harga BBM jenis bensin sebesar Rp.6.500,- dan solar sebesar Rp.5.500,- sedangkan pada tahun 2013 harga BBM jenis bensin menjadi sebesar Rp.8.500,- dan solar menjadi sebesar Rp.7.500,-

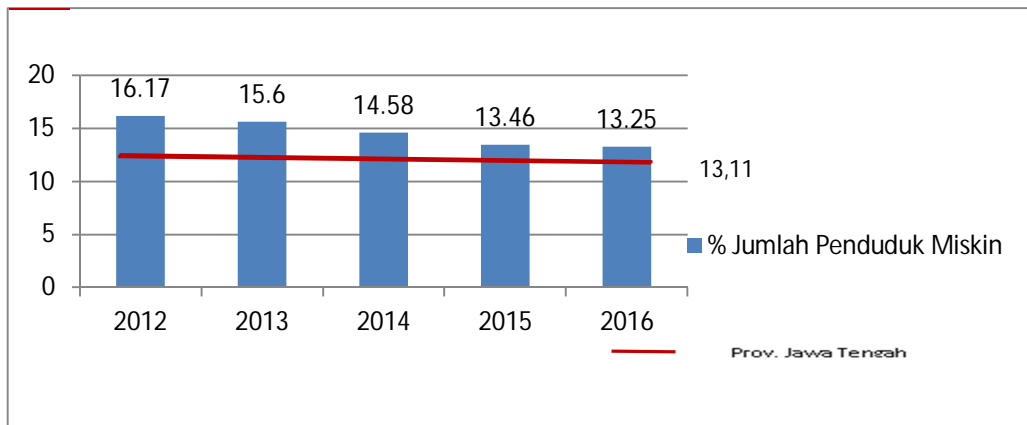
Mengingat BBM dan TDL sebagai faktor produksi utama, maka secara langsung menyebabkan perubahan harga barang-barang strategis yang sangat mempengaruhi laju inflasi. Sedangkan untuk tahun 2014, 2015 dan 2016 mengalami penurunan hal ini disebabkan oleh penurunan harga BBM pada awal tahun yang dikarenakan penurunan harga minyak mentah dunia, dan stabilnya harga bahan pokok kebutuhan sehari-hari. Inflasi tahun 2016 di Kabupaten Klaten menjadi sebesar 2,31%.

#### 2.1.2.4. Kemiskinan

Kondisi umum kemiskinan Kabupaten Klaten merupakan gambaran mengenai fakta dan permasalahan yang ada pada kondisi capaian dan perkembangan kemiskinan di Indonesia. Kondisi tersebut dapat dilihat dari capaian beberapa indikator, yaitu persentase penduduk miskin (Po), jumlah penduduk miskin, indeks kedalaman kemiskinan (P1) dan indeks keparahan kemiskinan (P2).

##### a. Persentase Penduduk Miskin

Posisi relatif persentase penduduk miskin Kabupaten Klaten Tahun 2012-2016 dapat dilihat pada Gambar 2.6.



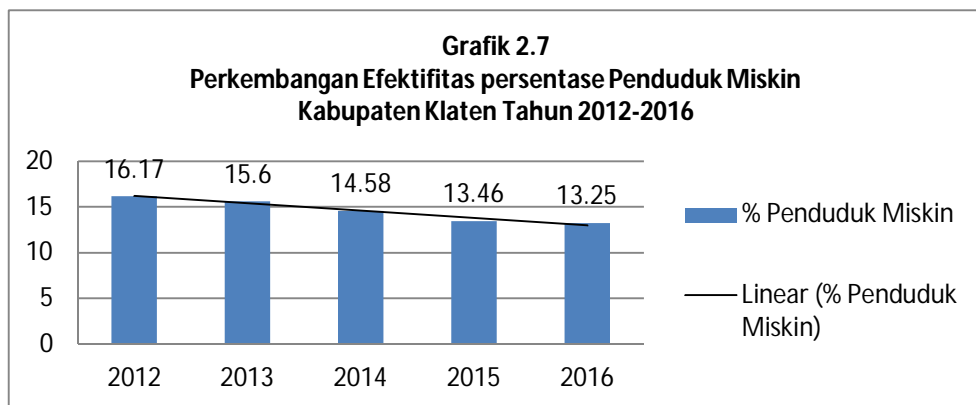
Sumber : BAPPEDA Kabupaten Klaten, 2017 (diolah)

**Gambar 2.6.**  
**Posisi Relatif Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Klaten Tahun 2012-2016**

Pada Gambar 2.6. ditunjukkan posisi relatif Persentase penduduk miskin Kabupaten Klaten pada tahun 2016 sebesar 13,25 % berada di atas rata-rata Provinsi Jawa Tengah sebesar 13,11%.

Dilihat dari perkembangannya, persentase penduduk miskin Kabupaten Klaten terus mengalami penurunan (kinerja positif), dari sebesar 16,71% pada tahun 2012 mengalami penurunan menjadi sebesar 13,25% pada tahun 2016 atau turun sebesar 3,46% selama 5 (lima) tahun terakhir.

Untuk melihat sejauh mana tingkat efektivitas penurunan persentase penduduk miskin Kabupaten Klaten dapat dilihat pada Gambar 2.7.



Sumber : Bappeda Kabupaten Klaten, 2017

Catatan : Tahun 2016 angka sementara

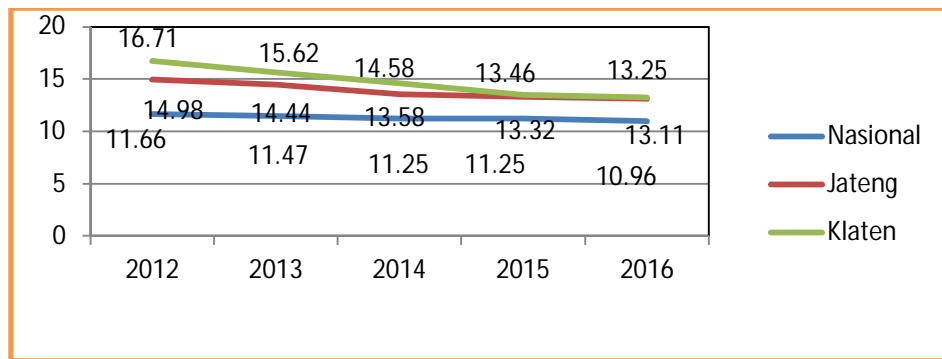
**Grafik 2.7**  
**Perkembangan Efektifitas Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Klaten Tahun 2012-2016**

Pada Grafik 2.7 ditunjukkan perkembangan efektivitas persentase penduduk miskin Kabupaten Klaten selama lima tahun terakhir mengalami penurunan menjadi sebesar 13,25 % dengan rata-rata penurunan tiap tahun sebesar 0,69 %.

Rata-rata penurunan pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 menunjukkan bahwa secara kumulatif upaya penanggulangan kemiskinan dalam periode tersebut berjalan efektif dan realisasi persentase penduduk

miskin Kabupaten Klaten pada tahun 2016 masih berada di atas rata-rata provinsi yakni 13,11%

Perkembangan relevansi persentase tingkat kemiskinan di Kabupaten Klaten dapat dilihat pada Gambar 2.8.



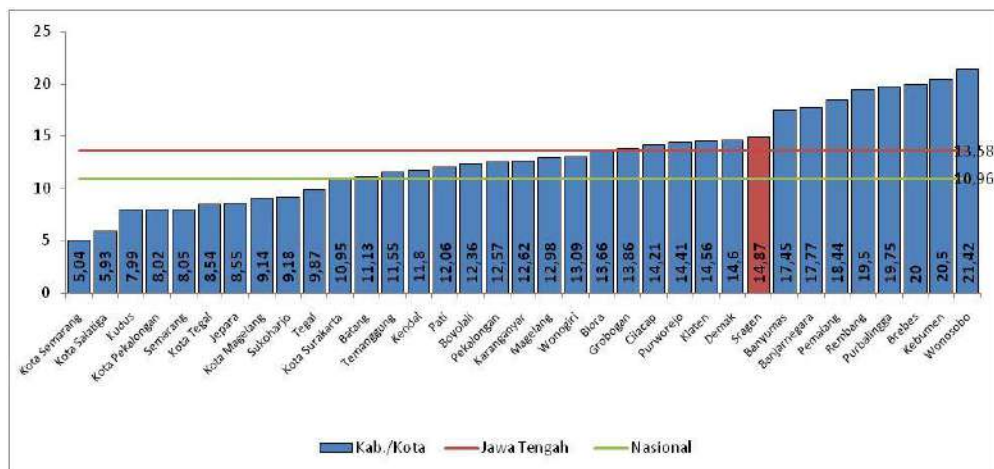
Sumber : BAPPEDA Kabupaten Klaten, 2017  
Catatan : Tahun 2016 angka sementara

**Gambar 2.8.**  
**Perkembangan Kemiskinan di Kabupaten Klaten Terhadap Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2012 – 2016**

Dilihat dari sisi penurunan dari Tahun 2012-2016 persentase penduduk miskin Kabupaten Klaten dan Provinsi Jawa Tengah mengalami perbaikan.

**b. Jumlah Penduduk Miskin**

Perkembangan posisi relatif jumlah penduduk miskin Kabupaten Klaten dibandingkan dengan Kab/kota se Jawa Tengah masih lebih tinggi dibanding rata-rata Provinsi Jawa Tengah dan berada di urutan ke-11 dari keseluruhan Kab/Kota, dan gambaran selengkapnya dapat dilihat pada Gambar 2.9.

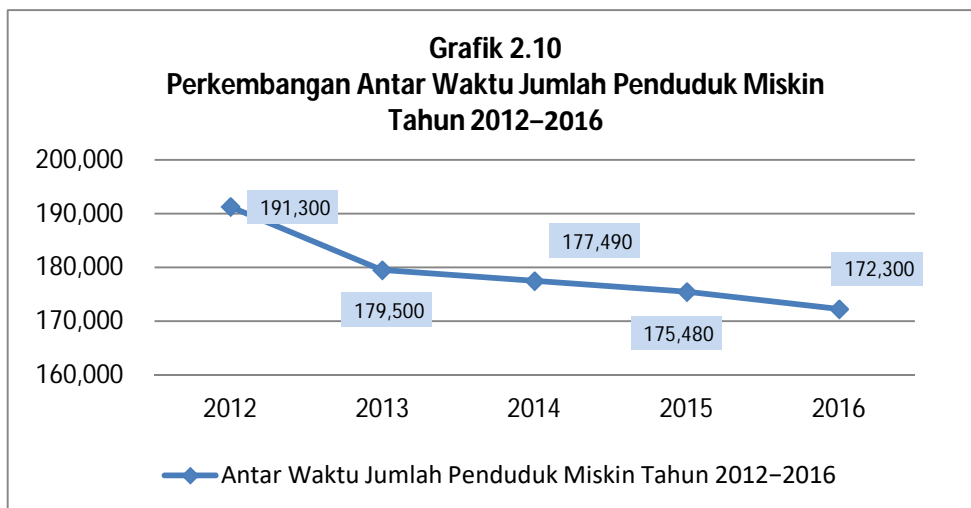


Sumber : Jawa Tengah Dalam Angka 2015

**Gambar 2.9**  
**Perkembangan Posisi Relatif Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Klaten Dibandingkan dengan Kab/Kota se-Jawa Tengah**

Sedangkan dilihat perkembangan jumlah penduduk miskin Kabupaten Klaten Tahun 2012-2016 dapat dilihat pada Grafik 2.10





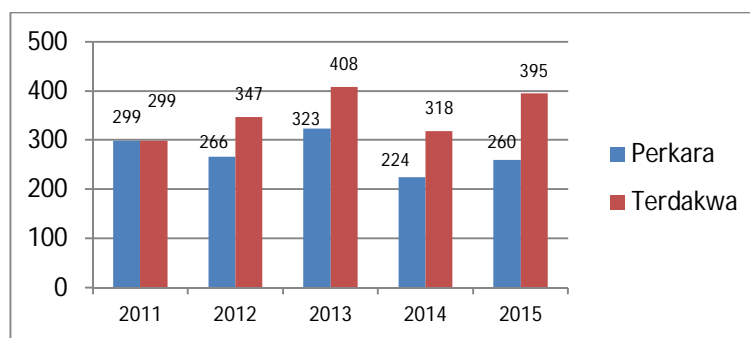
Sumber : BAPPEDA Kabupaten Klaten, 2017  
Catatan : Tahun 2016 angka sementara

**Grafik 2.10**  
**Perkembangan Antar Waktu Jumlah Penduduk Miskin Tahun 2012-2016**

Pada Grafik 2.10 ditunjukkan jumlah penduduk miskin Kabupaten Klaten terus mengalami penurunan (kinerja positif). Dalam rentang waktu 2012-2016, dari sebanyak 191.300 jiwa pada tahun 2012 mengalami penurunan menjadi sebanyak 172.300 jiwa pada tahun 2016 atau turun sebanyak 19.000 jiwa.

#### 2.1.2.5. Jumlah Tindak Pidana

Kondisi jumlah tindak pidana di Kabupaten Klaten bersifat fluktuatif, dari 299 terdakwa yang dijatuhi hukuman pada tahun 2011 menjadi 395 terdakwa yang dijatuhi hukuman pada tahun 2015. Meningkatnya jumlah terdakwa sebagai akibat tuntutan beban hidup, disamping semakin intensifnya penegakan hukum. Jumlah tindak pidana pada tahun 2011-2015 di Kabupaten Klaten, dapat dilihat pada Gambar 2.11



Sumber : Pengadilan Negeri Kabupaten Klaten, 2016

**Grafik 2.11.**  
**Jumlah Perkara dan Terdakwa di Kabupaten Klaten Tahun 2011-2015**

#### 2.1.2.6. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Berbagai program pembangunan khususnya dalam pembangunan manusia yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Klaten selama ini telah menunjukkan hasil yang cukup baik. Salah satu indikator untuk mengukur kualitas pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) adalah dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM merupakan suatu indeks komposit yang disusun dari 3 (tiga) komponen esensial untuk kehidupan manusia, yaitu: (i) Usia hidup panjang dan sehat diukur

dengan Angka harapan Hidup, (ii) Pengetahuan (*knowledge*) yang diukur dengan Rata-rata lama sekolah dan Angka harapan lama sekolah (iii) Standar hidup layak yang diukur dengan Pengeluaran Riel Per kapita. Adapun Hasil penghitungan IPM Kabupaten Klaten dapat dilihat pada Tabel 2.5

**Tabel 2.5**  
**Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**  
**di Kabupaten Klaten Tahun 2012-2015**

Indikator IPM	Tahun			
	2012	2013	2014	2015
Angka harapan Hidup (tahun)	76,47	76,52	76,54	76,55
Rata-rata lama sekolah (tahun)	7,43	7,74	7,92	8,16
Angka harapan lama sekolah (tahun)	12,12	12,27	12,74	12,84
Pengeluaran Riel Per kapita (dalam Ribuan Rp.)	10.858	10.962	10.965	11.178
IPM	71,71	72,42	73,19	73,81

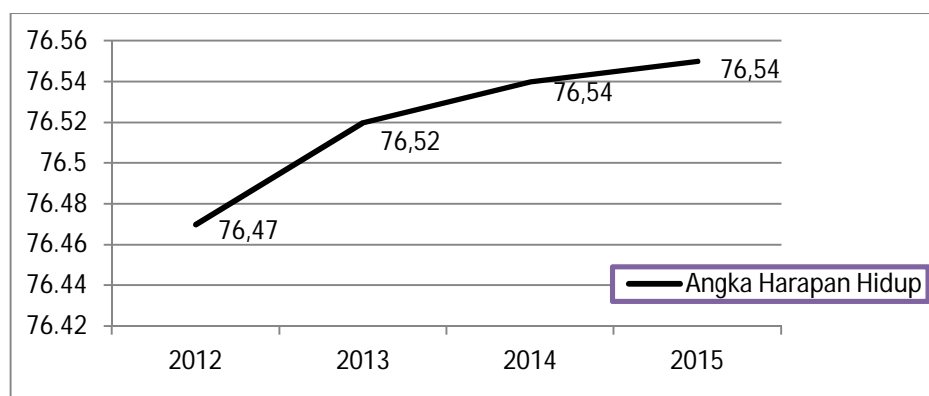
Sumber : IPM Kabupaten Klaten 2015

Dari Tabel 2.6 di atas dapat dilihat bahwa IPM di Kabupaten Klaten terus mengalami kenaikan, yaitu dari 71,71 pada tahun 2012, menjadi 72,42 pada tahun 2013, menjadi sebesar 73,19 pada tahun 2014, dan meningkat lagi menjadi sebesar 73,81 pada tahun 2015. Besaran IPM yang meningkat (walaupun masih relatif kecil) mencerminkan terjadinya peningkatan mutu/kualitas SDM di Kabupaten Klaten selama tahun 2012-2015.

Indikator pembentuk IPM secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut:

#### 1. Usia Harapan Hidup

Usia Harapan Hidup (UHH), di samping sebagai cerminan terhadap ukuran peningkatan kesejahteraan penduduk, juga menjadi indikator meningkatnya derajat kesehatan masyarakat. Selama kurun waktu 2012-2015 UHH masyarakat Kabupaten Klaten cenderung mengalami peningkatan. Hal ini disebabkan antara lain oleh semakin tingginya kesadaran masyarakat terhadap budaya hidup bersih dan sehat, termasuk upaya pemberian asupan yang semakin berkualitas terhadap anak usia dini atau anak usia Bawah Lima Tahun (BALITA). Perkembangan UHH masyarakat di Kabupaten Klaten dapat dilihat pada Gambar 2.12.

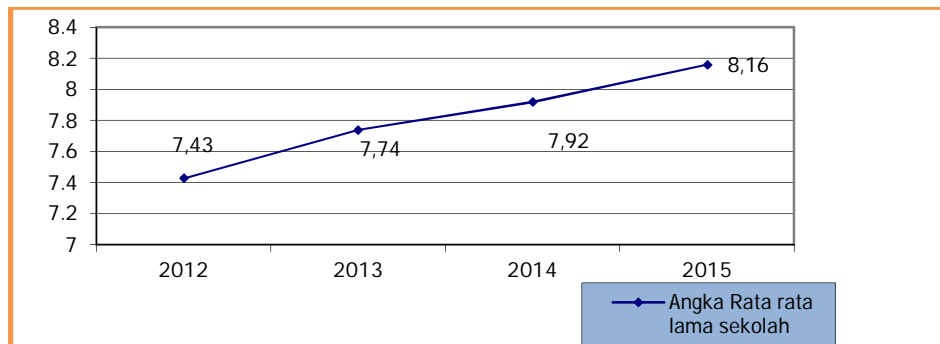


Sumber : BAPPEDA Kabupaten Klaten, 2017

**Gambar 2.12.**  
**Perkembangan Usia Harapan Hidup Masyarakat**  
**di Kabupaten Klaten Tahun 2012-2015**

## 2. Angka Rata-rata Lama Sekolah

Angka rata-rata lama sekolah di Kabupaten Klaten mengalami peningkatan dalam kurun waktu 2012-2015, yaitu dari sebesar 7,43 pada tahun 2012 menjadi sebesar 8,16 pada tahun 2015. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat partisipasi pendidikan semakin baik pada setiap jenjang pendidikan. Perkembangan angka rata-rata lama sekolah di Kabupaten Klaten dapat dilihat dapat dilihat pada Gambar 2. 13.

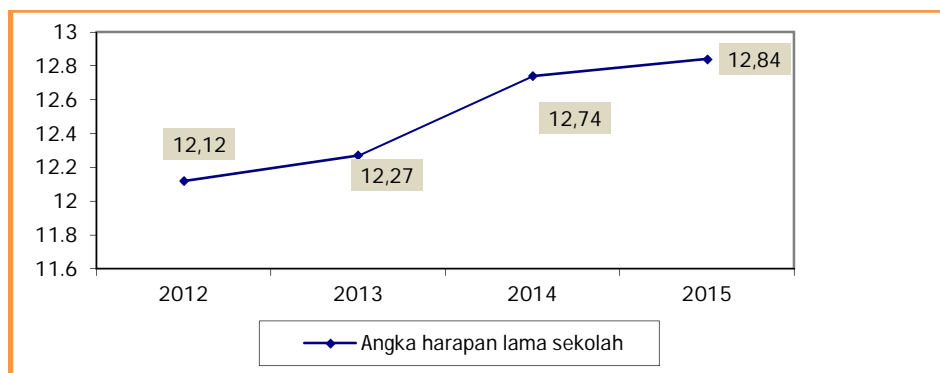


Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten, 2017

**Gambar 2.13.**  
Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah di Kabupaten Klaten Tahun 2012-2015

## 3. Angka Harapan Lama Sekolah

Angka harapan lama sekolah di Kabupaten Klaten mengalami peningkatan dalam kurun waktu 2012-2015, yaitu dari sebesar 12,12 pada tahun 2012 menjadi sebesar 12,84 pada tahun 2015. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat partisipasi pendidikan semakin baik pada setiap jenjang pendidikan. Perkembangan angka harapan lama sekolah di Kabupaten Klaten dapat dilihat dapat dilihat pada Gambar 2.14.

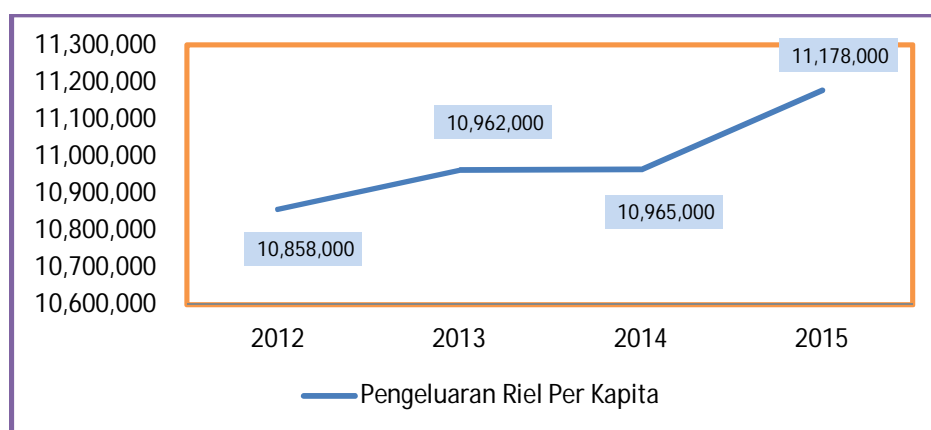


Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten 2017

**Gambar 2.14.**  
Perkembangan Angka Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Klaten Tahun 2012-2015

## 4. Pengeluaran Riil Per Kapita

Angka pengeluaran per kapita di Kabupaten Klaten bersifat fluktuatif, pada tahun 2012-2015 bersifat fluktuatif, pada tahun 2012 sebesar Rp.10.858.000,- dan pada tahun 2015 turun menjadi sebesar Rp.11.117.800,- Perkembangan angka pengeluaran riil per kapita di Kabupaten Klaten selama tahun 2012-2015 dapat dilihat pada Gambar 2.15.



Sumber : BAPPEDA Kabupaten Klaten, 2017

**Gambar 2.15.**  
**Perkembangan Pengeluaran Riel Per Kapita**  
**di Kabupaten Klaten Tahun 2012-2015**

#### 2.1.2.7. Angka Partisipasi Kasar (APK)

Angka Partisipasi Kasar (APK) di Kabupaten Klaten untuk semua jenjang pendidikan dasar dan menengah dari tahun 2012-2016 mengalami perkembangan yang bersifat fluktuatif. Jenjang pendidikan SD/MI/SDLB/Paket A tahun 2012 sudah mencapai 92,61%, seiring dengan perbaikan layanan pendidikan, dan pada tahun 2016 naik menjadi 105,23%. Adapun untuk jenjang SMP/MTs/SMPLB/Paket B tumbuh dari 94,24% pada tahun 2012, dan pada tahun 2016 menjadi 97,57%. Hal ini disebabkan karena keinginan anak usia sekolah pada jenjang SMP/MTs/SMPLB/Paket B banyak yang bersekolah dari luar daerah, juga ditunjang angka melanjutkan dan proporsi jumlah penduduk anak usia SMP/MTs/SMPLB/Paket B juga meningkat. Begitu juga untuk jenjang SMA/SMK/MA/SMALB/Paket C pada tahun 2012 sudah mencapai 77,94%, meningkat menjadi 93,12% pada tahun 2015, hal ini disebabkan karena meningkatnya kebutuhan anak usia SMA/SMK/MA/SMALB/Paket C disamping semakin baiknya peningkatan layanan pendidikan. Secara rinci, perkembangan APK di Kabupaten Klaten selama tahun 2012-2016 untuk semua jenjang pendidikan dapat dilihat pada Tabel 2.6

**Tabel 2.6**  
**Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) di Kabupaten Klaten**  
**Menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2012-2016**

No	Tahun	SD/MI/SDLB/Paket A	SMP/MTs/SMP LB/Paket B	SMA/SMK/MA/SMALB/Paket C
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	2012	92,61	94,24	77,94
2	2013	91,44	94,73	68,29
3	2014	92,27	87,26	82,74
4	2015	94,51	87,62	93,12
5	2016	105,23	97,57	93,19

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten, 2017

Dengan catatan, perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) di Kabupaten Klaten untuk semua Jenjang Pendidikan terutama di daerah perbatasan dan pedesaan sangat berpengaruh terhadap penyelenggaraan pendidikan, oleh karena itu

perlunya pemerataan mutu dan peningkatan kualitas tenaga pendidikan di semua tingkatan perlu mendapat perhatian agar penyelenggaraan pendidikan tidak terkonsentrasi di sekolah-sekolah unggulan dan perkotaan.

#### 2.1.2.8. Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka partisipasi Murni (APM) di Kabupaten Klaten untuk semua jenjang pendidikan dasar dan menengah dari tahun 2012-2016 mengalami perkembangan yang bersifat fluktuatif. Jenjang pendidikan SD/MI/SDLB/Paket A tahun 2012 sudah mencapai 77,39 %, naik menjadi 99 % pada tahun 2016. Jenjang SMP/MTs/SMPLB/Paket B pada tahun 2012 sudah mencapai 67,87% menjadi 91 % hal ini dipicu adanya anak usia sekolah pada jenjang tertentu ingin sekolah di luar daerah, yang relatif lebih baik dalam layanan penyelenggaraan pendidikannya. Begitu juga untuk jenjang SMA/SMK/MA/SMALB/Paket C pada tahun 2012 sudah mencapai 52,79 %, meningkat menjadi 79 % pada tahun 2016, hal ini disebabkan karena meningkatnya kebutuhan anak usia SMA/SMK/MA/SMALB/Paket C disamping semakin baiknya peningkatan layanan pendidikan. Secara lengkap, perkembangan APM di Kabupaten Klaten untuk semua jenjang pendidikan dapat dilihat pada Tabel 2.7.

**Tabel 2.7.**  
**Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM)**  
**Menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2012- 2016**

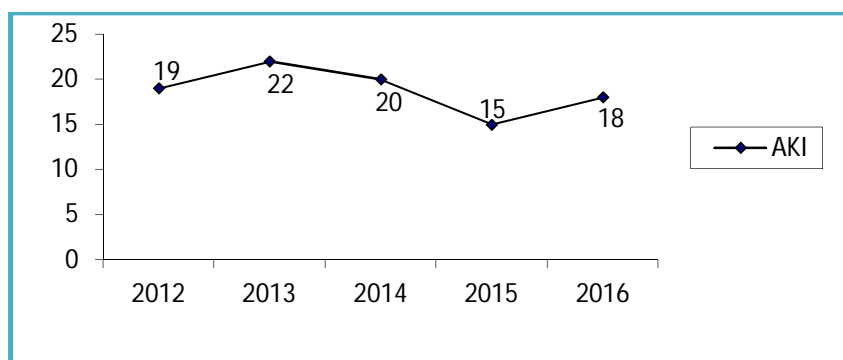
No	Tahun	SD /MI /SDLB/ Paket A	SMP/MTs/SMPLB/ Paket B	SMA/SMK/MA/ SMALB/Paket C
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	2012	77,39	67,87	52,79
2	2013	78,46	65,13	44,87
3	2014	79,13	62,48	44,08
4	2015	81,58	63,96	60,50
5	2016	99	91	79

*Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten, 2017*

Dengan catatan, perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) di Kabupaten Klaten untuk semua Jenjang Pendidikan sangat dipengaruhi kondisi masyarakat dan layanan pendidikan pada saat-saat tertentu, mengingat Klaten diapit dua kota besar, Jogjakarta dan Surakarta.

#### 2.1.2.9. Angka Kematian Ibu (AKI)

Kondisi Angka Kematian Ibu di Kabupaten Klaten dalam kurun waktu tahun 2012-2016 cenderung bersifat fluktuatif. Penyebab kematian ibu, di samping akibat hipertensi dan pendarahan, juga disebabkan oleh faktor-faktor non medis. Kondisi ini menggambarkan derajat kesehatan masyarakat perlu di tingkatkan terutama di wilayah-wilayah kecamatan dengan kasus kematian ibu yang tinggi, yang diantaranya adalah kecamatan: Wedi dan Juwiring. Perkembangan kasus kematian ibu melahirkan di Kabupaten Klaten selama Tahun 2012-2016 dapat dilihat pada Grafik 2.16

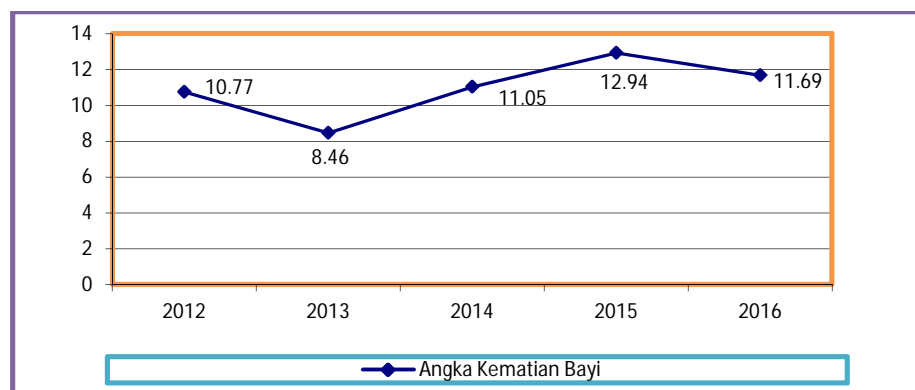


Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Klaten, 2017

**Gambar 2.16.**  
Perkembangan Kasus Kematian Ibu di Kabupaten Klaten Tahun 2012-2016

#### 2.1.2.10. Angka Kematian Bayi (AKB)

Kondisi Angka Kematian Bayi di Kabupaten Klaten dalam kurun waktu tahun 2012-2016 cenderung mengalami penurunan. Penyebab kematian bayi di samping karena pengaruh ibu dalam kondisi hipertensi dan pendarahan, juga diakibatkan oleh faktor-faktor non medis. Kondisi ini menggambarkan bahwa derajat kesehatan masyarakat perlu di tingkatkan terutama di wilayah kecamatan dengan kasus kematian ibu yang tinggi, seperti kecamatan: Bayat, Juwiring, Pedan dan Jogonalan. Perkembangan Angka Kematian Bayi di Kabupaten Klaten selama Tahun 2012-2016 dapat dilihat pada Gambar 2.17.



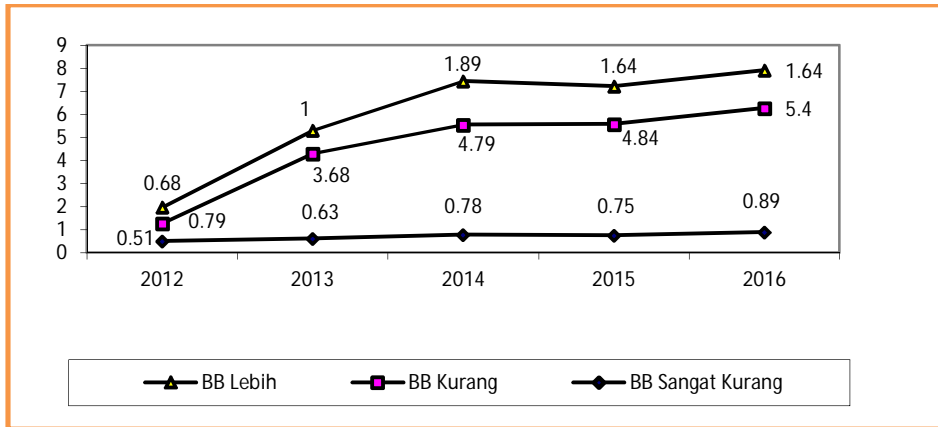
Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Klaten 2017

**Gambar 2.17.**  
Perkembangan Persentase Angka Kematian Bayi di Kabupaten Klaten Tahun 2012-2016

#### 2.1.2.11. Persentase Balita Gizi Buruk

Kondisi Persentase Balita Gizi Buruk di Kabupaten Klaten dalam kurun waktu tahun 2012-2016 cenderung bersifat fluktuatif. Penyebab balita gizi buruk karena kondisi sosial ekonomi keluarga, juga faktor medis. Kondisi ini menggambarkan derajat kesehatan masyarakat perlu di tingkatkan terutama di wilayah-wilayah kecamatan dengan kasus balita gizi buruk yang tinggi, seperti Kecamatan : Gantiwarno, Trucuk dan Jogonalan. Perkembangan Persentase Balita Gizi Buruk di Kabupaten Klaten selama Tahun 2012-2016 dapat dilihat pada Grafik 2.18



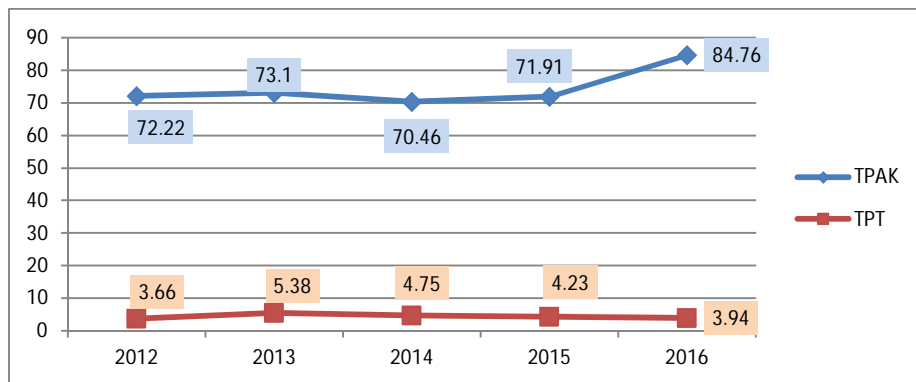


Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Klaten 2017

**Gambar 2.18.**  
Perkembangan Persentase Gizi Buruk di Kabupaten Klaten Tahun 2012-2016

#### 2.1.2.12. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kabupaten Klaten menunjukkan kecenderungan yang bersifat fluktuatif. Angka TPAK yang pada tahun 2012 sebesar 72,22%, pada tahun 2016 meningkat menjadi sebesar 84,76%. Di lain pihak, tingkat pengangguran terbuka bersifat fluktuatif pada tahun 2012 sebesar 3,66%, dan pada tahun 2016 turun menjadi 3,94%. Gambaran Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kabupaten Klaten dapat dilihat pada Gambar 2.19.



Sumber : BAPPEDA Kabupaten Klaten 2017

**Gambar 2.19.**  
Perkembangan TPAK dan TPT di Kabupaten Klaten Tahun 2012-2016

#### 2.1.2.13. Fokus Seni Budaya dan Olahraga

Perkembangan seni dan budaya di Kabupaten Klaten stabil. Bidang olahraga perkembangannya ditunjukkan dengan meningkatnya jumlah klub olahraga dan gedung olahraga. Perkembangan seni, budaya dan olahraga di Kabupaten Klaten dapat dilihat pada Tabel 2.8

**Tabel 2.8.**  
**Perkembangan Seni, Budaya dan Olahraga**  
**di Kabupaten Klaten Tahun 2012-2016**

No	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(1)	(2)	(3)
1	Jumlah Kelompok Kesenian	117	177	122	122	122
2	Benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	20	20	25	25	25
3	Jumlah Klub Olahraga	16	16	16	16	16
4	Jumlah prasarana olahraga	1	1	1	1	1
5	Persentase cabang olahraga yang mendapatkan medali tingkat nasional				17,14	15

Sumber : *Disbudparpora Kabupaten Klaten, 2017*

### 2.1.3. Aspek Pelayanan Umum

Gambaran kondisi Kabupaten Klaten pada aspek pelayanan umum dijabarkan dalam Fokus layanan wajib dan layanan pilihan, dan gambaran selengkapnya diuraikan sebagai berikut :

#### 2.1.3.1. Fokus Layanan Wajib

##### 1. Pendidikan

##### a. Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Angka Partisipasi Sekolah di Kabupaten Klaten dilihat pada tahun 2013-2014 mempunyai kecenderungan peningkatan pada jenjang SMP/MTs/SMPLB/Paket B, pada tahun 2013 mencapai 72,67% menjadi 86,52% pada tahun 2014, sedangkan jenjang SMA/SMK/MA/ SMALB/Paket C pada tahun 2013 mencapai 48,37% menjadi 77,79% pada tahun 2014. Gambaran Angka Partisipasi Sekolah di Kabupaten Klaten Tahun 2011-2015 dapat dilihat pada Tabel 2.9.

**Tabel 2.9**  
**Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS)**  
**di Kabupaten Klaten Menurut Jenjang Pendidikan**  
**Tahun 2012 - 2016**

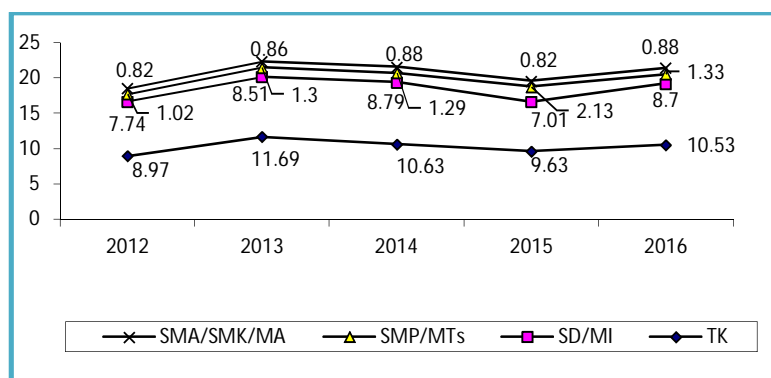
No	Tahun	SD /MI /SDLB /Paket A	SMP/MTs/SM PLB/Paket B	SMA/SMK/MA/ SMALB/Paket C
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	2012	119,63	93,65	57,28
2	2013	88,81	72,67	48,37
3	2014	82,24	86,52	67,33
4	2015	93,83	86,83	51,51

Sumber : *Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten, 2016*

##### b. Rasio Ketersediaan Sekolah

Rasio tersediaan sekolah menunjukkan jumlah sekolah per 10.000 jumlah penduduk usia sekolah. Kondisi di Kabupaten Klaten dari semua jenjang pada tahun 2012-2016 bersifat fluktuatif. Gambaran rasio ketersediaan sekolah di Kabupaten Klaten Tahun 2012-2016 selengkapnya dapat dilihat pada Gambar 2.20.





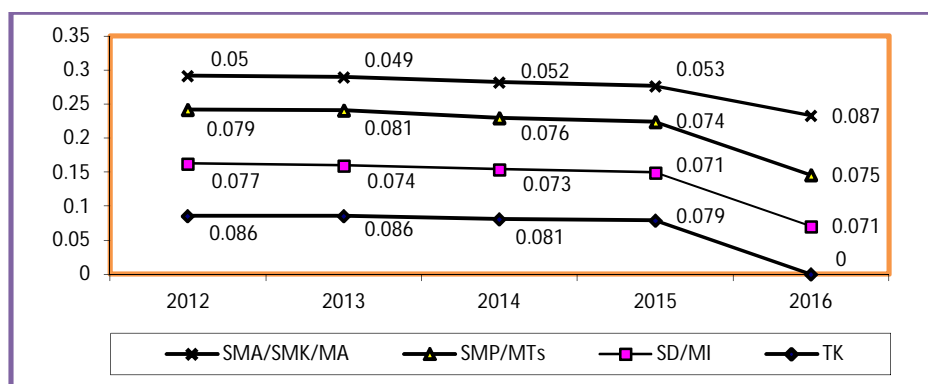
Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten, 2017

Gambar 2.20.

**Rasio Ketersediaan Sekolah  
di Kabupaten Klaten Tahun 2012-2016**

c. Rasio Guru dan Murid

Rasio guru dan murid menunjukkan perbandingan antara guru dan murid per 10.000 yang mengidentifikasi ketersediaan tenaga pengajar. Kondisi di Kabupaten Klaten dari semua jenjang pada Tahun 2012-2016 cenderung menurun, hal ini disebabkan karena banyak guru yang pensiun, sementara itu formasi pengadaan guru baru tidak sebanding dengan kebutuhan tenaga pendidikan yang dibutuhkan, dan adapun gambaran selengkapnya Rasio Guru dan Murid di Kabupaten Klaten Tahun 2012-2016 dapat dilihat pada Gambar 2.21.



Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten, 2017

Gambar 2.21.

**Rasio Guru dan Murid di Kabupaten Klaten  
Tahun 2012-2016**

d. Fasilitas Pendidikan

Selama lima tahun terakhir (tahun 2012-2016) ruang kelas dalam kondisi baik semakin meningkat, hal ini tidak terlepas dari adanya dana alokasi khusus bidang pendidikan, dan bantuan keuangan dari pemerintah provinsi. Sebagai gambaran perkembangan persentase ruang kelas dalam kondisi baik di Kabupaten Klaten tahun 2012-2016 dapat dilihat pada Tabel 2.10.

Tabel 2.10.

**Perkembangan Persentase Ruang Kelas Dalam Kondisi Baik  
di Kabupaten Klaten Tahun 2012-2016**

Uraian	Satuan	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(7)
Sekolah pendidikan SD/MI dalam kondisi baik	%	67,82	71,55	69,67	69,29	73
Sekolah pendidikan SMP/MTS dan SMA/SMK/MA dalam kondisi baik	%	89,57	89,20	89,61	88,23	89

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten, 2017



e. Angka Putus Sekolah

Selama lima tahun terakhir (tahun 2012-2016) angka putus sekolah yang diukur dengan jumlah anak putus sekolah bersifat fluktuatif, sekalipun adanya dana alokasi khusus bidang pendidikan, dan bantuan keuangan dari pemerintah provinsi sedikit banyak menekan jumlah anak putus sekolah. Sebagai gambaran perkembangan persentase angka putus sekolah di Kabupaten Klaten tahun 2012-2016 dapat dilihat pada Tabel 2.11.

**Tabel 2.11**  
**Perkembangan Persentase Angka Putus Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Klaten Tahun 2012-2016**

Uraian	Satuan	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Angka Putus Sekolah Tk. Pendidikan SD/MI	Kasus	58	56	28	22	33
Angka Putus Sekolah Tk. Pendidikan SMP/MTS	Kasus	104	59	24	42	43
Angka Putus Sekolah Tk. Pendidikan SMA/MA	Kasus	328	318	247	256	283

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten, 2017

Berdasarkan Tabel 2.11 di atas tinggi angka putus sekolah, untuk jenjang pendidikan SMK terutama di SMK swasta, mengkonidisikan bahwa kualitas lembaga yang bersangkutan hanya dapat memperoleh siswa yang kurang berprestasi, disamping layanan pendidikan kejuruan belum bisa memberi jaminan kebutuhan lapangan kerja. Dipihak lain, anak usia sekolah jenjang pendidikan SMA/MA/SMK lebih ingin cepat bekerja di sektor non formal (pekerja/tukang perumahan) daripada sekolah formal berlama-lama.

f. Guru yang Memenuhi Kualifikasi D4/SI

Selama lima tahun terakhir (tahun 2012-2016) guru yang memenuhi kualifikasi D4/SI semakin naik, hal ini tidak terlepas dari adanya dana sertifikasi pendidik formal, dan bantuan keuangan dari pemerintah provinsi untuk meningkatkan kapasitasnya. Sebagai gambaran perkembangan Guru yang Memenuhi Kualifikasi D4/SI di Kabupaten Klaten tahun 2012-2016 dapat dilihat pada Tabel 2.12

**Tabel 2.12**  
**Guru yang Memenuhi Kualifikasi D4/SI Menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Klaten Tahun 2012-2016**

Uraian	Satuan	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Jenjang Pendidikan SD/MI	%	63,47	63,53	77,50	79,09	
Jenjang Pendidikan SMP/MTS	%	88,24	89,54	90,86	92,09	
Jenjang Pendidikan SMA/MA/SMK	%	94,75	95,10	96,67	96,71	

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten, 2017

g. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Angka partisipasi kasar penduduk yang terlayani pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) selama lima tahun terakhir (tahun 2012-2016) cenderung mengalami peningkatan, hal ini mengindikasikan bahwa kebutuhan



pendidikan anak usia dini menjadi budaya dan kebutuhan bagi orang tua untuk menyekolahkan anaknya dengan berbagai alasan, dan seiring dengan munculnya kebijakan pendidikan non formal bagi pengembangan Anak Usia Dini (PAUD). Sebagai gambaran Perkembangan Persentase Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Klaten Tahun 2012-2016 dapat dilihat pada Tabel 2.13

**Tabel 2.13**  
**Perkembangan Persentase Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Klaten Tahun 2012-2016**

Uraian	Tahun				
	2012	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
APK PAUD	54,36	55,73	58,32	92,19	92,37

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten, 2017

## 2. Kesehatan

### a. Rasio Puskesmas dan Puskesmas Pembantu

Proporsi puskesmas dan puskesmas pembantu di Kabupaten Klaten Tahun 2012-2016 cenderung tetap, hal ini menunjukkan bahwa pelayanan kesehatan kepada masyarakat didominasi Puskesmas sebagai ujung pelayanan kesehatan dasar kepada masyarakat, adapun gambaran Rasio Puskesmas, Puskesmas Keliling, Pustu per Satuan Penduduk secara rinci dapat dilihat pada Tabel 2.14

**Tabel 2.14**  
**Rasio Puskesmas, Puskesmas Keliling, Pustu per Satuan Penduduk**

Tahun	Puskesmas		Puskesmas Keliling		Pustu	
	Jumlah	Rasio	Jumlah	Rasio	Jumlah	Rasio
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2012	34	0,003	34	0,003	86	0,007
2013	34	0,003	34	0,003	86	0,007
2014	34	0,003	34	0,003	86	0,007
2015	34	0,003	34	0,003	86	0,007
2016	34	0,003	34	0,003	86	0,007

Sumber : Dinas Kesehatan, 2017

### b. Rasio Dokter

Proporsi dokter umum di Kabupaten Klaten tahun 2012-2016 lebih besar dibanding dokter spesialis dan dokter gigi, hal ini menunjukkan bahwa pelayanan kesehatan kepada masyarakat masih didominasi dokter umum sebagai ujung pelayanan kesehatan dasar kepada masyarakat, adapun gambaran Rasio Dokter Per Satuan Penduduk secara rinci dapat dilihat pada Tabel 2.15.

**Tabel 2.15.**  
**Rasio Dokter Per Satuan Penduduk**

Tahun	Dokter Umum		Dokter Spesialis		Dokter Gigi	
	Jumlah	Rasio	Jumlah	Rasio	Jumlah	Rasio
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2012	218	0,015	48	0,003	33	0,002
2013	138	0,030	38	0,002	34	0,002
2014	146	0,020	29	0,002	27	0,002
2015	115	0,078	41	0,028	19	0,0128
2016	352	0,237	110	0,074	97	0,0653

Sumber : Dinas Kesehatan, 2017

c. Cakupan Desa/Kelurahan UCI

Cakupan desa/kelurahan *Universal Child Immunisation* di Kabupaten Klaten tahun 2011-2015 cenderung lebih meningkat hal ini menunjukkan bahwa pelayanan kesehatan kepada cakupan pelayanan kesehatan dasar kepada masyarakat lebih baik, adapun gambaran Cakupan Desa/Kelurahan UCI secara rinci dapat dilihat pada Tabel 2.16

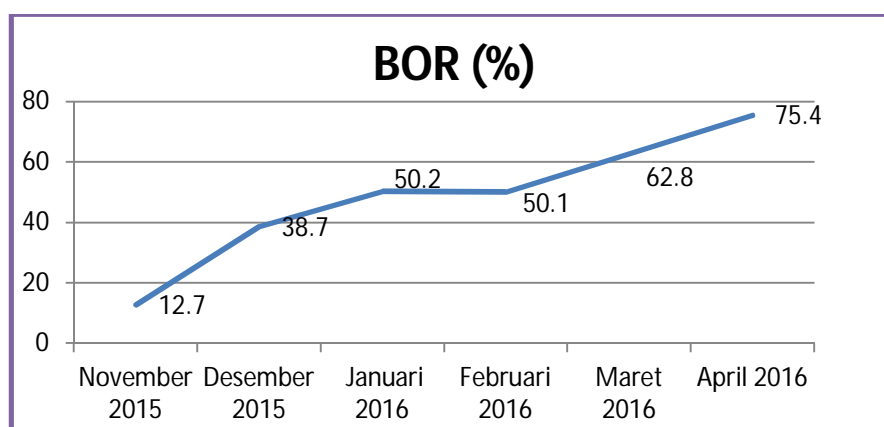
**Tabel 2.16**  
**Cakupan Desa/Kelurahan UCI**

Tahun	Jumlah desa/kel	Jumlah ds/kel UCI	Cakupan
(1)	(2)	(3)	(4)
2012	401	401	100 %
2013	401	401	100 %
2014	401	401	100 %
2015	401	401	100 %
2016	401	401	100 %

Sumber : Dinas Kesehatan, 2017

d. Cakupan Pelayanan RSUD Bagas Waras

RSUD Bagas Waras ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2014. Sedangkan berdasarkan Keputusan Bupati Klaten Nomor 445/301 Tahun 2015 tentang Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, dan untuk mendukung operasional RSUD Bagas Waras ditertibkan Keputusan Kepala Kantor Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Klaten Nomor 503.24/002/OP/2015/29 tentang Pemberian Izin Operasional Rumah Sakit. Adapun kinerja pelayanan RSUD Bagas Waras diukur dari indikator BOR (*Persentase pemakaian tempat tidur pada satuan waktu tertentu*) per November 2015 s/d April 2016 dapat dilihat pada Gambar 2.22.



Sumber : RSUD Bagas Waras, 2016

**Gambar 2.22.**  
**Indikator BOR**  
**(Persentase pemakaian tempat tidur pada satuan waktu tertentu)**

Disamping itu pada tahun 2016, jumlah kunjungan pasien sebanyak 43.875 jiwa dengan perincian: 1). Rata-rata kunjungan rawat inap sebanyak 5.740 orang/tahun (atau rata-rata 16 orang/hari), 2). Rata-rata kunjungan rawat jalan sebanyak 38.135 orang/tahun (atau rata-rata 104 orang/hari), dan 3). Rata-rata kunjungan IGD sebanyak 6.023 orang/tahun (atau rata-rata 16 orang/hari).

### 3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

#### a. Prasarana jalan

Total panjang jalan di Kabupaten Klaten yang termasuk ke dalam kategori jalan negara 45,272 km, jalan provinsi sepanjang 34,238 km dan jalan kabupaten sepanjang 777 km. Pelayanan prasarana jalan berdasarkan pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 1/PRT/M/2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Dengan demikian pengukuran kinerja SKPD DPU dan ESDM mengacu ketentuan tersebut, mengingat adanya ketersediaan data base dan target capaian yang telah ditetapkan. Kondisi prasarana jalan Kabupaten Klaten hingga Tahun 2015 sebagai berikut:

#### (1). Jaringan Jalan

- (a). Aksesibilitas, dengan indikator tersedianya jalan yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan dalam wilayah kabupaten/kota.
- (b). Mobilitas, dengan indikator tersedianya jalan yang memudahkan masyarakat per individu melakukan perjalanan. Tingkat mobilitas jaringan jalan dilihat dari rasio antara jumlah total panjang jalan yang menghubungkan semua Pusat Kegiatan terhadap jumlah total penduduk Kabupaten Klaten dalam satuan km/10.000 jiwa. Jumlah penduduk Kabupaten Klaten pada tahun 2015 sebanyak 1.480.271 jiwa. Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 1/PRT/M/2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, rasio panjang jalan dibandingkan dengan jumlah penduduk minimal untuk suatu wilayah yang kepadatannya 1000 s/d 5000 jiwa/km<sup>2</sup> adalah 3 km per 10.000 jiwa. Pencapaian SPM indeks mobilitas pada tahun 2015 sudah mencapai 174,33 termasuk kategori 1 dengan tingkat kerapatan penduduk < 100 jiwa/km<sup>2</sup>.
- (c). Keselamatan, dengan indikator tersedianya jalan yang menjamin pengguna jalan berkendara dengan selamat. Berdasarkan pencapaian dan penerapan SPM pada tahun 2015 baru mencapai 58,16% dan sesuai penetapan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 1/PRT/M/2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada tahun 2014 minimal harus mencapai 60%

#### (2). Ruas Jalan

- (a). *kondisi jalan*, dengan indikator tersedianya jalan yang menjamin kendaraan dapat berjalan dengan selamat dan nyaman. Berdasarkan pencapaian dan penerapan SPM pada tahun 2015 baru mencapai 67,65 % dan sesuai penetapan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 1/PRT/M/2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada tahun 2014 minimal harus mencapai 60%, artinya kondisi jalan sudah melampaui target yang ditetapkan.
- (b). *kecepatan*, dengan indikator tersedianya jalan yang menjamin perjalanan dapat dilakukan sesuai dengan kecepatan rencana. Berdasarkan pencapaian dan penerapan SPM pada tahun 2015 sudah



mencapai 76,65 % dan sesuai penetapan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 1/PRT/M/2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada tahun 2014 minimal harus mencapai 60%, dengan kondisi ini Klaten sudah melampaui.

b. Prasarana Sumber Daya Air

Luas area layanan irigasi di Kabupaten Klaten sebesar 1.608 ha yang tercakup dalam Daerah Irigasi (DI). Secara kewenangan, ada 2 (dua) DI yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, 5 (lima) DI yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan 478 DI yang menjadi kewenangan Kabupaten Klaten. Dengan pembagian kewenangan itu, maka pengelolaan irigasi dilakukan dari APBN, APBD Provinsi Jawa Tengah dan APBD Kabupaten Klaten maupun yang bersumber dari dana desa. Pengelolaan sistem irigasi meliputi prasarana irigasi, air irigasi, manajemen irigasi, kelembagaan pengelolaan irigasi, dan sumber daya manusia.

c. Pelayanan Air Bersih Dan Sanitasi

Cakupan pelayanan air bersih dan sanitasi, khususnya jamban sampai dengan tahun 2015 sudah mencapai target *Millenium Development Goal's*. Capaian air bersih tahun 2015 mencapai 80,8 %, dengan perincian untuk wilayah perkotaan 89,89 % dan perdesaan 71,34 %.

Sedangkan cakupan akses sanitasi telah sampai 84,8 % akses dengan perincian 86 % wilayah perkotaan dan 71,34 % wilayah perdesaan. Cakupan Pelayanan Air Bersih dan Sanitasi di Kabupaten Klaten Tahun 2011-2015 dapat lihat pada Tabel 2.17.

**Tabel 2.17**  
**Cakupan Pelayanan Air Bersih dan Sanitasi**  
**di Kabupaten Klaten Tahun 2011-2015**

NO	SEKTOR	SKALA	Capaian Tahun				
			2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Air Minum	Kabupaten	945.906	960.981	987.075	1.012.456	1.060.614
			%	72,15	73,30	75,29	77,23
		Perkotaan	396.221	402.256	426.142	437.568	438.126
			%	80,44	81,67	86,52	88,84
		Perdesaan	549.685	558.725	560.933	574.888	622.488
			%	67,16	68,26	68,53	70,24
2	Sanitasi	Kabupaten	772.455	851.079	921.757	1.059.933	1.111.744
			%	58,92	64,92	70,31	80,85
		Perkotaan	311.231	348.256	384.523	379.206	428.530
			%	63,19	70,70	78,07	76,99
		Perdesaan	461.224	502.823	537.234	680.727	683.214
			%	56,35	61,43	65,64	83,17

Sumber : RAD-AMPL 2015-2019

Capaian kinerja untuk tahun 2016 sudah mencapai 87,2% (dari total jumlah penduduk sebanyak 1.300.706 jiwa). Sesuai Rencana Aksi Daerah Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Tahun 2015-2019, diharapkan cakupan ini dapat meningkat menjadi 100% untuk air minum dan 100 % untuk sanitasi pada



tahun 2019. Selain itu, berbagai program juga diarahkan untuk mencapai target akses universal (*universal acces*), yakni tercapainya akses 100 persen air minum dengan perincian 85 persen jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan (BJP) terlindungi dan 15 persen BJP tak terlindungi.

Upaya pemenuhan akses universal khususnya terkait air minum dan sanitasi dilakukan melalui PDAM, optimalisasi Dana Desa dan Alokasi Dana Desa, CSR, maupun program berbasis masyarakat seperti Pamsimas, program Kotaku, Sanimas, USRI dan program lainnya.

#### **4. Perumahan dan Kawasan Permukiman**

Dalam aspek penyediaan sarana permukiman yaitu hunian, tantangan yang dihadapi adalah mencukupi kebutuhan hunian baru bagi penduduk Kabupaten Klaten. Keseluruhan lahan yang ada, tidak mungkin untuk dibangun sebagai kawasan permukiman, oleh karenanya Pemerintah Kabupaten Klaten harus melakukan pembatasan kawasan untuk pembangunan perumahan, dan melakukan optimalisasi pemanfaatan lahan dengan pola pembangunan vertikal terutama pada kawasan-kawasan permukiman yang padat.

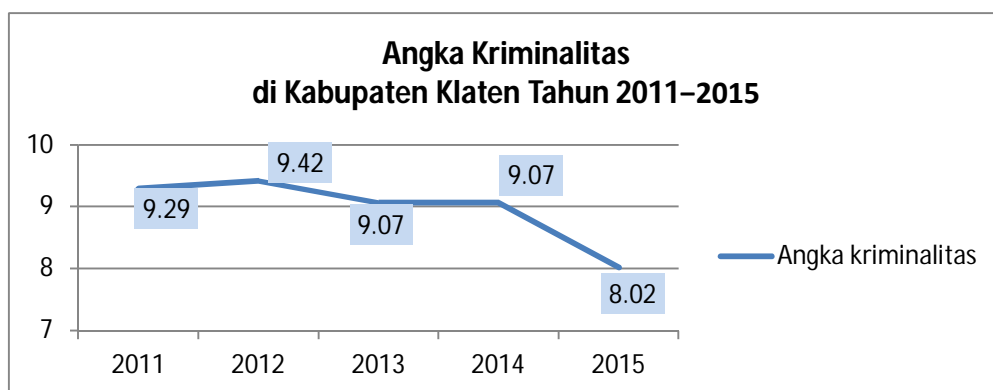
Menghadapi tantangan dalam rangka peningkatan prasarana dasar permukiman khususnya kawasan permukiman padat, maka harus ditempuh dengan berbagai upaya pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kualitas lingkungan permukimannya. Masyarakat perlu ditingkatkan kesadarannya untuk mampu memelihara prasarana dasar permukiman yang ada di lingkungannya, dengan demikian sumber daya manusia di tingkat pemerintahan desa dan kelurahan secara bertahap ditingkatkan kemampuannya, selain berkonsentrasi mengurus masalah administrasi pemerintahan juga mampu memberdayakan masyarakat. Rumah tidak permanen masih relatif besar dan menjadi permasalahan tersendiri. Sementara ini tercatat sebanyak 379.404 unit rumah, dengan perincian: untuk tempat tinggal sebanyak 307.713 unit, campuran sebanyak 48.532 unit, dan bukan tempat tinggal sebanyak 23.159 unit.

Sedangkan jumlah rumah tidak layak huni pada tahun 2015 sebanyak 24.775 unit, dan pada tahun 2016 telah diperbaiki sebanyak 1087 unit.

#### **5. Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat**

Urusan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat dilaksanakan untuk mendukung peningkatan stabilitas sosial politik melalui penciptaan kondusivitas daerah, peningkatan wawasan kebangsaan dan ideologi negara, peningkatan kesadaran politik dan demokratisasi, serta peningkatan kesadaran bela negara. Bentuk kegiatan yang dilaksanakan diantaranya : koordinasi pengamanan wilayah, optimalisasi peran Peningkatan Kinerja Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA), Forum Kerukunan Umat beragama (FKUB), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Toma/ga dan lembaga lainnya, Penegakan Perda, Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan, dan Pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan. Angka kriminalitas di Kabupaten Klaten selama tahun 2011-2015 sebagaimana Gambar 2.23.





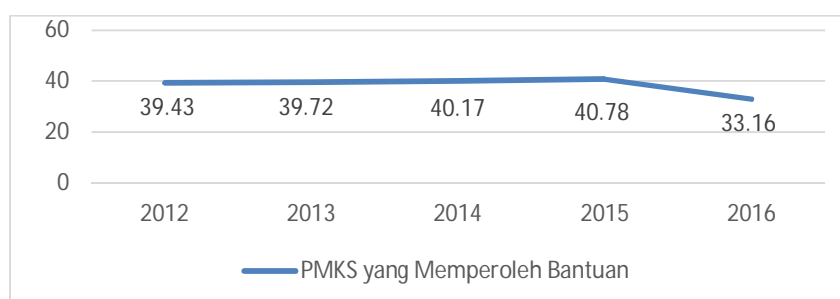
Sumber : Pengadilan Negeri Klaten 2017, (diolah)

**Gambar 2.23.**  
**Angka Kriminalitas di Kabupaten Klaten Tahun 2011-2015**

Berdasarkan Grafik 2.23 di atas dapat diartikan pada tahun 2015 tercatat sebanyak 260 perkara yang dapat diselesaikan dari 324 perkara. Kejadian ini juga mengingat luas wilayah 65.556 ha (655,56 km<sup>2</sup>) yang mencakup 26 Kecamatan, 391 Desa serta 10 Kelurahan, sementara ini diukur dari jumlah Linmas per jumlah 10.000 penduduk baru pada kisaran 89,83 dengan rasio Pos Siskamling per jumlah penduduk sudah mencapai kisaran angka 2,49, dan cakupan penegakan Perda baru mencapai 90,91 hal ini disebabkan karena luasan wilayah, jumlah penduduk serta kompleksitas permasalahan kemasyarakatan tidak sebanding dengan jumlah Linmas. Sehingga perlunya pemberdayaan masyarakat dalam ikut menjaga ketentraman dan ketertiban untuk menekan angka kriminalitas menjadi alternatif dalam menjaga kondusivitas daerah.

## 6. Sosial

Pengentasan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PPMKS) merupakan salah satu fokus pembangunan daerah di Kabupaten Klaten hingga saat ini. Program-kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka peningkatan perlindungan sosial belum dapat mengatasi permasalahan PMKS secara keseluruhan, namun telah menunjukkan perkembangan ke arah yang positif. Hal ini ditunjukkan kinerja layanan sosial diukur dengan PMKS yang memperoleh bantuan, dan persentase PMKS skala kabupaten/kota yang menerima bantuan program pemberdayaan masyarakat melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya. Gambaran PMKS yang memperoleh bantuan dapat dilihat pada Gambar 2.24.



Sumber : Dinas Sosial, PP dan PA Kabupaten Klaten, 2017

**Gambar 2.24.**  
**PMKS yang Memperoleh Bantuan**





Berdasarkan Grafik 2.24 di atas dapat dijelaskan bahwa, PMKS yang memperoleh bantuan sosial belum bisa memenuhi target karena keterbatasan pembiayaan dari sebanyak 119.489 penyandang PMKS baru bisa ditangani sebanyak 48.729 PMKS Begitu pula upaya penanganan penyandang penderita cacat juga cenderung bersifat fluktuatif. Gambaran jumlah penderita cacat menurut kecamatan dan jenisnya dapat dilihat pada Tabel 2. 18.

**Tabel 2.18.**  
**Penanganan Penyandang Penderita Cacat**  
**Menurut Kecamatan dan Jenis di Kabupaten Klaten Tahun 2015**

Kecamatan	Cacat Tubuh	Cacat Netra	Cacat Mental	Cacat Rungu dan Wicara	Cacat Ganda	Cacat Mental eks psikotik
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
01 Prambanan	1	3	281	-	1	9
02 Gantiwarno	-	-	355	-	-	-
03 Wedi	20	107	322	76	268	35
04 Bayat	22	58	154	39	134	6
05 Cawas	24	24	62	42	59	21
06 Trucuk	14	14	241	12	12	15
07 Kalikotes	17	43	86	25	68	20
08 Kebonarum	1	9	35	2	22	39
09 Jogonalan	7	13	33	4	16	27
10 Manisrenggo	25	21	63	21	46	62
11 Karangnongko	39	4	37	5	-	10
12 Ngawen	-	24	74	28	7	35
13 Ceper	10	39	132	33	69	97
14 Pedan	10	37	58	11	34	35
15 Karangdowo	3	54	80	31	28	42
16 Juwiring	14	18	30	17	11	25
17 Wonosari	257	-	-	-	-	1
18 Delanggu	9	12	98	14	9	52
19 Polanharjo	5	35	109	26	35	17
20 Karanganom	16	46	74	22	35	57
21 Tulung	-	32	67	26	17	27
22 Jatinom	16	50	212	37	62	96
23 Kemalang	24	37	172	14	60	4
24 Klaten Selatan	-	15	16	12	2	24
25 Klaten Tengah	14	21	36	20	17	32
26 Klaten Utara	13	6	43	6	11	9
<b>Jumlah 2015</b>	<b>561</b>	<b>722</b>	<b>2.870</b>	<b>523</b>	<b>1023</b>	<b>797</b>
2014	2.810	1.020	1.697	995	481	984
2013	2.436	850	1.049	714	383	811
2012	2.917	1.323	1.280	1.078	390	1.032
2011	2.308	1.097	1.032	664	220	836

Sumber : Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Klaten, 2016

Kebersamaan dari semua pihak untuk mengurangi angka PMKS, khususnya peran pemerintah daerah, keterlibatan masyarakat baik secara langsung maupun melalui kelompok-kelompok masyarakat akan membuahkan hasil yang maksimal.

## 7. Ketenagakerjaan

Kualitas dan efektifitas Sumber Daya Manusia (SDM) mempunyai korelasi positif yang erat dengan suksesnya program pembangunan. Dalam hal ini gambaran profil SDM merupakan suatu informasi untuk mengevaluasi pembangunan ekonomi pada tahap sebelumnya, dan merencanakan tahapan pembangunan berikutnya. Masalah angkatan kerja adalah masalah yang perlu mendapat perhatian besar dalam melakukan perencanaan pembangunan. Karakteristik angkatan kerja ini sangat besar pengaruhnya bagi kesejahteraan penduduk, terutama jika dilihat secara ekonomi makro.



Proporsi pengangguran terbuka dari angkatan kerja berguna sebagai acuan pemerintah bagi pembukaan lapangan kerja baru. Di samping itu, trend indikator ini akan menunjukkan keberhasilan program ketenagakerjaan dari tahun ke tahun. Secara teori, penduduk dapat dikategorikan menjadi 2 (dua), yaitu: (i) penduduk usia kerja, dan (ii) penduduk bukan usia kerja, seperti pada Gambar 2.25.



**Gambar 2.25.**  
**Pembagian Penduduk Berdasarkan Usia Kerja, Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan Kerja.**

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kabupaten Klaten menunjukkan kecenderungan yang bersifat fluktuatif. Angka TPAK yang pada tahun 2012 sebesar 72,22%, pada tahun 2016 meningkat menjadi sebesar 84,76%. Di lain pihak, tingkat pengangguran terbuka bersifat fluktuatif pada tahun 2012 sebesar 3,66%, dan pada tahun 2016 turun menjadi 3,94%. Gambaran Perkembangan Ketenagakerjaan di Kabupaten Klaten Tahun 2012-2016 dapat dilihat pada Tabel 2.19.

**Tabel 2.19**  
**Perkembangan Ketenagakerjaan di Kabupaten Klaten Tahun 2012- 2016**

No	URAIAN	Satuan	TAHUN				
			2012	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	72,22	73,1	70,46	71,91	84,76
2	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3,66	5,38	4,75	4,23	3,94
3	Bekerja	%	69,57	69,17	67,11	69,29	81,42
4	Penduduk Usia Kerja	Jumlah	975.789	963.189	894.546	894.536	742.458
5	Angkatan kerja	Jumlah	704.715	704.715	630.300	630.291	629.311
6	Jumlah yang menganggur	Jiwa	25.793	37.914	29.953	29.951	24.789

Sumber : BAPPEDA, 2017 (diolah)

Disamping Tabel 2.19 sebagaimana tersebut di atas, untuk mengetahui lebih rinci terkait ketenagakerjaan dapat disajikan beberapa indikator Kependudukan dan Ketenagakerjaan di Kabupaten Klaten Tahun 2011 – 2015 sebagaimana Tabel 2.20.

**Tabel 2.20.**  
**Beberapa Indikator Kependudukan dan Ketenagakerjaan**  
**di Kabupaten Klaten Tahun 2011 - 2015**

INDIKATOR	Satuan	2011	2012	2013	2014	2015*)
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Jumlah Penduduk Usia Kerja	orang	993.961	975.789	963.189	894.546	894.536
<b>Kegiatan utama penduduk usia kerja</b>						
Bekerja	%	38,87	60,15	52,44	42,84	54,56
Mencari pekerjaan	%	33,8	12,98	15,11	26,03	18,77
Sekolah	%	11,44	12,79	14,19	14,25	16,34
Mengurus rumah tangga	%	24,64	22,48	26,91	26,42	9,08
Lainnya	%	1,25	1,6	1,35	1,46	1,25
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	%	70,03	72,22	73,1	70,46	70,46
Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4,35	3,66	5,38	4,75	4,75
<b>Lapangan Pekerjaan Penduduk Yang Bekerja</b>						
Pertanian	%	16,89	17,26	16,79	16,68	7,43
Penggalian	%	1,32	1,3	1,31	1,38	-
Industri	%	21,16	20,72	20,35	20,75	0,15
Listrik, gas & Air Bersih	%	0,81	0,84	0,83	0,91	0,01
Konstruksi	%	7,37	7,29	8,09	7,37	0,05
Perdagangan	%	29,77	29,9	30,11	30,4	10,15
Angkutan	%	3,1	3,15	3,12	3,16	0,52
Lembaga Keuangan	%	4,08	4,1	4,08	4,27	0,00
Jasa dan Lainnya	%	15,5	15,44	15,32	15,08	81,69
<b>Status pekerjaan penduduk yang bekerja</b>						
Berusaha sendiri	%	24,97	22,39	21,29	23,29	55,57
Berusaha dibantu buruh tidak tetap	%	13,15	17,03	19,2	19,2	13,73
Berusaha dibantu buruh tetap	%	3,42	4,25	2,5	2,5	24,54
Buruh/karyawan & pekerjaan bebas	%	48,08	44,14	45,82	42,82	6,05
Pekerja keluarga	%	10,38	12,19	11,19	12,19	0,10

\*) data diolah berdasarkan Database Pelayanan SIAK Dinas Dukcapil, 2016

Kesejahteraan tenaga kerja di Kabupaten Klaten selama kurun waktu 2012-2016 selalu meningkat dengan ditunjukkan meningkatnya persentase Upah Minimal Kabupaten/Kota (UMK) terhadap Kebutuhan Hidup Layak (KHL). Persentase UMK terhadap KHL dapat dilihat pada Tabel 2.21.

**Tabel 2.21.**  
**Persentase UMK terhadap KHL**  
**Di Kabupaten Klaten Tahun 2012-2016**

Tahun	Rata-Rata UMK (Rupiah)	KHL (Rupiah)	Persentase UMK Terhadap KHL
(1)	(2)	(3)	(4)
2012	812.000	862.623	94,13
2013	871.500	1.015.262	85,84
2014	1.026.000	1.169.976	100,00
2015	1.170.000	1.365.550	102,52
2016*)	1.400.000	-	-

Sumber : Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Klaten, 2017  
Catatan : Mulai tahun 2016 KHL sudah tidak dipakai lagi

Tenaga kerja di Kabupaten Klaten dalam kurun waktu tahun 2011-2015 sebagian besar bekerja di sektor primer (pertanian), namun mulai terjadi pergeseran ke sektor sekunder (perdagangan dan industri) serta sektor tersier (bidang jasa). Penduduk Usia 15 tahun ke atas yang bekerja dapat dilihat pada Tabel 2.22.

**Tabel 2.22.**  
**Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas Yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama Di Kabupaten Klaten Tahun 2011- 2015**

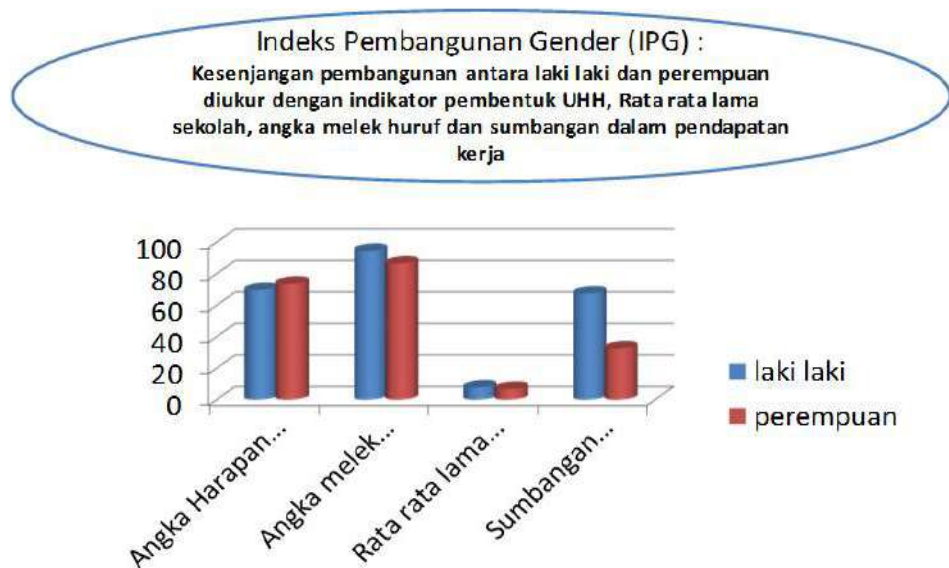
Tahun	Pertanian	Industri	Perdagangan	Jasa Kemasyarakatan, Sosial dan Perorangan	Lainnya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2011	3.097	16.796	5.186	7.661	4.470
2012	3.097	19.010	5.195	7.223	4.589
2013	3.097	26.800	9.721	1.085	6.794
2014	1.418	19.507	9.221	3.387	7.321
2015*)	32.773	1.488	17.795	12.058	49.714

Sumber : Dinsoskertrans Kabupaten Klaten, 2015

Keterangan : \*) Database Pelayanan SIAK Dinas Dukcapil

### 8. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pemberdayaan perempuan di Kabupaten Klaten selama tahun 2011-2015 cenderung meningkat, hal ini ditunjukkan dengan capaian IPG dan IDG yang semakin baik.



**Gambar 2.26.**  
**Indeks Pembangunan Gender (IPG)**



**Gambar 2.27.**  
**Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)**

Selain itu upaya perlindungan anak dan perempuan ditunjukkan dengan meningkatnya penyelesaian terhadap kasus kekerasan yang berbasis gender dan anak. Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dapat dilihat pada Tabel 2.23.

**Tabel 2.23**  
**Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Berhadapan Dengan Hukum di Kabupaten Klaten 2011-2015**

Tahun	Fisik		Psikis		Seksual		Penelantaran		Trafficking		Jumlah
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2015	-	-	-	2	-	15	-	-	-	-	17
2014	6	-	-	-	-	30	-	-	-	-	36
2013	-	39	1	2	-	8	1	16	-	-	66
2012	0	47	0	2	0	1	0	17	0	0	67
2011	28	31	2	2	8	8	14	20	0	0	113

Sumber : P2TP2A Kabupaten Klaten, 2016

## 9. Pangan

Ketersediaan pangan di Kabupaten Klaten pada tahun 2015 dengan produksi padi sawah 359,735 ton per tahun, produksi jagung 87,422 ton, dan produksi kedelai sebanyak 3,485 ton. Adapun jumlah ketersediaan dan kebutuhan pangan tahun 2015 selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.24

**Tabel 2.24**  
**Jumlah Ketersediaan dan Kebutuhan Pangan Tahun 2015**

No	Komoditas	Produksi	Ketersediaan	Kebutuhan	Surplus/Minus	Konsumsi per kapita (kg/kap/th)	Faktor Konversi (100-angka susut)
		(Ton)	(Ton)	(Ton)	(Ton)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Padi sawah	437,206	245,655	123,314	122,341	83,93	*)
2	Jagung	94,416	84,03	4,819	79,211	3,28	89,00%
3	Kedelai	5,658.61	5,355	33,808	-28,453	23,01	94,66%
4	Kacang tanah	2,509.32	2,17	0,808	1,362	0,55	86,49%
5	Kacang Hijau	134,634	0,125	0,309	-0,184	0,21	93,00%
6	Ubi Kayu	20,404.08	19,561	12,562	6,999	8,55	95,87%
7	Ubi Jalar	369,15	0,325	2,821	-2,496	1,92	88,00%
8	Daging	1,099	1,088342	16,162	-15,073658	1,97	99,02%
9	Gula	5,0415450	4,789468	15,692	-10,902532	10,68	95,00%
10	Telur	9,1671790	8,979252	5,877	3,102252	4,0	97,95%
11	Susu	3,1987650	2,696599	5,231	-2,534401	3,56	84,31%
12	Ikan	22,5508020	21,874278	13,664	8,210278	10,96	97,00%

Sumber: Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Klaten, 2016

Dari Tabel 2.24 di atas diketahui bahwa untuk data pada tahun 2015 ketersediaan beras mencapai 245.655 ton, sedangkan untuk kebutuhan beras 123.314 ton

sehingga masih surplus beras 122.340 ton. Ketersediaan beras dan surplus beras pada tahun 2015 ini meningkat bila dibandingkan pada tahun 2014, peningkatan ini dipengaruhi dengan meningkatnya jumlah gabah kering giling di tahun 2016 yang mencapai 437.206 tan jik dibandingkan tahun 2014 yang hanya menghasilkan 340.774 ton.

## 10. Pertanahan

Penerbitan sertifikat hak atas tanah yang diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten menjadi salah satu indikator pelayanan umum pada urusan pertanahan. Penerbitan pada kurun waktu 2011-2015 bersifat flutuaktif. Adapun gambaran Penerbitan Sertifikat Hak Atas Tanah yang Diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten 2011-2015 dapat dilihat pada Tabel 2. 25.

**Tabel 2.25.**  
**Penerbitan Sertifikat Hak Atas Tanah yang Diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten 2011-2015**

No	Jenis Sertifikat Hak Atas tanah	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Hak milik	11.084	510,826	620.378	631.768	580.537
2	Hak guna usaha	-	3	4	4	3
3	Hak guna bangunan	303	5.886	6.375	6.712	8.582
4	Hak pakai	58	3.632	3.932	3.956	3.736
5	Hak pengelolaan	-	2	6	6	5
6	Satuan Rusun	-	1.363	1.384	1.384	1.384
7	Hak Wakaf	70	888	1.003	1.079	1.554
Jumlah		11.515	522.600	633.082	644.909	595.801

Sumber : Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten, 2016

## 11. Lingkungan Hidup

Lingkungan hidup merupakan salah satu tujuan pembangunan *Millenium Development Goals* (MDGs). Lingkungan merupakan tempat bagi kelangsungan makhluk hidup yang didalamnya terdapat air, tanah dan udara, harus bersih atau berada pada ambang batas minimal pengaruh pencemaran, sehingga tidak mempengaruhi kesehatan dan aktifitas masyarakat.

Berbagai persoalan yang dihadapi Kabupaten Klaten di masa datang adalah penyediaan air bersih, sanitasi, persoalan limbah, sampah padat, limbah cair, dan polusi udara.

Sampah yang dihasilkan oleh masyarakat Kabupaten Klaten mencapai 350 m<sup>3</sup> per hari. Besarnya jumlah sampah yang dihasilkan menjadi pemikiran bersama untuk diantisipasi sejak dini, agar tidak menimbulkan permasalahan bagi Pemerintah Kabupaten Klaten di masa datang. TPA Jomboran dengan luas ± 1,7 ha sudah ditutup, dan sudah dialihkan di Joho Prambanan dan Troketon Pedan.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, penelitian dan pengembangan serta penerapan teknologi persampahan perlu untuk terus dilakukan dan dikembangkan, mengingat jumlah Industri Kecil/UKM di Kabupaten Klaten pada tahun 2015 sudah mencapai 34.155 UMKM, 131 unit usaha industri menengah/besar dan 207 pusat perdagangan/pasar dan jumlah sentra Industri sebanyak 45 buah. Efek dari kegiatan industri di samping menghasilkan limbah cair juga menghasilkan limbah padat dan polusi



udara. Sehingga limbah cair yang dihasilkan dari limbah industri perlu dipantau sebagai langkah pengendalian pencemaran, karena dengan bertambahnya kegiatan industri maka jumlah limbah yang dihasilkan berpotensi terhadap pencemaran lingkungan, terlebih sebagian besar industri yang berada di Kabupaten Klaten belum memiliki Instalasi Pengolahan Limbah (IPAL).

Pencemaran udara di Kabupaten Klaten di sebabkan oleh aktifitas kegiatan industri dan transportasi. Pencemaran berupa emisi gas ke udara berupa CO, CO<sub>2</sub>, SO<sub>2</sub>, NO<sub>2</sub>, debu dan partikel, serta kebisingan. Untuk membuat lingkungan yang nyaman melalui penurunan Gas Rumah Kaca (GRK) perlu adanya Ruang Terbuka Hijau (RTH).

Proporsi ruang terbuka hijau tersebut mencakup 20% Ruang Terbuka Hijau Publik dan 10% Ruang Terbuka Hijau Privat. Proporsi RTH Kabupaten Klaten saat ini masih jauh dari harapan karena hanya sekitar 6,7%. Melihat kondisi RTH tersebut, masih ada kewajiban bagi Pemerintah Kabupaten Klaten untuk memenuhi amanat Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yaitu untuk mencapai angka 30%. Kendala yang dihadapi dalam memenuhi ketentuan proporsi Ruang Terbuka Hijau Privat karena menyangkut kepentingan kepemilikan lahan.

## 12. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pengelolaan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil meliputi 3 (tiga) pentahapan, yaitu : (i) Pendaftaran Penduduk, (ii) Pencatatan Sipil, dan (iii) Pengelolaan Informasi Kependudukan. Pendaftaran Penduduk dengan produk Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Surat Keterangan Kependudukan (SKK). Pencatatan Sipil dengan produk Akte Kelahiran, Akte Kematian, Akte Perkawinan, Akte Pengangkatan Anak dan Akte Pengakuan/Pengesahan Anak. Pengelolaan Informasi Kependudukan dengan produk data/informasi kependudukan yang berupa olahan proses dari pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Adapun jumlah pelayanan akte di Kabupaten Klaten Tahun 2012-2016 dapat dilihat pada Tabel 2.26

**Tabel 2.26**  
**Jumlah Pelayanan Akte di Kabupaten Klaten Tahun 2012-2016**

No	Jenis Akte	2012	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Kelahiran	8.168	17.741	16.127	10.540	10.130
2	Kematian	120	137	275	393	239
3	Perkawinan	488	462	474	469	753
4	Perceraian	68	55	54	63	41

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Klaten, 2017

Selain itu untuk mewujudkan penerapan *single identity number* program e-KTP sampai dengan tahun 2016 baru tercatat penduduk yang ber-KTP sebanyak 901.409 orang.

### 13. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Secara administratif Kabupaten Klaten dibagi menjadi 26 kecamatan, 391 desa dan 10 kelurahan. Kecamatan yang memiliki jumlah desa terbesar adalah Kecamatan Cawas dengan 20 desa, 4 (empat) kecamatan memiliki 19 desa yaitu: Kecamatan Wedi, Karangdowo, Juwiring dan Karanganom. Sementara kecamatan yang memiliki jumlah desa paling sedikit adalah Kecamatan Klaten Tengah dengan 3 desa. Jumlah Dukuh di seluruh Kabupaten Klaten sebanyak 3.703 dukuh. Untuk mendorong kemandirian desa, maka upaya yang dilakukan adalah dengan program pemberdayaan masyarakat sampai basis desa/kelurahan.

Program pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan, disamping untuk mendorong kemandirian desa juga untuk menanggulangi kemiskinan. Pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat disamping dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah, juga dilakukan oleh Konsultan Mandiri Program Pemberdayaan Masyarakat PNPM Mandiri. PNPM Mandiri Perdesaan tersebar di 11 Kecamatan untuk kegiatan infrastruktur, sedang untuk ekonomi produktif mencakup 25 kecamatan. PNPM Mandiri perkotaan tersebar di 212 lokasi desa/kelurahan. Ke depan program Pemberdayaan Masyarakat PNPM Mandiri sudah berakhir diganti dengan Program Peningkatan Kualitas Kawasan Pemukiman (Program 100 0 100).

### 14. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Indikator pelaksanaan urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dapat dijelaskan sebagai berikut:

#### a. Jumlah Peserta KB dan KB Aktif

Jumlah peserta KB baru dalam kurun waktu tahun 2012-2016 mengalami peningkatan secara fluktuatif. Peserta KB baru pada tahun 2012 sebanyak 31.207 peserta KB baru, dan pada tahun 2013 turun menjadi 25.905 peserta KB baru, tahun 2014 naik menjadi 28.254 peserta KB baru, namun pada tahun 2015 turun menjadi 23.559 peserta KB baru, dan tahun 2016 menjadi sebanyak 26.481 peserta. Hal ini disebabkan karena semakin meningkatnya kesadaran pasangan usia subur dalam menyiapkan keluarga sejahtera, dan kondisi sosial masyarakat. Gambaran peserta KB dan KB Aktif di Kabupaten Klaten Tahun 2012-2016 selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.27.

**Tabel 2.27.**  
**Peserta KB dan KB Aktif**  
**di Kabupaten Klaten Tahun 2012-2016**

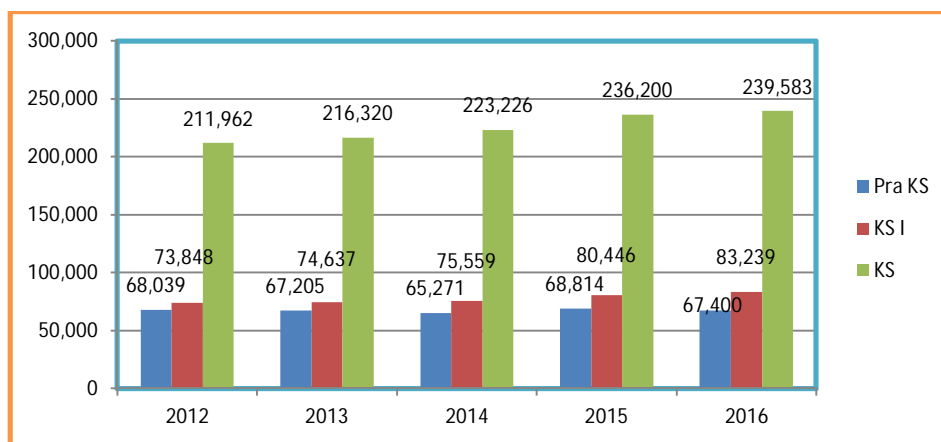
Tahun	Pasangan Usia Subur	Peserta KB Baru	Peserta KB Aktif
(1)	(2)	(3)	(4)
2012	203.806	31.207	166.160
2013	204.998	25.905	168.751
2014	206.812	28.254	172.333
2015	203.448	23.559	154.422
2016	201.950	26.481	158.943

Sumber : Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB Kab. Klaten, 2017



b. Jumlah Keluarga Sejahtera

Sedangkan berdasarkan pentahapan Keluarga Sejahtera (KS), selama tahun 2012-2016 terjadi penurunan keluarga Pra Sejahtera dan peningkatan dalam Keluarga Sejahtera I (KS I), Keluarga Sejahtera III dan Keluarga Sejahtera III Plus (KS III dan KS Plus). Pada tahun 2012 tercatat sebanyak 68.039 KK Pra KS, dan pada tahun 2016 menjadi sebanyak 67.400 KK Pra KS, sedangkan keluarga KS I pada tahun 2012 tercatat sebanyak 73.848 KK KS, dan pada tahun 2016 menjadi sebanyak 83.239 KK KS I, sementara keluarga KS pada tahun 2012 tercatat sebanyak 113.259 KK KS, dan pada tahun 2016 menjadi sebanyak 239.583 KK KS. Adapun gambaran Perkembangan Jumlah Tahapan Keluarga Sejahtera di Kabupaten Klaten Tahun 2012 - 2016 selengkapnya dapat dilihat pada Gambar 2.28.



Sumber : Dinas Sosial, PP dan PA Kabupaten Klaten 2017, (diolah)

**Gambar 2.28.**  
Perkembangan Jumlah Tahapan Keluarga Sejahtera di Kabupaten Klaten Tahun 2012 - 2016 (dalam satuan Kepala Keluarga / KK)

15. Perhubungan

Peningkatan jumlah sarana angkutan publik, menuntut ketersediaan prasarana perhubungan jalan yang memadai untuk pengangkutan barang dan jasa. Adapun kondisi sarana perhubungan pada saat ini dapat dicerminkan dari keberadaan sarana transportasi darat yang terdiri mobil barang, kendaraan khusus dan angkutan publik dapat dilihat pada pada Tabel 2.28.

**Tabel 2.28.**  
Jumlah Sarana Angkutan (Umum dan Pribadi) di Kabupaten Klaten Tahun 2015

Jenis Kendaraan	Tahun				
	2011 (unit)	2012 (unit)	2013 (unit)	2014 (unit)	2015 (unit)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
01 Sepeda Motor					
02 Mobil Penumpang					
03 Mobil Barang	9.091	9.644	10.241	10.794	10765
04 Mobil Bus					
* Umum	344	328	347	395	407
Bus Besar	281	255	113	49	49
Bus Sedang	49	56	105	90	93
Bus Kecil	14	17	129	256	265
* Bukan Umum	239	213	214	557	155
05 Kendaraan Khusus/Alat Berat	3	3	3	9	10
06 Mobil Penumpang Umum	-	-	-	-	-
07 Kendaraan Roda Tiga	-	-	-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>9.677</b>	<b>10.188</b>	<b>10.811</b>	<b>11.755</b>	<b>11.337</b>

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten, 2016

**16. Komunikasi dan Informatika**

Bidang komunikasi dan informatika Kabupaten Klaten telah memiliki website yaitu [www.klatenkab.go.id](http://www.klatenkab.go.id), sementara untuk warung internet (warnet) sudah menyebar di 26 kecamatan dan telah menjadi konsumsi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan informasi. Penyiaran radio lokal terdapat 7 stasiun penyiaran ( 1 milik pemerintah daerah/RSPD, 6 lainnya milik swasta/komunitas) dan terdapat 7 buah surat kabar lokal.

**17. Koperasi Usaha Kecil dan Menengah**

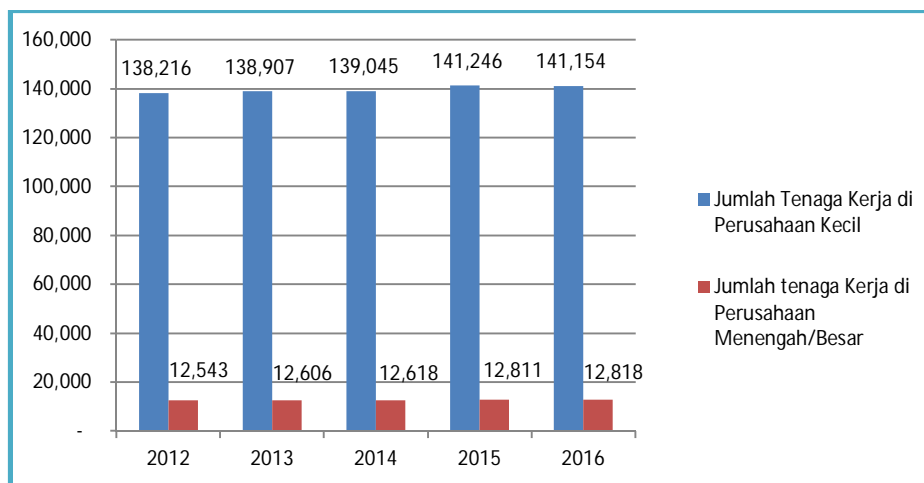
Koperasi Usaha Kecil dan Menengah sebagai bagian pengembangan ekonomi daerah di Kabupaten Klaten diantaranya meliputi koperasi dan KUD. Hal ini mengingat posisi dan manfaat dari koperasi maupun KUD yang menyentuh sampai lapisan bawah, dan dapat dijadikan sebagai wahana paguyuban maupun kelompok usaha masyarakat. Data pengembangan usaha nasional di Kabupaten Klaten Tahun 2012-2016 dapat dilihat pada Tabel 2.29.

**Tabel 2.29.**  
**Pengembangan Usaha Nasional di Kabupaten Klaten Tahun 2012 – 2016**

No	Pengembangan Usaha Nasional	Jumlah (Buah)				
		2012	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Koperasi	871	890	890	952	977
2	KUD	34	34	34	34	34
3	Jumlah Pengusaha	Jumlah ( Orang )				
	a).Pengusaha Kecil	34.077	34.251	34.155	34.666	34.672
	b).Pengusaha Menengah/Besar	126	130	131	133	134
4	Jumlah Tenaga Kerja	Jumlah ( Orang )				
	a).Usaha Kecil	138.216	138.907	139.045	141.125	141.154
	b).Usaha Menengah/Besar	12.543	12.606	12.618	12.811	12.818

Sumber : Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Klaten, 2017

Penyerapan kerja yang terserap bersifat fluktuatif, terutama usaha kecil dari 138.216 orang pada tahun 2012 menjadi 141.154 pada tahun 2016. Sedangkan jumlah tenaga kerja usaha menengah/besar pada tahun 2015 sebanyak 12.543 orang menjadi sebanyak 12.818 orang pada tahun 2016. Gambaran trend jumlah tenaga kerja di perusahaan kecil dan menengah/besar Tahun 2012-2016 dapat dilihat pada Gambar 2.29.



Sumber : Dnas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Klaten, 2017

**Gambar 2.29.**  
**Trend Jumlah Tenaga Kerja Di Perusahaan Kecil dan Menengah/Besar Tahun 2012 – 2016**

Berdasarkan Grafik 2.28 di atas trend pengembangan usaha nasional di Kabupaten Klaten Tahun 2012- 2016 dapat dijelaskan bahwa penyerapan tenaga kerja bersifat fluktuatif terutama pada usaha kecil. Hal ini disebabkan oleh karena: 1) terkendala pada pemasaran produk, banyak produk-produk yang menumpuk pada para pelaku kecil, yang tentu saja secara tidak langsung akan berdampak pada pemberhentian tenaga kerja; 2) disamping itu juga disebabkan karena faktor usaha musiman, yaitu bahwa pada musim-musim tertentu pelaku usaha akan kebanjiran pesanan sehingga akan banyak tenaga kerja yang dibutuhkan begitu juga untuk sebaliknya di saat sepi pesanan.

## 18. Penanaman Modal

### a. Penanaman Modal dalam Negeri (PMDN)

Faktor penting lain yang juga mempengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah adalah penanaman modal/investasi, Penanaman modal/investasi tidak bisa dilepaskan dari sektor usaha industri, semakin besar dan berkembang industri di suatu daerah semakin besar investasi yang ditanamkan dalam daerah tersebut. Perkembangan realisasi PMDN di Kabupaten Klaten tahun 2013-2016 dapat dilihat pada Tabel 2.30.

**Tabel 2.30.**  
**Perkembangan Realisasi PMDN**  
**di Kabupaten Klaten Tahun 2013-2016**

No	Uraian	Satuan	PMDN			
			2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Jumlah Unit Usaha	Unit	34.121	34.155	34.666	679
2	Jumlah Tenaga Kerja	Orang	138.907	139.045	141.126	6.615
3	Nilai Investasi (Rp. 000)	Rp.	152.974.137	146.248.657	221.977.337	220.628.729

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Klaten, 2017

### b. Penanaman Modal Asing (PMA)

Perkembangan realisasi investor PMA di Kabupaten Klaten dalam kurun waktu tahun 2013-2016 bersifat fluktuatif. Ada beberapa hal sebagai faktor kunci terkait dengan peningkatan/perkembangan penanaman modal antara lain meliputi: 1) kemudahan dalam proses perijinan (kejelasan persyaratan perijinan, transparansi biaya, serta proses pengurusan sesuai dengan prosedur ketentuan yang berlaku); 2) adanya respon positif dari masyarakat dengan masuknya investasi ke daerah, disertai dengan suatu kesadaran masyarakat bahwa investor akan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya daerah; 3) Upah Minimum Kerja (UMK) yang masih terjangkau juga menjadi daya tarik bagi investor, disamping dengan jumlah ketersediaan tenaga kerja yang siap pakai.; 4) Dukungan sarana prasarana yang semakin baik dari tahun ke tahun baik dari harga tanah yang relatif bersaing, sarana infrastruktur, sarana tenaga listrik maupun ketersediaan air serta letak yang sangat strategis Kabupaten Klaten. Adapun Perkembangan Realisasi PMA di Kabupaten Klaten Tahun 2013-2016 dapat dilihat pada Tabel 2.31.

**Tabel 2.31.**  
**Perkembangan Realisasi PMA**  
**di Kabupaten Klaten Tahun 2012-2016**

No	Uraian	Satuan	PMA			
			2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Jumlah Unit Usaha	Unit	130	131	134	134
2	Jumlah Tenaga Kerja	Orang	12.606	12.618	12.811	12.818
3	Nilai Investasi	(US \$)	409.836	1.429.505	5.836.620	3.150.720

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Klaten, 2017

Berdasarkan Tabel 2.30 tentang Perkembangan Realisasi PMDN di Kabupaten Klaten Tahun 2013-2016 dan Tabel 2.31 tentang Perkembangan Realisasi PMA di Kabupaten Klaten Tahun 2013-2016, terlihat bahwa Penanaman modal daerah, baik Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) selalu bersifat fluktuatif, karena sangat tergantung pada situasi pasar. Indikator perkembangan penanaman modal daerah menggunakan 3 (tiga) tolok ukur meliputi : jumlah unit usaha, jumlah tenaga kerja, dan nilai investasi (baik dalam ribu rupiah maupun US \$).

#### 19. Pemuda dan Olahraga

Pada kurun waktu tahun 2012-2016 perkembangan jumlah organisasi kepemudaan, maupun kegiatan keolahragaan relatif stabil, dan perkembangannya dapat dilihat pada Tabel 2.32.

**Tabel 2.32.**  
**Perkembangan Kepemudaan dan Olahraga**  
**di Kabupaten Klaten 2012-2016**

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2012	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Jml klub/cabang olahraga	Cabang	21	34	35	35	35
2	Jml gedung Olahraga Tk. Kecamatan	Gedung	26	26	26	26	26
3	Jml Organisasi Pemuda	Organisasi	26	26	26	26	26
4	Jml Organisasi Olahraga	Organisasi	8	8	8	8	8

Sumber : Disbudparpora Kab. Klaten, 2017

Lembaga kepemudaan dan olah raga yang berkembang di Kabupaten Klaten antara lain: (a) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI); (b) Organisasi Kemasyarakatan Pemuda; (c) Lembaga Sosial Pemuda, Lembaga kepemudaan yang umumnya berbentuk Yayasan; (d) Organisasi Pemuda Partai Politik; (e) Organisasi Mahasiswa; (f) Praja Muda Karana (Pramuka); (g) Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) tingkat SLTA; (h) Karang Taruna; (i) Organisasi Pemuda Kedaerahan; (j) Lembaga Pemuda Profesi; (k) Perkumpulan Pemuda di bidang Seni; (l) Klub Ilmuwan Muda; dan (m) Lembaga Pemuda Pencinta Alam (n) Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI).

#### 20. Statistik

Sejalan dengan penerapan perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja, langkah penguatan pengendalian dan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan menjadi pilihan strategis. Proses perencanaan memerlukan data dan informasi

statistik yang berkualitas. Oleh karena itu, ketersediaan data dan informasi statistik yang andal merupakan salah satu kunci keberhasilan perencanaan. Data dan informasi statistik berkualitas tidak saja menjadi rujukan pemerintah tetapi juga dibutuhkan oleh kalangan swasta dan masyarakat untuk pengembangan usaha dan beragam kebutuhan lainnya.

Kualitas data diukur melalui 6 (enam) dimensi, yaitu : akurat, relevan, tepat waktu (*timeliness*), mudah diakses (*accessibility*), koheren (*coherence*) yang berarti konsisten antar sektor dan antar periode dan spasial, serta mudah diinterpretasi (*interpretability*). Untuk mewujudkan sasaran tersebut dirumuskan 3 (tiga) langkah: (i) Peningkatan kualitas data; (ii) Peningkatan penerapan teknologi informasi dan komunikasi; dan (iii) Peningkatan kapasitas SDM.

Dalam upaya mewujudkan data dan informasi pemerintah Kabupaten Klaten menerbitkan dokumen Kabupaten Klaten Dalam Angka (KKDA), Kajian Ekonomi Daerah (KED), Input-Output, Profil Desa, Profil Daerah, Evaluasi RKPD, dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjiP). Semua dokumen ini dimaksudkan sebagai ukuran kinerja daerah untuk setiap tahunnya.

## 21. Kebudayaan

### a. Penyelenggaraan Seni dan Budaya

Dalam kurun waktu tahun 2012-2016 perkembangan jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya serta sarana penyelenggaraan seni dapat dilihat dapat dilihat pada Tabel 2.33.

**Tabel 2.33.**  
**Jumlah Penyelenggaraan Seni dan Budaya**  
**di Kabupaten Klaten Tahun 2012-2016**

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2012	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Jml penyelenggaraan festival seni dan budaya	kegiatan	52	52	52	52	52
2	Jml sarana penyelenggaraan seni dan budaya	Tempat	12	12	12	12	12

Sumber : Disbudparpora Kab. Klaten, 2016

### b. Jumlah cagar budaya yang dilestarikan

Dalam kurun waktu tahun 2012-2016 perkembangan jumlah cagar budaya yang dilestarikan dapat relatif tidak ada perubahan, dan sebagai gambaran Jumlah Cagar Budaya yang dilestarikan di Kabupaten Klaten Tahun 2012-2016 dapat dilihat pada Tabel 2.34.

**Tabel 2.34.**  
**Jumlah Cagar Budaya Yang Dilestarikan**  
**di Kabupaten Klaten Tahun 2012-2016**

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2012	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Jml Candi Purbakala	Jumlah	8	8	8	8	8
2	Jml Makam	Jumlah	4	4	4	4	4
3	Pemandang Alam	buah	2	2	2	2	2
4	Museum	buah	1	1	1	1	1
5	Lainnya		-	-	-	-	-

Sumber : Disbudparpora Kab. Klaten, 2017

## 22. Perpustakaan

Pada tahun 2016 jumlah perpustakaan desa sebanyak 29 unit dan perpustakaan kelurahan sebanyak 3 unit. Layanan perpustakaan keliling sebanyak 5 unit yang melayani 26 kecamatan di Kabupaten Klaten, secara bergilir sesuai jadwal yang ditetapkan. Terdapat juga layanan perpustakaan keliling dengan 5 unit sepeda motor untuk *merolling* buku pada daerah yang tidak terjangkau bus keliling. Perkembangan perpustakaan di Kabupaten Klaten dapat dilihat pada Tabel 2.35.

**Tabel 2.35.**  
**Perkembangan Perpustakaan di Kabupaten Klaten Tahun 2012-2016**

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2012	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Jumlah koleksi perpustakaan	Judul	9.128	11.231	40.976	43.661	46.558
2	Jumlah pengunjung perpustakaan	Orang	9.128	6.842	7.648	7.673	38.003

Sumber : Dinas Arsip dan Perpustakaan Kab. Klaten, 2017

Berdasarkan Tabel 2.35 di atas, jumlah pengunjung perpustakaan mengalami peningkatan yang sangat tinggi dibanding pada tahun 2015 (atau naik 495,28 %), hal ini dikarenakan adanya tambahan data jumlah pengunjung pada perpustakaan keliling dan pengunjung saat *car free day*.

## 23. Kearsipan

Pengelolaan kearsipan sebagai bagian dari aset pemerintah daerah dilihat dari jumlah arsip yang tercatat dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Pada tahun 2012 sebanyak 25.671 arsip, dan pada tahun 2016 setelah diluidasi tinggal 19.588 arsip. Gambaran pengelolaan kearsipan di Kabupaten Klaten pada tahun 2012-2016 dapat dilihat pada Tabel 2.36.

**Tabel 2.36.**  
**Pengelolaan Kearsipan di Kabupaten Klaten Tahun 2012-2016**

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2012	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Jumlah Arsip	Jumlah	25.671	65.526	71.161	68.700	19.588

Sumber : Dinas Arsip dan Perpustakaan Kab. Klaten, 2017

Pelayanan arsip untuk SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten diharapkan dapat berkembang ke arah arsip digital, sehingga akan lebih memudahkan dalam pencarian arsip.

### 2.1.3.2. Fokus Pelayanan Urusan Pilihan

Analisis kinerja atas layanan urusan pilihan dilakukan terhadap indikator-indikator kinerja penyelenggaraan urusan pilihan pemerintahan daerah (ada 8 urusan pilihan), yaitu bidang urusan : (i) Kelautan dan Perikanan, (ii) Pariwisata, (iii) Pertanian, (iv) Kehutanan, (v) Energi dan Sumber Daya Mineral, (vi) Perdagangan, (vii) Perindustrian, dan (viii) Ketrasmigrasian. Gambaran dari masing-masing penjelasan urusan pilihan tersebut adalah sebagai berikut:



## 1. Kelautan dan Perikanan

Daya dukung dan melimpahnya air mendorong petani dan masyarakat setempat memanfaatkan potensi air untuk budidaya ikan di sawah dan kolam. Gambaran Produksi Ikan dan Jenisnya menurut Kecamatan di Kabupaten Klaten Tahun 2011-2015 dapat dilihat pada Tabel 2.37.

**Tabel 2.37.**  
**Produksi Ikan dan Jenisnya Menurut Kecamatan**  
**di Kabupaten Klaten Tahun 2015 (ton)**

Kecamatan	Kolam	Sawah	Keramba	Waduk	Sungai	Genangan Air	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
01 Prambanan	7.894,28				0,00	94,95	7.989,23
02 Gantiwarno	4.687,85				92,10	0,00	4.779,95
03 Wedi	5.120,40				42,56	0,00	5.162,96
04 Bayat	16.969,67		1.811,10	1.753,00	76,73	0,00	20.610,50
05 Cawas	613,86				138,75	0,00	752,61
06 Trucuk	1.292,30				117,94	0,00	1.410,24
07 Kalikotes	1.017,55				0,00	46,02	1.063,57
08 Kebonarum	11.816,21				0,00	47,51	11.863,72
09 Jogonalan	6.101,96				115,62	0,00	6.217,58
10 Manisrenggo	11.167,04				10,85	9,24	11.187,13
11 Karangnongko	5.131,13	8,40			75,12	132,29	5.346,94
12 Ngawen	1.570,79				0,00	106,36	1.677,15
13 Ceper	808,57				36,07	0,00	844,64
14 Pedan	620,65				13,52	0,00	634,17
15 Karangdowo	623,39		1,65		0,00	63,30	688,34
16 Juwiring	2.939,02				0,00	38,26	2.977,28
17 Wonosari	13.303,75		63,80		0,00	304,41	13.671,96
18 Delanggu	4.985,81				84,52	17,45	5.087,78
19 Polanharjo	65.984,39	35,00			0,00	35,10	66.054,49
20 Karanganom	3.687,97	4,25			0,00	18,42	3.710,64
21 Tulung	86.181,47	3,92			75,81	0,00	86.261,20
22 Jatinom	3.589,44				35,16	0,00	3.624,60
23 Kemalang	1.485,83				0,00	55,61	1.541,44
24 Klaten Selatan	8.735,13				0,00	559,72	9.294,85
25 Klaten Tengah	1.637,29				288,95	48,36	1.974,60
26 Klaten Utara	3.566,77				331,30	0,00	3.898,07
Jumlah 2015	271.532,52	51,57	1.876,55	1.753,00	1.535,00	1.577,00	278.325,64
2014	254.559,82	0	1.685,56	1.775	1.030,00	247,00	259.297,38
2013	191.942,18	20	631,81	863	1.654,00	481,00	195.573,99
2012	136.317	-	2.921,00	1.039	1.422,00	477,00	142,18

Sumber : Dinas Pertanian Kabupaten Klaten, 2017

Dari Tabel 2.37 dapat dilihat pada tersebut di atas dapat disampaikan bahwa produksi perikanan di Kabupaten Klaten dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2015 mengalami peningkatan yang cukup pesat, khususnya untuk produksi ikan dari budidaya kolam yang berada di Kawasan Minapolitan, yang meliputi kecamatan Karanganom, Tulung, dan Kecamatan Polanharjo.

Selain di Kawasan Minapolitan, di beberapa wilayah kecamatan juga mengalami peningkatan produksi perikanan yang cukup signifikan, antara lain: di keramba-keramba wilayah kecamatan Prambanan, Kebonarum, Manisrenggo, Klaten Selatan, dan Kecamatan Wonosari.

Peningkatan produksi perikanan ini disebabkan adanya penambahan jumlah luasan budidaya serta adanya usaha intensifikasi budidaya perikanan dan penggunaan bibit unggul. Produksi ikan dalam daerah didominasi oleh jenis ikan Nila dan Lele. Untuk belut, produksi dalam daerah belum mencukupi, setiap tahun masih mendatangkan dari luar daerah khususnya dari daerah Jawa Timur. Produksi perikanan ini terkait erat dengan pola atau tingkat konsumsi ikan di Kabupaten Klaten. Untuk memahami tingkat konsumsi ikan dapat diturunkan dari jumlah produksi ikan (kg) sebagaimana tersebut

dalam Tabel 2.38 dibagi dengan kapita setiap tahun. Secara terinci tingkat konsumsi ikan di Kabupaten Klaten dalam lima tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel 2.38.

**Tabel 2.38.**  
**Tingkat Konsumsi Ikan di Kabupaten Klaten**

No.	Tahun	Tingkat Konsumsi Ikan (Kg/kapita/tahun)
1.	2011	12,66
2.	2012	12,79
3.	2013	12,92
4.	2014	13,06
5.	2015	15,14

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Klaten, 2016

## 2. Pariwisata

Pengembangan pariwisata Kabupaten Klaten dapat dilihat dari produk wisata dan pasar wisata. Produk pariwisata di Kabupaten Klaten antara lain mencakup:

### a. Jenis Kekayaan Wisata Alam

Kabupaten Klaten mempunyai banyak wisata alam maupun wisata buatan. Nama dan jenis obyek wisata serta lokasinya di Kabupaten Klaten dapat dilihat pada pada Tabel 2.39.

**Tabel 2.39**  
**Nama dan Jenis Obyek Wisata serta Lokasinya di Kabupaten Klaten Tahun 2016**

No.	Nama Obyek Wisata	Jenis Obyek Wisata	Lokasi
(1)	(2)	(3)	(4)
01.	Perayaan Padusan	Event Tradisional	Kec. Tulung Kab.Klaten
02.	Perayaan Maleman	Event Tradisional	Kec. Klaten Utara
03.	Perayaan Syawalan	Event Tradisional	Kec. Bayat dan Kec. Kalikotes
04.	Perayaan Yaqowiyu	Event Tradisional	Kec. Jatinom
05.	Deles Indah	Wisata Alam	Kec. Kemalang
06.	Sumber Air Ingas (OMAC)	Wisata Alam	Kec. Tulung Kab.Klaten
07.	Makam Pandanaran	Wisata Sejarah dan Religi	Kec. Bayat
08.	Jombor Permai	Wisata Alam	Kec. Bayat
09.	Makam R.Ng Ronggowarsito	Wisata Sejarah dan Religi	Kec. Trucuk
10.	Makam Ki Ageng Perwito	Wisata Sejarah dan Religi	Kec. Wonosari
11.	Pemandian Jolotundo	Wisata Alam	Kec. Karanganom
12.	Candi Plaosan	Wisata Sejarah dan Religi	Kec. Prambanan
13.	Makam Ki Agen Gribig	Wisata Sejarah dan Religi	Kec. Jatinom
14.	Sendang Sinongko	Wisata Alam	Kec. Ceper
15.	Umbul Ponggok	Wisata Air dan Snarkling	Kec. Polanharjo
16.	Umbul Pelem	Wisata Air	Kec. Tulung
17.	Umbul Manten	Wisata Air	Kec. Polanharjo
18.	Desa Wisata Nganjat	Wisata Air dan Perikanan Nila	Kec. Polanharjo
19.	Desa Wisata Janti	Pemancingan	Kec. Polanharjo
20.	Desa Wisata Kebon Dalem Kidul	Wisata Budaya dan Industri	Kec. Prambanan
21.	Desa Wisata Soran-Duwet	Wisata Budaya dan Outbond	Kec. Ngawen
22.	Desa Wisata Jarum	Wisata Budaya dan Kerajinan Batik	Kec. Bayat
23.	Desa Wisata Krakitan	Wisata Religi dan Alam	Kec. Bayat
24.	Desa Wisata Demak Ijo	Wisata Budaya dan Kerajinan	Kec. Karangnongko
25.	Desa Wisata Mlese dan Tlising	Industri Lurik	Kec. Cawas
26.	Desa Wisata Melikan	Wisata Budaya dan Kerajinan Keramik	Kec. Wedi

Sumber : BAPPEDA Kabupaten Klaten , 2017



Permasalahan yang dijumpai dalam pengembangan pariwisata di Kabupaten Klaten adalah masih perlunya peningkatan pengembangan pemasaran pariwisata, pengembangan destinasi pariwisata serta peningkatan sumber daya manusia yang terkait dengan kepariwisataan. Serta penataan kawasan pariwisata yang dapat memiliki daya tarik.

b. Jenis Kekayaan Wisata Budaya

Jenis kekayaan wisata budaya di Kabupaten Klaten antara lain: Candi Plaosan, Candi Lumbung, Candi Bubrah, Candi Asu (Sona), Candi Sojiwan, Candi Merak, Candi Karangnongko, Candi Sewu, Masjid Jimbung, Masjid Golo, Masjid Jawi, Makam Syech Domba, Makam Syeh Kewel, Makam Ki Ageng Gribig, Makam R Ng. Ronggowarsito, Situs Kaliworo, dan Situs Wonoboyo, Makam Sunan Pandanaran, dan Makam Kyai Mlati.

c. Tempat Bersejarah

Tempat bersejarah yang ada di Kabupaten Klaten diantaranya: Monumen Juang 45 Klaten, Monumen PARATA MBKD Pos X-I, Museum Gula Jawa Tengah di Jogonalan, Monumen Patung Kemerdekaan Soekarno, Goa Jepang dan Pesanggrahan Pakubuwono di Deles.

d. Jumlah Obyek Wisata Dan Pengunjung

Perkembangan jumlah obyek wisata dan pengunjung di Kabupaten Klaten dalam kurun waktu tahun 2012-2016 menunjukkan peningkatan, selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.40.

**Tabel 2.40.**  
**Jumlah Obyek Wisata dan Pengunjung**  
**di Kabupaten Klaten Tahun 2012-2016**

Tahun	Jumlah Obyek Wisata (obyek)	Pengunjung (orang)
(1)	(2)	(3)
2012	82	325.007
2013	82	256.200
2014	82	320.872
2015	82	604.700
2016	82	-

Sumber: Disbudparpora Kabupaten Klaten, 2017

Berdasarkan Tabel 2.40 dapat dilihat pada tersebut di atas menunjukkan bahwa jumlah pengunjung obyek wisata pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 mengalami penurunan. Penurunan ini disebabkan oleh karena banyaknya bermunculan destinasi wisata baru di wilayah sekitar Kabupaten Klaten sehingga banyak pengunjung yang ingin merasakan suasana yang baru. Disamping itu juga tidak diselenggarakannya even tradisional maleman karena lokasi di GOR Gelarsena yang biasanya dipergunakan untuk tempat maleman dipergunakan sebagai terminal. Dikarenakan lokasi terminal lama dipergunakan untuk pembangunan Masjid Agung. Kemudian pada tahun 2014 mengalami peningkatan menjadi 320.872 pengunjung oleh karena pada tahun tersebut telah kembali diselenggarakan event tahunan maleman di GOR Gelarsena. Sedangkan untuk tahun 2015 mengalami peningkatan jumlah pengunjung wisata yang cukup pesat menjadi 604.700 pengunjung, oleh karena pada tahun 2015 tersebut merupakan penggabungan antara jumlah



pengunjung obyek wisata yang dikelola oleh Dinas Budparpora dengan pengunjung di Obyek Wisata yang dikelola oleh masyarakat/Swasta. Selain itu juga dipengaruhi oleh adanya promosi wisata dan obyek-obyek wisata yang telah mulai tertata dengan baik.

### 3. Pertanian

Luas wilayah Kabupaten Klaten sebesar 655,56 Km<sup>2</sup>. Pada Tahun 2015 berdasarkan pemakaian di lahan pertanian untuk penggunaan lahan sawah 33.111 Ha dan untuk lahan bukan sawah sebesar 6.581 Ha. Sedangkan untuk lahan bukan pertanian seluas 25.809 Ha. Menurut sistem penggunaan air di Kabupaten Klaten, menunjukkan bahwa sawah dengan sistem pengairan teknis seluas 19,897 Ha, sistem pengairan setengah teknis seluas 9,771 Ha; sistem pengairan sederhana seluas 2,267 Ha, serta sistem tadah hujan seluas 1,463 Ha. Adapun Luas Lahan Pertanian dan Bukan Lahan Pertanian di Kabupaten Klaten Tahun 2015 dapat dilihat pada Tabel 2.41

**Tabel 2.41.**  
**Luas Lahan Pertanian dan Bukan Lahan Pertanian**  
**di Kabupaten Klaten Tahun 2015 (dalam satuan Ha)**

Kecamatan	Lahan Pertanian		Lahan Bukan Pertanian	Luas Wilayah
	Sawah	Bukan Sawah		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
01 Prambanan	1.243	13	1.187	2.443
02 Gantiwarno	1.625	155	784	2.564
03 Wedi	1.554	18	866	2.438
04 Bayat	815	785	2.343	3.943
05 Cawas	2.317	46	1.084	3.447
06 Trucuk	1.909	2	1.470	3.381
07 Kalikotes	750	8	540	1.298
08 Kebonarum	720	2	245	967
09 Jogonalan	1.574	1	1.095	2.670
10 Manisrenggo	1.509	139	1.048	2.696
11 Karangnongko	764	851	1.059	2.674
12 Ngawen	1.042	8	647	1.697
13 Ceper	1.538	7	900	2.445
14 Pedan	872	445	600	1.917
15 Karangdowo	2.048	69	806	2.923
16 Juwiring	2.001	12	966	2.979
17 Wonosari	2.219	14	881	3.114
18 Delanggu	1.303	1	574	1.878
19 Polanharjo	1.822	92	470	2.384
20 Karanganom	1.682	11	713	2.406
21 Tulung	1.738	467	995	3.200
22 Jatinom	604	1.543	1.406	3.553
23 Kemalang	54	1.848	3.264	5.166
24 Klaten Selatan	809	3	631	1.443
25 Klaten Tengah	294	1	597	892
26 Klaten Utara	308	40	673	1.041
Jumlah 2015	<b>33.111</b>	<b>6.581</b>	<b>25.684</b>	<b>65.556</b>
2014	33.166	6.581	25.809	65.556
2013	33.220	6.581	25.755	65.556
2012	33.314	6.386	25.856	65.556
2011	33.374	6.383	25.798	65.556

Sumber : Dinas Pertanian Kabupaten Klaten, 2016

Sedangkan LP2PB (Lahan Perlindungan Pertanian Pangan Berkelanjutan) seluas 32.451 Ha sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Perda Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), khususnya peruntukan sawah lestari. Dengan adanya LP2PB tersebut, alih fungsi lahan pertanian dapat dikendalikan dengan rata-rata perubahan lahan pertanian 39 Ha di luar LP2PB. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.42.

**Tabel 2.42.**  
**Luas Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian Ke Non Pertanian Menurut Kecamatan dan Penggunaannya di Kabupaten Klaten Tahun 2016 (Ha)**

Tahun	Dari Sawah & Tegalan	Peruntukkan Bangunan Tanah				Jumlah
		Perumahan	Industri	Perusahaan	Jasa	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2016	45,3910	33,0577	8,9094	0,113	3,3109	45,3910
2015	55,2309	40,8997	13,6631	-	0,6681	55,2309
2014	54,1504	40,4863	13,6611	-	-	54,1504
2013	79,7695	44,8933	31,1604	-	3,7158	79,7695
2012	67,2869	54,7319	9,8036	1,0856	1,6658	67,2869

*Sumber Data: Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten, 2017*

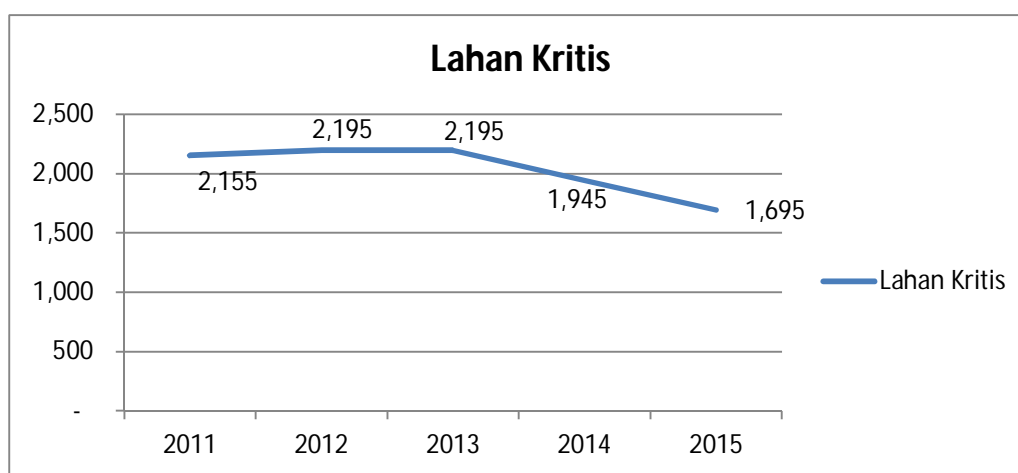
Di Kabupaten Klaten juga dikembangkan pola pertanian terpadu, yang merupakan integrasi antara bidang tanaman pangan, bidang peternakan, dan bidang perikanan yang diharapkan ke depan bisa menjadi Kawasan Agropolitan sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Klaten. Hal ini mengingat sampai dengan saat ini pengembangan kawasan Agropolitan belum dapat direalisasikan.

#### 4. Kehutanan

Hutan di Kabupaten Klaten terdapat 2 (dua) jenis hutan yang masuk dalam kawasan hutan negara yaitu Hutan Lindung seluas 810,6 Ha dan Hutan Produksi seluas 639,8 Ha. Hutan negara ini dikelola oleh Perum Perhutani, sedangkan hutan lainnya adalah Hutan Rakyat seluas 1.202 Ha.

Hutan di Kabupaten Klaten di antaranya:

- *Hutan Lindung*, terletak di bagian barat dan secara administratif berada di wilayah Kecamatan Kemalang yang mencakup Desa Tegalmulyo dan Desa Sidoharjo, serta berada di lereng Gunung Merapi pada ketinggian 700 – 1.200 m dpl.
- *Hutan Produksi*, terletak di 3 (tiga) wilayah kecamatan, yaitu: *Kecamatan* Bayat, Kecamatan Wedi, dan Kecamatan Kalikotes. Hutan produksi ini terletak pada perbukitan Sekis – filit dan perbukitan kapur/batu gamping dengan ketinggian antara 300 – 500 m dpl.
- *Hutan Rakyat*, hutan rakyat ini merupakan program pemerintah melalui program penghijauan dan *rehabilitasi* lahan serta konservasi tanah. Hutan Rakyat ini tersebar di beberapa wilayah kecamatan yang mempunyai lahan kering, diantaranya Kecamatan: Kemalang, Manisrenggo, Karangnongko, Jatinom, Tulung, Prambanan, Bayat dan Wedi.
- Sampai dengan saat ini masih terdapat lahan kritis seluas 1.695 Ha pada tahun 2015, mengalami penurunan seluas 250 Ha dibanding Tahun 2014 seluas 1.945 Ha. Sehingga masih diperlukan adanya Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan, khususnya di wilayah kecamatan Kemalang, Tulung, Jatinom, Karangnongko, Bayat, Prambanan, Wedi, dan Cawas. Adapun perkembangan lahan kritis di Kabupaten Klaten Tahun 2011–2015 dapat dilihat pada Gambar 2.30.



Sumber : Dinas Pertanian Kabupaten Klaten, 2016

**Gambar 2.30.**  
**Perkembangan Lahan Kritis di Kabupaten Klaten Tahun 2011–2015**

- Selain itu di Kabupaten Klaten juga terdapat pengembangan hasil hutan non kayu, meliputi: budidaya tawon madu serta penangkaran burung berkicau, seperti: burung jalak bali, kenari, jalak suren, murai, jalak putih, cucak rowo, perkutut, dan burung love bird sampai dengan saat ini di Kabupaten sudah terdapat 190 penangkar burung (yang sudah resmi terdaftar).

## 5. Energi dan Sumber Daya Mineral

Berdasarkan pengamatan terhadap bahan galian dan pertambangan (sumber daya mineral) yang ada di Kabupaten Klaten, bahan galian tersebut pada umumnya termasuk dalam galian golongan C, dapat dilihat pada disajikan pada Tabel 2.43.

**Tabel 2.43.**  
**Potensi Pertambangan di Kabupaten Klaten**

No	Jenis Mineral	Lokasi	Potensi (m3)	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Andesit Karangdowo	Desa Ringin Puiti, Desa Tumpukan, Kecamatan Karangdowo	1.424.933	Jumlah deposit layak ditambang, belum banyak dimanfaatkan dan dapat digunakan sebagai konstruksi ringan bangunan
2.	Batu Gamping Kalkarenit	Desa Tegalrejo, Kecamatan Bayat	100.000	Jumlah deposit layak ditambang dan dapat digunakan sebagai konstruksi ringan
3.	Batu Gamping Keras	Desa Jimbung, Kecamatan Kalikotes	280.803	Masih dapat ditambang, namun jika terlalu dalam mengakibatkan kecelakaan penambangan
		Desa Wiro, Desa Gununggajah, Kecamatan Bayat	277.060	
4.	Batu gamping Nummulites	Desa Gununggajah, Kecamatan Bayat	1.000	Jumlah deposit tidak layak ditambang
5.	Batu pasir Tufaan	Desa Kerten, Kecamatan Gantiwarno	1.000	Jumlah deposit tidak layak ditambang
6.	Gabro dan Diorite	Desa Jerukan, Desa Gampingan, Kecamatan Bayat	60.000	Jumlah deposit layak ditambang dapat digunakan konstruksi dan bahan uruk
7.	Lempung Aluvial	Desa Mlese, Desa Jabung, Kecamatan Gantiwarno	6.000	Jumlah deposit layak ditambang dan dapat digunakan sebagai bahan baku batu merah
		Desa Semenden, Kecamatan Karangnongko	6.300	
		Desa Rejoso, Desa Pakahan, Desa Kwaran, Desa Bakung, Kecamatan Jogonalan,	309.000	

No	Jenis Mineral	Lokasi	Potensi (m <sup>3</sup> )	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Desa Basin, Desa Gondang Kecamatan Kebonarum	1.895.100	
		Desa Sumberejo, Desa Jetis, Desa Nglinggi Kec. Klaten Selatan	103.500	
8.	Lempung Residual	Desa Beluk, Desa Desa Gunung Gajah, Kecamatan Bayat	85.950	Jumlah deposit layak ditambang dan dapat digunakan sebagai bahan baku keramik, gerabah, genteng dan bata
9.	Marmer	Desa Bawak, Kecamatan Cawas	75	Jumlah deposit tidak layak ditambang,
10.	Pasir Vulkanik & Andesit Vulkaniki	Desa Balerante, Desa Sidorejo, Desa Taluh, Desa Panggang	3.133.849	Jumlah deposit layak ditambang, kualitas pasir vulkanik sangat baik untuk bahan bangunan
11.	Zeolit	Desa Nengahan, Kec. Bayat	100	Deposit tidak layak ditambang

Sumber : Profil Daerah Kabupaten Klaten, 2017 (diolah)

## 6. Perdagangan

Sektor perdagangan merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang mempunyai keterkaitan dengan sektor-sektor lainnya yang peranan sebagai penggerak utama perekonomian di daerah, untuk mendorong peningkatan pendapatan masyarakat, mengurangi pengangguran dan menurunkan angka kemiskinan.

Pasar merupakan sektor utama untuk menggerakkan perekonomian, dan selama 3 (tiga) tahun jumlah pasar tidak ada perubahan. Gambaran pasar menurut jenisnya, dapat dilihat pada terlihat pada Tabel 2.44.

**Tabel 2.44.**  
**Pasar Menurut Jenisnya Di Kabupaten Klaten Tahun 2012-2016**

Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
01 Departemen Store	1	1	1	1	1
02 Pasar Swalayan	108	108	118	118	118
03 Pasar Umum	81	81	81	81	81
04 Pasar Hewan	12	12	9	9	9
05 Pasar Buah	1	1	1	1	1
06 Pasar Sepeda	2	2	2	2	2
07 Pasar Ikan	0	0	0	0	0
08 Lain-Lain / Pasar Burung	4	4	4	4	4
09 Pasar Klitikan	1	1	1	1	1
<b>Jumlah</b>	<b>210</b>	<b>210</b>	<b>217</b>	<b>217</b>	<b>217</b>

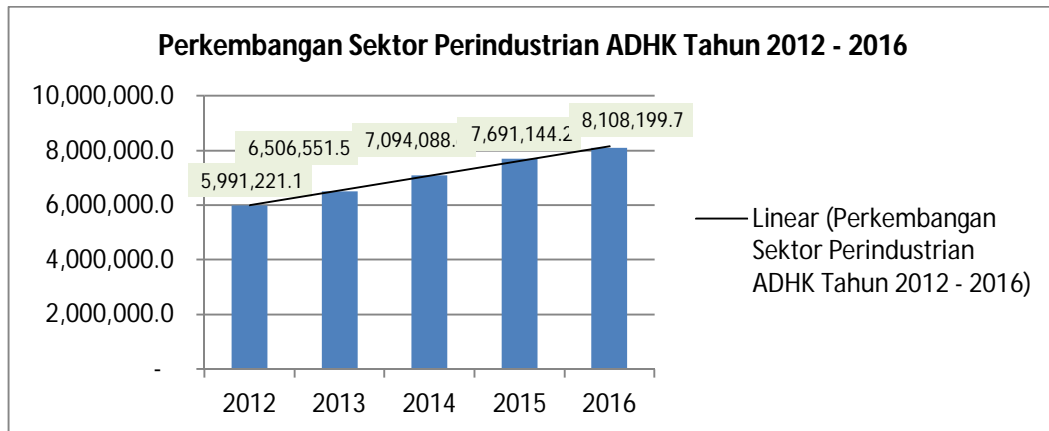
Sumber : Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Klaten, 2017

Dari Tabel 2.44 di atas dapat diketahui bahwa sarana perdagangan yang berperan sebagai penggerak perekonomian masyarakat di daerah sangat bervariasi, mulai dari bentuk departemen store, pasar swalayan sampai dengan pasar klitikan. Hal ini disebabkan karena masyarakat yang semakin bervariasi dan berkembang seiring dengan perkembangan penduduk dan teknologi, kondisi iklim usaha yang kondusif di daerah, disamping itu pemerintah juga memberikan kemudahan kepada pelaku usaha atau masyarakat untuk mendirikan pasar swalayan dengan syarat-syarat tertentu sesuai peraturan yang berlaku.



## 7. Perindustrian

Dalam komponen PDRB Kabupaten Klaten, sektor industri manufaktur dibentuk oleh sub sektor industri besar, menengah, kecil dan rumah tangga. Sektor industri sebagai sektor andalan memberikan andil yang besar bagi perekonomian di Kabupaten Klaten, yaitu memberikan sumbangan terhadap PDRB ADHK sebesar 32,82% (atau Rp.5.991.221,1 ribu) pada tahun 2012 dan pada tahun 2016 menjadi sebesar 35,74% (Rp.8.108.199,73 ribu). Adapun perkembangan sektor Perindustrian terhadap PDRB ADHK pada Tahun 2012-2016 dapat disajikan pada Gambar 2.31.



Sumber : BAPPEDA Kabupaten Klaten, 2017 (diolah)

**Gambar 2.31.**  
**Perkembangan sektor Perindustrian terhadap PDRB ADHK pada Tahun 2012-2016**

Basis ekonomi untuk *sektor industri manufaktur* berdasarkan sebaran di tingkat kecamatan yang menempati 5 (lima) besar adalah: (1) Kecamatan Ceper; (2) Kecamatan Trucuk; (3) Kecamatan Wedi; (4) Kecamatan Prambanan; dan (5) Kecamatan Jogonalan. Perusahaan industri besar dan sedang menurut kecamatan di Kabupaten Klaten tahun 2016 terdiri dari berbagai bidang industri seperti industri makanan dan minuman, tembakau, tekstil, pakaian jadi, kayu dan *furniture*, kertas dan percetakan, serta logam dan besi. Industri besar dan sedang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keseluruhan sektor industri selama tahun 2012-2016 yang mengalami peningkatan adalah perusahaan industri tekstil, industri lainnya cenderung mengalami penurunan. *Industri logam dan besi* banyak terdapat di Kecamatan Ceper, Karanganyar, Polanharjo, Delanggu dan Wonosari. *Industri kertas dan percetakan* terdapat di Kecamatan Klaten Utara dan Klaten Tengah. *Industri kayu dan furniture* terdapat di Kecamatan Ceper, Trucuk, Cawas, Juwiring, Ngawen dan Klaten Utara.

*Kawasan potensial sentra industri logam* terdapat di Kecamatan Ceper, Polanharjo, Karanganyar, Delanggu, dan Wonosari. *Sentra industri tembakau* terdapat di Kecamatan Prambanan, Manisrenggo, Kebonarum, Wedi, Klaten Selatan, Ngawen, Gantiwarno, Trucuk, Jogonalan, dan Ceper. *Sentra industri gerabah* terdapat di Kecamatan Wedi, dan Bayat. *Sentra industri mebel* terdapat di Kecamatan Klaten Utara, Trucuk, Cawas, Juwiring, Ngawen, dan Ceper. Adapun *sentra industri konveksi* terdapat di Kecamatan Jogonalan, Wedi, Klaten Selatan, Ngawen, Karanganyar, Wonosari dan Pedan.

## 8. Ketransmigrasian.

Kepadatan penduduk yang semakin besar serta daya dukung dari sektor ekonomi tidak memungkinkan untuk tetap meningkatkan perekonomian masyarakat, sehingga masyarakat banyak yang merantau, pilihan lain bertransmigrasi untuk meningkatkan kualitas hidup. Selama 3 (tiga) tahun terakhir ada 4 (empat) pulau yang menjadi tujuan transmigrasi yaitu Sumatra, Kalimantan, Sulawesi dan Provinsi Maluku.

Jumlah transmigrasi tahun 2012 di Pulau Kalimantan sebanyak sebanyak 15 KK (41 jiwa), tahun 2013 telah diberangkatkan sebanyak 10 KK (39 jiwa), tahun 2014 sebanyak 4 KK (15 jiwa), dan pada tahun 2015 sebanyak 30 KK (60 jiwa), dan pada tahun 2016 sebanyak 19 KK.

### 2.1.3.3. Penunjang Urusan Umum Pemerintahan

Di samping berdasarkan urusan wajib, dan urusan pilihan Pemerintah daerah diberi kewenangan untuk melaksanakan penunjang urusan pemerintahan dalam bidang perencanaan, penganggaran, pengawasan dan kepegawaian. Adapun secara garis besar, sebagai berikut:

Penunjang urusan umum Pemerintahan, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dalam pelaksanaannya telah memberi warna tentang Reformasi perubahan yang sangat signifikan dalam kehidupan berpolitik di Kabupaten Klaten.

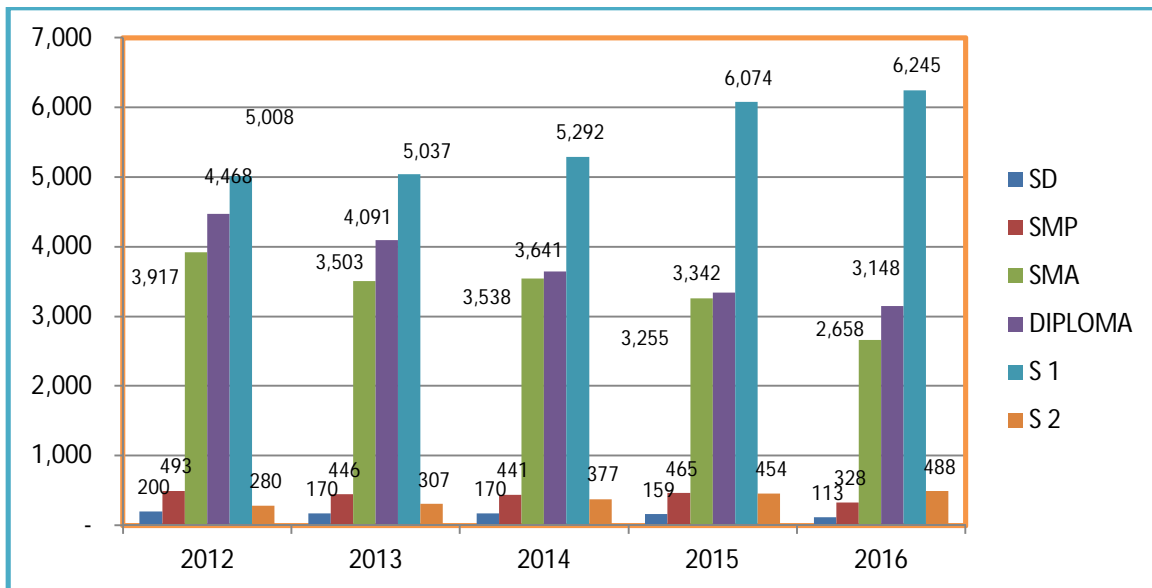
Komposisi anggota DPRD Kabupaten Klaten hasil Pemilu Tahun 2014. Sebanyak 17 orang dari Fraksi PDIP, 8 orang dari Fraksi Golkar, 5 orang dari Fraksi PAN, 7 orang dari Fraksi Keadilan Sejahtera, 4 orang dari Fraksi PHN (Pembangunan Hati Nurani), 4 orang dari PKN (Partai Kebangkitan Nasional). Dari sebanyak 50 orang anggota DPRD, terbagi ke dalam 4 komisi, yaitu: (i) Komisi I sebanyak 10 orang, (ii) Komisi II sebanyak 12 orang, (iii) Komisi III sebanyak 10 orang, dan (iv) Komisi IV sebanyak 13 orang. Selama kurun waktu 2014-2015, DPRD periode 2014-2019 telah menghasilkan beberapa produk hukum. Sebagai gambaran kinerja DPRD diukur dari jenis dan jumlah keputusan selama tahun 2012-2016 selengkapnya disajikan pada Tabel 2.45.

**Tabel 2.45**  
**Jenis dan Jumlah Keputusan DPRD 2012-2016**

Komisi	Fraksi				
	2012	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
01. Perda	17	22	12	13	18
02. Keputusan DPRD	32	47	38	32	-
03. Keputusan Pimpinan DPRD	22	18	23	22	-
04. Keputusan Panitia Anggaran	17	7	6	9	-
05. Keputusan Panitia Musyawarah	12	12	13	16	-
<b>Jumlah</b>	<b>95</b>	<b>106</b>	<b>92</b>	<b>92</b>	

Sumber: Kabupaten Klaten Dalam Angka Tahun 2016

Dipihak lain, Berdasar data Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Klaten, pada tahun 2016 jumlah Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Klaten telah mencapai sebanyak 12.979 orang, yang terdiri dari 5.908 orang (atau 45,52 %) Laki-laki, dan 7.072 orang (atau 54,48 %) perempuan. Gambaran singkat profil jumlah pegawai berdasarkan Jenjang Pendidikan, dan dapat disajikan dalam Gambar 2.32.



Sumber : BKPPD Kabupaten Klaten, 2017

**Gambar 2.31.**  
**Profil Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan Tahun 2012-2016**

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah telah mengamanatkan bahwa pembentukan perangkat Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia harus dengan pertimbangan rasional, efektif, efisien dan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah masing-masing. Pemerintah Kabupaten Klaten pada tahun berikutnya telah mengesahkan dan sekaligus mengimplementasikan Peraturan Daerah yang mengatur Organisasi Perangkat Daerah.

Adapun perkembangan struktur organisasinya Dinas bertambah dari 7 (2007) menjadi 10 (2010) menjadi 18 (2016), kemudian Kantor berkurang dari 13 (2007) menjadi 6 (2010) menjadi 1 (2016), jumlah Badan dari 4 (2007) menjadi 5 (2011) menjadi 5 (2016) dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas bertambah dari 75 (2007) menjadi sebanyak 87 (2010).

## 2.1.4. Aspek Potensi Daerah

### 2.1.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Tingkat kesejahteraan suatu rumah tangga dapat diukur melalui besarnya pendapatan dan konsumsi/pengeluaran rumah tangga. Semakin tinggi pendapatan, maka semakin tinggi pula pengeluaran rumah tangga. Gambaran tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.46.

**Tabel 2.46.**  
**Persentase Penduduk Kabupaten Klaten Menurut Golongan Pengeluaran Tahun 2012-2016 (dalam persen)**

<i>Golongan Pengeluaran</i>	2012	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
< 40.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.000 - 59.999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60.000 - 79.999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80.000 - 99.999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.000 - 149.999	1,31	1,09	1,02	0,71	0,32
150.000 - 199.999	5,19	5,25	5,11	3,17	1,07
200.000 - 299.999	26,41	25,66	23,07	12,07	8,66
> 300.000	67,09	68,00	70,80	84,05	89,95
Jumlah	100,00	100,00	100,00	100,00	100

Sumber : Profil Daerah Kabupaten Klaten 2017, (diolah)



Dari tabel di atas dapat dilihat persentase penduduk menurut golongan pengeluaran, pada tahun 2016 terjadi peningkatan untuk golongan >Rp.300.000,- sedangkan untuk golongan lainnya mengalami penurunan. Meskipun uang yang dibelanjakan tidak dapat untuk mengkonsumsi banyak pilihan, sedangkan pendapatan tidak ada perubahan/penambahan, maka ada kecenderungan untuk tidak membeli barang yang sifatnya tidak mendesak karena uang yang dimiliki tidak mencukupi. Pergeseran ke kelompok pengeluaran yang lebih tinggi karena adanya peningkatan harga-harga kebutuhan yang harus dicukupi.

Tabel di bawah ini menunjukkan sebagian besar pengeluaran penduduk adalah untuk makanan dibanding untuk non makanan. Hal ini menunjukkan bahwa kebutuhan makan sebagai kebutuhan primer merupakan kebutuhan pokok dibanding kebutuhan non makan yang sifatnya sekunder. Pemenuhan kebutuhan makanan cenderung menurun, pada tahun 2011 sebesar 55,14% , dan pada tahun 2015 menjadi 48,07%, sebaliknya untuk pemenuhan non makanan pada tahun 2011 sebesar 44,86%, dan pada tahun 2015 menjadi sebesar 51,93%. Gambaran tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.47.

**Tabel 2.47**  
**Rata - rata Pengeluaran Penduduk Menurut Pengeluaran Makanan dan Non Makanan Tahun 2012- 2016**

Rata - rata Pengeluaran Penduduk	2012	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Makanan	51,30	51,23	51,21	48,07	46,03
2. Non Makanan	48,70	48,77	48,79	51,93	53,97
<b>Jumlah</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100</b>

Sumber: Profil Daerah Kabupaten Klaten 2017, (diolah)

#### 2.1.4.2. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

Pembangunan sarana dan prasarana di Kabupaten Klaten direncanakan untuk mendukung terwujudnya visi daerah. Fasilitas wilayah/infrastruktur yang ada di Kabupaten Klaten, sebagai-berikut:

##### 1. Lahan Pertanian

Penggunaan lahan di Kabupaten Klaten setiap tahunnya selalu berubah dan cenderung mengikuti pertambahan jumlah penduduk, dan perluasan kegiatan perekonomian. Perubahan tata guna lahan berhubungan dengan lahan sawah dan lahan kering. Gambaran tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.48.

**Tabel 2.48.**  
**Luas Lahan Pertanian dan Bukan Lahan Pertanian di Kabupaten Klaten Tahun 2016 (dalam satuan Ha)**

Kecamatan	Lahan Pertanian		Lahan Bukan Pertanian	Luas Wilayah
	Sawah	Bukan Sawah		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
01 Prambanan	1.243	13	1.187	2.443
02 Gantiwarno	1.625	155	784	2.564
03 Wedi	1.554	18	866	2.438
04 Bayat	815	785	2.343	3.943
05 Cawas	2.317	46	1.084	3.447
06 Trucuk	1.909	2	1.470	3.381
07 Kalikotes	750	8	540	1.298
08 Kebonarum	720	2	245	967
09 Jogonalan	1.574	1	1.095	2.670
10 Manisrenggo	1.509	139	1.048	2.696
11 Karangnongko	764	851	1.059	2.674

Kecamatan	Lahan Pertanian		Lahan Bukan Pertanian	Luas Wilayah
	Sawah	Bukan Sawah		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
12 Ngawen	1.042	8	647	1.697
13 Ceper	1.538	7	900	2.445
14 Pedan	872	445	600	1.917
15 Karangdowo	2.048	69	806	2.923
16 Juwiring	2.001	12	966	2.979
17 Wonosari	2.219	14	881	3.114
18 Delanggu	1.303	1	574	1.878
19 Polanharjo	1.822	92	470	2.384
20 Karanganom	1.682	11	713	2.406
21 Tulung	1.738	467	995	3.200
22 Jatinom	604	1.543	1.406	3.553
23 Kemalang	54	1.848	3.264	5.166
24 Klaten Selatan	809	3	631	1.443
25 Klaten Tengah	294	1	597	892
26 Klaten Utara	308	40	673	1.041
Jumlah 2016				
2015	33.111	6.581	25.684	65.556
2014	33.166	6.581	25.809	65.556
2013	33.220	6.581	25.755	65.556
2012	33.314	6.386	25.856	65.556

Sumber : Dinas Pertanian Kabupaten Klaten

## 2. Pasar

Pasar merupakan pendukung keberhasilan daerah dalam memasarkan produk daerah. Fasilitas pasar di Kabupaten Klaten menurut kepemilikannya, dapat dibedakan menjadi: (i) milik pemerintah, (ii) milik desa, dan (iii) milik perorangan. Gambaran Jumlah Pasar Kios, Los dan Pedagang dapat dilihat pada Tabel 2.49.

**Tabel 2.49.**  
**Jumlah Pasar Kios, Los dan Pedagang Menurut Kecamatan di Kabupaten Klaten Tahun 2016**

Kecamatan	Pasar			Jumlah		
	Pemerintahan	Desa	Perorangan	Kios	Los	Pedagang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
01 Prabanan	3	1	-	589	92	1312
02 Gantiwarno	2	1	-	69	12	230
03 Wedi	3	2	-	36	3	-
04 Bayat	3	2	-	285	17	1172
05 Cawas	2	6	-	117	14	153
06 Trucuk	2	3	-	24	10	73
07 Kalikotes	1	2	-	95	15	503
08 Kebonarum	1	-	1	60	11	244
09 Jogonalan	2	2	-	74	5	263
10 Manisrenggo	2	-	-	8	8	36
11 Karangnongko	1	-	-	27	83	1097
12 Ngawen	1	2	-	42	9	212
13 Ceper	-	2	1	71	28	476
14 Pedan	1	2	-	153	19	897
15 Karangdowo	1	2	-	68	2	372
16 Juwiring	3	1	-	169	84	617
17 Wonosari	1	1	-	193	39	769
18 Delanggu	1	-	-	74	37	269
19 Polanharjo	-	1	-	81	66	634
20 Karanganom	3	1	-	234	49	1340
21 Tulung	1	5	-	287	80	1168
22 Jatinom	2	3	-	89	16	250
23 Kemalang	2	1	-	49	30	320
24 Klaten Selatan	1	-	-	64	52	501
25 Klaten Tengah	7	-	-	18	4	4
26 Klaten Utara	4	1	-	17	6	41
Jumlah 2016	-	-	-	-	-	-
2015	50	41	2	2.993	791	12.953
2014	49	48	2	3.655	1.823	11.189
2013	48	39	-	2.884	790	13.749
2012	48	54	1	2.595	862	13.415

Sumber: Kabupaten Klaten Dalam Angka 2016



### 3. Jaringan Listrik

Jaringan listrik merupakan pendukung kegiatan pembangunan di segala bidang. Jaringan listrik di Kabupaten Klaten sampai dengan tahun 2015 KWH terjual sudah mencapai 600.177.101 Kwh, dan 2.209.751 Kvarh. Gambaran selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.50

**Tabel 2.50.**  
**KWH Terjual PLN Menurut Bulan Tahun 2016**

Tahun	Pedan		Tulung		Klaten		Delanggu	
	Kwh	Kvarh	Kwh	Kvarh	Kwh	Kvarh	Kwh	Kvarh
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
2016								
2015	159.682.405	710.528	132.982.842	195.264	234.886.147	1.160.923	72.625.707	143.036
2014	154.481.066	479.800	130.131.858	135.712	222.424.785	1.420.765	68.882.418	214.629
2013	145.477.079	592.698	120.070.726	49.141	205.095.237	631.249	62.244.093	82.001
2012	135.474.329	483.506	118.246.829	54.937	185.073.854	120.729	58.323.388	11.982

Sumber : Kabupaten Klaten Dalam Angka 2015

### 4. Jaringan Air Bersih

Produksi air bersih di Kabupaten Klaten selama tahun 2012-2016 mengalami peningkatan. Jumlah produksi air bersih tahun 2012 sebesar 10.066.160 m<sup>3</sup>, dan pada tahun 2016 sudah mencapai 11.678.870 m<sup>3</sup>. Gambaran tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.51.

**Tabel 2.51.**  
**Kapasitas dan Produksi Air Minum Yang Terjual dari PDAM di Kabupaten Klaten Tahun 2016**

Tahun	Jumlah Sumber	Jumlah Pelanggan	Kapasitas Produksi	Air yang Didistribusikan	Air yang Terjual	Air yang Hilang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2016	-	-	-	-	-	-
2015	16	37.941	11.678.870	10.983.558	8.473.591	2.509.967
2014	16	37.071	11.711.094	11.257.296	7.909.837	3.347.154
2013	16	34.933	10.366.903	10.216.812	7.486.919	2.729.893
2012	16	32.449	10.066.160	9.914.382	7.214.415	2.699.967

Sumber: PDAM Kabupaten Klaten, 2016

Dilihat dari jumlah sumber air yang ada, baik yang berasal dari sumber mata air dan dari waduk atau rawa-rawa, ada 4 (empat) kecamatan yang mempunyai sumber air dari mata air terbanyak, yaitu: (i) Kecamatan Manisrenggo sebanyak 24 sumber mata air, (ii) Kecamatan Tulung sebanyak 24 sumber mata air, (iii) Kecamatan Karangnongko sebanyak 17 sumber mata air, dan (iv) Kecamatan Ngawen sebanyak 16 sumber mata air. Sementara hanya ada 1 (satu) kecamatan yang mempunyai sumber air dari waduk, yaitu Kecamatan Bayat.

### 5. Jaringan Transportasi

Jaringan transportasi yang berupa panjang jalan di Kabupaten Klaten pada tahun 2015 sepanjang 777 km terdiri dari jalan aspal, jalan kerikil dan jalan tanah. Berdasarkan kondisi jalan yang ada, tingkat kerusakan jalan di Kabupaten Klaten pada tahun 2015. Perincian selengkapnya dapat dilihat pada dapat dilihat pada Tabel 2.52.

**Tabel 2.52.**  
**Panjang Jalan Menurut Jenis Permukaan Kondisi dan Kelas Jalan**  
**di Kabupaten Klaten Tahun 2016 ( Km )**

Keadaan	Status Jalan									
	Jalan Negara			Jalan Provinsi			Jalan Kabupaten			
	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016	
(1)	(2)			(3)			(4)			
<b>I</b>	<b>Jenis Permukaan</b>									
	a. Aspal/Hotmix/Lapen/sandsheet	33,52	33,52	33,52	41.360	41.360	41.360	754	754	753,94
	b. Berbatu/Macadam	-	-	-	-	-	-	1,63	1,63	3,16
	c. Hotmix	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	d. Kerikil	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	e. Tanah/Jalan Belum Tembus	-	-	-	-	-	-	21,37	21,37	12,53
	f. Beton	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Jumlah - I</b>	<b>33,52</b>	<b>33,52</b>	<b>33,52</b>	<b>41.360</b>	<b>41.360</b>	<b>41.360</b>	<b>777</b>	<b>777</b>	<b>769,63</b>
<b>II</b>	<b>Kondisi Jalan</b>									
	a. Baik	3,9	5,86	9,7	25,76	18,76	17,76	550,57	381,08	471,86
	b. Sedang	29,62	24,42	22,67	15,61	6,38	7,38	86,63	206,61	142,76
	c. Rusak	-	3,24	1,15	-	2	3	-	68	52
	d. Rusak Berat				14,21	14,23	13,23	132,44	113,94	103,01
	<b>Jumlah - II</b>	<b>33,52</b>	<b>33,52</b>	<b>33,52</b>	<b>41,37</b>	<b>41,37</b>	<b>41,37</b>	<b>777</b>	<b>769,63</b>	<b>769,63</b>
<b>III</b>	<b>Kelas Jalan</b>									
	a. Kelas I	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	b. Kelas II	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	c. Kelas III	-	-	-	41.360	41.360	41360	-	-	-
	d. Kelas IIIA	33,52	33,52	33,52	-	-	-	-	-	-
	e. Kelas IIIB	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	f. Kelas IIIC	-	-	-	-	-	-	777	777	769,63
	g. Kelas IV	-	-	-	-	-	-	754	754	-
	h. Kelas Tidak Dirinci	-	-	-	-	-	-	1,63	1,63	-
	<b>Jumlah - III</b>	<b>33,52</b>	<b>33,52</b>	<b>33,52</b>	<b>41,36</b>	<b>41,36</b>	<b>41,36</b>	<b>777</b>	<b>777</b>	<b>769,63</b>

Sumber : Kabupaten Klaten Dalam Angka 2016

Panjang jalan berdasarkan jenis jalan menurut kecamatan di Kabupaten Klaten meliputi: (i) Jalan Provinsi, (ii) Jalan Kabupaten, (iii) Jalan Poros Desa, dan (iv) Jalan Lingkungan seperti terlihat pada Tabel 2.50. Dari tabel tersebut dapat dilihat kecamatan-kecamatan yang dilalui jalan provinsi, yaitu: (i) Kecamatan Cawas 8.100 km; (ii) Kecamatan Pedan 6.100 km; (iii) Kecamatan Tulung 6.000 km; serta (iv) Kecamatan Ceper 5.000 km.

Jenis/kategori jalan kabupaten yang tersebar di seluruh kecamatan adalah (i) Kecamatan Gantiwarno 47.540 km; (ii) Kecamatan Klaten Tengah 42.880 km; (iii) Kecamatan Prambanan 39.140 km; dan (i) Kecamatan Karangnongko 38.320 km. Gambaran tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.53

**Tabel 2.53.**  
**Panjang Jalan Berdasar Jenis Jalan Menurut Kecamatan**  
**di Kabupaten Klaten Tahun 2016 (dalam km)**

No.	Kecamatan	Jalan Provinsi	Jalan Kabupaten	Jalan Poros Desa	Jalan Lingkungan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
01.	Prambanan	-	39,140	78,580	43,350
02.	Gantiwarno	-	47,540	136,950	27,900
03.	Wedi	-	24,880	88,068	48,160
04.	Bayat	-	25,630	87,815	93,130
05.	Cawas	8,100	37,180	101,215	87,335
06.	Trucuk	0,940	36,920	104,635	98,287
07.	Kalikotes	-	20,580	84,688	74,373
08.	Kebonarum	-	20,440	42,825	10,725
09.	Jogonalan	-	25,970	81,141	65,710
10.	Manisrenggo	-	28,430	105,840	51,050
11.	Karangnongko	-	38,320	74,540	37,735

No.	Kecamatan	Jalan Provinsi	Jalan Kabupaten	Jalan Poros Desa	Jalan Lingkungan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
12.	Ngawen	2,900	25,220	64,460	58,700
13.	Ceper	5,000	16,370	81,570	77,255
14.	Pedan	6,100	25,210	64,520	75,005
15.	Karangdowo	-	22,140	107,315	37,319
16.	Juwiring	-	31,190	121,645	83,074
17.	Wonosari	-	31,020	54,810	57,820
18.	Delanggu	-	20,920	57,543	57,415
19.	Polanharjo	-	28,610	95,266	56,275
20.	Karanganom	-	26,200	100,650	81,088
21.	Tulung	6,000	37,370	107,330	79,390
22.	Jatinom	4,400	33,060	83,550	98,780
23.	Kemalang	-	35,810	137,450	26,100
24.	Klaten Selatan	-	26,700	59,280	30,404
25.	Klaten Tengah	-	42,880	24,850	13,460
26.	Klaten Utara	1,400	29,230	24,500	24,770
	JUMLAH	34,840	776,960	2.171,006	1.494,610

Sumber: Kabupaten Klaten Dalam Angka 2016

#### 6. Sarana Akomodasi

Sarana akomodasi penunjang perkembangan sektor pariwisata di Kabupaten Klaten terdapat sarana akomodasi penginapan sebanyak 42 hotel/losmen, walaupun belum ada yang berbintang, tetapi cukup memadai bagi wisatawan asing maupun domestik. Sedangkan untuk *Tour and Travel* (biro perjalanan) sudah tersedia sebanyak 18 buah, dengan perincian dapat dilihat pada Tabel 2.54.

**Tabel 2.54.**  
**Biro Perjalanan di abupaten Klaten**

Biro Perjalanan	
1. PT Ekapari	10. Persada Indah Tour
2. CV. Dewa Nusantara Tour	11. Sargedde Tour and Travel
3. CV. Pulo Mas Tour	12. Pradana Tour
4. PT. Danita Tour Service	13. Selendang Sutera
5. Adi Tour	14. Bintang Timur
6. Giri Sampurna Putra Tour	15. Galihayu Tour and Travel
7. H and R Tour	16. Astuti Pinastika Tour
8. Multi Pratama	17. Graphindo Tour Travel
9. Sembilan Buana Tour	18. Kharisma Tour

#### 2.1.4.3. Fokus Iklim Berinvestasi

Penanaman Modal atau investasi merupakan mesin penggerak pertumbuhan pembangunan (*engine of growth of development*) melalui peningkatan aktivitas sektor-sektor ekonomi pembentuk Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Kabupaten Klaten.

Peningkatan peluang investasi dilaksanakan dengan perbaikan pelayanan perijinan, pemberian insentif investasi, penciptaan keamanan dan ketertiban kota, pengembangan penanaman modal dan investasi daerah, meningkatkan promosi dan kerjasama investasi, mendorong tumbuhnya industri kreatif. Penyediaan infrastruktur yang cukup dan berkualitas merupakan daya tarik investasi, hal ini merupakan prasyarat untuk mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi tinggi dan berkelanjutan. Ketersediaan infrastruktur yang tidak memadai akan menjadi kendala bagi masuknya investasi. Peningkatan partisipasi swasta melalui kemitraan antara pemerintah, masyarakat dan swasta (*public-private partnership*) diperlukan untuk menjawab tantangan terbatasnya sumber daya pemerintah dalam pembiayaan pembangunan, terutama terkait dengan efisiensi pembiayaan investasi.



Kondisi perekonomian Kabupaten Klaten diukur dari berbagai variabel makro seperti PDRB dan laju pertumbuhan ekonomi, tingginya kedua variable tersebut sangat mendukung masuknya investasi baik dalam bentuk Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA). Gambaran jumlah tenaga kerja, nilai investasi dan nilai produksi berdasarkan kelompok industri di Kabupaten Klaten tahun 2016, tersebut dapat dilihat pada Tabel 2. 55.

**Tabel 2.55.**  
**Perusahaan Industri dan Tenaga Kerja Menurut Kelompok Usaha di Kabupaten Klaten Tahun 2016**

Kelompok Industri		Jumlah Unit Usaha	Jumlah Tenaga Kerja	Investasi (JutaanRp)	Nilai Produksi (Jutaan Rp)
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)
<b>I</b>	<b>INDUSTRI BESAR / MENENGAH</b>				
01	Industri Logam Mesin Kimia dan Aneka ( ILMKA )	88	7.717	377.326.533	1.739.405.385
02	Industri Hasil Pertanian dan Kehutanan	45	5.101	250.310.633	1.153.902.491
	<b>Sub Jumlah 2016</b>	134	12.818	627.637.166	2.893.307.876
<b>II</b>	<b>INDUSTRI KECIL</b>				
01	Industri Logam Mesin Kimia dan Aneka ( ILMKA )	17.598	71.628	545.760.452	2.276.256.721
02	Industri Hasil Pertanian dan Kehutanan	17.074	59.526	445.648.807	1.860.555.185
	<b>Sub Jumlah 2016</b>	34.672	131.154	991.409.259	4.136.811.906

Sumber : Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Klaten, 2017

#### 2.1.4.4. Fokus Kualitas Sumber Daya Manusia

*United Nation Development Programme* (UNDP) merumuskan Pembangunan Manusia sebagai upaya memperluas peluang dan pilihan maupun taraf yang telah dan akan dicapai sehingga upaya tersebut dapat diketahui secara transparan. Konsep Pembangunan Manusia menuntut terjadinya formasi (*formation*) atas kemampuan manusia yang terlihat melalui perbaikan taraf kesehatan, pengetahuan dan ketrampilan serta daya beli sehingga penduduk memperoleh/menemukan manfaatnya terutama dalam hal produktivitas, pemerataan, pemberdayaan dan kesinambungan.

Masalah pembangunan yang harus diatasi setiap daerah adalah jumlah pengangguran dan ketersediaan lapangan kerja. Jumlah pencari kerja di Kabupaten Klaten selama 3 (tiga) tahun terakhir bersifat fluktuatif. Tahun 2011 jumlah pencari kerja wanita sebanyak 5.150 orang, pada Tahun 2015 menjadi 4.287 pencari kerja. Jumlah pencari kerja laki-laki Tahun 2011 sebanyak 5.150 orang, tahun 2015 menjadi 4.596 orang. Jumlah pencari kerja, baik laki-laki maupun perempuan dari tahun ke tahun bersifat fluktuatif, dan gambaran selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.56.

**Tabel 2.56.**  
**Banyaknya Pencari Kerja Menurut Pendidikan dan Jenis Kelamin Tahun 2012-2016**

Tahun	SD		SMP		SMA/SMK		Sarjana Muda		Sarjana		Jumlah	
	Lk	Pr	Lk	Pr	Lk	Pr	Lk	Pr	Lk	Pr	Lk	Pr
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2016	17	58	244	393	3.485	2.403	155	455	283	427	4.184	3.738
2015	12	36	304	425	3.728	2.848	220	491	332	487	4.596	4.287
2014	9	21	268	384	3.265	2.340	176	514	529	1.086	4.237	4.345

Tahun	SD		SMP		SMA/SMK		Sarjana Muda		Sarjana		Jumlah	
	Lk	Pr	Lk	Pr	Lk	Pr	Lk	Pr	Lk	Pr	Lk	Pr
2013	9	35	402	701	4.593	3.886	483	970	1.550	2.457	7.037	8.049
2012	8	24	255	362	2.475	1.922	134	333	279	346	3.148	2.987

Sumber: Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Klaten, 2017 (diolah)

## 2.2. EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD TAHUN LALU DAN REALISASI RPJMD

Era pembangunan berbasis kinerja bukan masalah bagaimana program/kegiatan sudah dilaksanakan atau belum dan seberapa serapan anggaran, melainkan bagaimana target sasaran strategis jangka menengah yang telah ditetapkan tercapai atau tidak. Sehingga pembangunan berbasis kinerja, sesungguhnya upaya untuk mencapai efisiensi pelaksanaan program/kegiatan dan sumber daya anggaran yang diukur dari keluaran, hasil maupun dampak.

Sehingga pendekatan pembangunan berbasis kinerja akan sejalan dengan upaya untuk mewujudkan prinsip *good governance* dengan mengedepankan akuntabilitas sejauh mana instansi pemerintah telah memenuhi tugas pokok dan fungsinya dalam pelayanan publik. Oleh karena itu pentingnya pengendalian dan pertanggungjawaban pelaksanaan program/kegiatan untuk memastikan bahwa kinerja yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan pembangunan, dan mencapai target yang telah ditetapkan. Salah satu dasar rujukan yang diacu adalah Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 54 Tahun 2014 tentang Pentunjuk Teknis Penyusunan Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu Atas Laporan Kinerja. Juga berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, terutama terkait dengan penentuan skala nilai peringkat kinerja sebagai bahan penilaian dari masing-masing sasaran strategis. Adapun skala skala nilai peringkat kinerja sebagaimana dimaksud, dapat disajikan pada Tabel 2.57.

Tabel 2.57.  
Skala Nilai Peringkat Kinerja Progresif

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1	$\geq 90,1$	Sangat Baik	
2	$75,1 \leq 90$	Tinggi	
3	$65,1 \leq 75$	Sedang	
4	$50,1 \leq 65$	Rendah	
5	$\leq 50$	Sangat Rendah	

Sumber : Permendagri Nomor 54 Tahun 2010, diolah.

Tabel 2.58  
Skala Nilai Peringkat Kinerja Represif

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1	$\leq 100$	Baik	
2	$\geq 99,9$	Tidak Baik	

Sumber : Bagian Organisasi Kabupaten Klaten

### 2.2.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Mengacu Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021, serta Peraturan Bupati Klaten Nomor 34 Tahun 2016 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021 capaian kinerja organisasi yang telah dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun 2016 sebagaimana Tabel 2.59.

**Tabel 2.59.**  
**Capaian Kinerja Organisasi Perangkat Daerah**  
**Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun 2016**

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Rencana	Realisasi	%
1	Angka Partisipasi Kasar PAUD	Angka	92,19	92,37	100,20
2	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A	Angka	94,53	105,23	111,32
3	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B	Angka	87,58	97,57	111,41
4	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	Angka	81,6	91,26	111,84
5	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	Angka	63,94	72,77	113,81
6	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	Angka	96,64	92,43	95,64
7	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	Angka	0,02	0,03	
8	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	Angka	0,1	0,08	80
9	Angka kelulusan SD/MI	Angka	97,78	99	101,25
10	Angka kelulusan SMP/ MTs	Angka	95,55	98	102,56
11	Persentase balita gizi buruk	%	0,75	0,022	2,93
12	Angka kematian ibu melahirkan	Kasus	15	18	
13	Angka kematian bayi	Angka	12,5	11,69	93,52
14	Angka kematian balita	Angka	15,9	0,463	2,91
15	Persentase konsistensi perencanaan	%	71	89,59	126,18
16	Persentase penggunaan data statistik	%	90	91	101,11
17	Skor LPPD	Skor	2,7	3,019	111,81
18	Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	81	82	101,23
19	Skor LKJIP	Skor	60	47,89	
20	Opini BPK terhadap LKPD	Opini	WTP	WTP	100,00
21	Tingkat Muturitas SPIP	Tingkat	1	1	100,00
22	Tingkat Kapabilitas APIP	Tingkat	2	2	100,00
23	Kontribusi sektor Pertanian terhadap PDRB	%	11,50	12,32	107,13
24	Indeks Kecukupan Pangan	Indeks	91,4	91,4	100,00
25	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Skor	91,5	91,5	100,00
26	Kontribusi sektor industri terhadap PDRB	%	34,52	39,61	114,75
27	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB	%	18,74	18,73	99,95
28	Persentase UMKM yang memiliki daya saing	%	5	4,7	94,00
29	Persentase kenaikan koperasi aktif	%	0,26	0,25	96,15
30	Persentase kenaikan nilai investasi (%) :				
	PMDN	%	1,75	-0,01	
	PMA	%	2,25	-0,40	
31	Persentase Pencari kerja yang ditempatkan	%	24,74	35,15	142,08
32	Persentase kasus hubungan pekerja dan perusahaan tertangani	%	80	100	125,00
33	Persentase hasil inovasi masyarakat/ hasil krenova/ TTG yang dikembangkan	%	2,5	6	240,00
34	Persentase jalan dalam kondisi baik (%)	%	55,26	56,26	101,81
35	Persentase drainase dalam kondisi baik (%)	%	61,31	61,39	100,13
36	Persentase irigasi dalam kondisi baik (%)	%	19,12	41,54	217,26
37	Persentase air minum layak	%	87,2	76,01	87,17
38	Persentase sanitasi penduduk yang terlayani sistem air limbah yang layak	%	88,22	54,76	62,07



No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Rencana	Realisasi	%
39	Rasio penanganan luasan kawasan kumuh perkotaan	%	5	14,58	291,60
40	Persentase ruang terbuka hijau publik kawasan perkotaan	%	8,73	9,8	112,26
41	Persentase penanganan RTLH	%	5,48	3,75	68,43
42	Persentase kenaikan desa tangguh bencana (desa)	%	0	0	#DIV/0!
43	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang	%	90	98	108,89
44	Angka kriminalitas	Angka	2,83	2,82	99,65
45	Rasio PMKS yang memperoleh bantuan sosial	%	41,78	33,16	79,37
46	Rasio anak yang memerlukan perlindungan khusus	%	4,48	3,69	82,37
47	Rasio penduduk berKTP per satuan penduduk	%	90	89,5	99,44
48	Rasio penduduk ber-akta kelahiran per satuan penduduk	%	26,68	28,91	108,36

Catatan : Indikator Nomor 17, 18,19,20 dan 21 merupakan capaian kinerja tahun 2015, sedangkan target capaian tahun 2016 belum bisa disampaikan (masih dalam proses penilaian oleh lembaga yang berwenang).

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 15 (lima belas) sasaran strategis dengan 48 (empat puluh delapan) Indikator Kinerja Sasaran yang terdiri dari 41 (empat puluh satu) indikator yang sifatnya progresif, dan 7 (tujuh) indikator yang sifatnya represif. Dari masing-masing indikator diperoleh hasil:

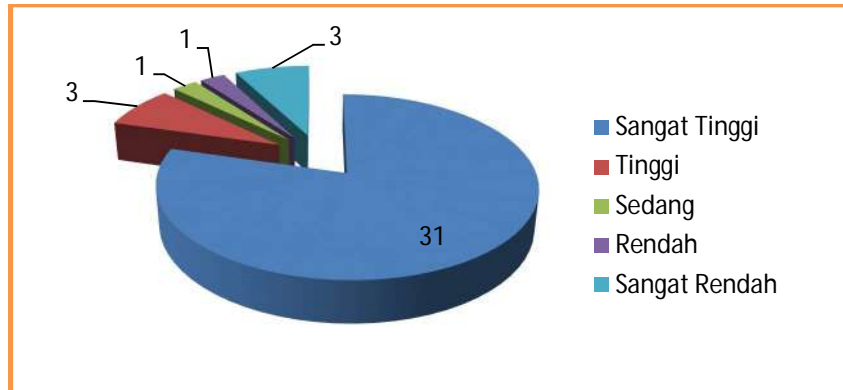
**A. Indikator Progresif**, dengan hasil : a. Sebanyak 33 (tiga puluh tiga) Indikator Kinerja sasaran atau sebanyak 80,49 % dengan kriteria **Sangat Baik**, b. Sebanyak 3 (tiga) atau sebanyak 7,32 % dengan kriteria **Tinggi**, c. Sebanyak 1 (satu) Indikator Kinerja Sasaran atau sebanyak 2,44 % dengan kriteria **Sedang**, d. Sebanyak 1 (satu) Indikator Kinerja Sasaran atau sebanyak 2,44 % dengan kriteria **Rendah**, dan e. Sebanyak 3 (tiga) Indikator Kinerja Sasaran atau sebanyak 7,32 % dengan kriteria **Sangat Rendah**. Adapun perincian atas hasil pengukuran kinerja, sebagai berikut:

- a. Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja dengan kriteria **sangat baik**, atau interval nilai realisasi kinerja  $\geq 90,1$  sebanyak 33 (tiga puluh tiga), diantaranya :
  1. Angka Partisipasi Kasar PAUD;
  2. Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A;
  3. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B;
  4. Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A;
  5. Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B;
  6. Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA;
  7. Angka kelulusan SD/MI;
  8. Angka kelulusan SMP/ MTs;
  9. Persentase konsistensi perencanaan;
  10. Persentase penggunaan data statistik;
  11. Skor LPPD;
  12. Indeks Profesionalitas ASN;
  13. Opini BPK terhadap LKPD;
  14. Tingkat Muturitas SPIP;
  15. Tingkat Kapabilitas APIP;
  16. Kontribusi sektor Pertanian terhadap PDRB;
  17. Indeks Kecukupan Pangan;



18. Skor Pola Pangan Harapan;
  19. Kontribusi sektor industri terhadap PDRB;
  20. Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB;
  21. Persentase UMKM yang memiliki daya saing;
  22. Persentase kenaikan koperasi aktif;
  23. Persentase Pencari kerja yang ditempatkan;
  24. Persentase kasus hubungan pekerja dan perusahaan tertangani;
  25. Persentase hasil inovasi masyarakat/ hasil krenova/ TTG yang dikembangkan;
  26. Persentase jalan dalam kondisi baik (%);
  27. Persentase drainase dalam kondisi baik (%);
  28. Luasan lahan irigasi dalam kondisi baik (%);
  29. Rasio penanganan luasan kawasan kumuh perkotaan;
  30. Persentase ruang terbuka hijau publik kawasan perkotaan;
  31. Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang;
  32. Rasio penduduk berKTP per satuan penduduk;
  33. Rasio penduduk ber-akta kelahiran per satuan penduduk;
- b. Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja dengan kriteria ***tinggi***, atau interval nilai realisasi kinerja ***75,1 ≤ 90*** sebanyak 4 (empat), diantaranya :
1. Persentase air minum layak;
  2. Rasio PMKS yang memperoleh bantuan sosial;
  3. Rasio anak yang memerlukan perlindungan khusus;
- c. Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja dengan kriteria ***sedang***, atau interval nilai realisasi kinerja ***65,1 ≤ 75*** sebanyak 1 (satu), diantaranya :
1. Persentase penanganan RTLH
- d. Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja dengan kriteria ***rendah***, atau interval nilai realisasi kinerja ***50,1 ≤ 65*** sebanyak 1 (satu), diantaranya :
1. Persentase sanitasi penduduk yang terlayani sistem air limbah yang layak;
- e. Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja dengan kriteria ***sangat rendah***, atau interval nilai realisasi kinerja ***≤ 50*** sebanyak 3 (tiga), diantaranya :
1. Skor LKjIP;
  2. Persentase kenaikan nilai investasi (%) PMDN;
  3. Persentase kenaikan nilai investasi (%) PMA;

Berdasarkan Capaian Kinerja Organisasi Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun 2016 sebagaimana diuraikan di atas, apabila ditarik kesimpulan berdasarkan Skala Nilai Peringkat Kinerja sebagaimana diatur berdasarkan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 diperoleh data sebagaimana Gambar 2.32.



Gambar 2.32.  
Peringkat Kinerja Progresif

B. **Indikator Refresif**, dengan hasil: a. Sebanyak 5 (lima) indikator kinerja sasaran atau sebanyak 71,43 % dengan kriteria **Baik (Berhasil Menekan)**, b. Sebanyak 2 (dua) indikator kinerja sasaran atau sebanyak 28,57 % dengan kriteria **Tidak Baik (Melampaui Target yang ditetapkan)**, Adapun perincian atas hasil pengukuran kinerja, sebagai berikut:

a. Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja dengan kriteria **baik**, diantaranya:

1. Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs
2. Persentase balita gizi buruk
3. Angka kematian bayi
4. Angka kematian balita
5. Angka kriminalitas

b. Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja dengan kriteria **tidak baik**, diantaranya:

1. Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI
2. Angka kematian ibu melahirkan

Berdasarkan Capaian Kinerja Organisasi Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun 2016 sebagaimana diuraikan di atas, apabila ditarik kesimpulan berdasarkan Skala Nilai Peringkat Kinerja Represif maka diperoleh data sebagaimana Gambar 2.33.

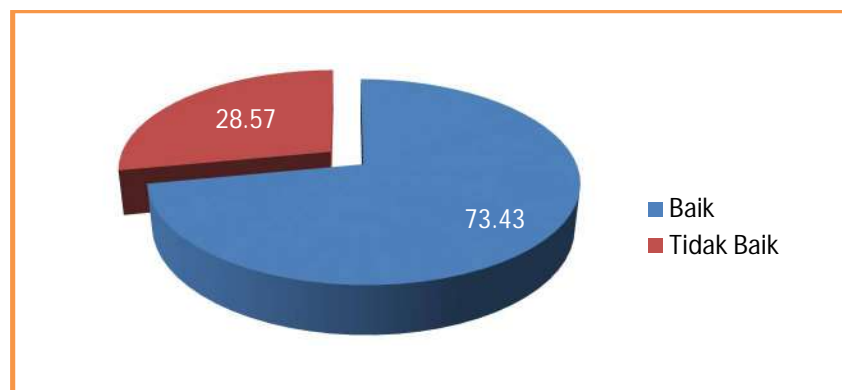


Diagram 2.33.  
Peringkat Kinerja Represif

C. Disamping itu ada 1 (satu) indikator, baik target maupun realisasi masih 0 (kosong), yakni indikator Persentase kenaikan desa tangguh bencana (desa).

## 2.2.2. EVALUASI DAN ANALISIS PENCAPAIAN KINERJA SASARAN RPJMD

Sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, penyelenggaraan urusan pendidikan menjadi pelayanan dasar yang wajib dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Klaten. Untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah, serta untuk mewujudkan sasaran pemenuhan kebutuhan pendidikan bagi masyarakat didukung dengan Pelaksanaan Pendidikan Untuk Semua di Kabupaten Klaten Tahun 2016 disusun tetap berdasarkan pencapaian pendekatan 6 (enam) pilar strategis, yakni: 1). Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), 2). Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, 3). Pendidikan Kecakapan Hidup (*Life-skill*), 4). Pendidikan Keaksaraan, 5). Pengarusutamaan gender, dan 6). Peningkatan Kualitas Pendidikan. Sehingga capaian kinerja PUS 2016 merupakan gambaran keberhasilan capaian kinerja urusan pendidikan dalam mendukung pencapaian visi-misi pembangunan jangka menengah daerah.

### 1. Pencapaian Kinerja Pemenuhan Kebutuhan Pendidikan Bagi Masyarakat.

Adapun capaian sasaran terwujudnya pemenuhan kebutuhan pendidikan bagi masyarakat sebagaimana Tabel 2.60

**Tabel 2.60.**  
**Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja**  
**Terwujudnya Pemenuhan Kebutuhan Pendidikan Bagi Masyarakat**

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian Tahun 2015	Kondisi Tahun 2016			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2016 Thd Target Akhir RPJMD (%)
			Target	Realisasi	%		
1	Angka Partisipasi Kasar PAUD	92,19	92,19	92,37	100,20	93,19	99,12
2	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A	94,53	94,53	105,23	111,32	97,03	108,45
3	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B	87,58	87,58	97,57	111,41	90,08	108,31
4	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	81,6	81,6	91,26	111,84	84,10	108,51
5	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	63,94	63,94	72,77	113,81	66,44	109,53
6	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	96,64	96,64	92,43	95,64	96,69	95,59
7	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	0,02	0,02	0,03		0,01	33,33
8	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	0,1	0,1	0,08	80	0,05	62,50
9	Angka kelulusan SD/MI	97,78	97,78	99	101,25	97,83	101,20
10	Angka kelulusan SMP/MTs	95,55	95,55	98	102,56	95,60	102,51

#### a. Angka Partisipasi Kasar PAUD

Salah satu upaya perluasan dan pemerataan pelayanan akses pendidikan adalah pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak usia dini (*sampai ≤ 6 tahun*) yang dilakukan melalui penyelenggaraan pendidikan anak usia dini (PAUD) untuk memberikan bekal dan kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.

Angka partisipasi kasar penduduk yang terlayani pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Selama lima tahun terakhir (tahun 2012-2016) cenderung mengalami peningkatan, hal ini mengindikasikan bahwa kebutuhan pendidikan anak usia dini menjadi keharusan dan kebutuhan bagi orang tua untuk menyekolahkan anaknya dengan berbagai alasan, dan seiring dengan munculnya kebijakan pendidikan non

formal bagi pengembangan Anak Usia Dini (PAUD). Sebagai gambaran APK PAUD di Kabupaten Klaten tahun 2012-2016 sebagaimana Tabel 2.61.

**Tabel 2.61**  
**Perkembangan Persentase Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Klaten Tahun 2012-2016**

Uraian	Tahun				
	2012	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
APK PAUD	54,36	55,73	58,32	92,19	92,37

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten, 2016

**b. Angka Partisipasi Pendidikan Dasar**

Angka partisipasi pendidikan dasar yang dimaksud dalam pengertian ini adalah Angka Partisipasi Kasar yang dirumuskan dengan jumlah penduduk pada tahun ke- t dari berbagai usia sedang sekolah pada jenjang pendidikan dasar dibagi jumlah penduduk pada tahun ke- t yang berada pada kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan dikalikan seratus.

Angka partisipasi kasar penduduk yang terlayani pada jenjang Pendidikan dasar (SD/MI dan SMP/MTs) selama lima tahun terakhir (tahun 2012-2016) cenderung mengalami peningkatan, hal ini mengindikasikan bahwa kebutuhan pendidikan dasar menjadi keharusan dan kebutuhan bagi orang tua untuk menyekolahkan anaknya dengan berbagai alasan, dan seiring dengan munculnya kebijakan Wajardikdas (pendidikan dasar sembilan tahun). Sebagai gambaran APK pendidikan dasar di Kabupaten Klaten tahun 2012-2016 sebagaimana Tabel 2.62

**Tabel 2.62.**  
**Perkembangan Persentase Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Dasar di Kabupaten Klaten Tahun 2012-2016**

Uraian	Tahun				
	2012	2013	2014	2015	2016
APK SD /MI /SDLB /Paket A	99,27	92,80	92,97	94,51	105,23
APK SMP/MTs/SMPLB/ Paket B	94,24	94,73	87,04	87,58	97,57

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten, 2016

Berdasarkan data Tabel 2.62 di atas ada beberapa karakteristik kenapa APK untuk jenjang pendidikan SD/MI ada yang menonjol, misalnya Kecamatan Wedi, Delanggu, Klaten Utara dan Klaten Tengah hal ini disebabkan karena ada beberapa sekolah swasta yang sebagian besar siswanya berasal dari kecamatan lain. Umumnya anak bersekolah di SD swasta karena sekolah yang bersangkutan memiliki keunggulan khusus dan seazas dengan keinginan orang tuanya untuk menyekolahkan anaknya agar mendapatkan pendidikan moralitas dan rasa nyaman untuk belajar.

Sementara itu, anak usia sekolah di jenjang pendidikan SMP/MTs di kecamatan Kebonarum, Karangnongko, Juwiring, Polaharjo dan Klaten Selatan lebih suka memilih di sekolah di luar kecamatannya sendiri, hal ini disebabkan karena jarak sekolah dan mutu sekolah menjadi pertimbangan utama kenapa memilih sekolah di luar kecamatannya, disamping ada tradisi untuk mengikuti kakak-kakak terdahulunya.

**c. Angka Partisipasi Murni**

Angka partisipasi Murni (APM) di Kabupaten Klaten untuk semua jenjang pendidikan dasar dan menengah dari tahun 2012-2016 mengalami perkembangan yang bersifat fluktuatif. Jenjang pendidikan SD/MI/SDLB/Paket A tahun 2012 sudah mencapai 77,39%, naik menjadi 91,26% pada tahun 2016. Begitu juga untuk jenjang SMP/MTs/SMPLB/Paket B cenderung mengalami penurunan, pada tahun 2012 sudah mencapai 67,87% menjadi 72,77% pada tahun 2016, hal ini dipicu adanya anak usia sekolah pada jenjang tertentu ingin sekolah di luar daerah, yang relatif lebih baik dalam layanan penyelenggaraan pendidikannya. Secara lengkap, perkembangan APM di Kabupaten Klaten untuk semua jenjang pendidikan dapat dilihat pada Tabel 2.63.

**Tabel 2.63.**  
**Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM)**  
**Menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2012- 2016**

Uraian	Tahun				
	2012	2013	2014	2015	2016
APM SD /MI /SDLB /Paket A	77,39	78,46	79,13	81,59	91,26
APM SMP/MTs/SMPLB/ Paket B	67,87	65,13	62,48	63,96	72,77

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten, 2016

Dengan catatan, perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) di Kabupaten Klaten untuk semua Jenjang Pendidikan sangat dipengaruhi kondisi masyarakat dan layanan pendidikan pada saat-saat tertentu, mengingat Klaten diapit dua kota besar, Yogya dan Solo.

**d. Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA**

Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA dari tahun 2012-2016 mengalami perkembangan yang bersifat fluktuatif. Jenjang pendidikan SMP/MTs ke SMA/SMK/MA tahun 2012 sudah mencapai 81,45%, naik menjadi 92,43% pada tahun 2016. Hal ini dipicu adanya anak usia sekolah pada jenjang tertentu ingin sekolah di luar daerah, yang relatif lebih baik dalam layanan penyelenggaraan pendidikannya. Secara lengkap, perkembangan Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA dari tahun 2012-2016 dapat dilihat pada Tabel 2.64.

**Tabel 2.64.**  
**Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA**  
**Tahun 2012-2016**

Uraian	Tahun				
	2012	2013	2014	2015	2016
(AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	81,45	82,32	89,16	96,64	92,43

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten, 2016

**e. Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI**

Selama lima tahun terakhir (tahun 2012-2016) angka putus sekolah yang diukur dengan jumlah anak putus sekolah bersifat fluktuatif, sekalipun adanya dana alokasi khusus bidang pendidikan, dan bantuan keuangan dari pemerintah provinsi sedikit banyak menekan jumlah anak putus sekolah. Sebagai gambaran perkembangan

persentase angka putus sekolah di Kabupaten Klaten tahun 2012-2016 dapat dilihat pada Tabel 2.64

**Tabel 2.64.**  
**Perkembangan Persentase Angka Putus Sekolah**  
**Menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Klaten Tahun 2012-2016**

Uraian	Satuan	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
Angka Putus Sekolah Tk. Pendidikan SD/MI	Kasus	58	56	28	22	33
Angka Putus Sekolah Tk. Pendidikan SMP/MTS	Kasus	104	59	24	42	43
			-	-	-	-

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten, 2017

Berdasarkan Tabel 3.9 di atas tinggi angka putus sekolah, untuk jenjang pendidikan SMK terutama di SMK swasta, mengkondisikan bahwa kualitas lembaga yang bersangkutan hanya dapat memperoleh siswa yang kurang berprestasi, disamping layanan pendidikan kejuruan belum bisa memberi jaminan kebutuhan lapangan kerja. Dipihak lain, anak usia sekolah jenjang pendidikan SMA/MA/SMK lebih ingin cepat bekerja di sektor non formal (pekerja/tukang perumahan) daripada sekolah formal berlama-lama.

**f. Angka Kelulusan SD/MI**

Angka Kelulusan (AL) di Kabupaten Klaten untuk semua jenjang pendidikan dasar dan menengah dari tahun 2012-2016 mengalami perkembangan yang bersifat fluatatif. Jenjang pendidikan SD/MI/SDLB/Paket A tahun 2012 sudah mencapai 99,66%, naik menjadi 99% pada tahun 2016. Begitu juga untuk jenjang SMP/MTs/SMPLB/Paket B cenderung mengalami pada tahun 2012 sudah mencapai 98,20 % menjadi 98% pada tahun 2016, hal ini dipicu adanya anak usia sekolah pada jenjang tertentu ingin sekolah di luar daerah, yang relatif lebih baik dalam layanan penyelenggaraan pendidikannya. Secara lengkap, perkembangan APM di Kabupaten Klaten untuk semua jenjang pendidikan dapat dilihat pada Tabel 2.65.

**Tabel 2.65.**  
**Perkembangan Angka Kelulusan (AL)**  
**Menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2012- 2016**

Uraian	Tahun				
	2012	2013	2014	2015	2016
AL SD /MI /SDLB /Paket A	99,60	99,40	98,11	97,78	99
AL SMP/MTs/SMPLB/Paket B	98,20	98,47	96,93	95,55	98

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten, 2017

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program yang dilakukan terkait pemenuhan pendidikan untuk semua bagi masyarakat di Kabupaten Klaten. Pada tahun 2016, program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis " *Terwujudnya pemenuhan kebutuhan pendidikan bagi masyarakat* " terdiri dari 6 (enam) program, diantaranya:

1. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
2. Pendidikan Dasar 9 (Sembilan) Tahun;
3. Pendidikan Menengah;
4. Pendidikan Non Formal;



5. Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan; dan
6. Manajemen Pelayanan Pendidikan.

## 2. Pencapaian Kinerja Peningkatan Kualitas Derajat Kesehatan Masyarakat;

Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kesehatan, bahwa azas penyelenggaraan kesehatan berdasarkan perikemanusiaan, keseimbangan, manfaat, perlindungan, penghormatan terhadap hak dan kewajiban, keadilan, gender dan nondiskriminatif, norma-norma keagamaan. Serta memperhatikan ketentuan Pasal 3, dinyatakan bahwa tujuan pembangunan kesehatan untuk meningkatkan kesadaran kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat setinggi-tingginya sebagai investasi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomi.

Mengingat kesehatan sebagai hak dasar manusia yang harus diwujudkan dalam bentuk pemberian berbagai pelayanan kesehatan kepada seluruh masyarakat melalui pelayanan kesehatan yang menyeluruh secara terarah, terpadu dan berkesinambungan, adil dan merata, serta aman, berkualitas, dan terjangkau oleh masyarakat. Bahwa untuk memenuhi hak, dan kebutuhan kesehatan setiap individu dan masyarakat dalam pelayanan kesehatan, serta memberikan perlindungan serta kepastian hukum kepada masyarakat, pemerintah wajib menyiapkan dan/atau mengadakan kebutuhan upaya kesehatan masyarakat, fasilitas pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan, dan pembiayaan kesehatan yang harus diwujudkan.

Berdasarkan pasal 12 Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar diantaranya Urusan Kesehatan dengan parameter aksesibilitas pelayanan dasar kesehatan yang diarahkan untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan indikator meningkatnya Indek Pembangunan Manusia (IPM) yang ditandai dengan peningkatan kesehatan, pendidikan, dan pendapatan masyarakat. Juga dasar Undang-Undang 23 Tahun 2014 urusan kewenangan daerah Kabupaten/Kota berkaitan dengan urusan kesehatan mencakup diantaranya :1. Upaya kesehatan, 2. Sumber Daya Manusia Kesehatan, 3. Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Makanan Minuman, dan 4. Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan.

Adapun pencapaian kinerja sasaran Peningkatan kualitas derajat kesehatan masyarakat sebagaimana Tabel 2.66.

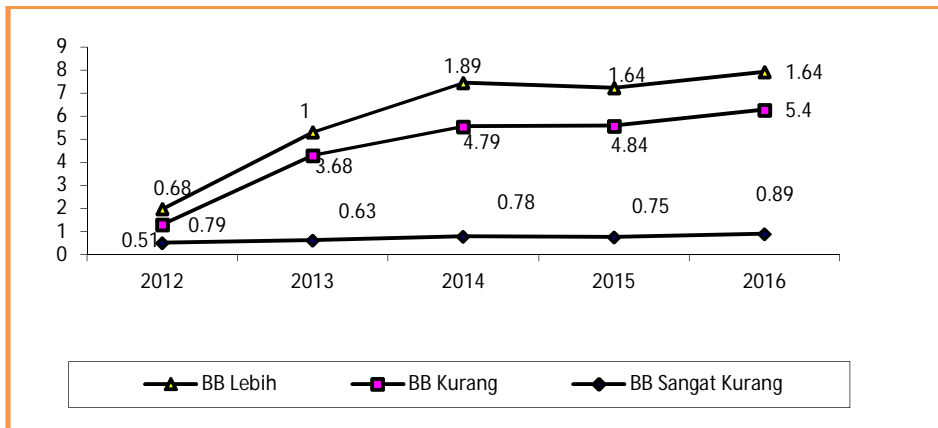
**Tabel 2.66.**  
**Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja**  
**Meningkatnya Kualitas Derajat Kesehatan Masyarakat**

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian Tahun 2015	Kondisi Tahun 2016			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2016 Thd Target Akhir RPJMD (%)
			Target	Realisasi	%		
1	Persentase balita gizi buruk	0,75	0,75	0,022	2,93	0,7	3181,82
2	Angka kematian ibu melahirkan	15	15	18	120,00	10	55,56
3	Angka kematian bayi	12,5	12,5	11,69	93,52	10	85,54
4	Angka kematian balita	15,9	15,9	0,463	2,91	15,3	3304,54



**a. Persentase balita Gizi Buruk**

Kondisi Persentase Balita Gizi Buruk di Kabupaten Klaten dalam kurun waktu tahun 2012-2016 cenderung bersifat fluktuatif. Penyebab balita gizi buruk karena kondisi sosial ekonomi keluarga, juga faktor medis. Kondisi ini menggambarkan derajat kesehatan masyarakat perlu di tingkatkan terutama di wilayah-wilayah kecamatan dengan kasus balita gizi buruk yang tinggi, seperti kecamatan : Gantiwarno, Trucuk dan Jogonalan. Perkembangan Persentase Balita Gizi Buruk di Kabupaten Klaten selama Tahun 2012-2016 dapat dilihat pada Gambar 2.32.



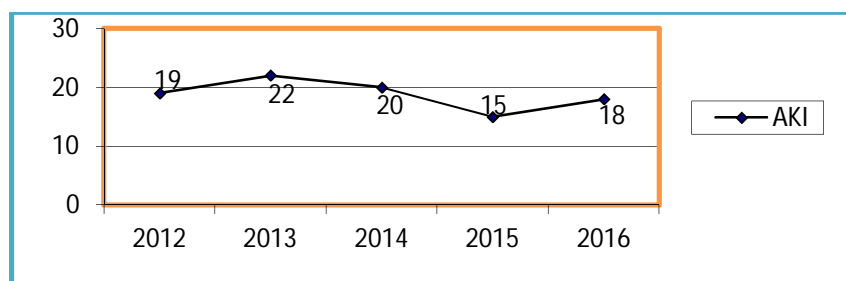
Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten 2017

**Gambar 2.34.**  
**Perkembangan Persentase Gizi Buruk di Kabupaten Klaten Tahun 2012- 2016**

Pada tahun 2016 tercatat sebanyak 15 (atau 0,022% dari total jumlah anak 68.558) kasus anak menderita gizi buruk. Upaya yang dilakukan untuk menekan kasus gizi buruk dengan memberikan makanan tambahan untuk bayi (PMTAS).

**b. Angka Kematian Ibu Melahirkan**

Kondisi Angka Kematian Ibu di Kabupaten Klaten dalam kurun waktu tahun 2012-2016 cenderung bersifat fluktuatif. Penyebab kematian ibu, di samping akibat hipertensi dan pendarahan, juga disebabkan oleh faktor-faktor non medis. Kondisi ini menggambarkan derajat kesehatan masyarakat perlu di tingkatkan terutama di wilayah-wilayah kecamatan dengan kasus kematian ibu yang tinggi, yang diantaranya adalah kecamatan : Wedi dan Juwiring. Perkembangan kasus kematian ibu melahirkan di Kabupaten Klaten selama Tahun 2012-2016 dapat dapat dilihat pada Grafik 2. 33



Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten 2017

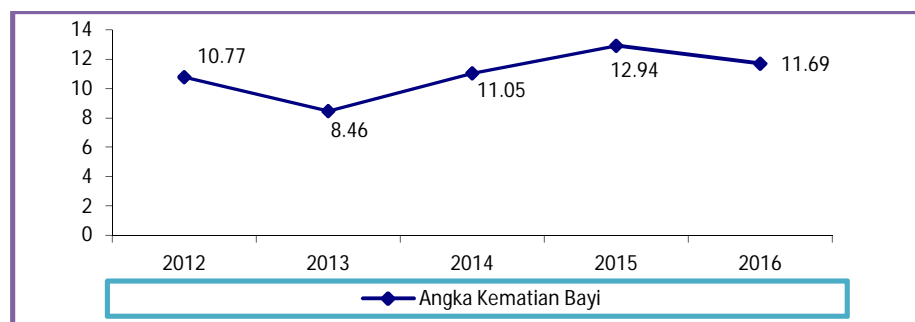
**Gambar 2.35.**  
**Perkembangan Kasus Kematian Ibu di Kabupaten Klaten Tahun 2012- 2016**

Pada tahun 2016 tercatat sebanyak 18 kasus kematian ibu melahirkan (atau AKI 106,84 dari total jumlah ibu melahirkan sebanyak 16.848). Upaya yang dilakukan untuk

menekan kasus kematian ibu melahirkan dengan meningkatkan penanganan komplikasi kebidanan dengan peningkatan cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan.

### c. Angka Kematian Bayi

Kondisi Angka Kematian Bayi di Kabupaten Klaten dalam kurun waktu tahun 2012-2016 cenderung mengalami penurunan. Penyebab kematian bayi di samping karena pengaruh ibu dalam kondisi hipertensi dan pendarahan, juga diakibatkan oleh faktor-faktor non medis. Kondisi ini menggambarkan bahwa derajat kesehatan masyarakat perlu di tingkatkan terutama di wilayah kecamatan dengan kasus kematian ibu yang tinggi, seperti kecamatan : Bayat, Juwiring, Pedan dan Jogonalan. Perkembangan Angka Kematian Bayi di Kabupaten Klaten selama Tahun 2012-2016 dapat dilihat pada Gambar 2.36.



Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten 2017

**Gambar 2.36.**  
**Perkembangan Persentase Angka Kematian Bayi**  
**di Kabupaten Klaten Tahun 2012-2016**

Pada tahun 2016 tercatat sebanyak 197 kasus kematian bayi (atau AKB 11,69 dari total kelahiran hidup sebanyak 16.848). Sementara itu tercatat sebanyak 32 kasus kematian balita (atau Angka Kematian Balita 0,463 dari total anak balita sebanyak 69.069). Upaya yang dilakukan untuk menekan kasus kematian bayi melahirkan dengan meningkatkan penanganan komplikasi kebidanan dengan peningkatan cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan dan cakupan kunjungan bayi.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program yang dilakukan terkait peningkatan kualitas derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Klaten. Pada tahun 2016, program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis "*Peningkatan derajat kesehatan masyarakat*" terdiri dari 13 (tiga belas) program, diantaranya:

1. Upaya Kesehatan Masyarakat;
2. Obat dan Perbekalan Kesehatan;
3. Pengawasan Obat dan Makanan;
4. Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat;
5. Perbaikan Gizi Masyarakat;
6. Pengembangan Lingkungan Sehat;
7. Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular;
8. Standarisasi Pelayanan Kesehatan;
9. Pelayanan Kesehatan masyarakat Miskin;
10. Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan prasarana sarana Puskesmas/Pustu dan Jaringannya;

11. Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Prasarana dan Sarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata;
12. Peningkatan Pelayanan kesehatan lansia; dan
13. Manajemen informasi dan regulasi kesehatan.

### 3. Pencapaian Kinerja Peningkatan Tata Kelola Pemerintah Daerah yang Efektif dan Efisien;

Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Efektif dan Efisien biasanya dicerminkan ke dalam 3 (tiga) pilar yaitu akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi. Sehingga kelihatan, sejauh mana faktor kontribusi masyarakat turut andil menyelesaikan masalah agar ruang demokrasi tumbuh dan berkembang. Ukuran Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Efektif dan Efisien diukur pada saat rencana disusun, sejauh mana data dan informasi dipakai sebagai *road map* untuk menyusun sasaran strategis yang hendak dicapai, juga sejauh mana konsistensi antar dokumen perencanaan saling menguatkan, sehingga *output*, *outcome* dan *benefit* akan kelihatan progres capaiannya.

Adapun capaian sasaran Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Efektif dan Efisien sebagaimana Tabel 2.67.

**Tabel 2.67.**  
**Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja**  
**Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Efektif dan Efisien**

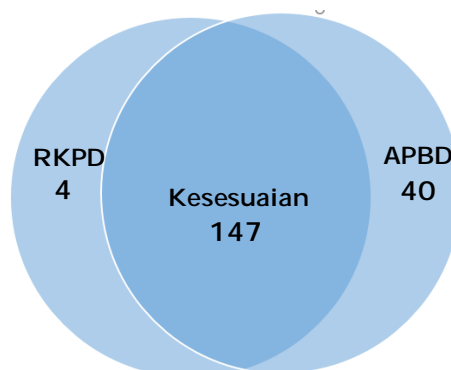
No	Indikator Kinerja Utama	Capaian Tahun 2015	Kondisi Tahun 2016			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2016 Thd Target Akhir RPJMD (%)
			Target	Realisasi	%		
1	Persentase konsistensi perencanaan	71	71	89,59	126,18	90	99,54
2	Persentase penggunaan data statistik	90	90	91	101,11	100	91,00
3	Skor LPPD	2,7	2,7	3,019	111,81	2,85	105,93
4	Indeks profesionalitas ASN	81	81	82	101,23	90	91,11
5	Skor LKJIP	60	60	47,89	47,89	70	68,41

#### 1. Persentase Konsistensi Perencanaan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Klaten Tahun 2016 merupakan masa transisi pelaksanaan dari implementasi dan penjabaran tahun kelima dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2010-2015 dan RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021. RKPD menjadi pedoman untuk menyusun Renja SKPD dan Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2016.

Berdasarkan analisis, dan evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2016 berdasarkan jumlah program dan kegiatan dalam RKPD, dan jumlah program dan kegiatan dalam APBD yang tersebar di 33 (tiga puluh tiga) urusan dalam Gambar 2.37.

### Kesesuaian Program RKPD 97,35%



Gambar 2.37.  
Kesesuaian Program RKPD dengan APBD

Berdasarkan gambar di atas, bahwa jumlah program RKPD sebanyak 151 yang tidak sesuai dengan program APBD sebanyak 4 program, sedangkan jumlah program dalam APBD sebanyak 187 yang tidak sesuai dengan RKPD sebanyak 40. Jumlah program yang sesuai antara RKPD dan APBD sebanyak 147 program.

## 2. Persentase Penggunaan Data Statistik

Perencanaan pembangunan wajib berbasis data dan informasi pelaksanaan pembangunan tahun-tahun sebelumnya. Sehingga sesuai dengan Pasal 17 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dijelaskan bahwa RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) memuat kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, serta prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, baik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun dari sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat harus didukung data dan informasi pelaksanaan pembangunan.

Memperhatikan ketentuan di atas, perencanaan pembangunan daerah harus didukung base line data dan informasi pembangunan yang akurat, dan tepat manfaat. Data dan informasi dalam : Kabupaten Klaten Dalam Angka Tahun 2016 merupakan jawaban untuk mengimplementasikan ketentuan Pasal 17 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 sekaligus sebagai tolok ukur capaian kinerja RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021, dan sekaligus sebagai upaya kita mendukung terwujudnya masyarakat Klaten yang Maju, Mandiri dan Berdaya Saing.

## 3. Skor LPPD (Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah)

Dalam RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021 telah ditetapkan adanya kebijakan daerah untuk : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih yang dijabarkan ke dalam arah kebijakan pembangunan daerah dengan\_Meningkatkan efektivitas organisasi Pemerintah Daerah yang peka terhadap permasalahan dan perubahan lingkungan internal maupun eksternal, dan Mewujudkan tata pemerintahan yang efektif dan efisien.

Capaian EKPPD (Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah) Kabupaten Klaten tahun 2015 dengan skor 3,02 tergolong sangat tinggi, dan perolehan skor ini apabila dirangking untuk tingkat Provinsi Jawa Tengah menduduk posisi 23 (dua puluh tiga)

dari 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah. Ke depan untuk memperbaiki peringkat EKPPD diperlukan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Peningkatan koordinasi secara lebih intensif dengan sesama OPD (Organisasi Perangkat Daerah).
- b. Melakukan pendampingan/desk dengan OPD dalam mengisi format EKPPD.
- c. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Tim Daerah (BPKP dan Inspektorat).

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program yang dilakukan terkait Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Efektif dan Efisien di Kabupaten Klaten. Pada tahun 2016, program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis "*Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Efektif dan Efisien*" terdiri dari 15 (lima) program, diantaranya:

1. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah;
2. Program Perencanaan Pembangunan Daerah;
3. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi;
4. Program Perencanaan Bidang Sosial Budaya;
5. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam;
6. Program Peningkatan Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan;
7. Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah;
8. Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media;
9. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa;
10. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi;
11. Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur;
12. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
13. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan;
14. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur; dan
15. Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah.

#### **4. Indeks Profesionalitas ASN**

Tuntutan profesionalitas aparatur sipil negara merupakan perwujudan akuntabilitas kinerja pemerintah sebagai kewajiban pemerintah yang harus bisa diwujudkan untuk mempertanggung-jawaban mandat yang telah diberikan dalam mengelola urusan penyelenggaraan pemerintah. Capaian Indeks Profesionalitas ASN tahun 2016 bersifat sementara, karena baru dalam proses penghitungan.

#### **5. Skor LKJIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah)**

Tuntutan akuntabilitas kinerja pemerintah merupakan kewajiban pemerintah yang harus bisa diwujudkan untuk mempertanggung-jawaban mandat yang telah diberikan dalam mengelola urusan penyelenggaraan pemerintah. Sebagaimana dalam RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021 mengupayakan pentingnya *Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih* yang dijabarkan ke dalam arah kebijakan pembangunan daerah dengan *Meningkatkan efektivitas organisasi Pemerintah Daerah yang peka terhadap permasalahan dan perubahan lingkungan internal maupun eksternal, dan Mewujudkan tata pemerintahan yang efektif dan efisien.*

Capaian kinerja telah menunjukkan hasil yang meningkat. Target yang ditetapkan pada tahun 2015 dengan nilai 60, namun terealisasi 47,89 (dengan Kategori C). Perolehan skor 47,89 dengan kriteria agak kurang.

Berdasarkan penilaian Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terdapat beberapa ikhtisar penting terkait penilaian kinerja instansi pemerintah di Kabupaten Klaten, diantaranya:

1. Pemerintah Kabupaten Klaten memperoleh nilai 47,89 atau dengan predikat C. Secara rinci hasil penilaian tersebut, sebagai berikut:
  - ✓ Perencanaan kinerja nilai 16,53;
  - ✓ Pengukuran kinerja nilai 9,19;
  - ✓ Pelaporan kinerja nilai 9,12;
  - ✓ Evaluasi kinerja nilai 4,39;
  - ✓ Capaian kinerja nilai 8,66;
2. Nilai ini merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi di lingkungan Instansi Pemerintah Kabupaten Klaten.
3. Pemerintah Kabupaten Klaten telah membangun akuntabilitas kinerja di semua jenjang pemerintahan dengan menerapkan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang mencakup: perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja dan capaian kinerja.
4. Secara umum atas kinerja Pemerintah Kabupaten Klaten adalah baik, namun masih terdapat beberapa hal yang perlu mendapat perhatian untuk perbaikan ke depan, agar kinerja pada instansi pemerintah terus mengalami peningkatan.

Langkah-langkah strategis yang akan dilaksanakan guna meningkatkan sistem akuntabilitas kinerja, adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kualitas perencanaan, dengan langkah-langkah;
  1. Mereview dokumen perencanaan untuk melihat ketepatan dan sinkronisasi antara tujuan, sasaran, indikator kinerja untuk mencapai target pembangunan jangka menengah dan panjang daerah.
  2. Memperbaiki dokumen perencanaan dan perjanjian kinerja sesuai dengan hasil reviu sebagai acuan penyusunan anggaran dengan menyusun agenda aksi daerah.
- b. Memperbaiki kualitas pengukuran kinerja melalui langkah-langkah;
  1. Menerapkan sistem pengukuran kinerja secara konsisten, dan sebagai bahan penilaian kinerja lembaga/pejabat, sekaligus sebagai pengendalian rencana.
  2. Memastikan penerapan dan penetapan Perjanjian Kinerja secara berjenjang mulai eselon II, III sampai pada tingkatan eselon IV.
- c. Meningkatkan kualitas akuntabilitas kinerja terhadap OPD, serta kualitas evaluasi program; dan
- d. Melakukan pengendalian dan evaluasi secara berjenjang terhadap capaian kinerja baik di tingkat kabupaten maupun OPD sebagai dasar penerapan pemberian *reward and punishment* dalam rangka semakin mendorong terciptanya manajemen berbasis kinerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten.



**4. Pencapaian Kinerja Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Akuntabel;**

Untuk mewujudkan sasaran *Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Akuntabel* sebagaimana telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Klaten diukur dengan indikator-indikator kinerja, diantaranya: Opini BPK terhadap LKPD, Tingkat Maturitas SPIP, dan Tingkat Kapabilitas APIP.

Opini BPK terhadap LKPD merupakan penilaian atas kinerja keuangan daerah yang dilakukan oleh BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) untuk menilai sejauh mana akuntabilitas dan kinerja keuangan pemerintah daerah telah dilaksanakan dengan baik. Dasar penilaian BPK berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Badan Pemeriksa keuangan, berdasarkan ketentuan ini pemeriksaan dilakukan secara periodik setiap tahun, dan pemeriksaan ini mencakup neraca, laporan realisasi anggaran, laporan kas, dan catatan atas laporan keuangan. Laporan yang dihasilkan atas pemeriksaan ini secara bertingkat, terdiri atas: Tidak Wajar (TD), Tidak Memberikan Pendapat (TMP), Wajar dengan Pengecualian (WDP), dan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Sedangkan penilaian indikator maturitas SPIP (Sistem Pengawasan Intern Pemerintah) dan Kapabilitas APIP (Aparat Pengawas Intern Pemerintah) dilaksanakan untuk memastikan dan mengurangi terjadinya penyimpangan/penyelewengan atas tujuan yang akan dicapai melalui aparat pengawas intern, sehingga didapat atas pelaksanaan pembangunan yang efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran.

Adapun capaian sasaran *Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Akuntabel* sebagaimana Tabel 2.68.

**Tabel 2.68.**  
**Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja**  
**Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Akuntabel**

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian Tahun 2015	Kondisi Tahun 2016			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2016 Thd Target Akhir RPJMD (%)
			Target	Realisasi	%		
1	Opini BPK terhadap LKPD	WTP	WTP	WTP	100	WTP	100
2	Tingkat Maturitas SPIP	1	1	1	100	3	33,33
3	Tingkat Kapabilitas APIP	2	2	2	100	3	33,33

**1. Opini BPK terhadap LKPD**

Realisasi atas target kinerja keuangan menunjukkan hasil kinerja sangat tinggi, atau menghasilkan opini penilaian *WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)*, satu prestasi yang belum pernah diperoleh selama ini. Kinerja ini merupakan komitmen bersama disemua jajaran pemerintah Kabupaten Klaten untuk mewujudkan aspek akuntabilitas pelaksanaan program/kegiatan, transparansi penggunaan anggaran, dan tertib administrasi sebagai bagian dari fakta integritas yang telah dibangun dan diciptakan penyelenggara negara. Adapun Opini BPK atas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun 2013-2016 disajikan pada Tabel 2.69.

**Tabel 2.69.**  
**Opini BPK Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Klaten**  
**Tahun 2013-2016**

Tahun	Opini BPK	Keterangan
2013	WDP	Paragraf penjelas berupa: penataan usaha persediaan di 43 SKPD tidak sesuai dengan pengelolaan aset tetap tidak tertib, realisasi intensif dan biaya pemungutan pajak daerah melebihi ketentuan, penganggaran dan

Tahun	Opini BPK	Keterangan
		pelaksanaan bantuan keuangan tidak sesuai ketentuan, serta sub pekerjaan speaker pembangunan Masjid Agung tahap II tidak sesuai spesifikasi.
2014	WDP	Paragraf penjelas berupa : Belum memadainya pengelolaan aset tetap dan pengeleloaan retribusi izin gangguan dan retribusi izin mendirikan bangunan, kurang memadainya pengelolaan penempatan dana cadangan serta kelebihan pembayaran atas selisih harga timpang dan kekurangan volume pekerjaan.
2015	WTP	Paragraf penjelas berupa: berlalutnya pekerjaan pembangunan menara Masjid Agung, belum memadainya data rincian aset peralatan dan aset tetap lainnya pada sekolah-sekolah, kelebihan pembayaran perjalanan dinas, serta program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian pegawai ASN.
2016	WTP	

Sumber : Badan Pengelola Keuangan Daerah, 2017.

Hasil penilaian sebagaimana tersebut pada Tabel 2.69 di atas, berdasarkan atas Proses pemeriksaan ini meliputi eksaminasi atas dasar pengujian bukti-bukti yang mendukung jumlah pengungkapan laporan keuangan, serta penilaian atas prinsip akuntabilitas yang digunakan dan estimasi yang signifikan, serta penyajian laporan keuangan secara menyeluruh yang dikerjakan oleh Pemerintah Kabupaten Klaten tahun 2016.

## 2. Tingkat Maturitas SPIP (Sistem Pengawasan Internal Pemerintah) dan Tingkat Kapabilitas APIP (Aparat Pengawas Intern Pemerintah)

Kapabilitas APIP ditingkatkan untuk memastikan dan mengurangi terjadinya penyimpangan/penyelewengan atas tujuan yang akan dicapai melalui sistem pengawasan intern pemerintah (SPIP), adapun pada tahun 2016 telah dilakukan pemeriksaan sebanyak 525 Obyek pemeriksaan, dengan pemeriksaan reguler sebanyak 432 Obrik dan dengan tujuan khusus/kasus sebanyak 93 Obrik. Dari sebanyak 432 Obrik yang telah ditindaklanjuti sebanyak 129 Obrik, masih dalam proses 51 Obrik, belum diproses 208 Obrik, dan tidak bisa ditindaklanjuti 44 Obrik. Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program yang dilakukan terkait sasaran Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Akuntabel di Kabupaten Klaten. Pada tahun 2016, program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis sasaran *Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Akuntabel* terdiri dari 12 (dua belas) program, diantaranya:

1. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah;
2. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Perangkat Daerah;
3. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
4. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH;
5. Program Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Desa;
6. Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan desa/Kelurahan;
8. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan;
9. Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan;
10. Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa;





11. Program Peningkatan Koordinasi Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan; dan
12. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah.

Kedepan akan terus diupayakan langkah-langkah guna mempertahankan opini WTP, dengan penguatan komitmen semua sepihak, baik pimpinan maupun pejabat fungsional umum Kabupaten Klaten untuk mempertahankan opini BPK Atas Laporan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Klaten.

#### 5. Pencapaian Kinerja Peningkatan Produktifitas, Nilai Tambah dan Daya Saing Sektor Pertanian dan Ketahanan Pangan

Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang pemenuhannya menjadi hak azasi setiap warga negara, hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996. Ketentuan peraturan perundangan ini telah ditindak-lanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan, ditegaskan bahwa ketahanan pangan merupakan hal yang sangat penting dalam rangka pembangunan nasional dan membentuk manusia Indonesia yang berkualitas, mandiri dan sejahtera melalui perwujudan persediaan pangan yang cukup, aman, bermutu, bergizi dan beragam dan terjangkau oleh daya beli masyarakat.

Pada kenyataannya peta penduduk rawan pangan yang dilansir BPS pada masih menunjukkan situasi yang sangat memprihatinkan. Rendahnya aksesibilitas pangan, dengan indikator kemampuan rumah tangga untuk selalu memenuhi kebutuhan pangan anggotanya akan mendorong penurunan konsumsi makanan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman di tingkat rumah tangga. Pada akhirnya akan mengancam dan berdampak pada kekurangan gizi masyarakat, terutama pada kelompok rentan yaitu ibu, bayi dan anak.

Adapun capaian sasaran Produktifitas, Nilai Tambah dan Daya Saing Sektor Pertanian dan Ketahanan Pangan sebagaimana Tabel 2.70.

**Tabel 2.70.**  
**Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja**  
**Meningkatnya Produktifitas, Nilai Tambah dan Daya Saing**  
**Sektor Pertanian dan Ketahanan Pangan**

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian Tahun 2015	Kondisi Tahun 2016			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2016 Thd Target Akhir RPJMD (%)
			Target	Realisasi	%		
1	Kontribusi sektor Pertanian terhadap PDRB	11,50	11,50	12,32	107,13	12,30	100,16
2	Indeks Kecukupan Pangan	91,4	91,4	91,4	100,00	91,75	99,62
3	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	91,5	91,5	91,5	100,00	92,75	98,65

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program yang dilakukan terkait sasaran Meningkatkan Produktifitas, Nilai Tambah dan Daya Saing Sektor Pertanian dan Ketahanan Pangan di Kabupaten Klaten. Pada tahun 2016, program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis sasaran Meningkatkan Produktifitas, Nilai Tambah dan Daya Saing Sektor Pertanian dan Ketahanan Pangan terdiri dari 9 (sembilan) program, diantaranya:



1. Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan);
2. Program Pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak;
3. Program Peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan;
4. Program Peningkatan produksi hasil peternakan;
5. Program Peningkatan kesejahteraan petani;
6. Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan;
7. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat;
8. Program Pemanfaatan potensi sumber daya hutan; dan
9. Program Rehabilitasi hutan dan lahan.

#### 6. Pencapaian Kinerja Peningkatan dan Pengembangan Produktifitas, Nilai Tambah dan Daya Saing Sektor Perindustrian, Perdagangan, Koperasi UMKM dan Penanaman Modal.

Sektor perindustrian, perdagangan, koperasi UMKM dan Penanaman Modal merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang mempunyai keterkaitan dengan sektor-sektor lainnya sebagai penggerak utama perekonomian di daerah, untuk mendorong peningkatan pendapatan masyarakat, mengurangi pengangguran dan menurunkan angka kemiskinan. Adapun capaian Sasaran Meningkatnya dan Pengembangan Produktifitas, Nilai Tambah dan Daya Saing Sektor Perindustrian, Perdagangan, Koperasi UMKM dan Penanaman Modal sebagaimana Tabel 2.71.

**Tabel 2.71.**  
**Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja**  
**Meningkatnya dan Pengembangan Produktifitas, Nilai Tambah dan Daya Saing Sektor**  
**Perindustrian, Perdagangan, Koperasi UMKM dan Penanaman Modal**

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian Tahun 2015	Kondisi Tahun 2016			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2016 Thd Target Akhir RPJMD (%)
			Target	Realisasi	%		
1	Kontribusi sektor industri terhadap PDRB	%	34,52	39,61	114,75	35,5	111,58
2	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB	%	18,74	18,73	99,95	19,55	95,81
3	Persentase UMKM yang memiliki daya saing	%	5	4,7	94,00	30	15,67
5	Persentase kenaikan koperasi aktif	%	0,26	0,25	96,15	0,6	41,67
6	Persentase kenaikan nilai investasi (%)						
	PMDN	%	1,75	-0,01	-0,57	2,75	0,36
	PMA	%	2,25	-0,4	-17,78	2,6	15,38

##### a. Persentase UMKM yang memiliki daya saing

Pada tahun 2016 tercatat sebanyak 54.981 UMKM, namun dari sebanyak 54.981 UMKM tersebut yang memiliki keunggulan daya saing produk yang kompetitif baru sebanyak 2.584 UMKM (atau 4,7%) yang tersebar di 11 (sebelas) klaster UMKM.

##### b. Persentase kenaikan koperasi aktif

Pada tahun 2016 tercatat sebanyak 977 koperasi, namun dari sebanyak 703 UMKM tersebut yang dinyatakan koperasi aktif baru sebanyak 72 (atau 72%) yang tersebar di 26 (dua puluh enam) kecamatan.

##### c. Persentase kenaikan nilai investasi (%)

Perkembangan Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN dlm jutaan Rupiah) pada tahun 2015 tercatat sebanyak Rp. 221.977 juta, namun pada tahun 2016 hanya

teralisasi sebanyak Rp. 220.629 Juta turun Rp.1.349 juta (atau turun 0,61%). Begitu juga dengan realisasi PMD, pada tahun 2015 sebanyak 5.836.620 US\$ namun pada tahun 2016 hanya terealisasi sebanyak 3.150.720 US\$ turun 2.685.900 US\$ (atau turun 53,98%). Penurunan nilai investasi ini disebabkan karena masalah regulasi, juga tingginya harga tanah, sehingga para investor menarik diri dan mengalihkan usahanya ke daerah lain.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program yang dilakukan terkait sasaran Meningkatkan Produktifitas, Nilai Tambah dan Daya Saing Sektor Pertanian dan Ketahanan Pangan di Kabupaten Klaten. Pada tahun 2016, program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis sasaran Meningkatkan dan Pengembangan Produktifitas, Nilai Tambah dan Daya Saing Sektor Perindustrian, Perdagangan, Koperasi UMKM dan Penanaman Modal terdiri dari 11 (sebelas) program, diantaranya:

1. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah;
2. Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri;
3. Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan;
4. Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri;
5. Pembinaan Pedagang Kakilima dan Asongan;
6. Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah;
7. Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi UMKM;
8. Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi;
9. Pengembangan Produk Unggulan Wilayah;
10. Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi; dan
11. Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi.

#### **7. Pencapaian Kinerja Peningkatan dan Pengembangan Produktifitas, Nilai Tambah dan Daya Saing Sektor Ketenagakerjaan;**

Masalah angkatan kerja adalah masalah yang perlu mendapat perhatian besar dalam melakukan perencanaan pembangunan. Karakteristik angkatan kerja ini sangat besar pengaruhnya bagi kesejahteraan penduduk, terutama jika dilihat secara ekonomi makro. Proporsi atau jumlah pengangguran terbuka dari angkatan kerja berguna sebagai acuan pemerintah bagi pembukaan lapangan kerja baru. Di samping itu, trend indikator ini akan menunjukkan keberhasilan program ketenagakerjaan dari tahun ke tahun.

Adapun capaian sasaran Meningkatkan dan Pengembangan Produktifitas, Nilai Tambah dan Daya Saing Sektor Ketenagakerjaan sebagaimana Tabel 2.72.

**Tabel 2.72.**  
**Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja**  
**Meningkatnya dan Pengembangan Produktifitas, Nilai Tambah dan Daya Saing**  
**Sektor Ketenagakerjaan**

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian Tahun 2015	Kondisi Tahun 2016			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2016 Thd Target Akhir RPJMD (%)
			Target	Realisasi	%		
1	Persentase Pencari kerja yang ditempatkan	%	24,74	35,15	141,47	26	135,19
2	Persentase kasus hubungan pekerja dan perusahaan tertangani	%	80	100	125,00	85	117,65



Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program yang dilakukan terkait sasaran Meningkatnya dan Pengembangan Produktifitas, Nilai Tambah dan Daya Saing Sektor Ketenagakerjaan di Kabupaten Klaten. Berdasarkan data capaian indikator Persentase Pencari kerja yang ditempatkan, terdapat sebanyak 2.784 tenaga kerja yang ditempatkan dari sebanyak 7.920 pencari kerja. Sedangkan indikator kasus hubungan pekerja dan perusahaan yang tertangani ada sebanyak 17 kasus yang tersebar di 851 perusahaan. Pada tahun 2016, program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis sasaran Meningkatnya dan Pengembangan Produktifitas, Nilai Tambah dan Data Saing Sektor Ketenagakerjaan terdiri dari 2 (dua) program, diantaranya:

1. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja; dan
2. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan.

#### 8. Pencapaian Kinerja Peningkatan Inovasi Dalam Pengembangan Ekonomi;

Pertumbuhan perekonomian Kabupaten Klaten selama tahun 2011-2016 menunjukkan kinerja positif, hal ini ditunjang adanya pertumbuhan sektor UMKM dan lapangan usaha yang mendukung peningkatan sektor jasa. Tahun 2011 tumbuh 1,96%, dan tahun 2013 tumbuh menjadi sebesar 5,72%, namun pada tahun 2014 mengalami penurunan (atau hanya tumbuh 5,38%) sebagai akibat pengaruh perekonomian nasional, sedangkan tahun 2016 tumbuh sebesar 5,7 %.

Salah satu indikator pertumbuhan ekonomi daerah ditunjang adanya pengembangan ekonomi kreatif dan produktif dengan menerapkan produk-produk inovasi daerah. Upaya yang ditempuh dengan menggerakkan masyarakat lewat hasil inovasi masyarakat, dan pengembangan teknologi tepat guna. Adapun capaian sasaran Meningkatnya Penerapan Inovasi Dalam Pengembangan Ekonomi sebagaimana Tabel 2.73.

**Tabel 2.73.**  
**Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja**  
**Meningkatnya Penerapan Inovasi Dalam Pengembangan Ekonomi**

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian Tahun 2015	Kondisi Tahun 2016			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2016 Thd Target Akhir RPJMD (%)
			Target	Realisasi	%		
1	Persentase hasil inovasi masyarakat/ hasil krenova/ TTG yang dikembangkan	%	2,5	6	240,00	20	30

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program yang dilakukan terkait sasaran Meningkatnya Penerapan Inovasi Dalam Pengembangan Ekonomi di Kabupaten Klaten, yang ditunjang capaian indikator persentase hasil inovasi masyarakat/ hasil krenova/ TTG yang dikembangkan dari sebanyak 30 hasil inovasi masyarakat dan yang dikembangkan sebanyak 2 produk, yakni prototif hand tracktor dan perbaikan varitas beras Rajalele. Pada tahun 2016, program yang dilaksanakan untuk sasaran Meningkatnya Penerapan Inovasi Dalam Pengembangan Ekonomi terdiri dari 1 (satu) program, yakni:

1. Program Pendataan Evaluasi, Penelitian dan Pengembangan;

#### 9. Pencapaian Kinerja Pemenuhan Kebutuhan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum;

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah, pemerintah kabupaten diwajibkan melaksanakan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang. Sementara ini kewajiban yang harus diperhatikan terkait prasarana jalan adalah : Total

panjang jalan di Kabupaten Klaten yang termasuk ke dalam kategori jalan negara 45,272 km, jalan provinsi sepanjang 34,238 km dan jalan kabupaten sepanjang 769,63 km. Faktor-faktor penting yang perlu diperhatikan adalah aksesibilitas, mobilitas, dan keselamatan.

Luas area layanan irigasi di Kabupaten Klaten sebesar 1.608 ha yang tercakup dalam Daerah Irigasi (DI). Secara kewenangan, ada 2 (dua) DI yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, 5 (lima) DI yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan 478 DI yang menjadi kewenangan Kabupaten Klaten. Dengan pembagian kewenangan itu, maka pengelolaan irigasi dilakukan dari APBN, APBD Provinsi Jawa Tengah dan APBD Kabupaten Klaten maupun yang bersumber dari dana desa. Pengelolaan sistem irigasi meliputi prasarana irigasi, air irigasi, manajemen irigasi, kelembagaan pengelolaan irigasi, dan sumber daya manusia. Disamping itu pemerintah kabupaten diwajibkan pula serius untuk memenuhi kebutuhan pelayanan air bersih dan sanitasi masyarakat. Adapun capaian sasaran Terwujudnya Pemenuhan Kebutuhan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum sebagaimana Tabel 2.74.

**Tabel 2.74.**  
**Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja**  
**Pemenuhan Kebutuhan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum**

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian Tahun 2015	Kondisi Tahun 2016			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2016 Thd Target Akhir RPJMD (%)
			Target	Realisasi	%		
1	Persentase jalan dalam kondisi baik (%)	%	55,26	56,26	101,81	65,8	85,50
2	Persentase drainase dalam kondisi baik (%)	%	61,31	61,39	100,13	63,24	97,07
3	Persentase irigasi dalam kondisi baik (ha)	%	19,12	41,54	217,26	19.130	0,22

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program yang dilakukan terkait sasaran Terwujudnya Pemenuhan Kebutuhan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Kabupaten Klaten yang ditunjang oleh indikator persentase jalan dalam kondisi baik sepanjang 471,86 Km ( total panjang jalan 769,63 Km), drainase dalam kondisi baik baru mencapai 61,31% (471,86 Km), hal ini disebabkan karena pembangunan jalan tidak disertai pembangunan drainase, sehingga merupakan salah satu penyebab rusaknya kondisi jalan. Pada tahun 2016, program yang dilaksanakan untuk sasaran Terwujudnya Pemenuhan Kebutuhan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum terdiri dari 21 (dua puluh satu) program, diantaranya:

1. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan;
2. Program Pembangunan Drainase / Gorong-gorong;
3. Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan/Perkotaan;
4. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang;
5. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya;
6. Program Pengembangan dan Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya;
7. Program Pengendalian Banjir;
8. Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;
9. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam;
10. Program Penataan Trotaar;

11. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan;
12. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa;
13. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ);
14. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas;
15. Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor;
16. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan;
17. Program Pengembangan Perumahan;
18. Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral;
19. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup;
20. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam; dan
21. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan.

#### 10. Pencapaian Kinerja Pemenuhan Prasarana, Sarana dan Utilitas Kawasan Perumahan dan Permukiman;

Menghadapi tantangan dalam rangka peningkatan prasarana dasar permukiman khususnya kawasan permukiman padat, maka harus ditempuh dengan berbagai upaya pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kualitas lingkungan permukimannya. Masyarakat perlu ditingkatkan kesadarannya untuk mampu memelihara prasarana dasar permukiman yang ada di lingkungannya, dengan demikian sumber daya manusia di tingkat pemerintahan desa dan kelurahan secara bertahap ditingkatkan kemampuannya, selain berkonsentrasi mengurus masalah administrasi pemerintahan juga mampu memberdayakan masyarakat.

Keseluruhan lahan yang ada, tidak mungkin untuk dibangun sebagai kawasan permukiman, oleh karenanya Pemerintah Kabupaten Klaten harus melakukan pembatasan kawasan untuk pembangunan perumahan, dan melakukan optimalisasi pemanfaatan lahan. Sementara ini tercatat sebanyak 379.404 unit rumah, dengan perincian: untuk tempat tinggal sebanyak 307.713 unit, campuran sebanyak 48.532 unit, dan bukan tempat tinggal sebanyak 23.159 unit.

Adapun capaian sasaran Meningkatnya Pemenuhan Prasarana, Sarana dan Utilitas Kawasan Perumahan dan Permukiman sebagaimana Tabel 2.75.

**Tabel 2.75.**  
**Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja**  
**Meningkatnya Pemenuhan Prasarana, Sarana dan Utilitas**  
**Kawasan Perumahan dan Permukiman**

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian Tahun 2015	Kondisi Tahun 2016			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2016 Thd Target Akhir RPJMD (%)
			Target	Realisasi	%		
1	Persentase air minum layak	87,2	87,2	76,01	87,17	100	76,01
2	Persentase sanitasi penduduk yang terlayani sistem air limbah yang layak	88,22	88,22	54,76	62,07	100	54,76
3	Rasio penanganan kawasan kumuh perkotaan	50,00	5	14,58	291,60	100	14,58
4	Persentase ruang terbuka hijau publik kawasan perkotaan	5,48	8,73	9,8	112,26	16	61,25
5	Persentase penanganan RTLH	13,73	5,48	3,75	68,43	34,25	10,95

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program yang dilakukan terkait sasaran Meningkatkan Pemenuhan Prasarana, Sarana dan Utilitas Kawasan Perumahan dan Pemukiman di Kabupaten Klaten yang pergerakannya relatif lambat. Hal ini disebabkan karena, 1). Penanganan air minum layak, penduduk yang terlayani sistem air limbah yang layak sangat tergantung pada sumber pendanaan dari APBN. Sementara itu jumlah rumah tangga 182.324 unit, 2) penanganan kawasan kumuh perkotaan, sementara ini hanya bergerak di 2 desa titik sasaran dengan cakupan luasan 34,47 Ha. 3). Penanganan RTLH hanya bergerak pada kisaran 1087 unit pertahun, padahal jumlah RTLH masih sebanyak 24.775 unit.

Pada tahun 2016, program yang dilaksanakan untuk sasaran Meningkatkan Pemenuhan Prasarana, Sarana dan Utilitas Kawasan Perumahan dan Pemukiman terdiri dari 3 (tiga) program, diantaranya:

1. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah;
2. Program Pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan; dan
3. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH).

#### **11. Pencapaian Sasaran Pengurangan Kerentanan Resiko Bencana;**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengamanatkan perlunya pengaturan yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program (Pasal 1 butir 10 UU PPLH).

Sehingga potensi dampak dan/atau resiko lingkungan yang mungkin ditimbulkan oleh suatu kebijakan, rencana, dan/atau program, sebelum pengambilan keputusan dilakukan, dapat diantisipasi. Dampak dan/atau resiko lingkungan yang mungkin timbul oleh suatu kebijakan, rencana, dan/atau program, oleh Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009 dikategorisasikan, antara lain sebagai potensi: meningkatkan resiko perubahan iklim, peningkatan kerusakan, kemerosotan atau kepunahan, keanekaragaman hayati, banjir, longsor, kekeringan dan/atau kebakaran hutan dan lahan, menurunkan mutu dan kelimpahan sumber daya alam, mendorong perubahan penggunaan dan/atau alih fungsi kawasan hutan terutama pada daerah yang kondisinya tergolong kritis, meningkatkan jumlah penduduk miskin atau terancamnya keberlanjutan penghidupan sekelompok masyarakat, dan/atau meningkatkan resiko terhadap kesehatan dan keselamatan manusia.

Berbagai hal tersebut di atas, perlu ada upaya pengurangan kerentanan resiko bencana dengan cara menggerakkan partisipasi masyarakat. Salah satu bentuk upaya tersebut perlunya penguatan masyarakat dengan menciptakan desa tangguh bencana dengan berbagai instrumen yang diperlukan.

Adapun capaian sasaran Terwujudnya Pengurangan Kerentanan Resiko Bencana sebagaimana Tabel 2.76.

**Tabel 2.76.**  
**Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja**  
**Terwujudnya Pengurangan Kerentanan Resiko Bencana**

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian Tahun 2015	Kondisi Tahun 2016			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2016 Thd Target Akhir RPJMD (%)
			Target	Realisasi	%		
1	Jumlah desa tangguh bencana (desa)	0	0	0	0	15	0

Pada tahun 2016 upaya untuk mewujudkan desa tangguh bencana belum ditargetkan, sementara ini baru diupayakan dengan rintisan "*desa paseduluran*" dan Kabupaten Tangguh Bencana, dan baru tahun 2017 ditargetkan adanya Desa Tangguh Bencana. Serta untuk mendukung pencapaian sasaran Terwujudnya Pengurangan Kerentanan Resiko Bencana di Kabupaten Klaten. Pada tahun 2016, program yang dilaksanakan untuk sasaran Terwujudnya Pengurangan Kerentanan Resiko Bencana terdiri dari 4 (empat) program, diantaranya:

1. Program Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
2. Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana;
3. Program Peningkatan Pengelolaan Logistik; dan
4. Program Penanganan Darurat Bencana.

#### **12. Pencapaian Sasaran Tertib Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang;**

Peningkatan efektivitas Rencana Tata Ruang Wilayah sebagai instrumen pembangunan secara konsisten digunakan untuk mewujudkan ruang yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan. Penggunaan sumber daya alam harus selaras, serasi, dan seimbang dengan fungsi lingkungan hidup. Sebagai konsekuensinya, kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan harus mengintegrasikan aspek lingkungan hidup dan mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan. Kebijakan yang dimaksud adalah rangkaian konsep dan azas yang menjadi dasar rencana. Kebijakan, rencana dan atau program (KRP) yang disusun harus memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, juga selaras, serasi, dan seimbang dengan fungsi lingkungan hidup.

Sehingga sebagai konsekwensi logis dari persoalan tersebut, KRP harus memperhatikan aspek lingkungan hidup dalam mewujudkan tujuan pembangunan yang berkelanjutan. Sehingga pemanfaatan dan pengendalian ruang merupakan upaya yang terstruktur, dan sebagai terobasan dan memastikan bahwa pada setiap tahap awal penyusunan KRP sudah memperhatikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Dalam pengertian, makna strategisnya sejak awal proses perencanaan dalam pengambil keputusan sudah mempertimbangkan hal-hal yang mendesak terkait pembangunan berkelanjutan.

Adapun capaian sasaran Terwujudnya Tertib Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang sebagaimana Tabel 2.77.





**Tabel 2.77.**  
**Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja**  
**Terwujudnya Tertib Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang**

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian Tahun 2015	Kondisi Tahun 2016			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2016 Thd Target Akhir RPJMD (%)
			Target	Realisasi	%		
1	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang	%	90	98	108,89	95	103,16

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program yang dilakukan terkait sasaran Terwujudnya Tertib Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang di Kabupaten Klaten. Pada tahun 2016, program yang dilaksanakan untuk sasaran Terwujudnya Tertib Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang terdiri dari 2(dua) program, diantaranya:

1. Program Perencanaan Tata Ruang; dan
2. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang.

### **13. Pencapaian Kinerja Peningkatan Keamanan dan Ketertiban Bagi Masyarakat;**

Memperhatikan luas wilayah 65.556 ha (655,56 km<sup>2</sup>) yang mencakup 26 Kecamatan, 391 Desa serta 10 Kelurahan, sementara ini diukur dari jumlah Linmas per jumlah 10.000 penduduk baru pada kisaran 89,83 dengan rasio Pos Siskamling per jumlah penduduk sudah mencapai kisaran angka 2,49, dan cakupan penegakan Perda baru mencapai 90,91 hal ini disebabkan karena luasan wilayah, jumlah penduduk serta kompleksitas permasalahan kemasyarakatan tidak sebanding dengan jumlah Linmas. Sehingga perlunya pemberdayaan masyarakat dalam ikut menjaga ketentraman dan ketertiban untuk menekan angka kriminalitas menjadi alternatif dalam menjaga kondusivitas daerah. Adapun capaian sasaran Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban Bagi Masyarakat sebagaimana Tabel 2.78.

**Tabel 2.78.**  
**Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja**  
**Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban Bagi Masyarakat**

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian Tahun 2015	Kondisi Tahun 2016			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2016 Thd Target Akhir RPJMD (%)
			Target	Realisasi	%		
1	Angka kriminalitas	2,84	2,83	2,82	99,65	2,77	101,81
2	Rasio PMKS yang memperoleh bantuan sosial	40,78	41,78	33,16	79,37	46,78	70,88

Angka kriminalitas dari tahun ke tahun dapat ditekan, karena dukungan masyarakat. Namun masalah PMKS yang memperoleh bantuan sosial belum bisa memenuhi target karena keterbatasan pembiayaan. Dari sebanyak 119.489 penyandang PMKS baru bisa ditangani sebanyak 48.729 PMKS. Pada tahun 2016, program yang dilaksanakan untuk sasaran Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban Bagi Masyarakat terdiri dari 8(delapan) program, diantaranya:

1. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan;
2. Program Peningkatan dan pembinaan kehidupan sosial politik;
3. Program Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan;
4. Program Perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan;



5. Program Pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya);
6. Program Peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat);
7. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial; dan
8. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial.

**14. Pencapaian Kinerja Peningkatan Pemenuhan Hak Anak;**

Perlindungan anak merupakan salah satu agenda penting dalam RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021, mengingat jumlah anak di Kabupaten Klaten pada tahun 2015 telah mencapai 411.599 jiwa (atau 31,40% dari total jumlah penduduk). Penyebaran jumlah penduduk yang tidak merata, serta besarnya jumlah jiwa sudah barang tentu akan terkait dengan masalah pangan, gizi, kesehatan, pendidikan dan kebutuhan khusus anak menjadi hal krusial yang harus diwujudkan untuk melindungi anak dengan cara penguatan kelembagaan anak, perlunya hak sipil dan kebebasan, serta perlindungan khusus terhadap tumbuh kembang anak. Data menunjukkan 14,47 persen penduduk Indonesia termasuk dalam kelompok sangat rawan pangan (asupan kalori <1.400 Kkal/orang/hari), 5,38 persen prevalensi gizi kurang hal ini menunjukkan bahwa *foodborne disease* merupakan masalah kesehatan masyarakat yang perlu diantisipasi. Kondisi umum pencapaian dan permasalahan yang dihadapi perlindungan anak di Kabupaten Klaten, diantaranya terkait : (1). Penguatan kelembagaan, (2). Hak sipil dan kebebasan, (3). Lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, (4). Kesehatan dasar dan kesejahteraan, (5). Pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan kreatif, serta (6). Perlindungan khusus. Adapun capaian sasaran Peningkatan Pemenuhan Hak Anak sebagaimana Tabel 2.79.

**Tabel 2.79.**  
**Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja**  
**Peningkatan Pemenuhan Hak Anak**

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian Tahun 2015	Kondisi Tahun 2016			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2016 Thd Target Akhir RPJMD (%)
			Target	Realisasi	%		
1	Rasio anak yang memerlukan perlindungan khusus	5,21	4,48	3,69	82,37	4,3	85,81

Jumlah anak di Kabupaten Klaten pada tahun 2016 tercatat sebanyak 368.095 anak. Dari sebanyak 368.095 anak tersebut yang memerlukan perlindungan khusus sebanyak 13.251 anak (atau 3,69%), dari bentuk-bentuk anak yang berhadapan dengan hukum (ABH), anak yang bekerja di bawah umur, dan penyandang disabilitas.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program yang dilakukan terkait sasaran Peningkatan Pemenuhan Hak Anak di Kabupaten Klaten. Pada tahun 2016, program yang dilaksanakan untuk sasaran Peningkatan Pemenuhan Hak Anak yakni :

1. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak.

**15. Pencapaian Kinerja Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Tepat Waktu, Tepat Mutu, Tepat Sasaran dan Tepat Manfaat;**

Ukuran keberhasilan peningkatan kualitas pelayanan publik tepat waktu, tepat mutu, tepat sasaran dan tepat manfaat diantaranya diukur pada layanan administrasi

kependudukan dan pencatatan sipil. Pada tahun 2016 tercatat sebanyak 992.889 orang penduduk yang wajib KTP, dari sebanyak 1.300.706 orang.

Adapun capaian sasaran Menigkatnya Kualitas Pelayanan Publik Tepat Waktu, Tepat Mutu, Tepat Sasaran dan Tepat Manfaat sebagaimana Tabel 2.80.

**Tabel 2.80.**  
**Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja**  
**Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Tepat Waktu, Tepat Mutu, Tepat Sasaran dan**  
**Tepat Manfaat**

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian Tahun 2015	Kondisi Tahun 2016			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2016 Thd Target Akhir RPJMD (%)
			Target	Realisasi	%		
1	Rasio penduduk berKTP per satuan penduduk	89,38	90	89,5	99,44	99,6	90,77
2	Rasio penduduk ber-akta kelahiran per satuan penduduk	16,68	26,68	28,91	108,36	9,14	31,62

Pada tahun 2016 tercatat sebanyak jumlah penduduk wajib KTP sebanyak 992.889 orang, dan jumlah penduduk yang telah memiliki akta kelahiran sebanyak 362.436 orang.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program yang dilakukan terkait sasaran Menigkatnya Kualitas Pelayanan Publik Tepat Waktu, Tepat Mutu, Tepat Sasaran dan Tepat Manfaat di Kabupaten Klaten. Pada tahun 2016, program yang dilaksanakan untuk sasaran Menigkatnya Kualitas Pelayanan Publik Tepat Waktu, Tepat Mutu, Tepat Sasaran dan Tepat Manfaat terdiri dari 1(satu) program, diantaranya:

1. Program Penataan Administrasi Kependudukan.

### 2.3. PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH

Identifikasi permasalahan pembangunan daerah dilakukan dengan berdasarkan hasil gambaran umum kondisi daerah dari aspek geografi, demografi, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah, serta mendasarkan pada hasil evaluasi pencapaian kinerja. Hasil identifikasi permasalahan kemudian dirumuskan menjadi isu strategis daerah. Berdasarkan hal tersebut maka permasalahan pembangunan daerah Kabupaten Klaten Tahun 2018, antara lain :

1. Masih tingginya angka putus sekolah;
2. Masih perlunya pemerataan sarana dan prasarana pendidikan;
3. Belum meratanya kualitas pendidikan, penanaman nilai-nilai moralitas, budi pekerti dan integritas;
4. Masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang penyehatan lingkungan dan penerapan perilaku hidup bersih;
5. Belum optimalnya reformasi birokrasi dan pelayanan publik serta penyelenggaraan tata kelola pemerintahan;
6. Masih minimnya kegiatan-kegiatan dalam rangka meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah;
7. Masih cukup tingginya jumlah penduduk miskin;
8. Belum meratanya kualitas dan kuantitas pembangunan infrastruktur yang membawa dampak kesenjangan antar wilayah;

9. Masih banyaknya jumlah pengangguran yang disebabkan terbatasnya lapangan kerja, keterampilan dan kapasitas tenaga kerja belum sepenuhnya sesuai dengan pasar kerja;
10. Belum optimalnya upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan bencana;
11. Masih tingginya ketergantungan terhadap energi;
12. Belum optimalnya pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup;
13. Belum optimalnya pengelolaan potensi ekonomi lokal melalui pengembangan sektor pariwisata;

#### **2.4. ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN DAERAH**

Dari identifikasi permasalahan pembangunan daerah di Kabupaten Klaten, serta memperhatikan lingkungan strategis daerah, maka dirumuskan isu strategis pembangunan daerah Kabupaten Klaten Tahun 2018, sebagai berikut :

##### **1. Pendidikan dan Kesehatan;**

Urusan pendidikan dan kesehatan adalah faktor yang mempengaruhi kualitas sumber daya manusia (SDM). Kualitas SDM ini juga merupakan bagian penting dalam rangka mendukung target capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Klaten yang pada tahun 2018 ditargetkan sebesar 74,10%.

Isu strategis yang ada pada urusan pendidikan adalah belum optimalnya aksesibilitas, sarana dan prasarana serta peran serta masyarakat dalam meningkatkan kualitas dan pemerataan pendidikan. Peningkatan kualitas pendidikan difokuskan pada pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana serta peningkatan pelayanan pendidikan melalui penyelenggaraan pendidikan secara menyeluruh baik pendidikan formal, maupun pendidikan informal dan non formal yang berkarakter berbasis moral dan budi pekerti.

Sedangkan isu strategis ada urusan kesehatan adalah belum optimalnya pelayanan kesehatan, masih adanya ancaman penyakit menular maupun penyakit tidak menular, dan masih banyaknya penduduk miskin yang belum menjadi peserta jaminan pemeliharaan kesehatan. Masih adanya angka kematian bayi dan ibu yang melahirkan serta pola hidup tak sehat dan pola kecukupan asupan pangan dan gizi termasuk akses terhadap air bersih menjadi permasalahan yang harus segera ditangani. Diharapkan penyelenggaraan urusan kesehatan ini dapat meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat dan Usia Harapan Hidup (UHH).

##### **2. Tata Kelola Pemerintahan, Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik;**

Sebagai langkah peningkatan pelayanan publik yang prima dan dalam rangka mencapai kesejahteraan masyarakat serta perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta mendukung roadmap reformasi birokrasi perlu adanya komitmen bersama sebagai mana implementasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Disamping itu dalam rangka menuju good government perlu adanya peningkatan pemanfaatan teknologi informasi.

##### **3. Kemiskinan dan Pengangguran;**

Penduduk miskin di Kabupaten Klaten Tahun 2016 pada kisaran 12,33% menurun dibandingkan Tahun 2015 yang berada pada kisaran 13,46%. Kecilnya penurunan

angka kemiskinan disebabkan oleh faktor-faktor antara lain pendapatan perkapita penduduk yang masih rendah, tingkat inflasi yang relatif masih tinggi serta adanya kenaikan harga kelompok bahan makanan pokok yang menjadi kebutuhan masyarakat. Kesenjangan antar wilayah juga menjadi faktor pengurangan angka kemiskinan yang masih perlu menjadi perhatian khusus oleh semua pihak.

Pengangguran di Kabupaten Klaten Tahun 2016 pada kisaran 4,20%. Permasalahan terkait dengan pengangguran antara lain dampak berkepanjangan krisis ekonomi, rendahnya kualitas angkatan kerja yang belum mampu bersaing serta belum mampunya menciptakan lapangan kerja mandiri.

#### **4. Lingkungan Hidup dan Bencana Alam;**

Permasalahan pokok pada sektor lingkungan hidup antara lain belum optimalnya pengelolaan persampahan; pencemaran dan kerusakan lingkungan yang mempengaruhi kualitas lingkungan hidup; kurangnya ruang terbuka hijau publik dan kurangnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup.

Isu kebencanaan di Kabupaten Klaten tidak terlepas dari faktor geografis yang terletak di lereng Gunung Merapi. Selain itu, secara geologis Kabupaten Klaten dilalui sesar aktif yang menimbulkan kerawanan gempa bumi. Kerawanan lain di Kabupaten Klaten seperti banjir, tanah longsor dan angin ribut. Untuk itu pengurangan resiko bencana merupakan aspek menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Klaten.

#### **5. Infrastruktur;**

Pembangunan infrastruktur sangat menjadi faktor dominan dan strategis dalam rangka mendukung daya saing daerah. Beberapa permasalahan pembangunan infrastruktur adalah :

- Belum optimalnya kualitas dan kuantitas prasarana, sarana dan utilitas, seperti jalan dan jembatan, drainase, sanitasi, air minum, jaringan transportasi, pemadam kebakaran, penerangan jalan umum dan jaringan irigasi.
- Kurangnya pemahaman dan kesadaran dari segenap stakeholder dan partisipasi masyarakat terhadap pentingnya pengaturan dan pengendalian tata ruang yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan.
- Belum optimalnya langkah strategis dan menyeluruh dalam menuju akses universal (100 persen akses air minum; 0 persen kawasan kumuh; 100 persen akses sanitasi)
- Masih perlu adanya dukungan dari Pemerintah Desa, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat dalam rangka pemerataan kualitas dan konektivitas infrastuktur antar wilayah serta antar kewenangan.

#### **6. Kedaulatan Pangan dan Energi;**

Pemerintah Kabupaten Klaten sebagai salah satu daerah penyangga pangan, maka perlindungan lahan pangan berkelanjutan dan sawah lestari menjadi fokus perhatian. Seiring dengan pertambahan jumlah penduduk, aktifitas penduduk dan perluasan kegiatan perekonomian menjadi ancaman perubahan tata guna lahan pangan ke sektor non pangan. Dari sektor energi, perlu adanya peningkatan pemanfaatan energi alternatif, peningkatan efisiensi pemanfaatan energi, serta optimalisasi pengelolaan energi terbarukan.



**7. Kesetaraan Gender, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk;**

Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak masih perlu ditingkatkan dalam rangka peningkatan peran serta perempuan dalam pembangunan daerah. Masih perlu peningkatan sistem kesejahteraan dan perlindungan anak menjadi perhatian mengingat Kabupaten Klaten adalah Kabupaten Layak Anak. Di sektor pengendalian penduduk, optimalisasi program keluarga berencana sangat perlu ditingkatkan dalam rangka mengendalikan laju pertumbuhan penduduk.

**8. Potensi Ekonomi Lokal**

Potensi kepariwisataan yang bervariasi menjadi modal dasar dalam pengembangan sektor kepariwisataan, namun demikian sampai saat ini pengelolaan kepariwisataan di Kabupaten Klaten masih kurang optimal sehingga daya tarik dan daya saing kepariwisataan dirasa masih kurang.

Sumberdaya industri, perdagangan, koperasi dan UKM yang cukup potensial dan dapat menjadi pendukung bagi pertumbuhan dan perkembangan ekonomi daerah, namun potensi sumberdaya yang ada tersebut belum dapat dikelola secara lebih optimal sehingga membawa pengaruh terhadap produktivitas dan daya saing. Di bidang investasi dan penanaman modal belum dapat optimal menggerakkan perekonomian daerah serta memberikan dampak membuka kesempatan kerja dalam rangka mengurangi pengangguran. Oleh karena itu diperlukan penciptaan iklim usaha yang kondusif serta kemitraan antara Pemerintah Daerah dengan dunia usaha.

## **BAB III**

### **RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH**

#### **3.1. ARAH KEBIJAKAN EKONOMI**

Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah merupakan kerangka implementatif atas pelaksanaan RKPD Kabupaten Klaten Tahun 2018 dan sekaligus proyeksi terhadap kondisi ekonomi makro regional pada tahun tersebut dengan mendasarkan pada kondisi ekonomi Kabupaten Klaten, wilayah sekitarnya, wilayah Provinsi Jawa Tengah dan Nasional pada tahun-tahun sebelumnya. Guna mencapai Kerangka Ekonomi Daerah tersebut, perlu disusun berbagai prioritas pembangunan dan langkah-langkah kebijakan yang strategis guna menghadapi berbagai tantangan dan permasalahan pembangunan agar arah pembangunan daerah tahun 2018 dapat dicapai sesuai dengan sasaran program dan kegiatan yang diajukan.

##### **3.1.1. Kondisi Ekonomi**

###### **3.1.1.1. Kondisi Ekonomi Nasional**

Ekspansi perekenomian global pada tahun 2016 mencapai 3,2 persen, lebih lambat dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 3,4 persen. Masih lambatnya proses ekonomi global juga tercermin dari pertumbuhan volume perdagangan internasional yang cenderung melambat. Di tahun 2017, perekenomian global diperkirakan akan tumbuh lebih baik, dengan laju sebesar 3,5 persen. Penggerak pertumbuhan ekonomi global ini terutama berasal dari negara-negara berkembang yang diperkirakan tumbuh sebesar 4,6 persen, lebih baik dari tahun 2016 yang hanya mencapai 4,3 persen. Pemulihan ekonomi juga diperkirakan akan terjadi di negara maju, yang didorong oleh ekspektasi kebijakan yang lebih pro terhadap pertumbuhan ekonomi. Perbaikan aktivitas perekenomian global ini diperkirakan akan mendorong peningkatan volume perdagangan dunia, sehingga volume perdagangan dunia diperkirakan akan tumbuh lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi global, yaitu sebesar 4,0 persen di tahun 2017.

Sejalan dengan pemulihan perekenomian global yang masih terbatas, pertumbuhan ekonomi domestik naik menjadi 5,0 persen pada tahun 2016, dari sebelumnya sebesar 4,9 persen di tahun 2015. Kenaikan pertumbuhan ekonomi didorong oleh konsumsi rumah tangga yang tumbuh stabil dan perbaikan kinerja ekspor. Inflasi yang rendah dan stabil mampu menjaga pertumbuhan konsumsi rumah tangga pada tingkat 5,0 persen.

Ekonomi Indonesia pada triwulan I tahun 2017 menunjukkan perbaikan dengan pertumbuhan ekonomi yang mencapai 5,0 persen, lebih tinggi dibandingkan triwulan yang sama tahun sebelumnya yang mencapai 4,9 persen. Kinerja tersebut didorong oleh ekspor yang meningkat signifikan, terutama ekspor nonmigas. Pertumbuhan konsumsi rumah tangga menunjukkan perlambatan salah satunya disebabkan kenaikan tarif dasar listrik bagi rumah tangga di awal tahun 2017.

Perkembangan perekenomian untuk keseluruhan tahun 2017 diperkirakan tumbuh sebesar 5,2 persen, sejalan dengan ekspektasi kinerja perekenomian global yang lebih baik dan berbagai upaya pemerintah, termasuk melalui implementasi yang efektif dari berbagai paket kebijakan.

Dengan mempertimbangkan berbagai fakta tersebut dengan seksama, asumsi dasar ekonomi makro yang digunakan dalam penyusunan postur RAPBN 2018 adalah sebagai berikut:

1. Pertumbuhan ekonomi diperkirakan sebesar 5,4 persen. Dari sisi penggunaan, pertumbuhan ekonomi diperkirakan didorong utamanya oleh konsumsi masyarakat dan pemerintah, serta pembentukan modal tetap bruto (PMTB)/investasi. Dari sisi produksi, sektor pertanian, sektor industri pengolahan, sektor konstruksi, sektor perdagangan, hotel, dan restoran, serta sektor pengangkutan dan komunikasi diperkirakan masih tetap menjadi sektor pendorong pertumbuhan ekonomi.
2. Laju inflasi diharapkan dapat dikendalikan pada tingkat 3,5 persen. Hal tersebut diharapkan dapat dicapai melalui kelancaran pasokan dan distribusi barang dan jasa, membaiknya koordinasi kebijakan fiskal, moneter, dan sektor riil yang didukung oleh meningkatnya kesadaran pemerintah daerah dalam upaya pengendalian inflasi.
3. Rata-rata nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat tahun 2018 diperkirakan berkisar Rp.13.500,-/USD dengan asumsi pertumbuhan ekonomi berkisar di angka 5,4 persen. Tekanan terhadap pergerakan nilai tukar rupiah diperkirakan bersumber dari semakin menurunnya surplus neraca perdagangan Indonesia, serta perlambatan ekonomi di Cina, India, dan Brazil yang dikhawatirkan akan mengurangi daya tarik arus modal masuk ke negara *emerging market* dan mendorong terjadinya *flight to quality*.
4. Tingkat suku bunga SPN di tahun 2018 diperkirakan sebesar 5,3% persen. Faktor-faktor yang menjadi pertimbangan antara lain adalah terkendalinya inflasi, nilai tukar, dan arus modal masuk ke Indonesia.
5. Rata-rata harga minyak mentah Indonesia atau *Indonesian Crude Price* (ICP) di pasar internasional diperkirakan mencapai sebesar US\$48 per barel. Perkiraan tersebut antara lain didukung oleh proyeksi pertumbuhan permintaan minyak dan melambatnya pertumbuhan pasokan minyak dari negara-negara non-OPEC.
6. *Lifting* minyak dan gas bumi Indonesia pada tahun 2018 diprediksikan mencapai 800 barel per hari dan *lifting* gas 1.200 ribu barel per hari.

Berdasarkan asumsi sebagaimana tersebut di atas, fokus pentahapan RPJMNas ke4 (2015-2019) diarahkan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian, berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang berkualitas serta mampu IPTEK yang terus meningkat, dengan prioritas pembangunan nasional sebagai berikut :

- a. Ekonomi, melalui penekanan pertumbuhan ekonomi makro, ketahanan pangan, ketahanan energi, ketahanan air, infrastruktur dasar dan konektivitas;
- b. Lingkungan hidup;
- c. Politik;
- d. Penegakan hukum;
- e. Tata kelola dan reformasi birokrasi;



- f. Pertahanan dan keamanan;
- g. Kesejahteraan rakyat, melalui peningkatan IPM, pendidikan dan kesehatan;
- h. Pembangunan kelautan; dan
- i. Pembangunan kewilayahan.

### **3.1.1.2. Kondisi Ekonomi Jawa Tengah dan Eks Karesidenan Surakarta**

Perkembangan perekonomian global dan nasional yang terus menunjukkan perkembangan positif diharapkan juga berdampak pada pertumbuhan perekonomian regional Jawa Tengah, sehingga berpotensi tumbuh lebih tinggi pada tahun 2018. Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah pada tahun 2017 diperkirakan akan tumbuh pada berkisaran 5,3–5,7%. Hal ini ditunjang adanya permintaan sektor tersier seperti konstruksi, telekomunikasi dan jasa keuangan diimbangi adanya permintaan domestik dan sektor pertanian.

Laju inflansi Jawa Tengah pada semester II 2016 (2,36%) atau mengalami penurunan dibanding tahun 2015 pada periode yang sama (2,73%). Komoditas yang memberikan sumbangan terbesar terhadap terjadinya inflansi adalah kelompok bahan makan dan makanan jadi serta bahan bakar. Adapun penyebab terjadinya inflansi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh kenaikan indeks pada kelompok pendidikan, rekreasi, olahraga sebesar 1,85%; kelompok perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar sebesar 0,70%, kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau sebesar 0,34%; kelompok transportasi, komunikasi dan jasa keuangan sebesar 0,26%, kesehatan sebesar 0,17%; kelompok sandang sebesar 0,05% dan kelompok bahan makanan sebesar 0,02%.

Kondisi kesejahteraan masyarakat membaik. Berdasarkan survei konsumen menunjukkan ketersediaan lapangan kerja meningkat (diukur dari menurunnya TPT Jateng pada tahun 2016 sebesar 4,63% dari 4,99% pada periode yang sama pada tahun 2015), namun kualitas penduduk yang bekerja belum mengalami perbaikan karena tenaga kerja yang terserap didominasi oleh penduduk yang berpendidikan rendah (SD ke bawah).

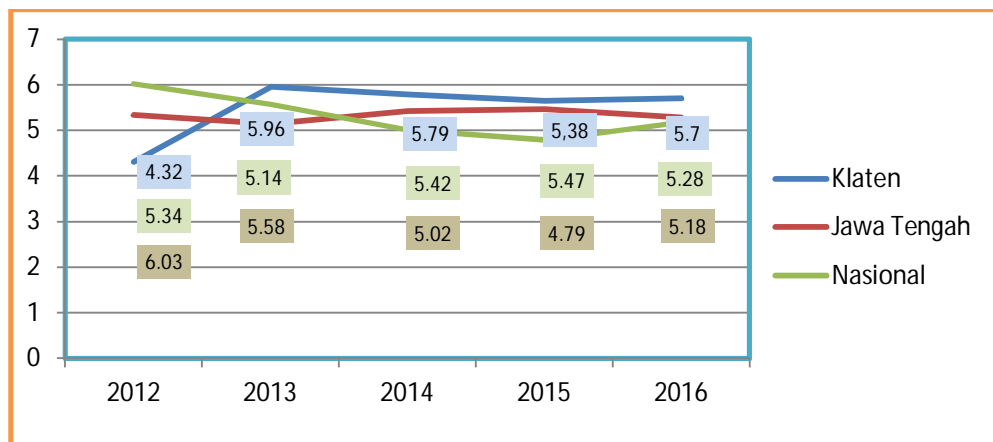
Sementara itu, Perekonomian wilayah Eks Karesidenan Surakarta selama tahun 2016 diantara kabupaten/kota di wilayah eks. Karesidenan Surakarta (Soloraya), diperkirakan berkisar pada angka 5,2% – 5,6%. Angka ini diperkirakan akan lebih baik dibanding capaian nasional (tumbuh 5,0%). Begitu juga angka laju inflansi tercatat sebesar 2,85% (yoy), dan secara tahun kalender tercatat sebesar 1,84% (ytd).

Capaian indikator ekonomi ini didukung adanya pengendalian, dan keterkaitan antar : ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga, kelancaran distribusi, komunikasi, koordinasi dan kerjasama para pihak dalam mendukung kinerja ekonomi. Juga diproyeksikan pertumbuhan ekonomi Eks. Karesidenan Surakarta pada tahun 2018 diperkirakan akan lebih baik dari tahun 2017, yaitu akan tumbuh pada kisaran 5,4 – 5,7% dengan kecenderungan bias ke atas. Sejauh industri pengolahan, perdagangan besar dan eceran, pertanian dan konstruksi masih mampu menopang pertumbuhan ekonomi. Sejalan dengan inflansi nasional, inflansi di eks Karesidenan Surakarta akan mengalami pelambatan.

### 3.1.1.3. Kondisi Ekonomi Kabupaten Klaten

#### A. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan perekonomian Kabupaten Klaten selama tahun 2012-2016 menunjukkan kinerja positif, hal ini ditunjang adanya pertumbuhan sektor UMKM dan lapangan usaha yang mendukung peningkatan sektor jasa. Tahun 2012 tumbuh 4,32%, dan tahun 2013 tumbuh menjadi sebesar 5,96%, namun pada tahun 2014 mengalami penurunan (atau hanya tumbuh 5,79%) sebagai akibat pengaruh perekonomian nasional, sedangkan tahun 2015 tumbuh sebesar 5,64 %, dan tahun 2016 diperkirakan tumbuh berkisar sebesar 5,7%. Perbandingan pertumbuhan perekonomian antara Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional selama Tahun 2011-2015, dapat dilihat pada Gambar 3.1.



Sumber : BAPPEDA Kabupaten Klaten, 2017

Gambar 3.1.

Perbandingan Pertumbuhan Perekonomian Antara Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional selama tahun 2012-2016

#### B. Produk Domestik Regional Bruto

Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Klaten atas Dasar Harga Konstan 2010 selama Tahun 2012-2016 tumbuh secara positif. PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 di Kabupaten Klaten selama tahun 2012-2016 mengalami kenaikan dari sebesar Rp.19.102.405,71 juta pada tahun 2012, meningkat menjadi sebesar Rp.23.717.931,01 pada tahun 2016. Sedangkan PDRB atas dasar Harga Berlaku di Kabupaten Klaten selama Tahun 2012-2016 mengalami kenaikan dari sebesar Rp.21.348.321,95 juta pada tahun 2012, meningkat menjadi sebesar Rp.31.558.691,07 pada tahun 2016.

Gambaran selengkapnya Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010, di Kabupaten Klaten selama Tahun 2012-2016 dapat dilihat dapat dilihat pada Tabel 3.1.

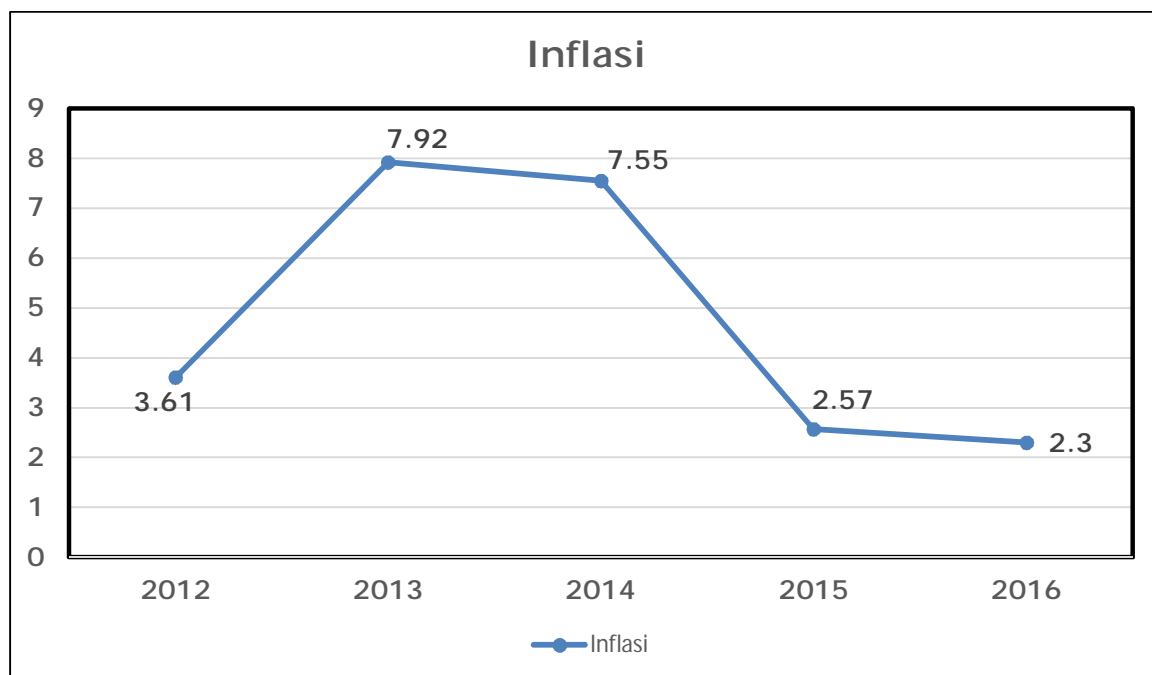
**Tabel 3.1**  
**Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010**  
**di Kabupaten Klaten Tahun 2012-2016 (dalam Rp.Juta)**

No	Lapangan Usaha	2012		2013		2014		2015		2016	
		Nilai (juta Rp.)	(%)	Nilai (juta Rp.)	(%)	Nilai (juta Rp.)	%	Nilai (juta Rp.)	%	Nilai (juta Rp.)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	2,471,010.67	11.10	2,583,620.33	4.56	2,606,035.81	0.87	2,732,275.47	4.84	2,814,072.17	2.99
2	Pertambangan dan Penggalian	523,680.55	3.87	557,451.35	6.45	597,551.15	7.19	617,439.64	3.33	635,253.28	2.89
3	Industri Pengolahan	5,991,221.12	6.51	6,506,551.46	8.60	7,093,268.56	9.02	7,540,801.78	6.31	8,001,139.74	6.10
4	Pengadaan Listrik dan gas	34,545.06	8.70	37,301.57	7.98	38,526.20	3.28	39,160.62	1.65	41,588.12	6.20
5	Pengadaan Air, Pengolahan sampah, Limbah, dan Daur Ulang	10,692.21	1.14	11,062.16	3.46	11,527.87	4.21	11,793.17	2.30	12,047.34	2.16
6	Konstruksi	1,199,173.63	2.55	1,254,970.42	4.65	1,294,690.29	3.17	1,356,317.55	4.76	1,435,985.49	5.87
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3,912,955.36	1.15	4,000,471.06	2.24	4,094,285.55	2.35	4,209,074.39	2.80	4,358,461.18	3.55
8	Transportasi dan Pergudangan	424,248.41	4.17	469,346.14	10.63	515,457.41	9.82	544,592.24	5.65	566,772.32	4.07
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	733,824.99	2.26	755,159.55	2.91	792,087.87	4.89	832,820.90	5.14	883,280.17	6.06
10	Informasi dan Komunikasi	722,286.22	2.11	749,129.31	3.72	794,978.71	6.12	844,708.79	6.26	908,151.37	7.51
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	637,716.58	6.26	675,611.17	5.94	718,614.58	6.37	767,642.41	6.82	823,297.85	7.25
12	Real Estate	272,023.36	3.62	290,530.05	6.80	316,062.61	8.79	339,893.73	7.54	360,869.45	6.17
13	Jasa Perusahaan	50,940.86	9.49	60,535.96	18.84	65,626.24	8.41	70,961.66	8.13	77,484.45	9.19
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	530,808.20	-0.10	543,501.77	2.39	546,822.57	0.61	574,874.57	5.13	591,863.52	2.96
15	Jasa Pendidikan	1,085,188.87	23.09	1,193,988.37	10.03	1,333,544.38	11.69	1,438,627.68	7.88	1,519,264.74	5.61
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan sosial	182,774.69	13.87	200,873.15	9.90	224,011.39	11.52	241,260.27	7.70	260,076.42	7.80
17	Jasa Lainnya	319,311.93	-1.18	351,325.20	10.03	381,431.17	8.57	396,731.26	4.01	428,323.40	7.96
<b>Produk Domestik Regional Bruto</b>		<b>19,102,402.71</b>	<b>5.71</b>	<b>20,241,429.02</b>	<b>5.96</b>	<b>21,424,522.36</b>	<b>5.84</b>	<b>22,558,976.13</b>	<b>5.30</b>	<b>23,717,931.01</b>	<b>5.14</b>

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Klaten 2017

### C. Inflasi

Angka inflasi di Kabupaten Klaten dalam kurun waktu Tahun 2012-2016 memiliki tren yang fluktuatif. Angka inflasi di Kabupaten Klaten pada tahun 2016 tercatat sebesar 2,30% (yoy), menurun jika dibandingkan dengan inflasi tahun 2015 (2,57%). Kondisi tersebut antara lain dipengaruhi oleh terjaganya pasokan, ketersediaan dan stabilnya harga komoditas kebutuhan pokok masyarakat serta minimalnya dampak kebijakan nasional terkait kenaikan tarif dasar listrik. Perkembangan inflasi Kabupaten Klaten Tahun 2012 – 2016 dapat dilihat pada Gambar 3.2.



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Klaten, 2017

**Gambar 3.2.**  
**Inflasi Kabupaten Klaten Tahun 2012-2016**

Seiring dengan perkembangan kondisi ekonomi tersebut di atas, maka kebijakan ekonomi daerah tetap di arahkan dan diupayakan dengan cara-cara: (i) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi, (ii) Menekan laju inflasi agar tidak melebihi satu digit (di atas 10%), dan (iii) Menekan laju pertumbuhan penduduk. Sebagaimana gambaran di atas, agar pertumbuhan perekonomian daerah berjalan pada *track* yang benar perlu dijaga terciptanya kondisi keuangan yang mantap; yakni mengupayakan terciptanya pelaksanaan pembangunan yang aman secara politis, dan layak secara ekonomis. Adapun gambaran perkembangan Indikator Makro Ekonomi Kabupaten Klaten Tahun 2012-2015 dapat disajikan pada Tabel 3.2.

**Tabel 3.2.**  
**Perkembangan Indikator Makro Ekonomi Kabupaten Klaten Tahun 2012-2015**

No	Indikator Makro Ekonomi	Realiasi				
		2012	2013	2014	2015	2016
1.	PDRB (Berlaku) (Jutaan Rp.)	21.348.321,95	23.345.149,85	26.270.890,31	28.988.778,55	31.558.691,07
2.	PDRB (Konstan) (Jutaan Rp.)	19.102.405,71	20.241.429,02	21.424.522,36	22.558.976,13	23.717.931,01
3.	Tk. Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,32	5,96	5,79	5,64	5,7

No	Indikator Makro Ekonomi	Realiasi				
		2012	2013	2014	2015	2016
4.	Tingkat Inflasi (%)	3,61	7,92	7,75	2,57	2,3
5.	Jumlah Penduduk Miskin (%)	14,63	13,88	13,14	12,48	12,33
6.	Jumlah Pengangguran Terbuka (%)	3,66	5,38	6,21	6,15	6,06
7.	PDRB Per Kaita (Konstan)	16.702.635	17.616.531	18.564.994	19.467.616	20.389.928
8.	Disparitas Pendapatan Regional yang dilihat dari perbedaan :					
	- <i>Pendapatan daerah (Rp.000)</i>	1.479.022.039	1.512.149.518.	1.778.004.138	2.175.576.489	2.364.485.257
	- <i>PAD (Rp.000)</i>	77.185.112	82.921.300	134.024.840	189.435.677	194.443.122
	- <i>Besaran IPM</i>	77,98	78,18	78,38	78,58	78,69
	- <i>UMR ( Rp.)</i>	812.000	871.500	1.170.000	1.400.000	1.400.000
9.	Berbagai macam besaran ratio & perbandingan-perbandingan					
	- Rasio PAD terhadap APBD	4,93	5,78	5,62	6,69	8,02
	- Rasio Dana Perimbangan terhadap APBD	69,90	69,05	69,70	69,36	56,65
	- Rasio Lain-Lain Pendapatan Yang Sah terhadap APBD	19,95	25,17	24,68	23,94	32,90

Sumber : BAPPEDA Kab. Klaten, 2017

### 3.1.2. TANTANGAN DAN PROSPEK PEREKONOMIAN DAERAH

Perekonomian Kabupaten Klaten pada tahun 2016 dan tahun-tahun mendatang diperkirakan akan mengalami pertumbuhan yang positif meskipun sedikit mengalami perlambatan seiring dengan perkiraan mulai membaiknya kondisi keuangan global, perkembangan investasi dan tingkat daya beli masyarakat.

Potensi daerah yang besar, ketersediaan lahan yang cukup memadai dan memiliki letak yang strategis di antara Jogjakarta-Surakarta, menjadikan peluang berkembangnya titik tumbuh ekonomi, yang diyakini mampu menyediakan lapangan kerja bagi tenaga kerja lokal secara signifikan. Upaya strategis dan regulasi yang adaptif diharapkan terbentuk, sehingga eksploitasi potensi sumber daya alam terjadi secara bijaksana dan memberikan dampak yang positif dan relevan terhadap peningkatan kualitas dan kesejahteraan masyarakat lokal.

Pertumbuhan ekonomi diperkirakan akan terus meningkat sejalan dengan perkembangan infrastruktur, keterbukaan akses serta potensi pasar yang semakin meningkat. Struktur ekonomi primer tetap merupakan andalan yang akan ditingkatkan kualitas dan pemerataannya karena merupakan basis utama ekonomi kerakyatan yang adaptif dengan kondisi lokal, disamping struktur ekonomi sekunder dan tersier diperkirakan akan meningkat pada tahun 2018 kedepan, dengan selain berkembangnya iklim investasi dan usaha jasa serta industri di Kabupaten Klaten.

Berdasarkan trend perkembangan ekonomi di daerah maupun ekonomi nasional, maka target ekonomi makro berdasarkan asumsi Kabupaten Klaten pada tahun 2018 adalah sebagai berikut:

- Pertumbuhan ekonomi 5,41 %
- Inflasi 3,10 ± 1%
- Prosentase penduduk miskin 10,09-11,21%
- Tingkat Pengangguran Terbuka 5,5%

Apabila prospek perekonomian daerah pada tahun 2018 didasarkan pada analisis lingkungan internal (kekuatan dan kelemahan) dan lingkungan eksternal (peluang dan ancaman) terhadap pencapaian tujuan-tujuan pembangunan daerah, adalah sebagai berikut :

## **A. Lingkungan Internal**

### **a. Kekuatan**

- 1). Posisi geografis Kabupaten Klaten yang strategis terletak diantara Jogjakarta-Surakarta akan memungkinkan terciptanya titik tumbuh ekonomi serta distribusi barang dan jasa, sekaligus memungkinkan berkembang menjadi kota satelit dan penyangga bagi kebutuhan barang dan jasa.
- 2). Menguatnya tata kelola penyelenggaraan pemerintah.
- 3). Tersedianya sarana dan prasarana perekonomian (pasar tradisional, tempat perbelanjaan dan pusat-pusat kawasan ekonomi) dan adanya upaya pemerintah dalam rangka mencukupi kebutuhan barang dan jasa bagi masyarakat.
- 4). Etos kerja, keuletan dan jiwa kewirausahaan masyarakat yang tinggi dalam sektor perekonomian mikro, kecil dan menengah (UMKM) berpengaruh dalam memberikan pertumbuhan makro perekonomian daerah.
- 5). Kualitas sumber daya manusia (SDM) dan sumber daya alam (SDA) yang terolah akan memungkinkan peningkatan produktifitas dan tergalinya potensi-potensi guna menciptakan produk unggulan daerah.
- 6). Potensi sumber daya alam yang dimiliki Kabupaten Klaten serta upaya pemerintah dalam rangka menggerakkan sendi-sendi perekonomian berbasis kerakyatan akan menjadi sumber pemasukan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang potensial.
- 7). Tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan daerah cukup tinggi.
- 8). Adanya kewenangan dalam menyusun peraturan perundangan dan kebijakan daerah dalam rangka mengoptimalkan potensi daerah.
- 9). Nilai-nilai sosial kemasyarakatan dan kearifan lokal dalam pelaksanaan pembangunan daerah tetap terpelihara dengan baik.
- 10). Potensi kepariwisataan yang bervariasi menjadi modal dasar dalam pengembangan sektor pariwisata guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pemerintah daerah.
- 11). Adanya infrastruktur dasar publik yang cukup memadai dan terbukanya akses ke setiap wilayah.

## **b. Kelemahan**

- 1). Masih terbatasnya para pelaku UMKM dalam mengakses sumber daya produktif (modal, teknologi, informasi dan pasar).
- 2). Masih tingginya jumlah penduduk miskin dan pengangguran
- 3). Belum meratanya kualitas pendidikan dan akses pelayanan kesehatan antar wilayah.
- 4). Belum terciptanya pemerataan hasil-hasil pembangunan dalam kerangka keruangan/wilayah pembangunan sampai tingkat desa
- 5). Masih terbatasnya akses data dan informasi pendukung dari masing-masing satuan kerja perangkat daerah baik sebagai bahan penyusunan perencanaan pembangunan daerah maupun penelitian dan pengembangan.
- 6). Belum optimalnya pertumbuhan kawasan ekonomi wilayah dan produk unggulan daerah yang memiliki daya tarik, daya tahan dan daya saing.
- 7). Belum optimalnya pengembangan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik dan penciptaan tata pemerintahan yang baik dan bersih (*good and clean governance*).

## **B. Lingkungan Eksternal**

### **a. Peluang**

- 1). Adanya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang memberikan ruang lebih besar untuk melakukan pemberdayaan terhadap UMKM dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan dan peningkatan pendapatan rakyat, penciptaan lapangan kerja dan pengentasan kemiskinan.
- 2). Adanya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang memberikan ruang lebih besar untuk melakukan penggalian sumber-sumber keuangan dari pajak dan retribusi daerah secara maksimal, khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD).
- 3). Semakin menguatnya pengintegrasian perekonomian dunia yang ditandai dengan perekonomian global yang memperbesar akses pasar bagi produk-produk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dari Kabupaten Klaten.
- 4). Terjalannya kerja sama antar daerah dalam Kawasan SUBOSUKAWONOSRATEN akan semakin menciptakan sinergisitas pengembangan dan pertumbuhan perekonomian daerah regional di Wilayah Solo Raya yang lebih baik.
- 5). Terciptanya iklim kondusif atas dasar pola-pola kemitraan antara pemerintah daerah dan dunia usaha yang saling menguntungkan akan lebih mendorong tumbuhnya iklim investasi dan mengurangi pengangguran terbuka dan meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat.
- 6). Adanya Undang-Undang Sistem Peradilan Anak.

### **b. Ancaman**

- 1). Semakin menguatnya daya saing terhadap produk-produk sejenis yang dihasilkan oleh pelaku UMKM dari luar Kabupaten Klaten baik dalam lingkungan domestik maupun lingkungan internasional.

- 2). Belum optimalnya *deregulasi dan debirokratisasi* investasi daerah serta masih adanya peraturan-peraturan daerah yang *kurang kondusif* dalam mendorong penciptaan investasi.
- 3). Adanya kebijakan pemerintah (kenaikan harga minyak bumi mentah dan resesi ekonomi dunia) dapat berdampak terhadap kenaikan harga (inflasi) yang berpotensi menurunkan daya beli masyarakat.
- 4). Semakin intensifnya daerah-daerah lain dalam melakukan kebijakan *deregulasi dan debirokratisasi* guna dalam memberikan kemudahan berinvestasi di daerah yang bersangkutan.
- 5). Flutuaktifnya harga minyak internasional dan pangan yang dapat mengakibatkan kenaikan harga BBM dan impor barang.
- 6). Flutuaktifnya nilai tukar rupiah terhadap dollar.
- 7). Adanya keberlanjutan dari krisis keuangan global yang akan berdampak pada sendi-sendi perekonomian nasional.
- 8). Naiknya harga minyak dunia yang berdampak pada naiknya harga BBM secara nasional.

#### **3.1.2.1. TANTANGAN UTAMA**

Berdasarkan kondisi dan perkembangan perekonomian Kabupaten Klaten serta mempertimbangkan faktor-faktor internal dan eksternal maka Kerangka Ekonomi Makro Daerah diprediksi akan menghadapi berbagai tantangan utama di antaranya sebagai berikut :

##### **A. Pertumbuhan Ekonomi**

Kondisi perekonomian Kabupaten Klaten tahun 2018 diperkirakan masih akan dipengaruhi oleh pelambatan ekonomi global, melemahnya harga komoditas ekspor, prospek ekonomi dan kebijakan moneter negara-negara maju serta ketidakpastian kondisi pasar keuangan global yang berdampak pada pelemahan nilai tukar rupiah. Beberapa tantangan yang dihadapi Kabupaten Klaten antara lain :

1. Pemberlakuan MEA yang akan berdampak pada dinamika kegiatan ekonomi di Kabupaten Klaten khususnya bagi UMKM;
2. Ketergantungan bahan bakar impor pada industri manufaktur dan kebutuhan pangan masyarakat;
3. Penurunan harga komoditas ekspor dunia yang berpengaruh terhadap nilai ekspor non migas di Kabupaten Klaten;
4. Tuntutan konsumen yang semakin meningkat atas produk berkualitas dan berwawasan lingkungan;

##### **B. Kualitas Pertumbuhan Ekonomi**

Secara normatif pertumbuhan ekonomi makro daerah yang selalu meningkat diharapkan tidak hanya meningkatkan arus produksi dan distribusi barang/jasa dari dan ke dalam daerah Kabupaten Klaten namun juga mampu memperbaiki kualitas hidup masyarakat yang ditunjukkan oleh peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Secara normatif dengan meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi daerah menunjukkan daya beli masyarakat meningkat, inflasi dapat dikendalikan, jumlah pengangguran dan penduduk miskin menurun.



Tantangan utama yang muncul adalah bagaimana meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi daerah namun tetap mampu mengakomodasi nilai-nilai universal yang berkembang sekarang (demokratisasi, tata pemerintahan yang baik, kelestarian lingkungan, dsbnya).

### **C. Stabilitas Ekonomi**

Keberlangsungan perekonomian tidak hanya memerlukan stabilitas ekonomi makro namun juga stabilitas kondisi keamanan dan politik. Hal ini dalam rangka tetap menjamin terpeliharanya potensi, aset-aset dan hasil-hasil pembangunan. Kondisi perekonomian riil yang fluktuatif yang ditandai dengan harga kebutuhan bahan pokok, ketersediaan barang dan jasa dan daya beli masyarakat menjadi tantangan dalam mencapai target indikator perekonomian makro.

#### **3.1.3. SASARAN KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH**

Perekonomian Kabupaten Klaten di masa depan diarahkan menjadi ekonomi daerah yang mandiri dengan ditopang pertumbuhan ekonomi kreatif. Kerangka ini menjelaskan bahwa ekonomi daerah diharapkan akan terbentuk dengan landasan dan struktur perekonomian yang kokoh, kekuatan fiskal daerah, PDRB perkapita meningkat dengan kontribusi terbesar bersandar pada kemandirian ekonomi kerakyatan. Struktur ekonomi tidak hanya didominasi oleh sektor primer, tetapi juga didukung oleh sektor sekunder dan tersier terutama melalui sektor dan subsektor andalan dan alternatif pengembangan ekonomi berdasarkan potensi dan kekuatan yang dimiliki. Pada aspek penerimaan daerah (pemerintah) diharapkan terjadi pengurangan ketergantungan terhadap dana pemerintah pusat, dan sebaliknya Pendapatan Asli Daerah serta sumber daya daerah lainnya akan menjadi kekuatan potensial Kabupaten Klaten di masa datang.

Selain itu Arah kebijakan ekonomi daerah Kabupaten Klaten pada tahun 2018 juga diarahkan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah, tingkat daya beli masyarakat serta tetap menjaga stabilitas harga dalam rangka meningkatkan penyediaan barang dan jasa bagi masyarakat. Pertumbuhan ekonomi daerah Kabupaten Klaten pada tahun 2012 mencapai 5,54%, pada tahun 2013 mencapai 5,79% , pada tahun 2014 mencapai 5,38% , pada tahun 2015 mencapai 5,4% dan pada tahun 2016 diperkirakan akan mencapai 5,55%. Namun demikian target sebesar tersebut hanya akan tercapai apabila didukung stabilitas ekonomi nasional, politik dan keamanan, serta terciptanya iklim usaha yang kondusif.

Terkait dengan target tersebut, mengingat kekuatan dan peluang serta kelemahan dan tantangan Kabupaten Klaten maka laju pertumbuhan ekonomi daerah dapat dicapai dengan menciptakan kebijakan-kebijakan yang mampu mendorong kegiatan investasi di sektor industri pertanian, industri dan perdagangan yang berorientasi ekspor serta pengembangan pariwisata. Peluang investasi dalam industri pertanian yang berorientasi ekspor salah satunya dilakukan dengan kemudahan regulasi-regulasi daerah yang sudah tidak relevan dengan kondisi sekarang dengan langkah RIA (*Regulatory Investment Assessment*). Kebijakan yang tumpang tindih antara pusat dan daerah serta antar sektor diharapkan tidak terjadi lagi. Kepastian hukum, penyehatan iklim ketenagakerjaan, peningkatan penyediaan infrastruktur, penyederhanaan

prosedur perijinan, perpajakan dan kepabeanaan serta peningkatan fungsi intermediasi sektor perbankan dengan sektor dunia usaha merupakan langkah utama guna mendorong kinerja peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah.

Kualitas pertumbuhan ekonomi dengan titik berat pemerataan pembangunan diupayakan dengan mendorong kegiatan sektor pertanian dan ekonomi yang berbasis perdesaan dan kerakyatan, penciptaan lapangan kerja baru dengan mengendalikan Upah Minimal Regional (UMR) agar tidak terjadi laju inflasi, memastikan biaya-biaya non UMR dengan mengarahkan pada peningkatan produktifitas tenaga kerja dan membangun hubungan industri yang harmonis.

Kualitas pertumbuhan daerah juga diupayakan untuk meningkatkan akses usaha mikro, kecil, menengah (UMKM) dan koperasi terhadap sumber daya produktif. Upaya-upaya untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dan pengurangan pengangguran diupayakan dengan berbagai kebijakan lintas sektoral yang mengarah pada penciptaan kesempatan usaha bagi masyarakat miskin, membuka peluang pemberdayaan masyarakat miskin serta pemberian perlindungan/proteksi sosial bagi masyarakat miskin. Stabilitas ekonomi dijaga dengan berbagai regulasi yang memungkinkan tumbuhnya sektor-sektor riil dan pemantauan perkembangan harga. Stabilitas ekonomi di masa mendatang juga akan didukung dengan semakin menguatnya perkembangan perdagangan dan jasa keuangan di daerah.

Oleh sebab itu peningkatan dan pengembangan ekonomi daerah akan diupayakan dan ditekankan pada (1) penguatan struktur ekonomi daerah dengan menyelaraskan perkembangan sektor primer, sekunder dan tersier melalui peningkatan sektor pertanian yang dilakukan secara terpadu dengan pengembangan agroindustri dan agribisnis berbasis agrominapolitan agar produktivitas, nilai tambah dan daya saing semakin banyak dinikmati para pelaku ekonomi lokal, (2) pengembangan usaha berbasis potensi daerah dan berorientasi pasar, sesuai dengan kompetensi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), (3) menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan UMKM menjadi usaha yang tangguh dan mandiri dengan perkuatan permodalan dan akses pasar melalui gerakan perkoperasian dan mengembangkan jenis koperasi yang ada antara lain : Koperasi Simpan Pinjam, Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah , (4) peningkatan peran UMKM dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi dan pengentasan masyarakat dari kemiskinan, (5) memacu laju pertumbuhan ekonomi daerah berbasiskan pada peningkatan investasi dan penciptaan iklim usaha yang kondusif, dan (6) peningkatan terhadap akses sumber daya produktif.

Berdasarkan arah kebijakan ekonomi daerah Kabupaten Klaten Tahun 2017, maka sasaran ekonomi pada tahun 2018 sebagai berikut :

1). Berkurangnya Jumlah Penduduk Miskin

Jumlah penduduk miskin di berbagai daerah dari tahun ke tahun cenderung menunjukkan peningkatan. Permasalahan ini muncul sebagai akibat masih adanya kebijakan yang tidak *pro-poor* dan sisi lain disebabkan penyebaran penduduk yang tidak merata, juga terbatasnya lapangan kerja disamping jumlah angkatan kerja lebih banyak. Berdasarkan hasil PPLS (Pendataan Program

Perlindungan Sosial) tahun 2011 di Kabupaten tercatat sebanyak 133.771 RTS (rumah tangga sasaran) dengan perincian, untuk kategori Rumah Tangga Miskin sebanyak 48.455 RTS, Rumah Tangga Hampir Miskin sebanyak 44.512 RTS dan Rumah Tangga Rentan Miskin sebanyak 44.805 RTS. Tahun 2017 ditarget presentase jumlah penduduk miskin tinggal 11,21%. Dari data ini menunjukkan bahwa masih besarnya tantangan Pemerintah Kabupaten Klaten di dalam upaya menurunkan tingkat kemiskinan.

2). Berkurangnya Jumlah Pengangguran Terbuka

Dengan berkurangnya lapangan kerja di sektor formal telah mengakibatkan munculnya lapangan kerja di sektor informal (maraknya Pedagang Kaki Lima, semakin banyaknya wiraswasta dan kegiatan Usaha Rumah Tangga Mikro Kecil Menengah). Meningkatnya kegiatan PKL di beberapa tempat sampai menyebar di wilayah ibu kota kecamatan. Tumbuhnya sektor informal tersebut satu sisi telah ikut berperan sebagai katup pengaman atas berkurangnya kemampuan sektor formal dalam menyediakan kesempatan kerja namun di pihak lain sering berbenturan dengan berbagai kebijakan pemerintah yang mengarah pada upaya ketertiban dan keindahan kota. Dengan mengingat realita demikian maka diupayakan terciptanya regulasi dan kebijakan daerah yang berdampak pada pengurangan pengangguran terbuka namun sekaligus tidak bertentangan dengan kebijakan pemerintah.

Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) dan pada tahun 2011 meningkat menjadi 70,03. Sedangkan tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2010 mencapai 4,50% dan pada tahun 2011 turun menjadi 4,35%, dan pada tahun 2014 diperkirakan menjadi 3,95% serta tahun 2015 mencapai 3,93%. Serta tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2017 akan ditekan mendekati 5,8%.

Mengingat letak geografi, potensi, kekuatan, peluang dan tantangan Kabupaten Klaten maka sektor kepariwisataan daerah yang belum optimal diupayakan dapat memberikan peningkatan pendapatan bagi masyarakat dan pemerintah daerah. Potensi pariwisata yang bervariasi di wilayah kabupaten ini diharapkan terangkai dalam koridor pariwisata Jogjakarta-Surakarta yang semakin berkembang sekarang ini. Kerjasama *Java Promo* yang melibatkan Kabupaten Klaten salah satunya diharapkan mampu merealisasikan upaya pengembangan pariwisata.

Dalam kenyataannya sektor UMKM dapat bertahan walaupun kondisi perekonomian nasional dan global sedang tidak stabil. Walaupun sektor pertanian sudah tidak mampu menjadi penyumbang terbesar dalam struktur PDRB namun mengingat realita sektor ini masih dominan, maka upaya intensifikasi pertanian khususnya non beras dan pendirian industri berbasis pertanian diharapkan akan memberikan peluang kesempatan kerja. Kegiatan penggalan dan implementasi produk unggulan daerah diharapkan mendapat perhatian sehingga mampu mendorong penyerapan tenaga kerja.

3). Terjaganya Stabilitas Harga

Pertumbuhan ekonomi dan inflasi daerah merupakan parameter kondisi makro perekonomian daerah. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi namun perkembangan harga (*inflasi*) juga tinggi akan berdampak terhadap menurunnya daya beli

masyarakat. Dalam dimensi makro inflasi yang tinggi juga dapat mengurangi daya saing atas produk barang dan jasa.

Secara umum pada tahun 2016 inflasi di Kabupaten Klaten sebesar 0,27% dan jika dibandingkan dengan tahun 2015 yang sebesar 0,29% berarti ada penurunan. Inflasi yang terjadi di Kabupaten Klaten didorong adanya penurunan harga minyak mentah dunia yang berdampak pada penurunan BBM nasional, serta harga Elpiji 12 Kg, serta tekanan nilai Dollar AS terhadap rupiah di tengah ketidak-pastian pemulihan ekonomi global, adanya gangguan cuaca dan infrastruktur yang mengganggu pasokan komoditas, penetapan HPP untuk pengadaan Bulog, dan pengekatan impor pemerintah. Pertumbuhan perekonomian di Kabupaten Klaten pada tahun 2016 mencapai 5,7 persen, sehingga untuk tahun 2018 harus dapat menekan laju inflasi.

### **3.2. ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH**

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah, keuangan daerah mempunyai peranan yang sangat penting, dalam hal ini sebagaimana pembiayaan pelaksanaan pembangunan sangat tergantung pada kondisi kemampuan keuangan daerah, sehingga kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah perlu dilaksanakan agar pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat terlaksana dengan baik. Kondisi kemampuan keuangan daerah dapat dilihat dari penerimaan fiskal daerah. Terbatasnya sumber penerimaan telah menempatkan pengelolaan aset daerah secara optimal pada posisi yang amat potensial untuk menunjang penerimaan pemerintah daerah. Selain pendanaan melalui APBD, terdapat sumber pendanaan lainnya diluar APBD antara lain APBN dan APBD Provinsi Jawa Tengah, kemitraan dunia usaha, swadaya masyarakat serta kontribusi pelaku usaha melalui Corporate Social Responsibility (CSR).

#### **3.2.1. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan**

Kemandirian keuangan daerah merupakan hal penting dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, suatu daerah yang kemampuan fiskalnya baik akan memiliki kemampuan yang lebih baik dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan-kegiatan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam hal pelaksanaan fungsi pelayanan dan keberlangsungan pembangunan daerah.

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pendapatan Daerah merupakan hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun terkait. Sumber pendapatan daerah Kabupaten terdiri atas : 1) Pendapatan Asli Daerah yang terdiri atas pajak daerah, restribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah; 2) Dana Perimbangan yang meliputi dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak, dana alokasi umum, dana alokasi khusus; 3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah yang meliputi hibah, dana darurat, dana bagi hasil pajak dari pemerintah daerah lainnya, dana penyesuaian dan dana otonomi khusus, dana bantuan dari provinsi/kabupaten/kota lainnya, lain-lain penerimaan, dana transfer pusat

dan dana insentif daerah. Sementara penerimaan pembiayaan bersumber dari Sisa lebih perhitungan anggaran daerah tahun sebelumnya (SiLPA), penerimaan pinjaman daerah, Dana Cadangan Daerah (DC), dan hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Pendapatan daerah dihitung dari asumsi-asumsi yang ditetapkan pada saat penyusunan rencana target pendapatan daerah, diantaranya : kondisi dan perkembangan ekonomi makro; kebijakan fiskal Nasional yang turut berpengaruh pada penerimaan pendapatan daerah; potensi yang dimiliki serta realisasi pendapatan daerah tahun sebelumnya; upaya intensifikasi dan ekstensifikasi PAD.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, terjadi beberapa pengalihan beberapa kewenangan kabupaten/kota menjadi kewenangan provinsi, dari provinsi ke kabupaten/kota, dari provinsi ke pusat dan sebaliknya yang mengakibatkan akan terjadi perubahan kebijakan penerimaan pendapatan daerah.

Realisasi pendapatan daerah pada tahun sebelumnya menjadi acuan dalam rangka memproyeksikan target tahun yang akan direncanakan. Perkembangan realisasi pendapatan daerah Kabupaten Klaten dan proyeksi Tahun Anggaran 2018 dapat disajikan pada Tabel 3.3.

**Tabel 3.3.**  
**Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Daerah Tahun 2016-2018**  
**Kabupaten Klaten**

No	Uraian	Realisasi TA. 2016	Rencana APBD TA. 2017	Proyeksi Tahun 2018
<b>1</b>	<b>PENDAPATAN</b>	<b>2.258.604.630.605</b>	<b>2.471.302.356.000</b>	<b>2.789.260.227.000</b>
<b>1.1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>224.197.408.418</b>	<b>208.930.740.000</b>	<b>335.012.673.000</b>
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	75.574.747.729	71.570.381.000	88.376.500.000
1.1.2	Hasil Restribusi Daerah	22.559.038.217	22.879.788.000	13.900.202.000
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	9.025.861.668	9.025.118.500	9.025.118.500
1.1.4	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	117.037.760.867	105.455.452.500	223.710.852.500
<b>1.2</b>	<b>DANA PERIMBANGAN</b>	<b>1.573.615.108.481</b>	<b>1.730.081.906.000</b>	<b>1.868.159.181.000</b>
1.2.1	Dana Transfer Umum Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	50.275.933.273	47.349.972.000	52.020.647.000
1.2.2	Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum	1.204.344.586.098	1.305.212.808.000	1.305.212.808.000
1.2.3	Dana Transfer Khusus	318.994.589.110	377.519.126.000	510.925.726.000
<b>1.3</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>460.792.113.643</b>	<b>532.289.710.000</b>	<b>473.832.820.000</b>
1.3.1	Pendapatan Hibah	-	2.810.020.000	-
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	143.325.208.643	162.745.373.000	162.745.373.000
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	-	55.646.870.000	-
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	73.600.480.000	-	78.343.000.000
1.3.7	Dana Desa	243.866.425.000	311.087.447.000	345.000.000.000

Sumber : BAPPEDA Kab. Klaten, 2017 diolah

### 3.2.2. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Kebijakan pendapatan daerah Kabupaten Klaten Tahun 2018 merupakan perkiraan pendapatan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum yang jelas. Kebijakan pendapatan daerah tersebut diarahkan pada upaya peningkatan pendapatan daerah yang berasal dari sektor pajak daerah, retribusi daerah maupun dana perimbangan. Upaya yang ditempuh dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah antara lain :

1. Meningkatkan kemandirian keuangan daerah dengan kebijakan, adalah sebagai berikut :
  - a. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
  - b. Mengoptimalkan PAD sesuai ketentuan UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Upaya ini antara lain akan ditempuh dengan cara: (i) mulai tahun 2013, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sudah masuk menjadi Pajak Daerah dalam PAD, setelah secara bertahap dilakukan alih ketrampilan dan teknologi dalam pengelolaan PBB, (ii) secara bertahap dilakukan transfer ketrampilan dan teknologi dalam pengelolaan PBB, agar dapat berjalan secara *online* dengan Bank Operasi (BO).
2. Pengoptimalan sumber-sumber/potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang disesuaikan dengan peraturan perundangan terbaru, khususnya dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dengan jalan melakukan program intensifikasi dan ekstensifikasi pendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan cara:
  - a. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, khususnya untuk meningkatkan sumber pendapatan yang berasal dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
  - b. Mengadakan pendataan ulang terhadap berbagai obyek dan jenis-jenis pendapatan yang baru, khususnya dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
  - c. Penyesuaian besaran tarif dengan melakukan revisi terhadap berbagai Peraturan Daerah (Perda) yang sudah tidak sesuai, baik terkait dengan kondisi saat ini maupun kebutuhan penyesuaiannya dengan peraturan perundangan yang berlaku.
  - d. Membina hubungan yang baik dengan Wajib Pajak.
  - e. Meningkatkan peran aktif SKPD yang terkait, dalam rangka penegakan hukum dan peningkatan pendapatan daerah.
3. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dipungut tidak akan memberatkan masyarakat dan akan diusahakan bisa mendorong perkembangan investasi daerah di Kabupaten Klaten.
4. Dana Alokasi Umum (DAU) diproyeksikan sama dengan tahun anggaran sebelumnya (TA. 2017).

5. Dana Alokasi Khusus (DAK) diasumsikan mendasari hasil verifikasi usulan rencana program kegiatan tahun 2018.
6. Dana bagi hasil dari provinsi diharapkan akan meningkat rata-rata 5% per tahun atau lebih.
7. Bantuan keuangan dari Propinsi Jawa Tengah diasumsikan mendasari hasil verifikasi usulan rencana program kegiatan tahun 2018 yang akan didanai dari APBD Provinsi Jawa Tengah.
8. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat, yang ditempuh dengan cara:
  - a. Perbaikan sistem dan manajemen dalam pengelolaan pendapatan guna memberikan kemudahan akses Wajib Pajak (WP) dan Wajib Retribusi (WR).
  - b. Penegakan Perda terhadap WP dan WR yang tidak taat melakukan pembayaran kewajibannya.
9. Peningkatan kualitas pengelolaan manajemen pendapatan daerah, termasuk di dalamnya memberikan reward secara proporsional terhadap kinerja aparatur daerah dalam mengelola pendapatan daerah.
10. Mengupayakan peningkatan pendapatan dari Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, yaitu dengan cara meningkatkan aktivitas perekonomian Kabupaten Klaten, melalui penciptaan iklim usaha yang kondusif, penyehatan iklim ketenagakerjaan, penegakan hukum dan peraturan perundangan, serta meningkatkan keamanan dan ketertiban hingga di tingkat kecamatan dan kelurahan.

Ketergantungan yang tinggi terhadap Dana Perimbangan akan berdampak negatif apabila pendapatan negara mengalami fluktuatif akibat pengaruh global. Harga minyak mentah dunia yang mencapai di atas US\$ 48/barrel di pasaran dunia dan krisis keuangan global akan berdampak terhadap postur APBN 2018. Kondisi penerimaan pendapatan negara juga berpengaruh terhadap proyeksi penerimaan pendapatan daerah dari pos Dana Perimbangan yang akan berpengaruh terhadap rencana program kegiatan yang akan didanai dari Dana Alokasi Umum maupun Dana Alokasi Khusus. Apabila asumsi ini benar-benar terjadi maka bisa jadi kontribusi Dana Perimbangan dalam struktur APBD Kabupaten Klaten Tahun 2017 akan terjadi penurunan atau minimal sama dengan tahun 2018.

Mendasarkan data-data di atas disimpulkan bahwa kontribusi PAD masih berkisar antara 12,01 % sedangkan kontribusi Dana Perimbangan berkisar antara 66,98 %, serta kontribusi Lain-lain Pendapatan berkisar antara 21,01 % dalam proyeksi pendapatan tahun 2018.

Dengan demikian peran PAD Kabupaten Klaten sangat diharapkan mampu mengamankan APBD, dan diperlukan penggalan sumber-sumber pendanaan dari luar APBD. Salah satu sumber pembiayaan di luar APBD dapat berupa investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) atau Penanaman Modal Asing (PMA), kemitraan dengan dunia swasta/usaha, kemitraan dengan masyarakat, peningkatan swadaya masyarakat dan sebagainya. Dengan kondisi demikian ini, Pemerintah Kabupaten Klaten diharapkan mampu menarik investor untuk



menanamkan modalnya baik PMA maupun PMDN dalam skala luas. Deregulasi kebijakan-kebijakan daerah yang mengarah pada pemberian insentif, kesiapan dan sinergisitas antar SKPD serta langkah jemput bola pemerintah daerah kepada dunia usaha diharapkan dapat meningkatkan investasi tersebut.

### 3.2.3. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Kebijakan belanja daerah antara lain memprioritaskan pos belanja yang bersifat wajib antara lain belanja pegawai, belanja bagi hasil serta belanja barang dan jasa yang wajib dikeluarkan pada tahun yang bersangkutan. Belanja tidak langsung untuk belanja hibah, belanja bantuan sosial dan belanja bantuan keuangan serta belanja tidak terduga disesuaikan dan diperhitungkan berdasarkan ketersediaan pendanaan setelah belanja langsung. Pengalokasian belanja daerah rencana Tahun 2018 disesuaikan dengan asumsi dasar ekonomi makro, kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah, kebutuhan pembangunan dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kebijakan-kebijakan terkait belanja daerah Kabupaten Klaten Tahun 2018 antara lain :

- a. Pemenuhan belanja mengikat dan wajib dilakukan sesuai amanat Pasal 106 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016, yaitu :
  1. Memenuhi belanja mengikat yaitu belanja yang dibutuhkan secara terus-menerus dan dialokasikan dengan jumlah yang cukup untuk tahun anggaran yang berkenaan seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa.
  2. Memenuhi belanja wajib yaitu belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan, kesehatan dan/atau melaksanakan kewajiban dengan pihak ketiga.
- b. Pemenuhan belanja prioritas dalam pencapaian Visi dan Misi RPJMD 2016-2021  
Belanja prioritas dalam pencapaian Visi dan Misi RPJMD 2016-2021 adalah belanja program-program yang merupakan penjabaran pelaksanaan sasaran dan prioritas pembangunan tahun 2018 adalah tahap pemantapan pencapaian 4 butir tujuan yaitu 1) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat; 2) Mewujudkan pemenuhan kebutuhan prasarana, sarana dan utilitas umum bagi masyarakat; 3) Meningkatkan mutu dan kualitas lingkungan hidup; dan 4) Mewujudkan pengurangan resiko bencana.
- c. Pengalokasian belanja penyelenggaraan urusan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 serta dengan memperhatikan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
- d. Pengalokasian belanja dalam rangka mendukung target sasaran pembangunan daerah tahunan yang mendukung upaya perwujudan pembangunan nasional maupun pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah.
- e. Perencanaan belanja tidak langsung terkait Hibah dan Bantuan Sosial yang berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Peraturan Menteri



Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Kebijakan belanja daerah tahun 2018 disusun dengan pendekatan *money follow programe* dengan memperhatikan prioritas pembangunan yang sesuai dengan permasalahan serta situasi dan kondisi daerah Kabupaten Klaten pada tahun mendatang. Mendasari analisa dan perhitungan proyeksi sumber-sumber pendapatan daerah dan realisasinya, arah kebijakan belanja daerah tahun 2018 dituangkan dalam tabel dibawah ini :

**Tabel 3.4.**  
**Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Tahun 2016-2018**  
**Kabupaten Klaten**

No	Uraian	Realisasi TA. 2016	Rencana APBD TA. 2017	Proyeksi Tahun 2018
2	<b>BELANJA</b>	<b>2.282.330.771.499</b>	<b>2.590.956.004.000</b>	<b>2.883.260.227.000</b>
2.1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>1.780.715.488.258</b>	<b>1.903.072.821.000</b>	<b>1.734.516.451.341</b>
2.1.1	Belanja Pegawai	1.238.738.884.717	1.269.988.273.750	1.104.824.536.141
2.1.4	Belanja Hibah	32.171.055.836	45.793.750.000	41.302.995.000
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	11.810.425.000	2.392.000.000	2.535.000.000
2.1.6	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	5.826.321.071	9.445.017.800	9.445.016.900
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan	491.908.747.434	572.546.658.000	573.126.250.000
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	260.054.200	2.907.121.450	2.500.000.000
2.2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>501.615.283.241</b>	<b>687.883.183.000</b>	<b>1.148.743.775.659</b>
1.2.1	Belanja Pegawai	27.421.377.821	35.545.455.836	
1.2.2	Belanja Barang dan Jasa	253.434.818.136	317.830.141.000	
1.2.3	Belanja Modal	220.759.087.283	334.507.586.164	

Sumber : BAPPEDA Kab. Klaten, 2017 diolah

### 3.2.4. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

#### 3.2.3.1. Arah Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah merupakan pos dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang berfungsi untuk menutup *defisit* anggaran atau sebagai pos cadangan yang dimanfaatkan sebagai surplus anggaran. Dalam pola penganggaran sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dijelaskan bahwa struktur APBD terdiri dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah. Struktur Penerimaan Pembiayaan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016-2018 dapat disajikan pada Tabel 3.5

**Tabel 3.5.**  
**Realisasi dan Proyeksi Penerimaan Pembiayaan Daerah**  
**Kabupaten Klaten Tahun 2016- 2018**

No	Uraian	Realisasi TA. 2016	Rencana APBD TA. 2017	Proyeksi Tahun 2018
<b>3.1</b>	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>406.262.095.580</b>	<b>134.653.648.000</b>	<b>100.000.000.000</b>
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA)	406.198.863.893	134.653.648.000	100.000.000.000
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-
3.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	63.231.687	-	-
3.1.6	Penerimaan Piutang Daerah	-	-	-

*Sumber : BPKD & BAPPEDA Kab. Klaten, 2017 diolah*

Mendasarkan kondisi tersebut maka kebijakan Penerimaan Pembiayaan Daerah di Kabupaten Klaten pada Tahun 2018 antara lain diarahkan untuk :

- a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun sebelumnya (SiLPA) diasumsikan untuk menutup defisit anggaran yang terjadi. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu merupakan selisih lebih antara realisasi pendapatan dengan belanja daerah yang dalam APBD induk dianggarkan berdasarkan estimasi, dan didefinisikan dalam perubahan APBD yang ditetapkan dalam peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun sebelumnya. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu mencakup sisa dana untuk mendanai kegiatan lanjutan, utang pihak ketiga yang belum terselesaikan, pelampauan target pendapatan daerah, penerimaan dan pengeluaran lainnya yang belum terselesaikan sampai akhir tahun anggaran.
- b. Terkait dengan penerimaan dari Pihak Ketiga, maka:
  - ❖ Penerimaan Pihak Ketiga ditiadakan menyesuaikan regulasi dalam Perda Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (P3KD).
  - ❖ Penerimaan dari Pihak Ketiga dilakukan melalui pengelolaan kas non anggaran dan dilaporkan pada Laporan Arus Kas.
- c. Secara bertahap dilakukan terobosan pembiayaan keuangan daerah, yaitu dengan mempertimbangkan adanya obligasi daerah, saham, SBI dengan mempertimbangkan kemampuan SDM pengelola dan regulasi pemerintah.
- d. Optimalisasi pemberdayaan aset daerah sebagai sumber pembiayaan daerah.

### **3.2.3.2. Arah Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Daerah**

Kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Klaten diarahkan untuk penyertaan modal Tahun 2018. Struktur Penerimaan Pembiayaan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016-2018 dapat disajikan pada Tabel 3.6.

**Tabel 3.6.**  
**Realisasi dan Proyeksi Pengeluaran Pembiayaan Daerah**  
**Kabupaten Klaten Tahun 2016 - 2018**

No	Uraian	Realisasi TA. 2016	Rencana APBD TA. 2017	Proyeksi Tahun 2018
3.2	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>8.304.000.000</b>	<b>15.000.000.000</b>	<b>6.000.000.000</b>
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	3.000.000.000	5.000.000.000	6.000.000.000
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	5.304.000.000	10.000.000.000	-
	<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>397.958.095.580</b>	<b>119.653.648.000</b>	<b>94.000.000.000</b>

Sumber : BPKD & BAPPEDA Kab. Klaten, 2017 diolah

Mendasarkan kondisi tersebut maka kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Daerah di Kabupaten Klaten pada Tahun 2018 antara lain diarahkan untuk :

- a. Memperkuat permodalan dan kinerja perusahaan daerah yang bergerak pada sektor pelayanan kebutuhan dasar masyarakat dalam bentuk penyertaan modal daerah. Penyertaan modal kepada BUMD (Perusda) dilakukan secara bertahap. Penyertaan modal diberikan sesuai yang diatur dalam Perda tentang Penyertaan Modal.
- b. Merumuskan kebijakan/kerangka regulasi yang dapat mendorong partisipasi masyarakat/swasta dalam mendanai program dan kegiatan pemerintah daerah melalui kerjasama yang saling menguntungkan (*publik private partnership*).

### 3.2.5. Rekapitulasi Realisasi dan Proyeksi (Pagu Indikatif) Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah

Secara keseluruhan realisasi dan proyeksi pendapatan daerah, penerimaan pembiayaan daerah, belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah sebagaimana dirinci pada Tabel 3.7.

**Tabel 3.7.**  
**Rekapitulasi Realisasi dan Proyeksi (Pagu Indikatif)**  
**Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten**  
**Tahun 2016 - 2018**

No	Uraian	Realisasi TA. 2016	Rencana APBD TA. 2017	Proyeksi Tahun 2018
1	<b>PENDAPATAN</b>	<b>2.258.604.630.605</b>	<b>2.471.302.356.000</b>	<b>2.789.260.227.000</b>
1.1	<b>PENDAPATAN DAERAH ASLI</b>	<b>224.197.408.418</b>	<b>208.930.740.000</b>	<b>335.012.673.000</b>
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	75.574.747.729	71.570.381.000	88.376.500.000
1.1.2	Hasil Restribusi Daerah	22.559.038.217	22.879.788.000	13.900.202.000
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	9.025.861.668	9.025.118.500	9.025.118.500
1.1.4	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	117.037.760.867	105.455.452.500	223.710.852.500
1.2	<b>DANA PERIMBANGAN</b>	<b>1.573.615.108.481</b>	<b>1.730.081.906.000</b>	<b>1.868.159.181.000</b>
1.2.1	Dana Transfer Umum Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	50.275.933.273	47.349.972.000	52.020.647.000
1.2.2	Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum	1.204.344.586.098	1.305.212.808.000	1.305.212.808.000

No	Uraian	Realisasi TA. 2016	Rencana APBD TA. 2017	Proyeksi Tahun 2018
1.2.3	Dana Transfer Khusus	318.994.589.110	377.519.126.000	510.925.726.000
<b>1.3</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>460.792.113.643</b>	<b>532.289.710.000</b>	<b>473.832.820.000</b>
1.3.1	Pendapatan Hibah	-	2.810.020.000	-
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	143.325.208.643	162.745.373.000	162.745.373.000
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	-	55.646.870.000	-
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	73.600.480.000	-	78.343.000.000
1.3.7	Dana Desa	243.866.425.000	311.087.447.000	345.000.000.000
<b>2</b>	<b>BELANJA</b>	<b>2.282.330.771.499</b>	<b>2.590.956.004.000</b>	<b>2.883.260.227.000</b>
<b>2.1</b>	<b>BELANJA LANGSUNG TIDAK LANGSUNG</b>	<b>1.780.715.488.258</b>	<b>1.903.072.821.000</b>	<b>1.734.516.451.341</b>
2.1.1	Belanja Pegawai	1.238.738.884.717	1.269.988.273.750	1.104.824.536.141
2.1.4	Belanja Hibah	32.171.055.836	45.793.750.000	41.302.995.000
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	11.810.425.000	2.392.000.000	2.535.000.000
2.1.6	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	5.826.321.071	9.445.017.800	9.445.016.900
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan	491.908.747.434	572.546.658.000	573.126.250.000
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	260.054.200	2.907.121.450	2.500.000.000
<b>2.2</b>	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>501.615.283.241</b>	<b>687.883.183.000</b>	<b>1.148.743.775.659</b>
1.2.1	Belanja Pegawai	27.421.377.821	35.545.455.836	
1.2.2	Belanja Barang dan Jasa	253.434.818.136	317.830.141.000	
1.2.3	Belanja Modal	220.759.087.283	334.507.586.164	
<b>3</b>	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>			
<b>3.1</b>	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>406.262.095.580</b>	<b>134.653.648.000</b>	<b>100.000.000.000</b>
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA)	406.198.863.893	134.653.648.000	100.000.000.000
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-
3.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	63.231.687	-	-
3.1.6	Penerimaan Piutang Daerah	-	-	-
<b>3.2</b>	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>8.304.000.000</b>	<b>15.000.000.000</b>	<b>6.000.000.000</b>
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	3.000.000.000	5.000.000.000	6.000.000.000
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	5.304.000.000	10.000.000.000	-
	<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>397.958.095.580</b>	<b>119.653.648.000</b>	<b>94.000.000.000</b>
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Sumber : BPKD & BAPPEDA Kab. Klaten, 2017 diolah

**BAB IV**  
**PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2018**

**4.1. VISI, MISI, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH**

RKPD Kabupaten Klaten Tahun 2018 disusun dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021. Visi pembangunan daerah Kabupaten Klaten dalam Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021 yaitu:

**“MEWUJUDKAN KABUPATEN KLATEN YANG MAJU, MANDIRI DAN BERDAYA SAING”**

Makna yang termuat dalam visi pembangunan Klaten jangka menengah tersebut dijabarkan sebagai berikut :

1. **Klaten**, diartikan sebagai suatu daerah otonom, yang mempunyai batas-batas wilayah yang diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus pemerintahan dan kepentingan masyarakat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. **Maju**, yang dimaksud maju adalah kondisi Kabupaten Klaten ke depan dapat berkembang dan membawa ke keadaan yang lebih baik di semua aspek kehidupan.
3. **Mandiri**, yang dimaksud mandiri adalah Kabupaten Klaten mampu mewujudkan kehidupan yang sejajar dan sederajat dengan daerah lain dengan mengandalkan pada kemampuan dan kekuatan sendiri dengan tetap memperhatikan kerja sama dengan pihak lain.
4. **Berdaya saing**, yang dimaksud berdaya saing adalah Kabupaten Klaten dapat mewujudkan kemampuan ekonomi daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan dan berkelanjutan untuk memberikan peningkatan standar hidup bagi masyarakat dengan tetap memperhatikan keunggulan komparatif dan kompetitif dengan daerah lain.

Sehingga makna utuh dari Kabupaten Klaten yang Maju, Mandiri dan Berdaya Saing yaitu merupakan instrumen untuk menciptakan nilai-nilai kesejahteraan yang setara bagi segenap komponen masyarakat Klaten dan mewujudkan kondisi Klaten yang maju dalam peradapan, mandiri secara ekonomi, dan berdaya saing untuk menciptakan keunggulan komparatif dan kompetitif dengan daerah lain.

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, maka ditempuh 8 (delapan) misi pembangunan daerah, yaitu :

1. Mewujudkan sumber daya manusia yang cerdas, sehat dan berbudaya;
2. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih;
3. Meningkatkan dan mengembangkan ekonomi daerah yang lebih produktif, kreatif, inovatif dan berdaya saing berlandaskan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi lokal;
4. Meningkatkan kapasitas infrastruktur publik dan penyediaan kebutuhan sarana prasarana dasar sosial masyarakat;
5. Meningkatkan kapasitas pengelolaan kelestarian sumber daya alam yang selaras dengan tata ruang wilayah;
6. Mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat yang berakhlak dan berkepribadian;
7. Meningkatkan kapasitas pengarusutamaan gender dan perlindungan anak;
8. Meningkatkan kapasitas pelayanan publik.

Guna mewujudkan visi dan misi pembangunan tersebut, maka pembangunan jangka menengah Kabupaten Klaten Tahun 2016 - 2021 memiliki tujuan, sasaran, dan arah kebijakan yang dijabarkan sebagai berikut :

**1. Mewujudkan sumber daya manusia yang cerdas, sehat dan berbudaya**

**Tujuan :**

1. Mewujudkan pemenuhan pendidikan bagi masyarakat;
2. Mewujudkan kualitas derajat kesehatan masyarakat;
3. Mewujudkan peningkatan kualitas SDM yang berkarakter dan menjunjung nilai-nilai budaya.

**Sasaran :**

1. Terwujudnya pemenuhan kebutuhan pendidikan bagi masyarakat;
2. Meningkatnya kualitas derajat kesehatan masyarakat;
3. Meningkatnya kualitas SDM yang berkarakter dan menjunjung nilai-nilai budaya;

**Arah Kebijakan :**

1. Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan usia dini, dasar dan menengah menuju wajar dikdas 12 tahun, meningkatkan budaya baca masyarakat, meningkatkan kapasitas dan pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan baik bagi pendidikan formal maupun non formal, dan meningkatkan etos kerja pendidik dan tenaga kependidikan;
2. Meningkatkan kapasitas dan pemerataan tenaga kesehatan, dan Meningkatkan akses pelayanan dan derajat kesehatan masyarakat;
3. Meningkatkan dan mengembangkan nilai-nilai luhur berdasar pada kearifan lokal.

**2. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih**

**Tujuan :**

1. Meningkatkan profesionalisme aparatur pemerintah daerah;
2. Meningkatkan kapasitas pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah.

**Sasaran :**

1. Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur pemerintah daerah;
2. Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan akuntabilitas kinerja birokrasi dan pemerintahan desa;
3. Meningkatnya kapasitas pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah.

**Arah Kebijakan :**

1. Mewujudkan regulasi dan deregulasi yang mendukung terhadap pemerintahan yang baik dan bersih, Meningkatkan pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme, dan Meningkatkan kapasitas, kompetensi dan profesionalisme sumber daya aparatur.
2. Meningkatkan kemampuan anggota DPRD yang didukung peningkatan fasilitas kinerja, Meningkatkan efektivitas organisasi Pemerintah Daerah yang peka terhadap permasalahan dan perubahan lingkungan internal maupun eksternal, dan Mewujudkan tata pemerintahan yang efektif dan efisien.
3. Meningkatkan dan mengembangkan pengelolaan keuangan daerah, Meningkatkan dan mengembangkan pendapatan daerah, serta Meningkatkan dan mengembangkan aset daerah.

**3. Meningkatkan dan mengembangkan ekonomi daerah yang lebih produktif, kreatif, inovatif dan berdaya saing berlandaskan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi lokal;**

**Tujuan :** Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

**Sasaran :**

1. Meningkatnya dan berkembangnya produktifitas, nilai tambah dan daya saing sektor pertanian dan ketahanan pangan;
2. Meningkatnya dan berkembangnya produktifitas, nilai tambah dan daya saing sektor Indagkop, UMKM dan PM;
3. Meningkatnya dan berkembangnya produktifitas, nilai tambah dan daya saing sektor kepariwisataan;
4. Meningkatnya dan berkembangnya produktifitas, nilai tambah dan daya saing sektor ketenagakerjaan.

**Arah Kebijakan :**

1. Meningkatkan kapasitas dan tata kelola ekonomi daerah berbasis agropolitan, Meningkatkan dan mengembangkan produktifitas modal daerah, Meningkatkan diversifikasi dan ketahanan pangan, serta Meningkatkan kapasitas pemberdayaan dan perlindungan petani.
2. Meningkatkan dan mengembangkan produk unggulan daerah berbasis potensi lokal, Menciptakan iklim usaha dan investasi yang kondusif, Pengembangan pusat promosi dan perdagangan, serta Meningkatkan sarana dan prasarana pasar untuk mendukung usaha ekonomi masyarakat.
3. Meningkatkan dan mengembangkan destinasi dan promosi kepariwisataan, serta Meningkatkan dan mengembangkan industri kreatif dan kepariwisataan.
4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga kerja, serta Meningkatkan dan mengembangkan terciptanya lapangan usaha dan kesempatan kerja.

**4. Meningkatkan kapasitas infrastruktur publik dan penyediaan kebutuhan sarana prasarana dasar sosial masyarakat;**

**Tujuan :** Mewujudkan pemenuhan kebutuhan prasarana, sarana dan utilitas umum bagi masyarakat;

**Sasaran :**

1. Terwujudnya pemenuhan kebutuhan prasarana, sarana dan utilitas umum
2. Meningkatnya pemenuhan prasarana, sarana, utilitas kawasan perumahan dan permukiman

**Arah Kebijakan :**

1. Meningkatkan pemenuhan kebutuhan prasarana, sarana dan utilitas umum jalan (hotmix dan rigid/beton), jembatan, irigasi dan bangunan gedung pemerintah, Meningkatkan pemenuhan kebutuhan bangunan dan jaringan irigasi (sungai, bendung, waduk, embung dan saluran), Meningkatkan kualitas dan kuantitas prasarana, sarana dan utilitas umum jalan (hotmix dan rigid/beton), jembatan, irigasi dan bangunan gedung pemerintah, Meningkatkan kualitas bangunan dan jaringan irigasi (sungai, bendung, waduk, embung dan saluran), Meningkatkan

pengelolaan persampahan, serta Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana transportasi

2. Meningkatkan sarana prasarana air bersih dan air limbah berbasis masyarakat, Meningkatkan ketersediaan prasarana, sarana, utilitas umum jalan, dan makam, Meningkatkan ketersediaan kebutuhan energi listrik perdesaan, Meningkatkan layanan jaringan listrik rumah tangga di perdesaan dan pengembangan desa mandiri energi, Pengembangan sumber daya energi terbarukan, serta Meningkatkan penataan dan pembangunan kawasan perkotaan dan ruang publik.

**5. Meningkatkan kapasitas pengelolaan dan kelestarian sumber daya alam yang selaras dengan tata ruang wilayah;**

**Tujuan :**

1. Meningkatkan mutu dan kualitas lingkungan hidup.
2. Mewujudkan pengurangan resiko bencana.

**Sasaran :**

1. Peningkatan pengendalian dan penurunan tingkat kerusakan lingkungan hidup.
2. Terwujudnya pengurangan kerentanan resiko bencana;
3. Terwujudnya kesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang

**Arah Kebijakan :**

1. Pengembangan pengelolaan dan konservasi sumber daya air dan daerah aliran sungai, Meningkatkan rehabilitasi hutan dan lahan, serta Pengembangan pengelolaan hutan bersama masyarakat berbasis agro forestry.
2. Meningkatkan kapasitas dan menekan kerentanan di kawasan rawan bencana, Meningkatkan tata kelola dan kelembagaan dalam pengurangan resiko bencana, serta Mengembangkan pengurangan resiko bencana berbasis masyarakat dan desa tangguh bencana.
3. Penyelarasan rencana tata ruang dengan mendasarkan pada upaya pembangunan berkelanjutan, Meningkatkan dan pengembangan pemanfaatan prasarana, sarana dan utilitas umum berbasis mitigasi bencana, serta Meningkatkan fungsi pengawasan dan pengendalian kelaikan kondisi fisik prasarana, sarana, dan utilitas umum berbasis bencana.

**6. Mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat yang berakhlak dan berkepribadian;**

**Tujuan :** Meningkatkan tata kehidupan masyarakat yang berakhlak dan berkepribadian Pancasila;

**Sasaran :**

1. Terwujudnya ketertiban dan keamanan bagi masyarakat;
2. Terwujudnya penegakan Peraturan Daerah (Perda);
3. Terwujudnya akhlak yang mulia;
4. Terwujudnya keharmonisan kehidupan beragama;

**Arah Kebijakan :**

1. Meningkatkan wawasan kepribadian berjiwa Pancasila, Meningkatkan kualitas kelembagaan sosial kemasyarakatan, Meningkatkan moralitas, wawasan kebangsaan dan cinta tanah air, Meningkatkan pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan, serta Meningkatkan perlindungan sosial.
2. Meningkatkan pengawasan internal yang didukung aturan pelaksanaan yang



memadai, Meningkatkan Partisipasi dan Kesadaran Hukum Kepada Masyarakat, serta Meningkatkan pencegahan dan pemberantasan penyakit masyarakat.

3. Meningkatkan penyediaan prasarana dan sarana peribadatan, serta Meningkatkan dan mengembangkan norma-norma dan pendidikan sosial keagamaan.
4. Meningkatkan kerukunan umat beragama dan antar umat beragama.

#### **7. Meningkatkan kapasitas pengarusutamaan gender dan perlindungan anak; dan**

##### **Tujuan :**

1. Meningkatkan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan;
2. Mewujudkan pemenuhan hak anak dan perlindungan anak.

##### **Sasaran :**

1. Meningkatnya kapasitas perempuan dalam pembangunan
2. Meningkatnya pemenuhan hak anak dan perlindungan anak

##### **Arah Kebijakan :**

1. Meningkatkan peran serta perempuan dan kesetaraan gender, Meningkatkan kualitas hidup dan perlindungan perempuan, Meningkatkan dan pemberdayaan perempuan, Meningkatkan dan pengembangan kewirausahaan dan kelembagaan perempuan, serta Meningkatkan dan penguatan keluarga harapan berbasis usaha ekonomi produktif.
2. Mendorong dan memastikan anak, mendapatkan: 1. pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya, 2. Kesehatan dasar dan kesejahteraan, 3. Pemenuhan hak Sipil dan Kebebasan, 4. Perlindungan khusus, serta 5. Peningkatan dan penguatan kelembagaan anak, serta Mendorong dan menguatkan kondisi lingkungan yang kondusif bagi tumbuh kembang anak.

#### **8. Meningkatkan kapasitas pelayanan publik.**

**Tujuan :** Memberikan jaminan kepada masyarakat tentang pelayanan yang berkualitas;

##### **Sasaran :**

1. Terwujudnya pelayanan publik tepat waktu, tepat mutu, tepat sasaran dan tepat manfaat;
2. Terwujudnya penanganan pengaduan masyarakat.

##### **Arah Kebijakan :**

1. Meningkatkan kualitas layanan sistem informasi pelayanan perijinan, administrasi pemerintahan dan administrasi kependudukan, serta Meningkatkan cakupan dan kualitas standar pelayanan minimal sosial dasar (*bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan dan kawasan permukiman, ketertarikan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta sosial*).
2. Meningkatkan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan bupati.

Adapun keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan, sasaran, dan Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016–2021 sebagaimana Tabel 4.1.

Tabel 4.1.  
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Menengah Daerah  
Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021

<b>Visi</b> Mewujudkan Kabupaten Klaten yang Maju, Mandiri dan Berdaya Saing					
<b>Misi ke 1 :</b> Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Cerdas, Sehat dan Berbudaya					
<b>Tujuan</b>		<b>Sasaran</b>		<b>Arah Kebijakan</b>	
1	Mewujudkan pemenuhan pendidikan bagi masyarakat	1.1	Terwujudnya pemenuhan kebutuhan pendidikan bagi masyarakat	1.1.1.1	Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan usia dini, dasar dan menengah menuju wajar dikdas 12 tahun
				1.1.1.2	Meningkatkan budaya baca masyarakat
				1.1.2.1	Meningkatkan kapasitas dan pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan baik bagi pendidikan formal maupun non formal
				1.1.2.2	Meningkatkan etos kerja pendidik dan tenaga kependidikan
2	Mewujudkan kualitas derajat kesehatan masyarakat	2.1	Meningkatnya kualitas derajat kesehatan masyarakat	2.1.1.1	Meningkatkan kapasitas dan pemerataan tenaga kesehatan
				2.1.1.2	Meningkatkan akses pelayanan dan derajat kesehatan masyarakat
3	Mewujudkan peningkatan kualitas SDM yang berkarakter dan menjunjung nilai-nilai budaya	3.1	Meningkatnya kualitas SDM yang berkarakter dan menjunjung nilai-nilai budaya	3.1.1.1	Meningkatkan dan mengembangkan nilai-nilai luhur berdasar pada kearifan lokal

**Misi ke 2 :  
Peningkatan Kapasitas Pemerintahan yang Baik dan Bersih**

Tujuan		Sasaran		Arah Kebijakan	
1	Meningkatkan profesionalisme aparatur pemerintah daerah.	1.1	Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur pemerintah daerah.	1.1.1.1	Mewujudkan regulasi dan deregulasi yang mendukung terhadap pemerintahan yang baik dan bersih
				1.1.1.2	Meningkatkan pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme
				1.1.2.1	Meningkatkan kapasitas, kompetensi dan profesionalisme sumber daya aparatur
		1.2	Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan akuntabilitas kinerja birokrasi dan pemerintahan desa	1.2.1.1	Meningkatkan kemampuan anggota DPRD yang didukung peningkatan fasilitas kinerja.
				1.2.2.1	Meningkatkan efektivitas organisasi Pemerintah Daerah yang peka terhadap permasalahan dan perubahan lingkungan internal maupun eksternal
				1.2.2.2	Mewujudkan tata pemerintahan yang efektif dan efisien
				1.2.3.1	Penguatan kapasitas kelembagaan pemerintahan desa
2	Meningkatkan kapasitas pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah	2.1	Meningkatnya kapasitas pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah	2.1.1.1	Meningkatkan dan mengembangkan pengelolaan keuangan daerah
				2.1.1.2	Meningkatkan dan mengembangkan pendapatan daerah
				2.1.1.3	Meningkatkan dan mengembangkan aset daerah

**Misi ke 3 :**  
**Meningkatkan dan Mengembangkan Ekonomi Daerah yang Lebih Produktif, Kreatif, Inovatif dan Berdaya Saing**  
**Berlandaskan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Potensi Lokal**

Tujuan		Sasaran		Arah Kebijakan	
1	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat	1.1	Meningkatnya dan berkembangnya produktifitas, nilai tambah dan daya saing sektor pertanian dan ketahanan pangan	1.1.1.1	Meningkatkan kapasitas dan tata kelola ekonomi daerah berbasis agropolitan
				1.1.1.2	Meningkatkan dan mengembangkan produktifitas modal daerah
				1.1.1.3	Meningkatkan diversifikasi dan ketahanan pangan
				1.1.1.4	Meningkatkan kapasitas pemberdayaan dan perlindungan petani
		1.2	Meningkatnya dan berkembangnya produktifitas, nilai tambah dan daya saing sektor Indagkop, UMKM dan PM	1.2.1.1	Meningkatkan dan mengembangkan produk unggulan daerah berbasis potensi lokal
				1.2.1.2	Menciptakan iklim usaha dan investasi yang kondusif
				1.2.1.3	Pengembangan pusat promosi dan perdagangan
				1.2.1.4	Meningkatkan sarana dan prasarana pasar untuk mendukung usaha ekonomi masyarakat
		1.3	Meningkatnya dan berkembangnya produktifitas, nilai tambah dan daya saing sektor kepariwisataan	1.3.1.1	Meningkatkan dan mengembangkan destinasi dan promosi kepariwisataan
				1.3.1.2	Meningkatkan dan mengembangkan industri kreatif dan kepariwisataan
		1.4	Meningkatnya dan berkembangnya produktifitas, nilai tambah dan daya saing sektor ketenagakerjaan	1.4.1.1	Meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga kerja
				1.4.1.2	Meningkatkan dan mengembangkan terciptanya lapangan usaha dan kesempatan kerja

**Misi ke 4 :  
Meningkatkan Kapasitas Sarana dan Prasarana Publik dan Penyediaan Kebutuhan Sarana Prasarana Dasar Sosial Masyarakat**

Tujuan		Sasaran		Arah Kebijakan	
1	Mewujudkan pemenuhan kebutuhan prasarana, sarana dan utilitas umum bagi masyarakat	1.1	Terwujudnya pemenuhan kebutuhan prasarana, sarana dan utilitas umum	1.1.1.1	Meningkatkan pemenuhan kebutuhan prasarana, sarana dan utilitas umum jalan (hotmix dan rigid/beton), jembatan, irigasi dan bangunan gedung pemerintah.
				1.1.1.2	Meningkatkan pemenuhan kebutuhan bangunan dan jaringan irigasi (sungai, bendung, waduk, embung dan saluran).
				1.1.2.1	Meningkatkan kualitas dan kuantitas prasarana, sarana dan utilitas umum jalan (hotmix dan rigid/beton), jembatan, irigasi dan bangunan gedung pemerintah.
				1.1.2.2	Meningkatkan kualitas bangunan dan jaringan irigasi (sungai, bendung, waduk, embung dan saluran).
				1.1.3.1	Meningkatkan pengelolaan persampahan
				1.1.4.1	Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana transportasi
		1.2	Meningkatnya pemenuhan prasarana, sarana, utilitas kawasan perumahan dan permukiman	1.2.1.1	Meningkatkan sarana prasarana air bersih dan air limbah berbasis masyarakat
				1.2.2.1	Meningkatkan ketersediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum jalan, makam
				1.2.2.2	Meningkatkan ketersediaan kebutuhan energi listrik perdesaan
				1.2.2.3	Meningkatkan layanan jaringan listrik rumah tangga di perdesaan dan pengembangan desa mandiri energi
				1.2.2.4	Pengembangan sumber daya energi terbarukan
				1.2.3.1	Meningkatkan penataan dan pembangunan kawasan perkotaan dan ruang publik

Misi ke 5 : Meningkatkan Kapasitas Pengelolaan dan Kelestarian Sumber Daya Alam yang Selaras dengan Tata Ruang Wilayah					
Tujuan		Sasaran		Arah Kebijakan	
1	Meningkatkan mutu dan kualitas lingkungan hidup	1.1	Peningkatan pengendalian dan penurunan tingkat kerusakan lingkungan hidup	1.1.1.1	Pengembangan pengelolaan dan konservasi sumber daya air dan daerah aliran sungai
				1.1.1.2	Meningkatkan rehabilitasi hutan dan lahan
				1.1.2.1	Pengembangan pengelolaan hutan bersama masyarakat berbasis <i>agro forestry</i>
				1.1.3.1	Meningkatkan kelestarian lingkungan hidup
2	Mewujudkan pengurangan resiko bencana	2.1	Terwujudnya pengurangan kerentanan resiko bencana	2.1.1.1	Meningkatkan kapasitas dan menekan kerentanan di kawasan rawan bencana
				2.1.1.2	Meningkatkan tata kelola dan kelembagaan dalam pengurangan resiko bencana
				2.1.1.3	Mengembangkan pengurangan resiko bencana berbasis masyarakat dan desa tangguh bencana
		2.2	Terwujudnya kesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang	2.2.1.1	Penyelarasan rencana tata ruang dengan mendasarkan pada upaya pembangunan berkelanjutan
				2.2.1.2	Meningkatkan dan pengembangan pemanfaatan prasarana, sarana dan utilitas umum berbasis mitigasi bencana
				2.2.1.3	Meningkatkan fungsi pengawasan dan pengendalian kelaikan kondisi fisik prasarana, sarana, dan utilitas umum berbasis bencana

**Misi ke 6 :  
Mewujudkan Tataunan Kehidupan Masyarakat yang Berakhlak dan Berkepribadian**

Tujuan		Sasaran		Arah Kebijakan	
1	Meningkatkan tata kehidupan masyarakat yang berakhlak dan berkepribadian Pancasila	1.1	Terwujudnya ketertiban dan keamanan bagi masyarakat	1.1.1.1	Meningkatkan wawasan kepribadian berjiwa Pancasila
				1.1.1.2	Meningkatkan kualitas kelembagaan sosial kemasyarakatan
				1.1.1.3	Meningkatkan moralitas, wawasan kebangsaan dan cinta tanah air
				1.1.1.4	Meningkatkan pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan
				1.1.1.5	Meningkatkan perlindungan sosial
		1.2	Terwujudnya penegakan Peraturan Daerah (Perda)	1.2.1.1	Meningkatkan pengawasan internal yang didukung aturan pelaksanaan yang memadai
				1.2.1.2	Meningkatkan Partisipasi dan Kesadaran Hukum Kepada Masyarakat
				1.2.1.3	Meningkatkan pencegahan dan pemberantasan penyakit masyarakat
		1.3	Terwujudnya akhlak yang mulia	1.3.1.1	Meningkatkan penyediaan prasarana dan sarana peribadatan
				1.3.1.2	Meningkatkan dan mengembangkan norma-norma dan pendidikan sosial keagamaan
		1.4	Terwujudnya keharmonisan kehidupan beragama	1.4.1.1	Meningkatkan kerukunan umat beragama dan antar umat beragama

**Misi ke 7 :  
Meningkatkan Kapasitas Pengarusutamaan Gender dan Perlindungan Anak**

<b>Tujuan</b>		<b>Sasaran</b>		<b>Arah Kebijakan</b>	
1	Meningkatkan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan	1.1	Meningkatnya kapasitas perempuan dalam pembangunan	1.1.1.1	Meningkatkan peran serta perempuan dan kesetaraan gender
				1.1.1.2	Meningkatkan kualitas hidup dan perlindungan perempuan
				1.1.1.3	Meningkatkan dan pemberdayaan perempuan
				1.1.2.1	Meningkatkan dan pengembangan kewirausahaan dan kelembagaan perempuan
				1.1.2.2	Meningkatkan dan penguatan keluarga harapan berbasis usaha ekonomi produktif
2	Mewujudkan pemenuhan hak anak dan perlindungan anak	2.1	Meningkatnya pemenuhan hak anak dan perlindungan anak	2.1.1.1	Mendorong dan memastikan anak, mendapatkan: 1. pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya, 2. Kesehatan dasar dan kesejahteraan, 3. Pemenuhan hak Sipil dan Kebebasan, 4. Perlindungan khusus, serta 5. Peningkatan dan penguatan kelembagaan anak
				2.1.2.1	Mendorong dan menguatkan kondisi lingkungan yang kondusif bagi tumbuh kembang anak



**Misi ke 8 :  
Meningkatkan Kapasitas Pelayanan Publik**

Tujuan		Sasaran		Arah Kebijakan	
1	Memberikan jaminan kepada masyarakat tentang pelayanan yang berkualitas	1.1	Terwujudnya pelayanan publik tepat waktu, tepat mutu, tepat sasaran dan tepat manfaat	1.1.1.1	Meningkatkan kualitas layanan sistem informasi pelayanan perijinan, administrasi pemerintahan dan administrasi kependudukan
				1.1.2.1	Meningkatkan cakupan dan kualitas standar pelayanan minimal sosial dasar ( <i>bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan dan kawasan permukiman, ketentraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta sosial</i> )
		1.2	Terwujudnya penanganan pengaduan masyarakat	1.2.1.1	Meningkatkan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan bupati

#### 4.2. PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Tahun 2018 merupakan tahun ketiga dari pembangunan daerah jangka menengah Kabupaten Klaten Tahun 2016 – 2021. Dalam proses perencanaan pembangunan daerah Klaten tahun 2017 tidak terlepas dari hasil-hasil pembangunan sebelumnya. Selain itu, perencanaan pembangunan daerah Klaten juga disusun dengan memperhatikan berbagai kebijakan pembangunan nasional, terutama yang tertuang dalam RPJMN Tahun 2015–2019 dan RKP Tahun 2018, sebagai bentuk keselarasan antar kebijakan pusat dan daerah.

##### A. Arah Kebijakan Pembangunan Nasional Jangka Menengah Tahun 2015-2019 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2018

Berdasarkan RPJMN Tahun 2015-2019, kebijakan pembangunan nasional diarahkan pada upaya pencapaian visi dan misi pembangunan nasional tahun 2015-2019. Visi tersebut adalah **“Terwujudnya Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri, Dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong”**, yang dilakukan melalui 7 misi pembangunan yaitu:

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan;
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeadilan, dan demokratis berlandaskan negara hukum;
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim;
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera;
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing;
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional;
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan nasional jangka menengah tersebut, ditetapkan sembilan agenda prioritas yang disebut “Nawa Cita”, yaitu:

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara;
2. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya;
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah- daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan;
4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia;
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya;
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor- sektor strategis ekonomi domestik;
8. Melakukan revolusi karakter bangsa;
9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Implementasi kesembilan agenda prioritas pembangunan nasional tersebut dijabarkan dalam strategi pembangunan nasional dalam 3 (tiga) dimensi pembangunan yaitu:

1. Dimensi Pembangunan Manusia, yang terdiri dari : a) revolusi mental; b) pembangunan pendidikan; c) pembangunan kesehatan dan d) pembangunan perumahan dan permukiman.
2. Dimensi Pembangunan Sektor Unggulan, yang terdiri dari : a) kedaulatan pangan; b) kedaulatan energi dan ketenagalistrikan; c) kemaritiman dan kelautan; d) pariwisata dan kawasan industri serta Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).
3. Dimensi Pemerataan Dan Kewilayahan, yang terdiri dari : a) pemerataan antarkelompok pendapatan; b) perbatasan negara dan daerah tertinggal; c) pembangunan perdesaan dan perkotaan; dan d) pengembangan konektivitas nasional.

Untuk mencapai 3 (tiga) dimensi pembangunan tersebut perlu didukung oleh kondisi yang kondusif terkait pembangunan politik, hukum, pertahanan dan keamanan. Pembangunan nasional jangka menengah dilaksanakan untuk mencapai sasaran utama pembangunan nasional di tahun 2019, antara lain meliputi:

1. Pertumbuhan ekonomi sebesar 8,0%;
2. Laju inflasi sebesar 3,5%;
3. PDB per kapita sebesar Rp. 72.217 ribu;
4. Indeks Gini sebesar 0,36;
5. Tingkat kemiskinan sebesar 7,0 - 8,0%;
6. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 76,3;
7. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 4,0 – 5,0%.

Perencanaan pembangunan nasional tahun 2018 dalam rangka mendukung pencapaian sasaran utama pembangunan nasional tersebut dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2018. Pendekatan yang digunakan dalam proses perencanaan pembangunan nasional tahun 2018 adalah Holistik, Tematik, Integratif, Dan Spasial melalui penguatan kebijakan Money Follow Program.

Sesuai dengan Tema RKP Tahun 2018 (RPJMN 2015-2019) "**Memacu Investasi dan Infrastruktur untuk Pertumbuhan dan Pemerataan**" maka dalam rangka mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional tahun 2018 ditetapkan sasaran makro pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2018 yaitu:

1. Pertumbuhan ekonomi sebesar 6,23%;
2. Tingkat kemiskinan sebesar 9,45%;
3. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 5,9%; dan
4. Laju Inflasi 3,5%.

## **B. Prioritas Pembangunan Daerah Jawa Tengah Tahun 2018**

Tahun 2018 yang merupakan tahun kelima RPJMD Provinsi Jawa Tengah tahun 2014–2018, menjadi tahun yang strategis untuk melihat ketercapaian pembangunan daerah jangka menengah Jawa Tengah. Dengan memperhatikan hasil kinerja pembangunan tahun sebelumnya, dengan berbagai permasalahan dan isu strategis, maka upaya pencapaian target pembangunan daerah tahun 2018 dilakukan melalui berbagai strategi dan kebijakan yang diarahkan untuk "**Mewujudkan Kesejahteraan**

### ***Masyarakat yang Berkeadilan dan Berdikari”.***

Guna mendukung pencapaian sasaran makro pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2018 dan dalam rangka percepatan pencapaian tujuan pembangunan daerah tersebut, maka ditetapkan prioritas pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2018, meliputi :

1. Penguatan daya saing ekonomi daerah yang berbasis pada potensi unggulan daerah dan berorientasi pada ekonomi kerakyatan;
2. Penguatan percepatan penanggulangan kemiskinan melalui upaya pengurangan beban pengeluaran, peningkatan pendapatan, dan pemberdayaan ekonomi mikro dan kecil untuk masyarakat miskin;
3. Penguatan kualitas dan kompetensi sumber daya manusia diberbagai bidang dan cakupan layanan sosial dasar;
4. Penguatan ketahanan pangan dan energi yang didukung pembangunan pertanian dalam arti luas serta pengembangan dan pemanfaatan energi secara berkelanjutan;
5. Pemantapan pembangunan infrastruktur dengan memperhatikan keberlanjutan sumberdaya alam dan lingkungan serta pengurangan resiko bencana;
6. Pemantapan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik.

Tujuan, arah kebijakan serta penetapan prioritas pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2018 merupakan upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka mencapai sasaran makro pembangunan daerah tahun 2018, dalam rangka mengimplementasikan hal tersebut, maka ditetapkan target pembangunan Provinsi Jawa Tengah tahun 2018, yaitu :

- a. Pertumbuhan ekonomi sebesar 5,9 – 6,2%;
- b. Laju inflasi sebesar  $4,5 \pm 1\%$ ;
- c. PDRB per kapita sebesar Rp. 27,13 juta;
- d. Indeks Gini sebesar 0,337 dan Indeks Williamson sebesar 0,6986;
- e. Persentase penduduk miskin sebesar 10,40 – 9,93%;
- f. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 71,59, dengan komponen:
  1. Angka Harapan Hidup (AHH) sebesar 75,05 tahun;
  2. Harapan Lama Sekolah (HLS) sebesar 13,35 tahun;
  3. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) sebesar 7,15 tahun;
  4. Pengeluaran per Kapita Yang Disesuaikan sebesar 10.334,75 ribu per tahun;
- g. Indeks Pembangunan Gender (IPG) sebesar 69,99 dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) sebesar 71,99;
- h. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 4,13%; dan
- i. Nilai Tukar Petani (NTP) sebesar 103,27.

### **C. Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2018**

Tahun 2018 merupakan tahun ketiga RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2016–2021, menjadi tahun yang strategis untuk melihat ketercapaian pembangunan daerah jangka menengah Kabupaten Klaten. Memperhatikan hasil kinerja pembangunan tahun sebelumnya, dengan berbagai permasalahan dan isu strategis, maka upaya pencapaian target pembangunan daerah tahun 2018 dilakukan melalui berbagai strategi dan kebijakan yang diarahkan untuk **“Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Untuk Mewujudkan Kesejahteraan**

**Masyarakat**", dengan prioritas :

1. Peningkatan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan, dengan fokus pada :
  - a. Pemenuhan kebutuhan sarana prasarana pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, formal dan non formal melalui pembangunan ruang kelas baru, rehabilitasi bangunan kelas, pengadaan sarana prasana pembelajaran;
  - b. Penguatan sekolah-sekolah perbatasan;
  - c. Peningkatan kualifikasi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan;
  - d. Pemerataan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan;
  - e. Penyelenggaraan pelatihan/workshop bagi masyarakat;
  - f. Pemenuhan kebutuhan sarana prasarana pelayanan kesehatan melalui pembangunan puskesmas pembantu (Pustu), revitalisasi poliklinik desa (Polindes), pengadaan alat kesehatan;
  - g. Pemerataan kualifikasi tenaga kesehatan dan penyelenggara pelayanan kesehatan melalui akreditasi puskesmas dan rumah sakit, sertifikasi tenaga kesehatan, optimalisasi tenaga kesehatan di tingkat desa.
2. Peningkatan pelayanan publik melalui penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik serta reformasi birokrasi, dengan fokus pada :
  - a. Pendekatan pelayanan kepada masyarakat dengan meningkatkan kecepatan, kemudahan, kepastian dan transparansi pelayanan;
  - b. Peningkatan koordinasi dalam upaya menjaga kondusivitas wilayah melalui optimalisasi forum komunikasi pimpinan daerah (Forkompinda) serta forum komunikasi lintas instansi vertikal;
  - c. Peningkatan kapasitas akuntabilitas kinerja pemerintah;
  - d. Penguatan pengawasan yang bebas dari KKN melalui implementasi rencana aksi pencegahan dan penanggulangan korupsi, penerapan sistem pengendalian intern pemerintahan, optimalisasi satuan tugas sapu bersih pungutan liar (Saberpungli);
  - e. Optimalisasi penanganan pengaduan masyarakat melalui berbagai media elektronik ataupun media langsung;
  - f. Penguatan sistem manajemen sumberdaya manusia aparatur pemerintahan serta pengembangan kapasitas dan kualitas pegawai ASN di lingkup Pemerintahan Kabupaten Klaten;
  - g. Penguatan dan penataan organisasi perangkat daerah melalui penataan tatalaksana yang meliputi sistem, proses dan prosedur kerja yang efektif dan efisien, terukur yang mengarah pada prinsip-prinsip good governance.
  - h. Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam rangka penyelenggaraan pelayanan publik dan manajemen penyelenggaraan pemerintahan;
  - i. Penataan peraturan dan produk hukum daerah melalui jaringan dokumentasi informasi hukum (JDIH) serta sosialisasi produk hukum daerah; pengawasan dan penanganan pelanggaran peraturan daerah, serta monitoring dan evaluasi secara berkala;
3. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengurangan tingkat pengangguran melalui upaya :
  - a. Pemenuhan layanan kebutuhan dasar masyarakat (pendidikan, kesehatan, perumahan) melalui pemberian beasiswa miskin, pemberian jaminan pemeliharaan

- kesehatan masyarakat miskin non kuota APBN, penanganan rumah tidak layak huni, penyediaan dan peningkatan akses air bersih;
- b. Jaminan perlindungan sosial bagi masyarakat rumah tangga miskin;
  - c. Pemberdayaan ekonomi produktif melalui pemberdayaan UMKM; penyelenggaraan pelatihan dan keterampilan kerja bagi masyarakat;
  - d. Penumbuhkembangan wirausaha baru dalam rangka menciptakan lapangan kerja mandiri berbasis usaha kecil menengah;
4. Peningkatan pelestarian lingkungan hidup dan pengurangan resiko bencana, dengan fokus pada :
- a. Pemenuhan sarana dan prasarana pengelolaan sampah;
  - b. Peningkatan kinerja dan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah;
  - c. Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
  - d. Pengendalian kegiatan pertambangan yang dapat merusak lingkungan;
  - e. Rehabilitasi dan konservasi sumberdaya hutan.
  - f. Pemenuhan sarana prasarana penanggulangan bencana;
  - g. Peningkatan kesadaran masyarakat akan resiko bencana dan penyediaan logistik kebutuhan penanggulangan bencana.
5. Pemerataan pembangunan infrastruktur dalam rangka mengurangi kesenjangan antar wilayah, dengan fokus pada :
- a. Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur (jalan, jembatan, drainase, irigasi) yang menjadi kewenangan, daerah rawan bencana, perbatasan antar wilayah;
  - b. Peningkatan sarana prasarana perhubungan dalam rangka mendukung keselamatan jalan serta pengembangan sistem transportasi;
6. Penguatan ketahanan pangan guna mendukung kedaulatan pangan nasional melalui pembangunan sektor pertanian serta pengembangan dan pemanfaatan energi yang berkelanjutan, dengan fokus pada :
- a. Perlindungan lahan-lahan pangan berkelanjutan dan sawah lestari;
  - b. Pengembangan agribisnis tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
  - c. Pemenuhan sarana prasarana produksi pertanian;
  - d. Optimalisasi pemanfaatan lahan pekarangan;
  - e. Pembangunan dan pengisian lumbung pangan masyarakat;
  - f. Peningkatan produksi ternak dan perikanan;
  - g. Efisiensi pemanfaatan energi; peningkatan pemanfaatan energi alternatif dan optimalisasi pemanfaatan energi terbarukan.
7. Peningkatan pengarusutamaan gender, perlindungan anak dan pengendalian penduduk, dengan fokus pada :
- a. Peningkatan peran serta perempuan dan anak dalam pembangunan;
  - b. Pengurangan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak;
  - c. Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender;
  - d. Optimalisasi program keluarga berencana melalui penyuluhan kesehatan reproduksi.
8. Penguatan potensi ekonomi lokal melalui peningkatan dan pengembangan sektor pariwisata, perdagangan dan industri, dengan fokus pada :

- a. Peningkatan daya tarik dan daya saing kepawirisataan;
- b. Peningkatan dan pengembangan produktivitas, nilai tambah dan daya saing industri perdagangan, koperasi dan UKM;
- c. Peningkatan dan pengembangan investasi daerah.

Dengan memperhatikan arah kebijakan serta target pembangunan nasional tahun 2018, dan dalam rangka mendukung pencapaian target pembangunan Provinsi Jawa Tengah tahun 2018 serta dalam upaya mencapai target pembangunan jangka menengah daerah mendasari tujuan, arah kebijakan, isu strategis dan prioritas pembangunan daerah, maka ditetapkan target pembangunan daerah Kabupaten Klaten tahun 2018, yaitu :

- 1. Pertumbuhan ekonomi sebesar 5,41%;
- 2. Laju inflasi sebesar 3,10±1%;
- 3. Prosentase penduduk miskin sebesar 10,09-11,21%;
- 4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 74,10%; dan
- 5. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 5,5%

#### **4.3. KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGEMBANGAN KEWILAYAHAN KABUPATEN KLATEN**

##### **4.3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Pengembangan Wilayah**

Pengembangan wilayah Kabupaten Klaten pada hakekatnya ditujukan untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat Klaten, melalui berbagai upaya seperti peningkatan keterpaduan program pembangunan antar wilayah dan antar sektor yang berdimensi keruangan. Arah kebijakan pengembangan wilayah Klaten difokuskan untuk mengurangi kesenjangan (aspek pemerataan) terutama antara daerah tengah dan selatan, meningkatkan pertumbuhan ekonomi wilayah (aspek pertumbuhan), dan mewujudkan kelestarian lingkungan (aspek keberlanjutan), yang didasarkan pada pemanfaatan potensi sumber daya unggulan secara terpadu dan komprehensif.

Arah kebijakan pengembangan wilayah juga memperhatikan arah kebijakan pembangunan Jawa Tengah tahun 2018 yaitu untuk mewujudkan upaya ketahanan pangan dan energi yang berkelanjutan, serta percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran. Untuk itu perlu strategi pengembangan wilayah yang mendukung pada upaya pencapaian kebijakan pembangunan daerah tersebut, dengan tetap memperhatikan tujuan dasar pengembangan wilayah Kabupaten Klaten.

Dalam rangka pencapaian tujuan pengembangan wilayah Klaten, maka dilakukan beberapa strategi pengembangan wilayah melalui:

- a. Peningkatan pelayanan perkotaan dan pusat pertumbuhan ekonomi wilayah yang merata dan berhierarki;
- b. Pemerataan pembangunan infrastruktur terutama di wilayah tengah dan selatan;
- c. Pemeliharaan dan pemulihan fungsi kawasan yang berfungsi lindung;
- d. Pengentasan kemiskinan dan pembangunan kualitas hidup masyarakat

terutama di Kabupaten/Kota dengan tingkat kemiskinan dan pengangguran tinggi serta IPM rendah;

- e. Pengembangan ekonomi wilayah berbasis potensi unggulan daerah, terutama pada daerah-daerah yang memiliki sumber daya alam tinggi tetapi nilai PDRB per kapitanya rendah;
- f. Mendorong percepatan pembangunan daerah dengan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita relatif rendah dan kawasan perbatasan;
- g. Penguatan kerjasama antar daerah/wilayah/regional berdasarkan permasalahan, kekuatan dan potensi endogen;
- h. Penanggulangan bencana yang difokuskan pada upaya pengurangan risiko dan kerentanan bencana.

#### 4.3.2. Tujuan Pengembangan Wilayah

Pengembangan wilayah Klaten merupakan upaya untuk memantapkan pertumbuhan pembangunan wilayah yang berkeadilan dan berdikari dari aspek sosial, ekonomi, politik dan budaya, dengan memperhatikan potensi dan keragaman daya dukung serta daya tampung lingkungan, guna mencapai :

- a. Pembangunan yang merata dan harmonis antar wilayah;
- b. Efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pembangunan lintas sektor dan lintas wilayah;
- c. Pembangunan ekonomi dengan berbasis potensi lokal;
- d. Keseimbangan pemanfaatan ruang antara kawasan berfungsi lindung dengan kawasan budidaya.

Dengan upaya pengembangan wilayah, beberapa hal yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

1. Berkembangnya pusat-pusat pertumbuhan baru di tiap wilayah pengembangan dengan memanfaatkan potensi dan keunggulan daerah serta yang akan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah, antara lain melalui pengembangan klaster dan sentra industri unggulan;
2. Berkurangnya kesenjangan antar wilayah yang ditandai dengan nilai *Indeks Williamson* yang semakin baik, serta menurunnya penduduk miskin dan pengangguran;
3. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan berkelanjutan;
4. Meningkatnya tata kelola dan kelembagaan dalam pelaksanaan pembangunan lintas sektor dan wilayah.

#### 4.3.3. Sasaran Pengembangan Wilayah

Wilayah Kabupaten Klaten memiliki potensi pengembangan wilayah yang terbagi dalam 26 (dua puluh enam) Kecamatan dengan mempertimbangkan perpaduan dari aspek homogenitas, modalitas dan administratif tahun 2018, diharapkan kesenjangan antar wilayah di Klaten Klaten semakin berkurang, yang ditandai dengan meningkatnya *pertumbuhan ekonomi wilayah*, serta *berkurangnya angka kemiskinan dan pengangguran* di tiap wilayah tersebut akan diupayakan melalui bidang Fisik Prasarana, Sosial Budaya, dan Ekonomi.



## BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

Dalam rangka mewujudkan arah pembangunan daerah yang diarahkan untuk mendukung Peningkatan dan Pemantapan Kapasitas Pembangunan Berbasis Pedesaan dan Tata Kelola Ekonomi Daerah Guna Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat, maka program dan kegiatan prioritas daerah dijabarkan ke dalam pelaksanaan urusan pemerintahan.

Rencana program dan kegiatan yang dijabarkan ke dalam rumusan pada masing-masing SKPD telah menerapkan beberapa pendekatan perencanaan secara komprehensif meliputi pendekatan partisipatif, teknokratis, politik, bawah atas (*bottom up*) dan atas bawah (*top down*) yang disertai sasaran dan target kinerja yang akan dicapai serta indikasi anggaran indikatif yang diperlukan dalam rangka menjawab permasalahan dan mendukung pencapaian target sasaran pembangunan tahun 2018. Rumusan rencana program dan kegiatan secara detail dijabarkan ke dalam **Lampiran** yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2018 digunakan sebagai arah dan pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KU-APBD) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2018.

Adapun secara umum rumusan program pada masing-masing urusan bidang diuraikan sebagai berikut :

### **5.1. Urusan Wajib Pelayanan Dasar**

#### **1. Urusan Pendidikan**

Pelaksanaan urusan pendidikan difokuskan pada program pendidikan anak usia dini, wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun, pendidikan menengah, pendidikan non formal, peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan, pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan dan manajemen pelayanan pendidikan.

Fokus program tersebut diharapkan dapat mendukung pencapaian misi mewujudkan sumber daya manusia yang cerdas, sehat dan berbudaya dengan penekanan prioritas peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui peningkatan kualitas pendidikan usia dini, dasar dan menengah menuju wajib belajar 12 tahun; peningkatan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan; peningkatan minat dan budaya baca masyarakat dengan peningkatan prasarana dan sarana perpustakaan di tingkat sekolah. Pelaksanaan urusan pendidikan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan yang mencakup TK Negeri, SMP Negeri, Sanggar Kegiatan Belajar dan Dinas Pendidikan di tingkat Kecamatan (UPT).

Sedangkan indikasi kegiatan pada masing-masing program dijabarkan dalam rumusan pada Lampiran.

#### **2. Urusan Kesehatan**

Pelaksanaan urusan kesehatan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Umum Daerah Bagas Waras Klaten dengan dukungan pencapaian target mewujudkan sumber daya manusia yang cerdas, sehat dan berbudaya dengan

penekanan prioritas peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui peningkatan akses serta mutu pelayanan kesehatan dasar dan rujukan melalui peningkatan sarana prasarana pelayanan kesehatan; peningkatan kapasitas bagi tenaga medis dan non medis; optimalisasi peran dokter dan bidan; serta peningkatan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan.

Adapun fokus program yang dilaksanakan dalam rangka mendukung prioritas pembangunan daerah adalah sebagai berikut :

- a. Program Peningkatan Penyediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan;
- b. Program Upaya Kesehatan Masyarakat;
- c. Program Pengawasan Obat dan Makanan;
- d. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat;
- e. Program Perbaikan Gizi Masyarakat;
- f. Program Pengembangan Lingkungan Sehat;
- g. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular;
- h. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan;
- i. Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin;
- j. Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana Prasarana Puskesmas/Pustu dan Jaringannya;
- k. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata;
- l. Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata;
- m. Program Peningkatan kemitraan pelayanan kesehatan;
- n. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita;
- o. Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak
- p. Program Manajemen, Informasi dan Regulasi Kesehatan; dan
- q. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit.

Sedangkan indikasi kegiatan pada masing-masing program sebagaimana tersebut di atas terlampir.

### **3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**

Pelaksanaan urusan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum. Urusan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada tahun 2018 melaksanakan program pembangunan sebagai berikut :

- a. Pembangunan jalan dan jembatan;
- b. Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong;
- c. Pembangunan turap/talud/bronjong;
- d. Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan;
- e. Peningkatan sarana prasarana kebinamargaan;
- f. Pengembangan, Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya;
- g. Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya;
- h. Pengendalian Banjir;
- i. Pembangunan infrastruktur pedesaan;

- j. Pembangunan dan pengelolaan bangunan gedung;
- k. Pengendalian pemanfaatan ruang;
- l. Perencanaan Tata Ruang;

Sedangkan indikasi kegiatan pada masing-masing program sebagaimana tersebut di atas terlampir.

#### **4. Urusan Sosial**

Urusan bidang Sosial pada tahun 2018 melaksanakan program sebagai berikut:

- a. Pemberdayaan fakir miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya;
- b. Pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial;
- c. Pembinaan para penyandang cacat dan trauma;
- d. Pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya);
- e. Pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial;
- f. Peningkatan keagamaan;
- g. Penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- h. Rehabilitasi dan rekonstruksi Pasca bencana;
- i. Penanganan darurat bencana;
- j. Peningkatan pengelolaan logistik.

Sedangkan indikasi kegiatan pada masing-masing program sebagaimana tersebut di atas terlampir.

#### **5. Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman**

Fokus program pada pelaksanaan urusan perumahan rakyat dan kawasan pemukiman diarahkan pada program pengembangan perumahan. Sedangkan indikasi kegiatan program sebagaimana tersebut pada lampiran.

#### **6. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat**

Pelaksanaan urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat difokuskan pada program :

- a. Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan;
- b. Pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal;
- c. Pengembangan wawasan kebangsaan;
- d. Kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan;
- e. Pendidikan politik masyarakat;
- f. Peningkatan dan pembinaan kehidupan sosial politik;
- g. Pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan;
- h. Peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat.

Indikasi kegiatan pada masing-masing program sebagaimana tersebut dalam lampiran.

### **5.2. Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar**

#### **1. Urusan Tenaga Kerja**

Fokus program yang dilaksanakan pada urusan tenaga kerja, sebagai berikut:

- a. Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja;
- b. Peningkatan kesempatan kerja;
- c. Perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan.

Indikasi kegiatan pada masing-masing program sebagaimana terlampir dalam lampiran.

## **2. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

Fokus program yang akan dilaksanakan pada urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak adalah sebagai berikut :

- a. Keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan;
- b. Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak;
- c. Peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan anak;
- d. Peningkatan peran serta anak dan kesetaraan gender dalam pembangunan.

Indikasi kegiatan pada masing-masing program sebagaimana terlampir dalam lampiran.

## **3. Urusan Pangan**

Fokus program pada urusan pangan adalah peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat. Indikasi kegiatan pada program ini sebagaimana terlampir.

## **4. Urusan Pertanahan**

Fokus program pada urusan pertanahan adalah dalam rangka penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah serta penyelesaian konflik-konflik pertanahan. Indikasi kegiatan yang ada pada program ini sebagaimana terlampir.

## **5. Urusan Lingkungan Hidup**

Pelaksanaan urusan bidang lingkungan hidup difokuskan pada pelaksanaan program :

- a. Pengembangan kinerja pengelolaan persampahan;
- b. Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH);
- c. Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup;
- d. Perlindungan dan konservasi sumber daya alam;
- e. Rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumber daya alam;
- f. Pengembangan kapasitas pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup;
- dan
- g. Peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Indikasi kegiatan yang ada pada program diatas terjabarkan pada lampiran sebagaimana terlampir.

## **6. Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**

Fokus program yang dilaksanakan pada urusan ini adalah penataan administrasi kependudukan dengan indikasi kegiatan sebagaimana terlampir.

## **7. Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa**

Pelaksanaan urusan pemberdayaan masyarakat desa difokuskan pada pelaksanaan program :

- a. Peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan;
- b. Pengembangan lembaga ekonomi pedesaan;
- c. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa; dan
- d. Pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga

Sebagaimana program dilaksanakan didukung dengan kegiatan-kegiatan sesuai indikasi pada lampiran.

#### **8. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**

Fokus program pada urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana adalah sebagai berikut :

- a. Program keluarga berencana;
- b. Program kesehatan reproduksi remaja;
- c. Program pelayanan kontrasepsi;
- d. Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri;
- e. Program promosi kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan dimasyarakat;
- f. Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR;
- g. Program peningkatan penanggulangan narkoba, penyakit menular seksual (PMS) termasuk HIV/AIDS;
- h. Program pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak; dan
- i. Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga.

Indikasi kegiatan pada masing-masing program sebagaimana terlampir pada lampiran.

#### **9. Urusan Perhubungan**

Pelaksanaan urusan bidang perhubungan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan. Urusan bidang perhubungan pada tahun 2018 melaksanakan program pembangunan sebagai berikut :

- a. Pembangunan sarana dan prasarana perhubungan;
- b. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
- c. Peningkatan Pelayanan Angkutan;
- d. Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas, dan
- e. Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor.

Sedangkan indikasi kegiatan pada masing-masing program sebagaimana tersebut di atas terlampir.

#### **10. Urusan Komunikasi dan Informatika**

Pelaksanaan urusan bidang komunikasi dan informatika pada tahun 2018 melaksanakan program pembangunan sebagai berikut :

- a. Pengembangan komunikasi, informasi dan media massa;
- b. Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi; dan
- c. Peningkatan kerjasama informasi dengan media massa.

Sedangkan indikasi kegiatan pada masing-masing program sebagaimana tersebut di atas terlampir.

#### **11. Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah**

Pelaksanaan urusan koperasi dan usaha kecil menengah pada tahun 2018 melaksanakan program adalah sebagai berikut :

- a. Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah;

- b. Pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kecil menengah; dan
- c. Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi.

Sedangkan indikasi kegiatan pada masing-masing program sebagaimana tersebut di atas terlampir.

#### **12. Urusan Penanaman Modal**

Fokus program pada urusan penanaman modal yang akan dilaksanakan tahun 2018 adalah sebagai berikut :

- a. Peningkatan promosi dan kerjasama investasi; dan
- b. Peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi.

Sedangkan indikasi kegiatan pada masing-masing program sebagaimana tersebut di atas terlampir.

#### **13. Urusan Kepemudaan dan Olahraga**

Fokus program pada urusan kepemudaan dan olahraga pada tahun 2018 adalah :

- a. Program pembinaan pemuda dan olahraga; dan
- b. Program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga.

Indikasi kegiatan pada masing-masing program sebagaimana pada lampiran.

#### **14. Urusan Statistik**

Fokus program pada urusan statistik adalah pengembangan data/informasi/statistik daerah dengan indikasi kegiatan seperti pada lampiran.

#### **15. Urusan Persandian**

Untuk sementara dalam rangka melaksanakan urusan persandian, belum ada fokus program khusus.

#### **16. Urusan Kebudayaan**

Fokus program urusan kebudayaan yang akan dilaksanakan pada tahun 2018 adalah sebagai berikut :

- a. Program pengembangan nilai budaya;
- b. Program pengelolaan kebudayaan; dan
- c. Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya.

Indikasi kegiatan pada masing-masing program sebagaimana pada lampiran.

#### **17. Urusan Perpustakaan**

Fokus program pada urusan perpustakaan adalah pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan seperti pada lampiran.

#### **18. Urusan Arsip**

Fokus program pelaksanaan urusan arsip sebagaimana direncanakan pada tahun 2018 adalah sebagai berikut :

- a. Program perbaikan sistem administrasi kearsipan;
- b. Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah; dan
- c. Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan.

Indikasi kegiatan pada masing-masing program sebagaimana pada lampiran.

### **5.3. Urusan Pilihan**

#### **1. Urusan Kelautan dan Perikanan**

Fokus program pada urusan kelautan dan perikanan pada perencanaan tahun 2018 adalah sebagai berikut :

- a. Pengembangan budidaya perikanan;



- b. Pengembangan perikanan tangkap; dan
  - c. Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan.
- Sedangkan indikasi kegiatan yang akan dilaksanakan dimasing-masing program sebagaimana terlampir.

## **2. Urusan Pariwisata**

Pelaksanaan urusan pariwisata pada tahun 2018 difokuskan pada program :

- a. Pengembangan pemasaran pariwisata;
- b. Pengembangan destinasi pariwisata; dan
- c. Pengembangan kemitraan di bidang pariwisata.

Indikasi kegiatan yang akan dilaksanakan di masing-masing program sebagaimana terlampir.

## **3. Urusan Pertanian**

Fokus program pada urusan pertanian pada perencanaan pembangunan tahun 2018 sebagai berikut :

- a. Program peningkatan kesejahteraan petani;
- b. Program peningkatan ketahanan pangan;
- c. Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan;
- d. Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan;
- e. Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan;
- f. Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak;
- g. Program peningkatan produksi hasil peternakan; dan
- h. Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan.

Sedangkan indikasi kegiatan yang akan dilaksanakan dimasing-masing program sebagaimana terlampir.

## **4. Urusan Kehutanan**

Pelaksanaan urusan kehutanan pada tahun 2018 akan diarahkan ke program:

- a. Pemanfaatan potensi sumber daya hutan; dan
- b. Rehabilitasi hutan dan lahan.

Indikasi kegiatan yang akan dilaksanakan di masing-masing program sebagaimana terlampir.

## **5. Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral**

Fokus program pada urusan energi dan sumber daya mineral adalah :

- a. Program pembinaan dan pengawasan bidang energi dan sumber daya mineral;
- b. Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan; dan
- c. Program pengembangan energi baru terbarukan dan konservasi energi;

Sedangkan indikasi kegiatan yang akan dilaksanakan dimasing-masing program sebagaimana terlampir.

## **6. Urusan Perdagangan**

Pelaksanaan program pada urusan perdagangan difokuskan dalam program :

- a. Peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri;
- b. Perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan; dan
- c. Pembinaan pedagang kakilima dan asongan.

Indikasi kegiatan yang akan dilaksanakan di masing-masing program sebagaimana terlampir.

## **7. Urusan Perindustrian**

Fokus pelaksanaan program pada urusan perindustrian adalah :

- a. Pengembangan industri kecil dan menengah; dan
- b. Peningkatan kemampuan teknologi industri.

Sedangkan indikasi kegiatan yang akan dilaksanakan dimasing-masing program sebagaimana terlampir

## **8. Urusan Transmigrasi**

Pelaksanaan urusan transmigrasi difokuskan pada program pengembangan wilayah transmigrasi dan program transmigrasi lokal dengan indikasi kegiatan sebagaimana terlampir.

### **5.4. Administrasi Pemerintahan Umum**

Mendasari pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah maka didukung pelaksanaan urusan yang tidak terkait dalam urusan wajib maupun urusan pilihan. Adapun pelaksanaan urusan dalam rangka menunjang urusan pemerintahan umum adalah sebagai berikut :

#### **1. Administrasi Pemerintahan**

Fokus kegiatan dalam rangka pelaksanaan urusan fungsi lainnya secara garis besar adalah rumusan program yang dilaksanakan dalam rangka mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan, sebagaimana program :

- a. Peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah;
- b. Peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah;
- c. Peningkatan kerjasama antar pemerintah daerah;
- d. Penataan peraturan perundang-undangan;
- e. Peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa/kelurahan;
- f. Peningkatan tata kelola pemerintahan desa;
- g. Peningkatan koordinasi pelaksanaan pembangunan;
- h. Penyuluhan dan pelayanan bantuan hukum dan HAM;
- i. Peningkatan kapasitas kelembagaan dan ketatalaksanaan;
- j. Intensifikasi penanganan pengaduan masyarakat;
- k. Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH;
- l. Peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan; dan
- m. Peningkatan koordinasi dan pembinaan bidang Tata Pemerintahan, Pemberdayaan Masyarakat Desa, Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat serta Pembangunan di tingkat Kecamatan maupun Desa/Kelurahan.

Indikasi kegiatan pada masing-masing fokus program dijabarkan pada lampiran.

#### **2. Perencanaan**

Fokus urusan perencanaan pada tahun 2018 dirumuskan ke program :

- a. Pengembangan data/informasi;
- b. Peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah;
- c. Perencanaan pembangunan daerah;



- d. Perencanaan pembangunan bidang ekonomi;
- e. Perencanaan pembangunan bidang sosial budaya;
- f. Perencanaan pembangunan bidang prasarana wilayah dan sumber daya alam;
- g. Pendataan, evaluasi, penelitian dan pengembangan; dan
- h. Pengembangan wilayah perbatasan

Indikasi kegiatan pada masing-masing program sebagaimana dijabarkan dalam lampiran.

### **3. Keuangan**

Pelaksanaan urusan keuangan dalam rangka menunjang penyelenggaraan pemerintahan difokuskan pada program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah dengan indikasi kegiatan sebagaimana dijabarkan dalam lampiran.

### **4. Kepegawaian dan Diklat**

Rumusan program urusan kepegawaian dan diklat pada tahun 2018 diarahkan pada program :

- a. Peningkatan kapasitas sumberdaya apatur; dan
- b. Pembinaan dan pengembangan aparatur.

Indikasi kegiatan pada masing-masing program dijabarkan dalam lampiran.

### **5. Penelitian dan Pengembangan**

Untuk sementara dalam rangka melaksanakan urusan penelitian dan pengembangan, perencanaan pembangunan tahun 2018 masih belum ada fokus pelaksanaan program.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan OPD, direncanakan program yang bersifat pendukung operasional OPD, diantara lain sebagai berikut :

#### **1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**

Fokus kegiatan pada penyediaan jasa surat menyurat, jasa komunikasi sumber daya air dan listrik, jasa administrasi keuangan, jasa kebersihan kantor, alat tulis kantor, barang cetakan dan penggandaan, komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor, peralatan dan perlengkapan kantor, bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan, penyediaan makanan dan minuman, rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah, jasa pengamanan kantor, asuransi gedung kantor, asuransi kendaraan dinas, penyediaan jasa medis dan paramedis dan penyediaan jasa tenaga administrasi/teknis perkantoran. Diharapkan fokus-fokus kegiatan tersebut dapat mendukung peningkatan kapasitas pelayanan publik.

#### **2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**

Fokus kegiatan pada : pembangunan gedung kantor, pengadaan kendaraan dinas/operasional, pengadaan peralatan gedung kantor, pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor, pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional, pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor, pemeliharaan rutin/berkala mebeleur. Penataan lingkungan kantor. Pada dasarnya fokus kegiatan pada program ini adalah dalam rangka peningkatan sarana dan prasarana kantor.

#### **3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur**

Fokus kegiatan pada pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya dalam rangka mendukung target capaian tahun 2018 yaitu terlaksananya pengadaan pakaian dinas

beserta kelengkapannya. Diharapkan kegiatan pada program ini dapat tercapai sesuai dengan prioritas pembangunan dalam hal peningkatan kapasitas pemerintahan.

#### 4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Fokus pada kegiatan pendidikan dan pelatihan formal dengan dukungan pencapaian target tahun 2018 yaitu dengan terlaksananya diklat dan bintek aparatur dalam rangka peningkatan kapasitas SDM di setiap OPD sesuai dengan urusan bidang yang ditangani.

#### 5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Capaian Kinerja dan Keuangan

Fokus kegiatan pada program ini : laporan kinerja OPD. Kegiatan tersebut dilaksanakan dengan harapan mendukung target capaian pembangunan tahun 2018 yaitu tersedianya laporan Capaian Kinerja OPD dan Keuangan mendasari target-target yang sudah ditetapkan pada program sesuai urusan bidang yang ditangani pada masing-masing OPD.

Secara ringkas, *estimasi* rekapitulasi pagu anggaran indikatif yang digunakan untuk membiayai program-program dan kegiatan-kegiatan pada masing-masing penyelenggaraan urusan pemerintahan pada tahun 2018 dapat dilihat pada Tabel 5.1.

**Tabel. 5.1.**  
**Pagu Indikatif Tahun 2018**  
**Berdasarkan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan**

Kode	BIDANG URUSAN	PAGU INDIKATIF	PROPORSI (%)
( 1 )	( 2 )	( 3 )	( 4 )
<b>1</b>	<b>URUSAN WAJIB (PELAYANAN DASAR)</b>	<b>838.635.346.800</b>	<b>73.00%</b>
1.01	PENDIDIKAN	166.636.286.800	14.51%
1.02	KESEHATAN	158.877.195.000	13.83%
1.03	PEKERJAAN UMUM & PENATAAN RUANG	476.909.725.000	41.52%
1.04	PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN	15.113.500.000	1.32%
1.05	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	9.029.382.000	0.79%
1.06	SOSIAL	12.069.258.000	1.05%
<b>2</b>	<b>URUSAN WAJIB (NON PELAYANAN DASAR)</b>	<b>93.616.977.000</b>	<b>8.15%</b>
2.01	TENAGA KERJA	1.039.000.000	0.09%
2.02	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	597.000.000	0.05%
2.03	PANGAN	1.785.000.000	0.16%
2.04	PERTANAHAN	-	-
2.05	LINGKUNGAN HIDUP	37.850.200.000	3.29%
2.06	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	3.220.000.000	0.28%
2.07	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	4.421.653.000	0.38%
2.08	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	4.013.500.000	0.35%
2.09	PERHUBUNGAN	9.685.200.000	0.84%
2.10	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	4.641.500.000	0.40%
2.11	KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	4.152.730.000	0.36%
2.12	PENANAMAN MODAL	2.321.000.000	0.20%
2.13	KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	4.476.241.500	0.39%
2.14	STATISTIK	300.000.000	0.03%
2.15	PERSANDIAN	-	-
2.16	KEBUDAYAAN	12.956.952.500	1.13%
2.17	PERPUSTAKAAN	565.000.000	0.05%

Kode	BIDANG URUSAN	PAGU INDIKATIF	PROPORSI (%)
( 1 )	( 2 )	( 3 )	( 4 )
2.18	ARSIP	1.592.000.000	0.14%
<b>3</b>	<b>URUSAN PILIHAN</b>	<b>117.397.370.000</b>	<b>10.22%</b>
3.01	KELAUTAN DAN PERIKANAN	5.508.450.000	0.48%
3.02	PARIWISATA	7.826.400.000	0.68%
3.03	PERTANIAN	32.621.169.000	2.84%
3.04	KEHUTANAN	100.000.000	0.01%
3.05	ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	28.155.000.000	2.45%
3.06	PERDAGANGAN	39.875.000.000	3.47%
3.07	PERINDUSTRIAN	2.183.351.000	0.19%
3.08	TRANSMIGRASI	1.128.000.000	0.10%
<b>4</b>	<b>URUSAN PENUNJANG PEMERINTAHAN</b>	<b>99.094.083.375</b>	<b>8.63%</b>
4.01	ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	63.377.586.891	5.52%
4.02	PENGAWASAN	7.771.000.000	0.68%
4.03	PERENCANAAN	7.035.124.000	0.61%
4.04	KEUANGAN	13.265.274.000	1.15%
4.05	KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT	7.395.100.000	0.64%
4.06	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	250.000.000	0.02%
4.07	FUNGSI LAINNYA	-	-
<b>TOTAL</b>		<b>1.148.743.775.659</b>	<b>100.00%</b>

## BAB VI PENUTUP

### 6.1. Kaidah Pelaksanaan

Dalam penyelenggaraan pembangunan di Kabupaten Klaten, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2018 merupakan landasan dan pedoman dasar dalam rangka penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), serta Rancangan APBD (RAPBD) Tahun Anggaran 2018. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2018 merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang dalam proses penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021.

Penyusunan dokumen RKPD dengan berdasar pada dokumen perencanaan lain yang lebih tinggi merupakan upaya untuk menjaga keterkaitan dan konsistensi antar dokumen perencanaan karena dokumen yang konteksnya lebih tinggi bersifat makro dan menjadi dasar pijakan dalam penyusunan dokumen lain. Dan juga dalam penyusunan dokumen RKPD tetap mengacu pada Rancangan RKP Nasional dan Rancangan RKPD Provinsi Jawa Tengah, terutama dalam rangka mensinergikan, mensikronisasikan dan mengintegrasikan program dan kegiatan antara pembangunan nasional dengan pembangunan daerah.

Agar pelaksanaan RKPD tepat waktu dan sasaran, maka perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaannya sebagai berikut:

1. RKPD Tahun 2018 tidak hanya memuat program-program dalam kerangka investasi pemerintah dan pelayanan publik, tetapi juga memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, kebijakan keuangan daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
2. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan seluruh *Stakeholders* pembangunan termasuk masyarakat luas dan dunia usaha sebagai pemangku kepentingan pembangunan berkewajiban untuk melaksanakan program-program RKPD Tahun 2018 dengan sebaik-baiknya.
3. Sebagai pedoman penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), RKPD disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan juga Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
4. Dalam upaya sinkronisasi dan sinergi pelaksanaan setiap program dan kegiatan baik yang bersumber dari APBD maupun APBN/BLN, maka setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah perlu membuat Rencana Kerja – Organisasi Perangkat Daerah (Renja-OPD) Tahun 2018.
5. Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2018, maka Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah berkewajiban untuk melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap penjabaran dan sinergisitas RKPD Tahun 2018, ke dalam Rencana Kerja – Organisasi Perangkat Daerah (Renja – OPD) dan Pagu Indikatif OPD Tahun 2018.



## 6.2. Kesimpulan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Klaten Tahun 2018 memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya yang bersifat indikatif, maka RKPD Tahun 2018 disusun sebagai dasar/pedoman untuk penyusunan rancangan APBD Kabupaten Klaten Tahun 2018.

RKPD ini disusun atas partisipasi seluruh pelaku pembangunan melalui forum-forum OPD Kabupaten maupun forum lain yang dilaksanakan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (*Musrenbangda*) yang berfungsi sebagai forum untuk menghasilkan kesepakatan terutama sinkronisasi rencana kegiatan, penjelasan program dan kegiatan yang tercantum dalam agenda pembangunan daerah.

Dokumen ini berfungsi sebagai acuan dan pedoman bagi Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Klaten dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan umum, serta menjadi acuan bagi masyarakat untuk mewujudkan partisipasinya sekaligus untuk mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan, disamping itu juga telah mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, sehingga selain diusulkan ke APBD Kabupaten, juga diusulkan ke APBD Propinsi dan APBN (*Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan*).

Keberhasilan pembangunan di Kabupaten Klaten selain dilaksanakan oleh jajaran pemerintahan juga sangat ditentukan oleh dukungan masyarakat. Sehingga dukungan semua pihak, sebagaimana Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah untuk mewujudkan masyarakat Klaten yang ***Maju, Mandiri dan Berdaya Saing***.

Pit. BUPATI KLATEN,

**SRI MULYANI**





## **LAMPIRAN II**

**PERATURAN BUPATI KLATEN**

**NOMOR 27 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KLATEN**

**TAHUN 2018**

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH  
TAHUN 2018 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2019  
KABUPATEN KLATEN**

LAMPIRAN - II  
PERATURAN BUPATI KLATEN  
NOMOR 27 TAHUN 2017  
TENTANG  
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN KLATEN TAHUN 2018

**PERANGKAT DAERAH : DINAS PENDIDIKAN**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>1.01 - 1.1.0101 - 1</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>				<b>1.202.000.000</b>				<b>1.232.000.000</b>	
1.01 - 1.1.0101 - 1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Dinas Pendidikan	1.00 tahun	300.000.000	APBD	Dinas Pendidikan	1 tahun	300.000.000	APBD
1.01 - 1.1.0101 - 1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Pemberian insentif bagi Tenaga Harian Lepas (THL)	Dinas Pendidikan	29.00 orang	522.000.000	APBD	Dinas Pendidikan	29 orang	522.000.000	APBD
1.01 - 1.1.0101 - 1.10	Penyediaan alat tulis kantor	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Dinas Pendidikan	1.00 tahun	60.000.000	APBD	Dinas Pendidikan	1 tahun	75.000.000	APBD
1.01 - 1.1.0101 - 1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Penyediaan barang cetak dan penggandaan	Dinas Pendidikan	1.00 tahun	35.000.000	APBD	Dinas Pendidikan	1 tahun	40.000.000	APBD
1.01 - 1.1.0101 - 1.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Penyediaan komponen listrik/penerangan kantor	Dinas Pendidikan	1.00 tahun	25.000.000	APBD	Dinas Pendidikan	1 tahun	25.000.000	APBD
1.01 - 1.1.0101 - 1.17	Penyediaan makanan dan minuman	Penyediaan makanan dan minuman rapat	Dinas Pendidikan	1.00 tahun	50.000.000	APBD	Dinas Pendidikan	1 tahun	55.000.000	APBD
1.01 - 1.1.0101 - 1.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Biaya perjalanan dinas dan konsultasi ke luar daerah	Dinas Pendidikan	1.00 tahun	130.000.000	APBD	Dinas Pendidikan	1 tahun	135.000.000	APBD
1.01 - 1.1.0101 - 1.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Biaya perjalanan dinas rapat, koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Dinas Pendidikan	1.00 tahun	80.000.000	APBD	Dinas Pendidikan	1 tahun	80.000.000	APBD
<b>1.01 - 1.1.0101 - 2</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>				<b>520.000.000</b>				<b>230.000.000</b>	
1.01 - 1.1.0101 - 2.9	Pengadaan peralatan gedung kantor	Pengadaan peralatan utk scanning LJK Ujian Sekolah SD/MI	Dinas Pendidikan	1.00 paket	150.000.000	APBD		0	0	
1.01 - 1.1.0101 - 2.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Pemeliharaan rutin gedung kantor	Dinas Pendidikan	1.00 tahun	150.000.000	APBD	Dinas Pendidikan	1 tahun	150.000.000	APBD

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.01 - 1.1.0101 - 2.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Pemeliharaan rutin kendaraan dinas	Dinas Pendidikan	6.00 unit	45.000.000	APBD	Dinas Pendidikan	6 unit	50.000.000	APBD
1.01 - 1.1.0101 - 2.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Pemeliharaan perlengkapan kantor	Dinas Pendidikan	1.00 tahun	25.000.000	APBD	Dinas Pendidikan	1 tahun	30.000.000	APBD
1.01 - 1.1.0101 - 2.54	Fasilitasi Pindahan Kantor	Fasilitasi pindahan kantor	Dinas Pendidikan	1.00 kegiatan	150.000.000	APBD		0	0	
<b>1.01 - 1.1.0101 - 5</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>				<b>200.000.000</b>				<b>200.000.000</b>	
1.01 - 1.1.0101 - 5.1	Pendidikan dan pelatihan formal	Kursus Mahir Dasar (KMD) dan Kursus Mahir Lanjutan (KML) bagi Pembina Pramuka di SD dan SMP	Dinas Pendidikan	200.00 orang	200.000.000	APBD	Dinas Pendidikan	200 orang	200.000.000	APBD
<b>1.01 - 1.1.0101 - 6</b>	<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>				<b>275.000.000</b>				<b>295.000.000</b>	
1.01 - 1.1.0101 - 6.5	Pengelolaan Aset SKPD	Pengelolaan dan penataan aset Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan	1.00 tahun	100.000.000	APBD	Dinas Pendidikan	1 tahun	120.000.000	APBD
1.01 - 1.1.0101 - 6.7	Monev kegiatan SKPD	Monitoring dan evaluasi kegiatan dinas, UPTD, SMP	Kab. Klaten	1.00 tahun	100.000.000	APBD	Dinas Pendidikan	1 tahun	100.000.000	APBD
1.01 - 1.1.0101 - 6.8	Pengembangan Perencanaan Teknis dan Pengendalian Kegiatan SKPD	Penyusunan dokumen perencanaan OPD	Dinas Pendidikan	1.00 kegiatan	75.000.000	APBD	Dinas Pendidikan	1 kegiatan	75.000.000	APBD
<b>1.01 - 1.1.0101 - 15</b>	<b>Program Pendidikan Anak Usia Dini</b>				<b>756.250.000</b>				<b>616.000.000</b>	
1.01 - 1.1.0101 - 15.1	Pembangunan gedung sekolah	Pembangunan Gedung PAUD	Ngebong RT 03 RW 06 Delanggu	1 unit	140.250.000	APBD		0	0	
1.01 - 1.1.0101 - 15.59	Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini	Terfasilitasi pendampingan BOP DAK PAUD Tersalurkannya bantuan BOP DAK PAUD	Dinas Pendidikan TKN Pembina Klaten	1.00 kegiatan 1.00 kegiatan	95.000.000 36.000.000	APBD DAK	Dinas Pendidikan TKN Pembina Klaten	1 Kegiatan 1 Kegiatan	95.000.000 36.000.000	APBD DAK
1.01 - 1.1.0101 - 15.62	Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini	Terlaksananya Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran anak usia dini	Dinas Pendidikan	1.00 kegiatan	50.000.000	APBD	Dinas Pendidikan	1 Kegiatan	50.000.000	APBD
1.01 - 1.1.0101 - 15.63	Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama Pendidikan Anak Usia Dini				25.000.000				25.000.000	



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Terlaksananya Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama pendidikan anak usia dini	Dinas Pendidikan	1.00 kegiatan	25.000.000	APBD	Dinas Pendidikan	1 Kegiatan	25.000.000	APBD
1.01 - 1.1.0101 - 15.66	Monitoring, evaluasi Pendidikan Anak Usia Dini	Terlaksananya Monitoring, evaluasi dan pelaporan program PAUD	Dinas Pendidikan	1.00 kegiatan	50.000.000	APBD	Dinas Pendidikan	1 Kegiatan	50.000.000	APBD
1.01 - 1.1.0101 - 15.67	Peningkatan Mutu pendidikan PAUD	Sosialisasi lokakarya serta Fasilitasi Akreditasi Lembaga PAUD	Dinas Pendidikan	1.00 kegiatan	100.000.000	APBD	Dinas Pendidikan	1 Kegiatan	100.000.000	APBD
1.01 - 1.1.0101 - 15.68	Penyelenggaraan Ajang Kreativitas Anak Usia Dini	Terlaksananya Fasilitasi Gebyar PAUD/ajang kreativitas anak usia dini Terlaksananya Gebyar PAUD (2P0A)	Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan	1.00 kegiatan 1.00 kegiatan	95.000.000 15.000.000	APBD APBD I	Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan	1 Kegiatan 1 Kegiatan	95.000.000 15.000.000	APBD APBD I
1.01 - 1.1.0101 - 15.69	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas peserta didik PAUD serta Lembaga PAUD	Pembinaan minat, bakat dan kreativitas peserta didik PAUD serta lembaga PAUD	Dinas Pendidikan	1.00 kegiatan	50.000.000	APBD	Dinas Pendidikan	1 Kegiatan	50.000.000	APBD
1.01 - 1.1.0101 - 15.70	Fasilitasi kegiatan PAUD	Fasilitasi kegiatan PAUD	Dinas Pendidikan	1.00 kegiatan	100.000.000	APBD	Dinas Pendidikan	1 Kegiatan	100.000.000	APBD
<b>1.01 - 1.1.0101 - 16</b>	<b>Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun</b>				<b>42.903.826.000</b>				<b>25.372.000.000</b>	
1.01 - 1.1.0101 - 16.3	Penambahan ruang kelas sekolah	Pembangunan Ruang Kelas Baru SD Pembangunan Ruang Kelas Baru SD Pembangunan Ruang Kelas Baru SD Pembangunan Ruang Kelas Baru SD Pembangunan Ruang Kelas Baru SMP Pembangunan Ruang Kelas Baru SMP Pembangunan Ruang Kelas Baru SMP Pembangunan Ruang Kelas Baru SMP Pembangunan Ruang Kelas Baru SMP Pembangunan Ruang Kelas Baru SMP Pembangunan Ruang Kelas Baru SMP	SDN 1 Pomah, Tulung SDN TANGKISAN POS SDN 1 PERENG SDN 2 TAMBAKBOYO SMPN 1 KEMALANG SMPN 3 POLANHARJO SMPN 2 JUWIRING SMPN 1 KALIKOTES SMPN 2 GANTIWARNO	2 unit 1 unit 1 unit 1 unit 2 unit 2 unit 2 unit 1 ruang 2 ruang	2.480.000.000 300.000.000 150.000.000 150.000.000 300.000.000 300.000.000 300.000.000 150.000.000 300.000.000	APBD APBD APBD APBD DAK DAK DAK APBD APBD		0 0 0 0 0 0 0 0 0	1.000.000.000	DAK DAK
		Pembangunan Ruang Kelas Baru SMP	Kadibolo	0			SMP di Kab Klaten	6 Paket	1.000.000.000	DAK
		Pembangunan ruang kelas baru SD N 1 Kadibolo	Kadibolo	2 ruang	300.000.000	APBD		0		DAK

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Pembangunan Ruang Kelas Baru SD N Ngemplak	- RT - RW - Ngemplak	8 x 8 meter	80.000.000	APBD		0		DAK
1.01 - 1.1.0101 - 16.5	Pembangunan laboratorium dan ruang praktikum sekolah	Pembangunan Ruang Laboratorium IPA SMP Pembangunan Ruang Laboratorium IPA SMP Pembangunan Laboratorium Komputer dan perabotan SMP. Pembangunan Laboratorium Komputer dan perabotan SMP. Pembangunan Laboratorium Komputer dan perabotan SMP. Pembangunan Laboratorium Komputer dan perabotan SMP. Pembangunan Laboratorium Komputer dan perabotan SMP. Pembangunan Laboratorium Komputer dan perabotan SMP. Pembangunan Laboratorium Komputer dan perabotan SMP. Pembangunan Laboratorium Komputer dan perabotan SMP. Pembangunan Laboratorium Komputer dan perabotan SMP. Pembangunan Laboratorium Komputer dan perabotan SMP. Pembangunan Laboratorium Komputer dan perabotan SMP.	SMPN 2 GANTIWARNO SMPN 2 KARANGDOWO SMPN 1 KEBONARUM SMPN 1 JOGONALAN SMPN 1 WONOSARI SMPN 2 KARANGDOWO SMPN 2 CAWAS SMPN 7 KLATEN SMPN 2 CEPER SMPN 2 DELANGGU SMPN 2 GANTIWARNO SMPN 2 KEMALANG	1 paket 1 paket 1 paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket	2.530.000.000 265.000.000 265.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000	DAK DAK DAK DAK DAK DAK DAK DAK DAK DAK DAK		0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0	
1.01 - 1.1.0101 - 16.9	Penataan Lingkungan Sekolah (taman, lapangan upacara, fasilitas parkir, pagar)	Pembangunan Pagar Sekolah SMP Pembangunan Pagar Sekolah SMP Pembangunan Pagar Sekolah SMP Pembangunan Pagar Sekolah SMP Pembangunan Pagar Sekolah SMP Penataan Lingkungan Sekolah SD Penataan Lingkungan Sekolah SD Rehab Sedang Ruang Kelas SD N 1 Jiwan Tempat parkir sepeda guru	SMPN 2 PRAMBANAN SMPN 3 TRUCUK SMPN 3 BAYAT SMPN 2 KEMALANG SMPN 3 JATINOM SDN 1 JARUM, BAYAT SDN 1 PLANGGU, TRUCUK Lodadi RT 2 RW 1 Jiwan SLTP N 2 Jogonalan	1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 PAKET 1 PAKET 3 Kelas 3 x 20 m	680.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 100.000.000 100.000.000 30.000.000 60.000.000	DAK DAK DAK DAK DAK APBD APBD APBD APBD		0 0 0 0 0 1 PAKET 1 PAKET 0 0	250.000.000 125.000.000 125.000.000	APBD APBD APBD

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Pavingisasi halaman Sekolah SD N 1 Jiwana Pembangunan Pagar Belakang	- RT - RW - Jiwana SMPN 2 Prambanan, Desa Pereng	-- 120,4 m2	40.000.000 100.000.000	APBD APBD		0 0		APBD APBD
1.01 - 1.1.0101 - 16.12	Pembangunan perpustakaan sekolah	Pembangunan Perpustakaan SD	SDN 2 KRAKATAN, BAYAT	1 UNIT	150.000.000	APBD		1 UNIT	150.000.000	APBD
		Pembangunan Perpustakaan SD	SDN 2 JAPANAN, CAWAS	1 UNIT	150.000.000	APBD		1 UNIT	150.000.000	APBD
		Pembangunan Perpustakaan SD	SDN JOMBOR, CEPER	1 UNIT	150.000.000	APBD		1 UNIT	150.000.000	APBD
		Pembangunan Perpustakaan SD	SDN 1 KUJON, CEPER	1 UNIT	150.000.000	APBD		1 UNIT	150.000.000	APBD
		Pembangunan Perpustakaan SD	SDN 1 SRIBIT, DELANGGU	1 UNIT	150.000.000	APBD		1 UNIT	150.000.000	APBD
		Pembangunan Perpustakaan SD	SDN 6 DELANGGU, DELANGGU	1 UNIT	150.000.000	APBD		1 UNIT	150.000.000	APBD
		Pembangunan Perpustakaan SD	SDN 1 KARANGTURI, GANTIWARNO	1 UNIT	150.000.000	APBD		1 UNIT	150.000.000	APBD
		Pembangunan Perpustakaan SD	SDN 1 GLAGAH, JATINOM	1 UNIT	150.000.000	APBD		1 UNIT	150.000.000	APBD
		Pembangunan Perpustakaan SD	SDN 1 KAYUMAS, JATINOM	1 UNIT	150.000.000	APBD		1 UNIT	150.000.000	APBD
		Pembangunan Perpustakaan SD	SDN 1 JUWIRAN, JUWIRING	1 UNIT	150.000.000	APBD		1 UNIT	150.000.000	APBD
		Pembangunan Perpustakaan SD	SDN 1 GEMBLEGAN, KALIKOTES	1 UNIT	150.000.000	APBD		1 UNIT	150.000.000	APBD
		Pembangunan Perpustakaan SD	SDN 2 NGABEYAN, KARANGANOM	1 UNIT	150.000.000	APBD		1 UNIT	150.000.000	APBD
		Pembangunan Perpustakaan SD	SDN 1 DEMANGAN, KARANGDOWO	1 UNIT	150.000.000	APBD		1 UNIT	150.000.000	APBD
		Pembangunan Perpustakaan SD	SDN 2 RINGINPUTIH, KARANGDOWO	1 UNIT	150.000.000	BANKEU PROV		1 UNIT	150.000.000	BANKEU PROV
		Pembangunan Perpustakaan SD	SDN 1 NGRUNDUL, KEBONARUM	1 UNIT	150.000.000	BANKEU PROV		1 UNIT	150.000.000	BANKEU PROV
		Pembangunan Perpustakaan SD	SDN 2 KENDALSARI, KEMALANG	1 UNIT	150.000.000	BANKEU PROV		1 UNIT	150.000.000	BANKEU PROV

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Pembangunan Perpustakaan SD	SDN 1 PANGGANG, KEMALANG	1 UNIT	150.000.000	BANKEU PROV		1 UNIT	150.000.000	BANKEU PROV
		Pembangunan Perpustakaan SD	SDN 3 KARANGANOM, KLATEN UTARA	1 UNIT	150.000.000	BANKEU PROV		1 UNIT	150.000.000	BANKEU PROV
		Pembangunan Perpustakaan SD	SDN 1 GLODOGAN, KLATEN SELATAN	1 UNIT	150.000.000	BANKEU PROV		1 UNIT	150.000.000	BANKEU PROV
		Pembangunan Perpustakaan SD	SDN 2 SUKORINI, MANISRENGGO	1 UNIT	150.000.000	BANKEU PROV		1 UNIT	150.000.000	BANKEU PROV
		Pembangunan Ruang Perpustakaan SMP dan perabotannya.	SMPN 2 DELANGGU	1 paket	240.000.000	DAK		0		
		Pembangunan Ruang Perpustakaan SMP dan perabotannya.	SMPN 3 TRUCUK	1 paket	240.000.000	DAK		0		
		Pembangunan Perpustakaan SD	SDN 1 CANDIREJO, NGAWEN	1 UNIT	150.000.000	BANKEU PROV		1 UNIT	150.000.000	BANKEU PROV
		Pembangunan Perpustakaan SD	SDN 2 KAPUNGAN, POLANHARJO	1 UNIT	150.000.000	BANKEU PROV		1 UNIT	150.000.000	BANKEU PROV
		Pembangunan Perpustakaan SD	SDN 1 KOKOSAN, PRAMBANAN	1 UNIT	150.000.000	BANKEU PROV		1 UNIT	150.000.000	BANKEU PROV
		Pembangunan Perpustakaan SD	SDN 1 BANA, TULUNG	1 UNIT	150.000.000	BANKEU PROV		1 UNIT	150.000.000	BANKEU PROV
		Pembangunan Perpustakaan SD	SDN 1 MUNDU, TULUNG	1 UNIT	150.000.000	BANKEU PROV		1 UNIT	150.000.000	BANKEU PROV
		Pembangunan Perpustakaan SD	SDN KADILANGGON, WEDI	1 UNIT	150.000.000	BANKEU PROV		1 UNIT	150.000.000	BANKEU PROV
		Pembangunan Gedung Perpustakaan SDN II Ngandong	Ngandong RT 03 RW 02 Ngandong	1 Unit	200.000.000	APBD		0		BANKEU PROV
		Pembangunan ruang perpustakaan SD	SD N 1 Somopuro	1 unit	50.000.000	APBD		0		BANKEU PROV
1.01 - 1.1.0101 - 16.14	Pembangunan sarana air bersih dan sanitary	Peningkatan Sarpras Sanitasi SD	SDN BOGEM, BAYAT	1 UNIT	20.000.000	APBD		1 UNIT	20.000.000	APBD
		Peningkatan Sarpras Sanitasi SD	SDN 3 NGERANGAN, BAYAT	1 UNIT	20.000.000	APBD		1 UNIT	20.000.000	APBD
		Peningkatan Sarpras Sanitasi SD	SDN 1 POGUNG, CAWAS	1 UNIT	20.000.000	APBD		1 UNIT	20.000.000	APBD

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Peningkatan Sarpras Sanitasi SD	SDN 1 GOMBANG, CAWAS	1 UNIT	20.000.000	APBD		1 UNIT	20.000.000	APBD
		Peningkatan Sarpras Sanitasi SD	SDN 1 JAMBUKULON, CEPER	1 UNIT	20.000.000	APBD		1 UNIT	20.000.000	APBD
		Peningkatan Sarpras Sanitasi SD	SDN 1 POKAK, CEPER	1 UNIT	20.000.000	APBD		1 UNIT	20.000.000	APBD
		Peningkatan Sarpras Sanitasi SD	SDN 1 GATAK, DELANGGU	100 UNIT	20.000.000	APBD		1 UNIT	20.000.000	APBD
		Peningkatan Sarpras Sanitasi SD	SDN 1 DELANGGU, DELANGGU	1 UNIT	20.000.000	APBD		1 UNIT	20.000.000	APBD
		Peningkatan Sarpras Sanitasi SD	SDN GESIKAN, GANTIWARNO	1 UNIT	20.000.000	APBD		1 UNIT	20.000.000	APBD
		Peningkatan Sarpras Sanitasi SD	SDN 1 NGANDONG, GANTIWARNO	1 UNIT	20.000.000	APBD		1 UNIT	20.000.000	APBD
		Peningkatan Sarpras Sanitasi SD	SDN 2 GEDAREN, JATINOM	1 UNIT	20.000.000	APBD		1 UNIT	20.000.000	APBD
		Peningkatan Sarpras Sanitasi SD	SDN 1 BONYOKAN, JATINOM	1 UNIT	20.000.000	APBD		1 UNIT	20.000.000	APBD
		Peningkatan Sarpras Sanitasi SD	SDN PRAWATAN, JOGONALAN	1 UNIT	20.000.000	APBD		1 UNIT	20.000.000	APBD
		Peningkatan Sarpras Sanitasi SD	SDN PAKAHAN, JOGONALAN	1 UNIT	20.000.000	APBD		1 UNIT	20.000.000	APBD
		Peningkatan Sarpras Sanitasi SD	SDN 2 CARIKAN, JUWIRING	1 UNIT	20.000.000	APBD		1 UNIT	20.000.000	APBD
		Peningkatan Sarpras Sanitasi SD	SDN 1 SAWAHAN, JUWIRING	1 UNIT	20.000.000	APBD		1 UNIT	20.000.000	APBD
		Peningkatan Sarpras Sanitasi SD	SDN 1 KRAJAN, KALIKOTES	1 UNIT	20.000.000	APBD		1 UNIT	20.000.000	APBD
		Peningkatan Sarpras Sanitasi SD	SDN 1 GEMBLEGAN, KALIKOTES	1 UNIT	20.000.000	APBD		1 UNIT	20.000.000	APBD
		Peningkatan Sarpras Sanitasi SD	SDN 1 TROSO, KARANGANOM	1 UNIT	20.000.000	APBD		1 UNIT	20.000.000	APBD
		Peningkatan Sarpras Sanitasi SD	SDN 1 KADIREJO, KARANGANOM	1 UNIT	20.000.000	APBD		1 UNIT	20.000.000	APBD
		Peningkatan Sarpras Sanitasi SD	SDN 1 MUNGUNG, KARANGDOWO	1 UNIT	20.000.000	APBD		1 UNIT	20.000.000	APBD
		Peningkatan Sarpras Sanitasi SD	SDN 2 KUPANG, KARANGDOWO	1 UNIT	20.000.000	APBD		1 UNIT	20.000.000	APBD

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Peningkatan Sarpras Sanitasi SD	SDN 2 BLIMBING, KARANGNONGKO	1 UNIT	20.000.000	APBD		1 UNIT	20.000.000	APBD
		Peningkatan Sarpras Sanitasi SD	SDN 1 SOMOKATON, KARANGNONGKO	1 UNIT	20.000.000	APBD		1 UNIT	20.000.000	APBD
		Peningkatan Sarpras Sanitasi SD	SDN 1 MALANGJIWAN, KEBONARUM	1 UNIT	20.000.000	APBD		1 UNIT	20.000.000	APBD
		Peningkatan Sarpras Sanitasi SD	SDN 1 KARANGDUREN, KEBONARUM	1 UNIT	20.000.000	BANKEU PROV		1 UNIT	20.000.000	BANKEU PROV
		Peningkatan Sarpras Sanitasi SD	SDN 1 KENDALSARI, KEMALANG	1 UNIT	20.000.000	BANKEU PROV		1 UNIT	20.000.000	BANKEU PROV
		Peningkatan Sarpras Sanitasi SD	SDN 3 TLOGOWATU, KEMALANG	1 UNIT	20.000.000	BANKEU PROV		1 UNIT	20.000.000	BANKEU PROV
		Peningkatan Sarpras Sanitasi SD	SDN 1 NGLINGGI, KLATEN SELATAN	1 UNIT	20.000.000	BANKEU PROV		1 UNIT	20.000.000	BANKEU PROV
		Peningkatan Sarpras Sanitasi SD	SDN 2 MOJAYAN, KLATEN TENGAH	1 UNIT	20.000.000	BANKEU PROV		1 UNIT	20.000.000	BANKEU PROV
		Peningkatan Sarpras Sanitasi SD	SDN 1 JEBUGAN, KLATEN UTARA	1 UNIT	20.000.000	BANKEU PROV		1 UNIT	20.000.000	BANKEU PROV
		Peningkatan Sarpras Sanitasi SD	SDN 2 GERGUNUNG, KLATEN UTARA	1 UNIT	20.000.000	BANKEU PROV		1 UNIT	20.000.000	BANKEU PROV
		Peningkatan Sarpras Sanitasi SD	SDN KRANGGAN, MANISRENGGO	1 UNIT	20.000.000	BANKEU PROV		1 UNIT	20.000.000	BANKEU PROV
		Peningkatan Sarpras Sanitasi SD	SDN 2 TIJAYAN, MANISRENGGO	1 UNIT	20.000.000	BANKEU PROV		1 UNIT	20.000.000	BANKEU PROV
		Peningkatan Sarpras Sanitasi SD	SDN 1 DUWET, NGAWEN	1 UNIT	20.000.000	BANKEU PROV		1 UNIT	20.000.000	BANKEU PROV
		Peningkatan Sarpras Sanitasi SD	SDN 1 MANJUNG, NGAWEN	1 UNIT	20.000.000	BANKEU PROV		1 UNIT	20.000.000	BANKEU PROV
		Peningkatan Sarpras Sanitasi SD	SDN 3 KEDEN, PEDAN	1 UNIT	20.000.000	BANKEU PROV		1 UNIT	20.000.000	BANKEU PROV

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Peningkatan Sarpras Sanitasi SD	SDN 1 SOBAYAN, PEDAN	1 UNIT	20.000.000	BANKEU PROV		1 UNIT	20.000.000	BANKEU PROV
		Peningkatan Sarpras Sanitasi SD	SDN 1 KARANGLO, POLANHARJO	1 UNIT	20.000.000	BANKEU PROV		1 UNIT	20.000.000	BANKEU PROV
		Peningkatan Sarpras Sanitasi SD	SDN KEBONHARJO, POLANHARJO	1 UNIT	20.000.000	BANKEU PROV		1 UNIT	20.000.000	BANKEU PROV
		Peningkatan Sarpras Sanitasi SD	SDN 2 TAJI, PRAMBANAN	1 UNIT	20.000.000	BANKEU PROV		1 UNIT	20.000.000	BANKEU PROV
		Peningkatan Sarpras Sanitasi SD	SDN 1 SENGON, PRAMBANAN	1 UNIT	20.000.000	BANKEU PROV		1 UNIT	20.000.000	BANKEU PROV
		Peningkatan Sarpras Sanitasi SD	SDN 2 SUMBER, TRUCUK	1 UNIT	20.000.000	BANKEU PROV		1 UNIT	20.000.000	BANKEU PROV
		Peningkatan Sarpras Sanitasi SD	SDN 1 JATIPURO, TRUCUK	1 UNIT	20.000.000	BANKEU PROV		1 UNIT	20.000.000	BANKEU PROV
		Peningkatan Sarpras Sanitasi SD	SDN 2 MAJEGAN, TULUNG	1 UNIT	20.000.000	BANKEU PROV		1 UNIT	20.000.000	BANKEU PROV
		Peningkatan Sarpras Sanitasi SD	SDN 1 COKRO, TULUNG	1 UNIT	20.000.000	BANKEU PROV		1 UNIT	20.000.000	BANKEU PROV
		Peningkatan Sarpras Sanitasi SD	SDN KARANG, WEDI	1 UNIT	20.000.000	BANKEU PROV		1 UNIT	20.000.000	BANKEU PROV
		Peningkatan Sarpras Sanitasi SD	SDN 1 DENGKENG, WEDI	1 UNIT	20.000.000	BANKEU PROV		1 UNIT	20.000.000	BANKEU PROV
		Peningkatan Sarpras Sanitasi SD	SDN 1 SIDOWARNO, WONOSARI	1 UNIT	20.000.000	BANKEU PROV		1 UNIT	20.000.000	BANKEU PROV
		Peningkatan Sarpras Sanitasi SD	SDN 1 WADUNGGETA S, WONOSARI	1 UNIT	20.000.000	BANKEU PROV		1 UNIT	20.000.000	BANKEU PROV
		Pembangunan Jamban Siswa dan Guru SMP beserta Sanitasi	SMPN 3 GANTIWARNO	1 Paket	75.000.000	DAK		0		
		Pembangunan Jamban Siswa dan Guru SMP beserta Sanitasi	SMPN 2 MANISRENGGO	1 Paket	75.000.000	DAK		0		
		Pembangunan Jamban Siswa dan Guru SMP beserta Sanitasi	SMPN 2 WEDI	1 Paket	75.000.000	DAK		0		
		Pembangunan Jamban Siswa dan Guru SMP beserta Sanitasi	SMPN 2 JATINOM	1 Paket	75.000.000	DAK		0		
		Pembangunan Jamban Siswa dan Guru SMP beserta Sanitasi	SMPN 3 JATINOM	1 Paket	75.000.000	DAK		0		
		Pembangunan Jamban Siswa dan Guru SMP beserta Sanitasi	SMPN 2 DELANGGU	1 Paket	75.000.000	DAK		0		
		Pembangunan Jamban Siswa dan Guru SMP beserta Sanitasi	SMPN 2 PEDAN	1 Paket	75.000.000	DAK		0		
			KARANGDOWO							

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Pembangunan Jamban Siswa dan Guru SMP beserta Sanitasi	SMPN 3 KLATEN	1 Paket	75.000.000	DAK		0		
		Pembangunan Jamban Siswa dan Guru SMP beserta Sanitasi	SMPN 2 PEDAN	1 Paket	75.000.000	DAK		0		
		Pembangunan Jamban Siswa dan Guru SMP beserta Sanitasi	SMPN 2 BAYAT	1 Paket	75.000.000	DAK		0		
		Pembangunan Sanitasi Sekolah (Kamar Mandi dan Jamban) SDN Leses Manisrenggo	Leses	1 Paket	10.000.000	APBD		0		
		Pembuatan Sanitasi SD N 1 Demakijo	- RT - RW - Demakijo	2 unit	25.000.000	APBD		0		
		Pembangunan MCK Siswa	SMPN 1 Prambanan, Desa Sanggrahan	2 unit	20.000.000	APBD		0		
		Pembangunan Kamar mandi WC	SLTP N 1 Jogonalan	2 unit	20.000.000	APBD		0		
1.01 - 1.1.0101 - 16.15	Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa				4.170.000.000				3.483.000.000	
		Pengadaan Buku Perpustakaan SD	SDN BOGEM, BAYAT	1 PAKET	30.000.000	BANKEU PROV		1 PAKET	33.000.000	BANKEU PROV
		Pengadaan Buku Perpustakaan SD	SDN NENGAHAN, BAYAT	1 PAKET	30.000.000	BANKEU PROV		1 PAKET	33.000.000	BANKEU PROV
		Pengadaan Buku Perpustakaan SD	SDN 2 KEBON, BAYAT	1 PAKET	30.000.000	BANKEU PROV		1 PAKET	33.000.000	BANKEU PROV
		Pengadaan Buku Perpustakaan SD	SDN 2 TEGALREJO, BAYAT	1 PAKET	30.000.000	BANKEU PROV		1 PAKET	33.000.000	BANKEU PROV
		Pengadaan Buku Perpustakaan SD	SDN 1 JARUM, BAYAT	1 PAKET	30.000.000	BANKEU PROV		1 PAKET	33.000.000	BANKEU PROV
		Pengadaan Buku Perpustakaan SD	SDN 2 JARUM, BAYAT	1 PAKET	30.000.000	BANKEU PROV		1 PAKET	33.000.000	BANKEU PROV
		Pengadaan Buku Perpustakaan SD	SDN 1 BELUK, BAYAT	1 PAKET	30.000.000	BANKEU PROV		1 PAKET	33.000.000	BANKEU PROV
		Pengadaan Buku Perpustakaan SD	SDN 1 BANYURIPAN, BAYAT	1 PAKET	30.000.000	BANKEU PROV		1 PAKET	33.000.000	BANKEU PROV
		Pengadaan Buku Perpustakaan SD	SDN 1 JAPANAN, CAWAS	1 PAKET	30.000.000	BANKEU PROV		1 PAKET	33.000.000	BANKEU PROV
		Pengadaan Buku Perpustakaan SD	SDN 2 JAPANAN, CAWAS	1 PAKET	30.000.000	BANKEU PROV		1 PAKET	33.000.000	BANKEU PROV
		Pengadaan Buku Perpustakaan SD	SDN 1 NANGGULAN, CAWAS	1 PAKET	30.000.000	BANKEU PROV		1 PAKET	33.000.000	BANKEU PROV
		Pengadaan Buku Perpustakaan SD	SDN 3 PAKISARI, CAWAS	1 PAKET	30.000.000	BANKEU PROV		1 PAKET	33.000.000	BANKEU PROV



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Pengadaan Buku Perpustakaan SD	SDN 2 KARANGASEM, CAWAS	1 PAKET	30.000.000	BANKEU PROV		1 PAKET	33.000.000	BANKEU PROV
		Pengadaan Buku Perpustakaan SD	SDN 2 TUGU, CAWAS	1 PAKET	30.000.000	BANKEU PROV		1 PAKET	33.000.000	BANKEU PROV
		Pengadaan Buku Perpustakaan SD	SDN 2 BAREPAN, CAWAS	1 PAKET	30.000.000	BANKEU PROV		1 PAKET	33.000.000	BANKEU PROV
		Pengadaan Buku Perpustakaan SD	SDN 1 TUGU, CAWAS	1 PAKET	30.000.000	BANKEU PROV		1 PAKET	33.000.000	BANKEU PROV
		Pengadaan Buku Perpustakaan SD	SDN 1 GOMBANG, CAWAS	1 PAKET	30.000.000	BANKEU PROV		1 PAKET	33.000.000	BANKEU PROV
		Pengadaan Buku Perpustakaan SD	SDN 2 KEDUNGAMPEL, CAWAS	1 PAKET	30.000.000	BANKEU PROV		1 PAKET	33.000.000	BANKEU PROV
		Pengadaan Buku Perpustakaan SD	SDN 1 JAMBUKULON, CEPER	1 PAKET	30.000.000	BANKEU PROV		1 PAKET	33.000.000	BANKEU PROV
		Pengadaan Buku Perpustakaan SD	SDN 1 SEGARAN, DELANGGU	1 PAKET	30.000.000	BANKEU PROV		1 PAKET	33.000.000	BANKEU PROV
		Pengadaan Buku Perpustakaan SD	SDN 2 BOWAN, DELANGGU	1 PAKET	30.000.000	BANKEU PROV		1 PAKET	33.000.000	BANKEU PROV
		Pengadaan Buku Perpustakaan SD	SDN 2 GATAK, DELANGGU	1 PAKET	30.000.000	BANKEU PROV		1 PAKET	33.000.000	BANKEU PROV
		Pengadaan Buku Perpustakaan SD	SDN 2 KEPANJEN, DELANGGU	1 PAKET	30.000.000	BANKEU PROV		1 PAKET	33.000.000	BANKEU PROV
		Pengadaan Buku Perpustakaan SD	SDN 1 SIDOMULYO, DELANGGU	1 PAKET	30.000.000	BANKEU PROV		1 PAKET	33.000.000	BANKEU PROV
		Pengadaan Buku Perpustakaan SD	SDN 6 DELANGGU, DELANGGU	1 PAKET	30.000.000	BANKEU PROV		1 PAKET	33.000.000	BANKEU PROV
		Pengadaan Buku Perpustakaan SD	SDN 2 TLOBONG, DELANGGU	1 PAKET	30.000.000	BANKEU PROV		1 PAKET	33.000.000	BANKEU PROV
		Pengadaan Buku Perpustakaan SD	SDN 2 SRIBIT, DELANGGU	1 PAKET	30.000.000	BANKEU PROV		1 PAKET	33.000.000	BANKEU PROV
		Pengadaan Buku Perpustakaan SD	SDN 1 MENDAK, DELANGGU	1 PAKET	30.000.000	BANKEU PROV		1 PAKET	33.000.000	BANKEU PROV
		Pengadaan Buku Perpustakaan SD	SDN 1 TLOBONG, DELANGGU	1 PAKET	30.000.000	BANKEU PROV		1 PAKET	33.000.000	BANKEU PROV
		Pengadaan Buku Perpustakaan SD	SDN 2 BANDUNGAN, JATINOM	1 PAKET	30.000.000	BANKEU PROV		1 PAKET	33.000.000	BANKEU PROV

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Pengadaan Buku Perpustakaan SD	SDN 1 TEMUIRENG, JATNIOM	1 PAKET	30.000.000	BANKEU PROV		1 PAKET	33.000.000	BANKEU PROV
		Pengadaan Buku Perpustakaan SD	SDN 2 TIBAYAN, JATINOM	1 PAKET	30.000.000	BANKEU PROV		1 PAKET	33.000.000	BANKEU PROV
		Pengadaan Buku Perpustakaan SD	SDN 2 REJOSO, JOGONALAN	1 PAKET	30.000.000	BANKEU PROV		1 PAKET	33.000.000	BANKEU PROV
		Pengadaan Buku Perpustakaan SD	SDN 1 REJOSO, JOGONALAN	1 PAKET	30.000.000	BANKEU PROV		1 PAKET	33.000.000	BANKEU PROV
		Pengadaan Buku Perpustakaan SD	SDN 3 TAMBAKAN, JOGONALAN	1 PAKET	30.000.000	BANKEU PROV		1 PAKET	33.000.000	BANKEU PROV
		Pengadaan Buku Perpustakaan SD	SDN SUMYANG, JOGONALAN	1 PAKET	30.000.000	BANKEU PROV		1 PAKET	33.000.000	BANKEU PROV
		Pengadaan Buku Perpustakaan SD	SDN 1 TLOGORANDU, JUWIRING	1 PAKET	30.000.000	BANKEU PROV		1 PAKET	33.000.000	BANKEU PROV
		Pengadaan Buku Perpustakaan SD	SDN 1 TERASAN, JUWIIRNG	1 PAKET	30.000.000	BANKEU PROV		1 PAKET	33.000.000	BANKEU PROV
		Pengadaan Buku Perpustakaan SD	SDN 2 JATEN, JUWIRING	1 PAKET	30.000.000	BANKEU PROV		1 PAKET	33.000.000	BANKEU PROV
		Pengadaan Buku Mulok Bahasa Jawa SD	SDN 1 TALUN, KEMALANG	1 paket	10.000.000	BANKEU PROV		1 paket	10.000.000	BANKEU PROV
		Pengadaan Buku Perpustakaan SD	SDN 2 TANJUNG, JUWIIRNG	1 PAKET	30.000.000	BANKEU PROV		1 PAKET	33.000.000	BANKEU PROV
		Pengadaan Buku Perpustakaan SD	SDN 1 GONDANGSARI, JUWIRING	1 PAKET	30.000.000	BANKEU PROV		1 PAKET	33.000.000	BANKEU PROV
		Pengadaan Buku Perpustakaan SD	SDN 4 JIMBUNG, KALIKOTES	1 PAKET	30.000.000	BANKEU PROV		1 PAKET	33.000.000	BANKEU PROV
		Pengadaan Buku Perpustakaan SD	SDN 3 JOGOSETRAN, KALIKOTES	1 PAKET	30.000.000	BANKEU PROV		1 PAKET	33.000.000	BANKEU PROV
		Pengadaan Buku Perpustakaan SD	SDN 2 KALIKOTES, KALIKOTES	1 PAKET	30.000.000	BANKEU PROV		1 PAKET	33.000.000	BANKEU PROV
		Pengadaan Buku Perpustakaan SD	SDN PONDOK, KARANGANOM	1 PAKET	30.000.000	BANKEU PROV		1 PAKET	33.000.000	BANKEU PROV
		Pengadaan Buku Perpustakaan SD	SDN 1 JURANGJERO, KARANGANOM	1 PAKET	30.000.000	BANKEU PROV		1 PAKET	33.000.000	BANKEU PROV
		Pengadaan Buku Perpustakaan SD	SDN 2 RINGINPUTIH, KARANGDOWO	1 PAKET	30.000.000	BANKEU PROV		1 PAKET	33.000.000	BANKEU PROV

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Pengadaan Buku Perpustakaan SD	SDN 3 MUNGUNG, KARANGDOWO	1 PAKET	30.000.000	BANKEU PROV		1 PAKET	33.000.000	BANKEU PROV
		Pengadaan Buku Perpustakaan SD	SDN 2 PUGERAN, KARANGDOWO	1 PAKET	30.000.000	BANKEU PROV		1 PAKET	33.000.000	BANKEU PROV
		Pengadaan Buku Perpustakaan SD	SDN 1 SENTONO, KARANGDOWO	1 PAKET	30.000.000	BANKEU PROV		1 PAKET	33.000.000	BANKEU PROV
		Pengadaan Buku Perpustakaan SD	SDN 1 BABADAN, KARANGDOWO	1 PAKET	30.000.000	DAK		1 PAKET	33.000.000	DAK
		Pengadaan Buku Mulok Bahasa Jawa SD	SDN 2 DLIMAS, CEPER	1 paket	10.000.000	BANKEU PROV		1 paket	10.000.000	BANKEU PROV
		Pengadaan Buku Mulok Bahasa Jawa SD	SDN 1 MENDAK, DELANGGU	1 paket	10.000.000	BANKEU PROV		1 P	10.000.000	BANKEU PROV
		Pengadaan Buku Mulok Bahasa Jawa SD	SDN 3 KALIKOTES, KALIKOTES	1 paket	10.000.000	BANKEU PROV		1 paket	10.000.000	BANKEU PROV
		Pengadaan Buku Mulok Bahasa Jawa SD	SDN 1 PLUNENG, KEBONARUM	1 paket	10.000.000	BANKEU PROV		1 paket	10.000.000	BANKEU PROV
		Pengadaan Buku Mulok Bahasa Jawa SD	SDN 2 PASUNG, WEDI	1 paket	10.000.000	BANKEU PROV		1 paket	10.000.000	BANKEU PROV
		Pengadaan Buku Mulok Bahasa Jawa SD	SDN 2 KARANGANOM, KARANGANOM	1 paket	10.000.000	BANKEU PROV		1 paket	10.000.000	BANKEU PROV
		Pengadaan Buku Mulok Bahasa Jawa SD	SDN 2 BANDUNGAN, JATINOM	1 paket	10.000.000	BANKEU PROV		1 paket	10.000.000	BANKEU PROV
		Pengadaan Buku Mulok Bahasa Jawa SD	SDN 2 MANDONG, TRUCUK	1 paket	10.000.000	BANKEU PROV		1 paket	10.000.000	BANKEU PROV
		Pengadaan Buku Mulok Bahasa Jawa SD	SDN 1 JEMAWAN, JATINOM	1 paket	10.000.000	BANKEU PROV		1 paket	10.000.000	BANKEU PROV
		Pengadaan Buku Mulok Bahasa Jawa SD	SDN 3 KUNCEN, CEPER	1 paket	10.000.000	BANKEU PROV		1 paket	10.000.000	BANKEU PROV
		Pengadaan Buku Mulok Bahasa Jawa SD	SDN 3 PUNDUNGSARI, TRUCUK	1 paket	10.000.000	BANKEU PROV		1 paket	10.000.000	BANKEU PROV
		Pengadaan Buku Mulok Bahasa Jawa SD	SDN 3 PASEBAN, BAYAT	1 paket	10.000.000	BANKEU PROV		1 paket	10.000.000	BANKEU PROV
		Pengadaan Buku Mulok Bahasa Jawa SD	SDN 1 BAWUKAN, KEMALANG	1 paket	1.000.000.000	BANKEU PROV		1 paket	10.000.000	BANKEU PROV
		Pengadaan Buku Mulok Bahasa Jawa SD	SDN 2 BENGKING, JATINOM	1 paket	10.000.000	BANKEU PROV		1 paket	10.000.000	BANKEU PROV

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Pengadaan Buku Perpustakaan SD	SDN SOKA, KARANGDOWO	1 PAKET	30.000.000	DAK		1 PAKET	33.000.000	DAK
		Pengadaan Buku Perpustakaan SD	SDN NGEMPLAK, KARANGNONG KO	1 PAKET	30.000.000	DAK		1 PAKET	33.000.000	DAK
		Pengadaan Buku Perpustakaan SD	SDN JETIS, KARANGNONG KO	1 PAKET	30.000.000	DAK		1 PAKET	33.000.000	DAK
		Pengadaan Buku Perpustakaan SD	SDN 2 LOGEDE, KARANGNONG KO	1 PAKET	30.000.000	DAK		1 PAKET	33.000.000	DAK
		Pengadaan Buku Perpustakaan SD	SDN 1 MALANGJIWAN, KEBONARUM	1 PAKET	30.000.000	DAK		1 PAKET	33.000.000	DAK
		Pengadaan Buku Perpustakaan SD	SDN 1 GONDANG, KEBONARUM	1 PAKET	30.000.000	DAK		1 PAKET	33.000.000	DAK
		Pengadaan Buku Perpustakaan SD	SDN 1 GONDANG, KEBONARUM	1 PAKET	30.000.000	DAK		1 PAKET	33.000.000	DAK
		Pengadaan Buku Perpustakaan SD	SDN BASIN, KEBONARUM	1 PAKET	30.000.000	DAK		1 PAKET	33.000.000	DAK
		Pengadaan Buku Perpustakaan SD	SDN 1 KARANGDUREN, KEBONARUM	1 PAKET	30.000.000	DAK		1 PAKET	33.000.000	DAK
		Pengadaan Buku Perpustakaan SD	SDN DOMPOL, KEMALANG	1 PAKET	30.000.000	DAK		1 PAKET	33.000.000	DAK
		Pengadaan Buku Perpustakaan SD	SDN 1 KENDALSARI, KEMALANG	1 PAKET	30.000.000	DAK		1 PAKET	33.000.000	DAK
		Pengadaan Buku Perpustakaan SD	SDN 1 PANGGANG, KEMALANG	1 PAKET	30.000.000	DAK		1 PAKET	33.000.000	DAK
		Pengadaan Buku Perpustakaan SD	SDN 1 BUMIHARJO, KEMALANG	1 PAKET	30.000.000	DAK		1 PAKET	33.000.000	DAK
		Pengadaan Buku Perpustakaan SD	SDN 2 NGALAS, KLATEN SELATAN	1 PAKET	30.000.000	DAK		1 PAKET	33.000.000	DAK
		Pengadaan Buku Perpustakaan SD	SDN 1 GLODOGAN, KLATEN SELATAN	1 PAKET	30.000.000	DAK		1 PAKET	33.000.000	DAK
		Pengadaan Buku Perpustakaan SD	SDN KABUPATEN, KLATEN TENGAH	1 PAKET	30.000.000	DAK		1 PAKET	33.000.000	DAK

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Pengadaan Buku Perpustakaan SD	SDN 1 BARENG, KLATEN TENGAH	1 PAKET	30.000.000	DAK		1 PAKET	33.000.000	DAK
		Pengadaan Buku Perpustakaan SD	SDN 1 KLATEN, KLATEN TENGAH	1 PAKET	30.000.000	DAK		1 PAKET	33.000.000	DAK
		Pengadaan Buku Perpustakaan SD	SDN 1 BORANGAN, MANISRENGGO	1 PAKET	30.000.000	DAK		1 PAKET	33.000.000	DAK
		Pengadaan Buku Perpustakaan SD	SDN 2 LESES, MANISRENGGO	1 PAKET	30.000.000	DAK		1 PAKET	33.000.000	DAK
		Pengadaan Buku Perpustakaan SD	SDN 2 SOLODIRAN, MANISRENGGO	1 PAKET	30.000.000	DAK		1 PAKET	33.000.000	DAK
		Pengadaan Buku Perpustakaan SD	SDN 2 CANDIREJO, NGAWEN	1 PAKET	30.000.000	DAK		1 PAKET	33.000.000	DAK
		Pengadaan Buku Perpustakaan SD	SDN 3 DRONO, NGAWEN	1 PAKET	30.000.000	DAK		1 PAKET	33.000.000	DAK
		Pengadaan Buku Perpustakaan SD	SDN 1 JETISWETAN, PEDAN	1 PAKET	30.000.000	DAK		1 PAKET	33.000.000	DAK
		Pengadaan Buku Perpustakaan SD	SDN 1 KEDEN, PEDAN	1 PAKET	30.000.000	DAK		1 PAKET	33.000.000	DAK
		Pengadaan Buku Perpustakaan SD	SDN JANTI, POLANHARJO	1 PAKET	30.000.000	DAK		1 PAKET	33.000.000	DAK
		Pengadaan Buku Perpustakaan SD	SDN 1 KAHUMAN, POLANHARJO	1 PAKET	30.000.000	DAK		1 PAKET	33.000.000	DAK
		Pengadaan Buku Perpustakaan SD	SDN 2 POLAN, POLANHARJO	1 PAKET	30.000.000	DAK		1 PAKET	33.000.000	DAK
		Pengadaan Buku Perpustakaan SD	SDN TURUS, POLANHARJO	1 PAKET	30.000.000	DAK		1 PAKET	33.000.000	DAK
		Pengadaan Buku Perpustakaan SD	SDN 1 KEBONDALEM KIDUL, PRAMBANAN	1 PAKET	30.000.000	DAK		1 PAKET	33.000.000	DAK
		Pengadaan Buku Perpustakaan SD	SDN 2 SANGGRAHAN, PRAMBANAN	1 PAKET	30.000.000	DAK		1 PAKET	33.000.000	DAK
		Pengadaan Buku Perpustakaan SD	SDN 1 TAJI, PRAMBANAN	1 PAKET	30.000.000	DAK		1 PAKET	33.000.000	DAK
		Pengadaan Buku Perpustakaan SD	SDN 2 KEBONDALEM KIDUL, PRAMBANAN	1 PAKET	30.000.000	DAK		1 PAKET	33.000.000	DAK

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Pengadaan Buku Perpustakaan SD	SDN 1 WONOSARI, TRUCUK	1 PAKET	30.000.000	DAK		1 PAKET	33.000.000	DAK
		Pengadaan Buku Perpustakaan SD	SDN 2 PULUHAN, TRUCUK	1 PAKET	30.000.000	DAK		1 PAKET	33.000.000	DAK
		Pengadaan Buku Perpustakaan SD	SDN 2 WANGLU, TRUCUK	1 PAKET	30.000.000	DAK		1 PAKET	33.000.000	DAK
		Pengadaan Buku Perpustakaan SD	SDN 1 SABRANGLOR, TRUCUK	1 PAKET	30.000.000	DAK		1 PAKET	33.000.000	DAK
		Pengadaan Buku Perpustakaan SD	SDN 3 GADEN, TRUCUK	1 PAKET	30.000.000	DAK		1 PAKET	33.000.000	DAK
		Pengadaan Buku Perpustakaan SD	SDN 1 KIRINGAN, TULUNG	1 PAKET	30.000.000	DAK		1 PAKET	33.000.000	DAK
		Pengadaan Buku Perpustakaan SD	SDN 1 KALITENGAH, WEDI	1 PAKET	30.000.000	DAK		1 PAKET	33.000.000	DAK
		Pengadaan Buku Perpustakaan SD	SDN 1 KADILANGGON, WEDI	1 PAKET	30.000.000	DAK		1 PAKET	33.000.000	DAK
		Pengadaan Buku Perpustakaan SD	SDN PACING, WEDI	1 PAKET	30.000.000	DAK		1 PAKET	33.000.000	DAK
		Pengadaan Buku Perpustakaan SD	SDN 3 KINGKANG, WONOSARI	1 PAKET	30.000.000	DAK		1 PAKET	33.000.000	DAK
		Pengadaan Buku Perpustakaan SD	SDN 3 BENTANGAN, WONOSARI	1 PAKET	30.000.000	DAK		1 PAKET	33.000.000	DAK
		Pengadaan Buku Perpustakaan SD	SDN 2 BULAN, WONOSARI	1 PAKET	30.000.000	DAK		1 P	33.000.000	DAK
		Pengadaan Buku Perpustakaan SD	SDN 2 BENTANGAN, WONOSARI	1 PAKET	30.000.000	DAK		1 PAKET	33.000.000	DAK
		Pengadaan Buku Perpustakaan SD	SDN 3 TELOYO, WONOSARI	1 PAKET	30.000.000	DAK		1 PAKET	33.000.000	DAK
		Pengadaan Buku Perpustakaan SD	SDN 3 TEGALGONDO, WONOSARI	1 PAKET	30.000.000	DAK		1 PAKET	33.000.000	DAK
		Pengadaan Buku Perpustakaan SD	SDN 2 GUNTING, WONOSARI	1 PAKET	30.000.000	DAK		17 PAKET	33.000.000	DAK
		Pengadaan Buku Perpustakaan SD	SDN 1 TELOYO, WONOSARI	1 PAKET	30.000.000	DAK		1 PAKET	33.000.000	DAK
1.01 - 1.1.0101 - 16.18	Pengadaan alat praktik dan peraga siswa	PENGADAAN ALAT PERAGA MATEMATIKA DAN BAHASA SD BERBASIS EDUTAINMENT	SDN BOGEM, BAYAT	1 PAKET	1.527.826.000	APBD		1 PAKET	780.000.000	APBD
					30.000.000	APBD		1 PAKET	30.000.000	APBD

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		PENGADAAN ALAT PERAGA MATEMATIKA DAN BAHASA SD BERBASIS EDUTAINMENT	SDN 1 BAREPAN, CAWAS	1 PAKET	30.000.000	APBD		1 PAKET	30.000.000	APBD
		PENGADAAN ALAT PERAGA MATEMATIKA DAN BAHASA SD BERBASIS EDUTAINMENT	SDN 1 CEPER, CEPER	1 PAKET	30.000.000	APBD		1 PAKET	30.000.000	APBD
		PENGADAAN ALAT PERAGA MATEMATIKA DAN BAHASA SD BERBASIS EDUTAINMENT	SDN 1 BOWAN, DELANGGU	1 PAKET	30.000.000	APBD		1 PAKET	30.000.000	APBD
		PENGADAAN ALAT PERAGA MATEMATIKA DAN BAHASA SD BERBASIS EDUTAINMENT	SDN 1 BATURAN, GANTIWARNO	1 PAKET	30.000.000	APBD		1 PAKET	30.000.000	APBD
		PENGADAAN ALAT PERAGA MATEMATIKA DAN BAHASA SD BERBASIS EDUTAINMENT	SDN 1 BANDUNGAN, JATINOM	1 PAKET	30.000.000	APBD		1 PAKET	30.000.000	APBD
		PENGADAAN ALAT PERAGA MATEMATIKA DAN BAHASA SD BERBASIS EDUTAINMENT	SDN 1 BAKUNG, JOGONALAN	1 PAKET	30.000.000	APBD		1 PAKET	30.000.000	APBD
		PENGADAAN ALAT PERAGA MATEMATIKA DAN BAHASA SD BERBASIS EDUTAINMENT	SDN JUWIRING, JUWIRING	1 PAKET	30.000.000	APBD		1 PAKET	30.000.000	APBD
		PENGADAAN ALAT PERAGA MATEMATIKA DAN BAHASA SD BERBASIS EDUTAINMENT	SDN 1 GEMBLEGAN, KALIKOTES	1 PAKET	30.000.000	APBD		1 PAKET	30.000.000	APBD
		PENGADAAN ALAT PERAGA MATEMATIKA DAN BAHASA SD BERBASIS EDUTAINMENT	SDN 1 BRANGKAL, KARANGANOM	1 PAKET	30.000.000	APBD		1 PAKET	30.000.000	APBD
		PENGADAAN ALAT PERAGA MATEMATIKA DAN BAHASA SD BERBASIS EDUTAINMENT	SDN 1 BABADAN, KARANGDOWO	1 PAKET	30.000.000	APBD		1 PAKET	30.000.000	APBD
		PENGADAAN ALAT PERAGA MATEMATIKA DAN BAHASA SD BERBASIS EDUTAINMENT	SDN 1 BLIMBING, KARANGNONGKO	1 PAKET	30.000.000	APBD		1 PAKET	30.000.000	APBD
		PENGADAAN ALAT PERAGA MATEMATIKA DAN BAHASA SD BERBASIS EDUTAINMENT	SDN 1 GONDANG, KEBONARUM	1 PAKET	30.000.000	APBD		1 PAKET	30.000.000	APBD
		PENGADAAN ALAT PERAGA MATEMATIKA DAN BAHASA SD BERBASIS EDUTAINMENT	SDN 1 BALERANTE, KEMALANG	1 PAKET	30.000.000	APBD		1 PAKET	30.000.000	APBD
		PENGADAAN ALAT PERAGA MATEMATIKA DAN BAHASA SD BERBASIS EDUTAINMENT	SDN 1 GLODOGAN, KLATEN SELATAN	1 PAKET	30.000.000	APBD		1 PAKET	30.000.000	APBD
		PENGADAAN ALAT PERAGA MATEMATIKA DAN BAHASA SD BERBASIS EDUTAINMENT	SDN 3 KLATEN, KLATEN TENGAH	1 PAKET	30.000.000	APBD		1 PAKET	30.000.000	APBD
		PENGADAAN ALAT PERAGA MATEMATIKA DAN BAHASA SD BERBASIS EDUTAINMENT	SDN 1 GERGUNUNG, KLATEN UTARA	1 PAKET	30.000.000	APBD		1 PAKET	30.000.000	APBD

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		PENGADAAN ALAT PERAGA MATEMATIKA DAN BAHASA SD BERBASIS EDUTAINMENT	SDN 1 BARUKAN, MANISRENGGO	1 PAKET	30.000.000	APBD		1 PAKET	30.000.000	APBD
		PENGADAAN ALAT PERAGA MATEMATIKA DAN BAHASA SD BERBASIS EDUTAINMENT	SDN KAHUMAN, NGAWEN	1 PAKET	30.000.000	APBD		1 PAKET	30.000.000	APBD
		PENGADAAN ALAT PERAGA MATEMATIKA DAN BAHASA SD BERBASIS EDUTAINMENT	SDN 1 BENDO, PEDAN	1 PAKET	30.000.000	APBD		1 PAKET	30.000.000	APBD
		PENGADAAN ALAT PERAGA MATEMATIKA DAN BAHASA SD BERBASIS EDUTAINMENT	SDN 1 GLAGAHWANGI, POLANHARJO	1 PAKET	30.000.000	APBD		1 PAKET	30.000.000	APBD
		PENGADAAN ALAT PERAGA MATEMATIKA DAN BAHASA SD BERBASIS EDUTAINMENT	SDN 1 BRAJAN, PRAMBANAN	1 PAKET	30.000.000	APBD		1 PAKET	30.000.000	APBD
		PENGADAAN ALAT PERAGA MATEMATIKA DAN BAHASA SD BERBASIS EDUTAINMENT	SDN 1 GADEN, TRUCUK	1 PAKET	30.000.000	APBD		1 PAKET	30.000.000	APBD
		PENGADAAN ALAT PERAGA MATEMATIKA DAN BAHASA SD BERBASIS EDUTAINMENT	SDN 1 BANA, TULUNG	1 PAKET	30.000.000	APBD		1 PAKET	30.000.000	APBD
		PENGADAAN ALAT PERAGA MATEMATIKA DAN BAHASA SD BERBASIS EDUTAINMENT	SDN 2 CANAN, WEDI	1 PAKET	30.000.000	APBD		1 PAKET	30.000.000	APBD
		PENGADAAN ALAT PERAGA MATEMATIKA DAN BAHASA SD BERBASIS EDUTAINMENT	SDN 1 BENER, WONOSARI	1 PAKET	30.000.000	APBD		1 PAKET	30.000.000	APBD
		Pengadaan Alat Peraga Sekolah SMPN 2 Manisrenggo	Barukan	1 paket	250.000.000	APBD		0		APBD
		Pengadaan Komputer SD N 2 Jagalan	Gaden RT - RW - Jagalan	2 Unit	20.000.000	APBD		0		APBD
		Pengadaan Komputer	Tegalan RT 1 RW 2 Banyuaeng	1 Set	20.000.000	APBD		0		APBD
		Pengadaan Alat Lab Komputer	SMPN 2 Prambanan, Desa Pereng Sidowayah	1 paket	245.326.000	APBD		0		APBD
		Peningkatan Sarana Prasarana Pendidikan SMPN 2 Polanharjo		20 unit	100.000.000	APBD		0		APBD
		Pengadaan Komputer Siswa	SMPN 1 Prambanan, Desa Sanggrahan	45 unit	112.500.000	APBD		0		APBD
1.01 - 1.1.0101 - 16.19	Pengadaan mebeluer sekolah				3.180.000.000				1.980.000.000	
		Pengadaan Meubelair Sekolah SMP	SMPN 3 KLATEN	2 Paket	60.000.000	DAK		0		
		Pengadaan Meubelair Sekolah SMP	SMPN 6 KLATEN	2 Paket	60.000.000	DAK		0		



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Pengadaan Meubelair Sekolah SMP	SMPN 1 JATINOM	2 Paket	60.000.000	DAK		0		
		Pengadaan Meubelair Sekolah SMP	SMPN 3 JATINOM	2 Paket	60.000.000	DAK		0		
		Pengadaan Meubelair Sekolah SMP	SMPN 1 KALIKOTES	2 Paket	60.000.000	DAK		0		
		Pengadaan Meubelair Sekolah SMP	SMPN 7 KLATEN	2 Paket	60.000.000	DAK		0		
		Pengadaan Meubelair Sekolah SMP	SMPN 1 WONOSARI	2 Paket	60.000.000	DAK		0		
		Pengadaan Meubelair Sekolah SMP	SMPN 1 TRUCUK	2 Paket	60.000.000	DAK		0		
		Pengadaan Meubelair Sekolah SMP	SMPN 2 GANTIWARNO	2 Paket	60.000.000	DAK		0		
		Pengadaan Meubelair Sekolah SMP	SMPN 2 TULUNG	2 Paket	60.000.000	DAK		0		
		Pengadaan Meubelair Sekolah SMP	SMPN 2 PEDAN	2 Paket	60.000.000	DAK		0		
		Pengadaan Meubelair Sekolah SMP	SMPN 1 KARANGDOWO	2 Paket	60.000.000	DAK		0		
		Pengadaan Meubelair Sekolah SMP	SMPN 1 JUWIRING	2 Paket	60.000.000	DAK		0		
		Pengadaan Meubelair Sekolah SMP	SMPN 2 WEDI	2 Paket	60.000.000	DAK		0		
		Pengadaan Meubelair Sekolah SMP	SMPN 1 MANISRENGGO	2 Paket	60.000.000	DAK		0		
		Pengadaan Meubelair Sekolah SMP	SMPN 2 KARANGANOM	2 Paket	60.000.000	DAK		0		
		Pengadaan Meubelair Sekolah SMP	SMPN 3 CEPER	2 Paket	60.000.000	DAK		0		
		Pengadaan Meubelair Sekolah SMP	SMPN 3 TRUCUK	2 Paket	60.000.000	DAK		0		
		Pengadaan Meubelair Sekolah SMP	SMPN 1 KEBONARUM	2 Paket	60.000.000	DAK		0		
		Pengadaan Meubelair Sekolah SMP	SMPN 3 CAWAS	2 Paket	60.000.000	DAK		0		
		PENGADAAN MEUBELAIR PENGGANTI SD	SDN 2 BANYURIPAN, BAYAT	1 PAKET	20.000.000	BANKEU PROV		1 PAKET	20.000.000	BANKEU PROV
		PENGADAAN MEUBELAIR PENGGANTI SD	SDN 1 GUNUNGGAJA H, BAYAT	1 PAKET	20.000.000	BANKEU PROV		1 PAKET	20.000.000	BANKEU PROV
		PENGADAAN MEUBELAIR PENGGANTI SD	SDN 4 WIRO, BAYAT	1 PAKET	20.000.000	BANKEU PROV		1 PAKET	20.000.000	BANKEU PROV
		PENGADAAN MEUBELAIR PENGGANTI SD	SDN BOGEM, BAYAT	1 PAKET	20.000.000	BANKEU PROV		1 PAKET	20.000.000	BANKEU PROV
		PENGADAAN MEUBELAIR PENGGANTI SD	SDN 1 BAWAK, CAWAS	1 PAKET	20.000.000	BANKEU PROV		1 PAKET	20.000.000	BANKEU PROV
		PENGADAAN MEUBELAIR PENGGANTI SD	SDN 1 POGUNG, CAWAS	1 PAKET	20.000.000	BANKEU PROV		1 PAKET	20.000.000	BANKEU PROV

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		PENGADAAN MEUBELAIR PENGGANTI SD	SDN Bendungan, CAWAS	1 PAKET	20.000.000	BANKEU PROV		1 PAKET	20.000.000	BANKEU PROV
		PENGADAAN MEUBELAIR PENGGANTI SD	SDN 1 JAMBUKIDUL, CEPER	1 PAKET	20.000.000	BANKEU PROV		1 PAKET	20.000.000	BANKEU PROV
		PENGADAAN MEUBELAIR PENGGANTI SD	SDN 2 JAMBUKIDUL, CEPER	1 PAKET	20.000.000	BANKEU PROV		1 PAKET	20.000.000	BANKEU PROV
		PENGADAAN MEUBELAIR PENGGANTI SD	SDN 1 MEGER, CEPER	1 PAKET	20.000.000	BANKEU PROV		1 PAKET	20.000.000	BANKEU PROV
		PENGADAAN MEUBELAIR PENGGANTI SD	SDN 1 KLEPU, CPER	1 PAKET	20.000.000	BANKEU PROV		1 PAKET	20.000.000	BANKEU PROV
		PENGADAAN MEUBELAIR PENGGANTI SD	SDN 1 SRIBIT, DELANGGU	1 PAKET	20.000.000	BANKEU PROV		1 PAKET	20.000.000	BANKEU PROV
		PENGADAAN MEUBELAIR PENGGANTI SD	SDN 1 TLOBONG, DELANGGU	1 PAKET	20.000.000	BANKEU PROV		1 PAKET	20.000.000	BANKEU PROV
		PENGADAAN MEUBELAIR PENGGANTI SD	SDN 1 BOWAN, DELANGGU	1 PAKET	20.000.000	BANKEU PROV		1 PAKET	20.000.000	BANKEU PROV
		PENGADAAN MEUBELAIR PENGGANTI SD	SDN 1 JABUNG, GANTIWARNO	1 PAKET	20.000.000	BANKEU PROV		1 PAKET	20.000.000	BANKEU PROV
		PENGADAAN MEUBELAIR PENGGANTI SD	SDN 2 KATEKAN, GANTIWARNO	1 PAKET	20.000.000	BANKEU PROV		1 PAKET	20.000.000	BANKEU PROV
		PENGADAAN MEUBELAIR PENGGANTI SD	SDN 2 SAWIT, GANTIWARNO	1 PAKET	20.000.000	BANKEU PROV		1 PAKET	20.000.000	BANKEU PROV
		PENGADAAN MEUBELAIR PENGGANTI SD	SDN MUTIHAN, GANTIWARNO	1 PAKET	20.000.000	BANKEU PROV		1 PAKET	20.000.000	BANKEU PROV
		PENGADAAN MEUBELAIR PENGGANTI SD	SDN 1 NGANDONG, GANTIWARNO	1 PAKET	20.000.000	BANKEU PROV		1 P	20.000.000	BANKEU PROV
		PENGADAAN MEUBELAIR PENGGANTI SD	SDN KERTEN, GANTIWARNO	1 PAKET	20.000.000	BANKEU PROV		1 PAKET	20.000.000	BANKEU PROV
		PENGADAAN MEUBELAIR PENGGANTI SD	SDN 1 GLAGAH, JATINOM	1 PAKET	20.000.000	BANKEU PROV		1 PAKET	20.000.000	BANKEU PROV
		PENGADAAN MEUBELAIR PENGGANTI SD	SDN 1 KAYUMAS, JATINOM	1 PAKET	20.000.000	BANKEU PROV		1 PAKET	20.000.000	BANKEU PROV
		PENGADAAN MEUBELAIR PENGGANTI SD	SDN 1 TEMUIRENG, JATNIOM	1 PAKET	20.000.000	BANKEU PROV		1 PAKET	20.000.000	BANKEU PROV
		PENGADAAN MEUBELAIR PENGGANTI SD	SDN 1 TIBAYAN, JATINOM	1 PAKET	20.000.000	BANKEU PROV		1 PAKET	20.000.000	BANKEU PROV
		PENGADAAN MEUBELAIR PENGGANTI SD	SDN 1 WONOBOYO, JOGONALAN	1 PAKET	20.000.000	BANKEU PROV		1 PAKET	20.000.000	BANKEU PROV

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		PENGADAAN MEUBELAIR PENGGANTI SD	SDN PRAWATAN, JOGONALAN	1 PAKET	20.000.000	BANKEU PROV		1 PAKET	20.000.000	BANKEU PROV
		PENGADAAN MEUBELAIR PENGGANTI SD	SDN 1 SOMOPURO, JOGONALAN	1 PAKET	20.000.000	BANKEU PROV		1 PAKET	20.000.000	BANKEU PROV
		PENGADAAN MEUBELAIR PENGGANTI SD	SDN 2 KRAGUMAN, JOGONALAN	1 PAKET	20.000.000	BANKEU PROV		1 PAKET	20.000.000	BANKEU PROV
		PENGADAAN MEUBELAIR PENGGANTI SD	SDN 1 GONDANGSARI, JUWIRING	1 PAKET	20.000.000	BANKEU PROV		1 PAKET	20.000.000	BANKEU PROV
		PENGADAAN MEUBELAIR PENGGANTI SD	SDN 2 TERASAN, JUWIRING	1 PAKET	20.000.000	BANKEU PROV		1 PAKET	20.000.000	BANKEU PROV
		PENGADAAN MEUBELAIR PENGGANTI SD	SDN PUNDUNGAN, JUWIRING	1 PAKET	20.000.000	BANKEU PROV		1 PAKET	20.000.000	BANKEU PROV
		SDN PUNDUNGAN, JUWIRING	SDN 2 JATEN, JUWIRING	1 PAKET	20.000.000	BANKEU PROV		1 PAKET	20.000.000	BANKEU PROV
		PENGADAAN MEUBELAIR PENGGANTI SD	SDN 1 JETIS, JUWIRING	1 PAKET	20.000.000	BANKEU PROV		1 PAKET	20.000.000	BANKEU PROV
		PENGADAAN MEUBELAIR PENGGANTI SD	SDN 2 SAWAHAN, JUWIRING	1 PAKET	20.000.000	BANKEU PROV		1 PAKET	20.000.000	BANKEU PROV
		PENGADAAN MEUBELAIR PENGGANTI SD	SDN 3 JIMBUNG, KALIKOTES	1 PAKET	20.000.000	BANKEU PROV		1 PAKET	20.000.000	BANKEU PROV
		PENGADAAN MEUBELAIR PENGGANTI SD	SDN 1 GEMBLEGAN, KALIKOTES	1 PAKET	20.000.000	BANKEU PROV		1 PAKET	20.000.000	BANKEU PROV
		PENGADAAN MEUBELAIR PENGGANTI SD	SDN 1 TAMBONGWETAN, KALIKOTES	1 PAKET	20.000.000	BANKEU PROV		1 PAKET	20.000.000	BANKEU PROV
		PENGADAAN MEUBELAIR PENGGANTI SD	SDN 5 JIMBUNG, KALIKOTES	1 PAKET	20.000.000	BANKEU PROV		1 PAKET	20.000.000	BANKEU PROV
		PENGADAAN MEUBELAIR PENGGANTI SD	SDN 1 TROSO, KARANGANOM	1 PAKET	20.000.000	BANKEU PROV		1 PAKET	20.000.000	BANKEU PROV
		PENGADAAN MEUBELAIR PENGGANTI SD	SDN 2 BRANGKAL, KARANGANOM	1 PAKET	20.000.000	BANKEU PROV		1 PAKET	20.000.000	BANKEU PROV
		PENGADAAN MEUBELAIR PENGGANTI SD	SDN 1 GEMPOL, KARANGANOM	1 PAKET	20.000.000	BANKEU PROV		1 PAKET	20.000.000	BANKEU PROV
		PENGADAAN MEUBELAIR PENGGANTI SD	SDN 1 KUNDEN, KARANGANOM	1 PAKET	20.000.000	BANKEU PROV		1 PAKET	20.000.000	BANKEU PROV
		PENGADAAN MEUBELAIR PENGGANTI SD	SDN 1 TULAS, KARANGDOWO	1 PAKET	20.000.000	BANKEU PROV		1 PAKET	20.000.000	BANKEU PROV

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		PENGADAAN MEUBELAIR PENGGANTI SD	SDN 3 KARANGWUNGU, KARANGDOWO	1 PAKET	20.000.000	BANKEU PROV		1 PAKET	20.000.000	BANKEU PROV
		PENGADAAN MEUBELAIR PENGGANTI SD	SDN 2 DEMANGAN, KARANGDOWO	1 PAKET	20.000.000	BANKEU PROV		1 PAKET	20.000.000	BANKEU PROV
		PENGADAAN MEUBELAIR PENGGANTI SD	SDN 3 KARANGDOWO	1 PAKET	20.000.000	BANKEU PROV		1 PAKET	20.000.000	BANKEU PROV
		PENGADAAN MEUBELAIR PENGGANTI SD	KARANGDOWO, SDN GEMAMPIR, KARANGNONGKO	1 PAKET	20.000.000	BANKEU PROV		1 PAKET	20.000.000	BANKEU PROV
		PENGADAAN MEUBELAIR PENGGANTI SD	SDN 1 SOMOKATON, KARANGNONGKO	1 PAKET	20.000.000	BANKEU PROV		1 PAKET	20.000.000	BANKEU PROV
		PENGADAAN MEUBELAIR PENGGANTI SD	SDN 1 DEMAK IJO, KARANGNONGKO	1 PAKET	20.000.000	BANKEU PROV		1 PAKET	20.000.000	BANKEU PROV
		PENGADAAN MEUBELAIR PENGGANTI SD	SDN 2 KARANGDUREN, KEBONARUM	1 PAKET	20.000.000	BANKEU PROV		1 PAKET	20.000.000	BANKEU PROV
		PENGADAAN MEUBELAIR PENGGANTI SD	SDN 1 PLUNENG, KEBONARUM	1 PAKET	20.000.000	BANKEU PROV		1 PAKET	20.000.000	BANKEU PROV
		PENGADAAN MEUBELAIR PENGGANTI SD	SDN 2 GONDANG, KEBONARUM	1 PAKET	20.000.000	BANKEU PROV		1 PAKET	20.000.000	BANKEU PROV
		PENGADAAN MEUBELAIR PENGGANTI SD	SDN 1 KEPUTRAN, KEMALANG	1 PAKET	20.000.000	BANKEU PROV		1 PAKET	20.000.000	BANKEU PROV
		PENGADAAN MEUBELAIR PENGGANTI SD	SDN 1 BUMIHARJO, KEMALANG	1 PAKET	20.000.000	BANKEU PROV		1 PAKET	20.000.000	BANKEU PROV
		PENGADAAN MEUBELAIR PENGGANTI SD	SDN 2 TLOGOWATU, KEMALANG	1 PAKET	20.000.000	BANKEU PROV		1 PAKET	20.000.000	BANKEU PROV
		PENGADAAN MEUBELAIR PENGGANTI SD	SDN 1 SUMBEREJO, KLATEN SELATAN	1 PAKET	20.000.000	BANKEU PROV		1 PAKET	20.000.000	BANKEU PROV
		PENGADAAN MEUBELAIR PENGGANTI SD	SDN 2 GLODOGAN, KLATEN SELATAN	1 PAKET	20.000.000	BANKEU PROV		1 PAKET	20.000.000	BANKEU PROV

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		PENGADAAN MEUBELAIR PENGGANTI SD	SDN 2 NGALAS, KLATEN SELATAN	1 PAKET	20.000.000	BANKEU PROV		1 PAKET	20.000.000	BANKEU PROV
		PENGADAAN MEUBELAIR PENGGANTI SD	SDN 1 TEGALYOSO, KLATEN SELATAN	1 PAKET	20.000.000	BANKEU PROV		1 PAKET	20.000.000	BANKEU PROV
		PENGADAAN MEUBELAIR PENGGANTI SD	SDN 2 KLATEN, KLATEN TENGAH	1 PAKET	20.000.000	BANKEU PROV		1 PAKET	20.000.000	BANKEU PROV
		PENGADAAN MEUBELAIR PENGGANTI SD	SDN 4 KLATEN, KLATEN TENGAH	1 PAKET	20.000.000	BANKEU PROV		1 PAKET	20.000.000	BANKEU PROV
		PENGADAAN MEUBELAIR PENGGANTI SD	SDN 1 SEMANGKAK, KLATEN TENGAH	1 PAKET	20.000.000	BANKEU PROV		1 PAKET	20.000.000	BANKEU PROV
		PENGADAAN MEUBELAIR PENGGANTI SD	SDN 1 KARANGANOM, KLATEN UTARA	1 PAKET	20.000.000	BANKEU PROV		1 PAKET	20.000.000	BANKEU PROV
		PENGADAAN MEUBELAIR PENGGANTI SD	SDN 2 KETANDAN, KLATEN UTARA	1 PAKET	20.000.000	BANKEU PROV		1 PAKET	20.000.000	BANKEU PROV
		PENGADAAN MEUBELAIR PENGGANTI SD	SDN 1 JEBUGAN, KLATEN UTARA	1 PAKET	20.000.000	BANKEU PROV		1 PAKET	20.000.000	BANKEU PROV
		PENGADAAN MEUBELAIR PENGGANTI SD	SDN 2 SUKORINI, MANISRENGGO	1 PAKET	20.000.000	APBD		1 PAKET	20.000.000	APBD
		PENGADAAN MEUBELAIR PENGGANTI SD	SDN 2 TASKOMBANG, MANISRENGGO	1 PAKET	20.000.000	APBD		1 PAKET	20.000.000	APBD
		PENGADAAN MEUBELAIR PENGGANTI SD	SDN 2 DRONO, NGAWEN	1 PAKET	20.000.000	APBD		1 PAKET	20.000.000	APBD
		PENGADAAN MEUBELAIR PENGGANTI SD	SDN 2 GATAK, NGAWEN	1 PAKET	20.000.000	APBD		1 PAKET	20.000.000	APBD
		PENGADAAN MEUBELAIR PENGGANTI SD	SDN 1 PEPE, NGAWEN	1 PAKET	20.000.000	APBD		1 PAKET	20.000.000	APBD
		PENGADAAN MEUBELAIR PENGGANTI SD	SDN KAHUMAN, NGAWEN	1 PAKET	20.000.000	APBD		1 PAKET	20.000.000	APBD
		PENGADAAN MEUBELAIR PENGGANTI SD	SDN 1 SOBAYAN, PEDAN	1 PAKET	20.000.000	APBD		1 PAKET	20.000.000	APBD
		PENGADAAN MEUBELAIR PENGGANTI SD	SDN 2 KEDEN, PEDAN	1 PAKET	20.000.000	APBD		1 PAKET	20.000.000	APBD

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		PENGADAAN MEUBELAIR PENGGANTI SD	SDN 2 KALIGAWA, PEDAN	1 PAKET	20.000.000	APBD		1 PAKET	20.000.000	APBD
		PENGADAAN MEUBELAIR PENGGANTI SD	SDN 2 NGAREN, PEDAN	1 PAKET	20.000.000	APBD		1 PAKET	20.000.000	APBD
		PENGADAAN MEUBELAIR PENGGANTI SD	SDN WANGEN, POLANHARJO	1 PAKET	20.000.000	APBD		1 PAKET	20.000.000	APBD
		PENGADAAN MEUBELAIR PENGGANTI SD	SDN 3 KAHUMAN, POLANHARJO	1 PAKET	20.000.000	APBD		1 PAKET	20.000.000	APBD
		PENGADAAN MEUBELAIR PENGGANTI SD	SDN 1 KAHUMAN, POLANHARJO	1 PAKET	20.000.000	APBD		1 PAKET	20.000.000	APBD
		PENGADAAN MEUBELAIR PENGGANTI SD	SDN 2 GLAGAHWANGI, POLANHARJO	1 PAKET	20.000.000	APBD		1 PAKET	20.000.000	APBD
		PENGADAAN MEUBELAIR PENGGANTI SD	SDN 2 CUCUKAN, PRAMBANAN	1 PAKET	20.000.000	APBD		1 PAKET	20.000.000	APBD
		PENGADAAN MEUBELAIR PENGGANTI SD	SDN 2 PANDANSIMPING, PRAMBANAN	1 PAKET	20.000.000	APBD		1 PAKET	20.000.000	APBD
		PENGADAAN MEUBELAIR PENGGANTI SD	SDN 1 SENGON, PRAMBANAN	1 PAKET	20.000.000	APBD		1 PAKET	20.000.000	APBD
		PENGADAAN MEUBELAIR PENGGANTI SD	SDN 1 KOKOSAN, PRAMBANAN	1 PAKET	20.000.000	APBD		1 PAKET	20.000.000	APBD
		PENGADAAN MEUBELAIR PENGGANTI SD	SDN 2 KOKOSAN, PRAMBANAN	1 PAKET	20.000.000	APBD		1 PAKET	20.000.000	APBD
		PENGADAAN MEUBELAIR PENGGANTI SD	SDN 1 TRUCUK, TRUCUK	1 PAKET	20.000.000	APBD		1 PAKET	20.000.000	APBD
		PENGADAAN MEUBELAIR PENGGANTI SD	SDN 3 KARANGPAKEL, TRUCUK	1 PAKET	20.000.000	APBD		1 PAKET	20.000.000	APBD
		PENGADAAN MEUBELAIR PENGGANTI SD	SDN 3 PALAR, TRUCUK	1 PAKET	20.000.000	APBD		1 PAKET	20.000.000	APBD
		PENGADAAN MEUBELAIR PENGGANTI SD	SDN 2 TRUCUK, TRUCUK	1 PAKET	20.000.000	APBD		1 PAKET	20.000.000	APBD
		PENGADAAN MEUBELAIR PENGGANTI SD	SDN 1 BANA, TULUNG	1 PAKET	20.000.000	APBD		1 PAKET	20.000.000	APBD
		PENGADAAN MEUBELAIR PENGGANTI SD	SDN 1 DALEMAN, TULUNG	1 PAKET	20.000.000	APBD		1 PAKET	20.000.000	APBD

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		PENGADAAN MEUBELAIR PENGGANTI SD	SDN 1 KIRINGAN, TULUNG	1 PAKET	20.000.000	APBD		1 PAKET	20.000.000	APBD
		PENGADAAN MEUBELAIR PENGGANTI SD	SDN 1 SEDAYU, TULUNG	1 PAKET	20.000.000	APBD		1 PAKET	20.000.000	APBD
		PENGADAAN MEUBELAIR PENGGANTI SD	SDN 2 KEMIRI, TULUNG	1 PAKET	20.000.000	APBD		1 PAKET	20.000.000	APBD
		PENGADAAN MEUBELAIR PENGGANTI SD	SDN 1 BRANGKAL, WEDI	1 PAKET	20.000.000	APBD		1 PAKET	20.000.000	APBD
		PENGADAAN MEUBELAIR PENGGANTI SD	SDN 1 KADIBOLO, WEDI	1 PAKET	20.000.000	APBD		1 PAKET	20.000.000	APBD
		PENGADAAN MEUBELAIR PENGGANTI SD	SDN 1 PASUNG, WEDI	1 PAKET	20.000.000	APBD		1 PAKET	20.000.000	APBD
		PENGADAAN MEUBELAIR PENGGANTI SD	SDN 1 TEGALGONDO, WONOSARI	1 PAKET	20.000.000	APBD		1 PAKET	20.000.000	APBD
		PENGADAAN MEUBELAIR PENGGANTI SD	SDN SEKARAN, WONOSARI	1 PAKET	20.000.000	APBD		1 PAKET	20.000.000	APBD
		PENGADAAN MEUBELAIR PENGGANTI SD	SDN 3 DUWET, WONOSARI	1 PAKET	20.000.000	APBD		1 PAKET	20.000.000	APBD
1.01 - 1.1.0101 - 16.20	Pengadaan perlengkapan sekolah				4.000.000.000				2.000.000.000	
		PENGADAAN TIK PEMBELAJARAN SD	SDN 1 PASEBAN, BAYAT	1 PAKET	40.000.000	BANKEU PROV		1 PAKET	40.000.000	BANKEU PROV
		PENGADAAN TIK PEMBELAJARAN SD	SDN 2 Karangasem, CAWAS	1 PAKET	40.000.000	BANKEU PROV		1 PAKET	40.000.000	BANKEU PROV
		PENGADAAN TIK PEMBELAJARAN SD	SDN Bendungan, CAWAS	1 PAKET	40.000.000	BANKEU PROV		1 PAKET	40.000.000	BANKEU PROV
		PENGADAAN TIK PEMBELAJARAN SD	SDN 2 GUNUNGGAJA H, BAYAT	1 PAKET	40.000.000	BANKEU PROV		1 PAKET	40.000.000	BANKEU PROV
		PENGADAAN TIK PEMBELAJARAN SD	SDN 1 JAMBUKIDUL, CEPER	1 PAKET	40.000.000	BANKEU PROV		1 PAKET	40.000.000	BANKEU PROV
		PENGADAAN TIK PEMBELAJARAN SD	SDN 1 JAMBUKULON, CEPER	1 PAKET	40.000.000	BANKEU PROV		1 PAKET	40.000.000	BANKEU PROV
		PENGADAAN TIK PEMBELAJARAN SD	SDN 1 MENDAK, DELANGGU	1 PAKET	40.000.000	BANKEU PROV		1 PAKET	40.000.000	BANKEU PROV
		PENGADAAN TIK PEMBELAJARAN SD	SDN 1 SRIBIT, DELANGGU	1 PAKET	40.000.000	BANKEU PROV		1 PAKET	40.000.000	BANKEU PROV
		PENGADAAN TIK PEMBELAJARAN SD	SDN 1 BATURAN, GANTIWARNO	1 PAKET	40.000.000	BANKEU PROV		1 PAKET	40.000.000	BANKEU PROV

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		PENGADAAN TIK PEMBELAJARAN SD	SDN 2 MLESE, GANTIWARN	1 PAKET	40.000.000	BANKEU PROV		1 PAKET	40.000.000	BANKEU PROV
		PENGADAAN TIK PEMBELAJARAN SD	SDN 1 KRAJAN, JATINOM	1 PAKET	40.000.000	BANKEU PROV		1 PAKET	40.000.000	BANKEU PROV
		PENGADAAN TIK PEMBELAJARAN SD	SDN 1 RANDULANAN G, JATINOM	1 PAKET	40.000.000	BANKEU PROV		1 PAKET	40.000.000	BANKEU PROV
		PENGADAAN TIK PEMBELAJARAN SD	SDN 1 KRAGUMAN, JOGONALAN	1 PAKET	40.000.000	BANKEU PROV		1 PAKET	40.000.000	BANKEU PROV
		PENGADAAN TIK PEMBELAJARAN SD	SDN 1 WONOBOYO, JOGONALAN	1 PAKET	40.000.000	BANKEU PROV		1 PAKET	40.000.000	BANKEU PROV
		PENGADAAN TIK PEMBELAJARAN SD	SDN 1 GONDANG, KEBONARUM	1 PAKET	40.000.000	BANKEU PROV		1 PAKET	40.000.000	BANKEU PROV
		PENGADAAN TIK PEMBELAJARAN SD	SDN 1 SAWAHAN, JUWIRING	1 PAKET	40.000.000	BANKEU PROV		1 PAKET	40.000.000	BANKEU PROV
		PENGADAAN TIK PEMBELAJARAN SD	SDN 1 JIMBUNG, KALIKOTES	1 PAKET	40.000.000	BANKEU PROV		1 PAKET	40.000.000	BANKEU PROV
		PENGADAAN TIK PEMBELAJARAN SD	SDN 1 KRAJAN, KALIKOTES	1 PAKET	40.000.000	BANKEU PROV		1 PAKET	40.000.000	BANKEU PROV
		PENGADAAN TIK PEMBELAJARAN SD	SDN 1 KUNDEN, KARANGANOM	1 PAKET	40.000.000	BANKEU PROV		1 PAKET	40.000.000	BANKEU PROV
		PENGADAAN TIK PEMBELAJARAN SD	SDN 1 PADAS, KARANGANOM	1 PAKET	40.000.000	BANKEU PROV		1 PAKET	40.000.000	BANKEU PROV
		PENGADAAN TIK PEMBELAJARAN SD	SDN 2 BRANGKAL, KARANGANOM	1 PAKET	40.000.000	BANKEU PROV		1 PAKET	40.000.000	BANKEU PROV
		PENGADAAN TIK PEMBELAJARAN SD	SDN 2 NGABEYAN, KARANGANOM	1 PAKET	40.000.000	BANKEU PROV		1 PAKET	40.000.000	BANKEU PROV
		PENGADAAN TIK PEMBELAJARAN SD	SDN 1 KARANGJOHO, KARANGDOWO	1 PAKET	40.000.000	BANKEU PROV		1 PAKET	40.000.000	BANKEU PROV
		PENGADAAN TIK PEMBELAJARAN SD	SDN 1 NGOLODONO, KARANGDOWO	1 PAKET	40.000.000	BANKEU PROV		1 PAKET	40.000.000	BANKEU PROV
		PENGADAAN TIK PEMBELAJARAN SD	SDN 1 BLIMBING, KARANGNONG KO	1 PAKET	40.000.000	BANKEU PROV		1 PAKET	40.000.000	BANKEU PROV
		PENGADAAN TIK PEMBELAJARAN SD	SDN 1 JIWAN, KARANGNONG KO	1 PAKET	40.000.000	BANKEU PROV		1 PAKET	40.000.000	BANKEU PROV
		PENGADAAN TIK PEMBELAJARAN SD	SDN 1 MALANGJIWAN, KEBONARUM	1 PAKET	40.000.000	BANKEU PROV		1 PAKET	40.000.000	BANKEU PROV